



PEREKONOMIAN DOMESTIK

Bagian II

PEREKONOMIAN DOMESTIK

Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2013 tidak terlepas dari pengaruh perubahan pola siklus yang mewarnai dinamika ekonomi global. Perubahan pola siklus global tersebut memengaruhi kinerja perekonomian domestik tidak saja melalui jalur perdagangan (*trade channel*), namun juga melalui jalur pasar keuangan (*financial market channel*). Di samping pengaruh global, faktor domestik yang bersifat struktural juga menjadi salah satu akar permasalahan ekonomi. Permasalahan struktural yang semakin mengemuka di tengah stabilitas yang terganggu, bersama-sama dengan tantangan global, menekan kinerja perekonomian domestik.

Perubahan siklus global berupa menurunnya permintaan global dan turunnya harga komoditas global menyebabkan pertumbuhan ekspor mencatat kontraksi sehingga memengaruhi kinerja transaksi berjalan, yang telah mengalami defisit sejak triwulan IV-2011. Selain faktor siklikal tersebut, kinerja ekspor juga dipengaruhi permasalahan struktural berupa dominannya komposisi komoditi sumber daya alam dalam struktur ekspor Indonesia. Dalam kondisi ini maka penurunan harga komoditas global yang masih berlanjut tidak dapat dihindari akan menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, defisit transaksi berjalan juga dipengaruhi impor yang masih cukup kuat yang juga terkait dengan permasalahan struktural yang telah berlangsung lama. Permasalahan struktural tersebut adalah keterbatasan kapasitas industri domestik dalam memenuhi permintaan. Permasalahan ini semakin mengemuka sejalan dengan semakin meningkatnya komposisi kelompok kelas menengah dengan kebutuhan yang semakin kompleks. Selain itu, tekanan pada transaksi berjalan juga dipengaruhi neraca jasa dan neraca pendapatan yang masih persisten mencatat defisit. Permasalahan struktural juga mewarnai catatan defisit neraca ini, seperti masih terbatasnya jasa transportasi domestik untuk keperluan perdagangan antar negara.

Ekonomi global 2013 juga diwarnai ketidakpastian di pasar keuangan global terkait isu pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) di Amerika Serikat. Gejolak di pasar keuangan yang terjadi memicu aliran modal asing

keluar dari negara *emerging market* menuju negara maju, terutama AS, sejalan dengan munculnya ekspektasi kenaikan suku bunga AS. Indonesia, yang menjadi salah satu tempat penanaman modal portfolio asing, juga tidak terlepas dari dampak rencana *tapering off* ini, dimana terjadi aliran modal asing yang keluar cukup signifikan dari pasar keuangan domestik. Selain itu, keluarnya aliran modal asing dari Indonesia juga dipicu oleh persepsi negatif investor asing terhadap tekanan inflasi yang sempat tinggi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dan defisit transaksi berjalan yang melebar. Keseluruhan hal ini berakibat pada menurunnya surplus transaksi modal dan finansial. Melebarnya defisit transaksi berjalan dan menurunnya surplus transaksi modal dan finansial menyebabkan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) mengalami defisit setelah sebelumnya mengalami surplus.

Defisit transaksi berjalan yang semakin melebar tidak terhindarkan mendorong nilai tukar rupiah bergerak dalam tren melemah. Eskalasi pelemahan rupiah semakin kuat terjadi sejak pertengahan Mei 2013 sampai menjelang akhir September 2013, saat terjadi aliran keluar modal asing di pasar keuangan yang meningkat akibat rencana pengurangan stimulus moneter di AS dan persepsi negatif investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Sebagai akibatnya rupiah pada tahun 2013 terdepresiasi cukup tajam dibandingkan tahun 2012, baik secara *point to point* ataupun secara rata-rata.

Dinamika perekonomian global juga berpengaruh pada kinerja perekonomian berupa tren pertumbuhan ekonomi yang melambat sejak triwulan awal, sehingga untuk keseluruhan tahun tercatat 5,8%, melambat dari pertumbuhan tahun 2012 sebesar 6,2%. Pelemahan pertumbuhan ekonomi tersebut bersumber dari investasi yang melambat sejak awal tahun akibat menurunnya persepsi keyakinan pelaku bisnis terhadap perlambatan ekonomi. Sementara ekspor masih tumbuh terbatas sejalan dengan masih lemahnya pertumbuhan ekonomi dunia dan penurunan harga komoditas global. Sebaliknya, konsumsi masih tumbuh stabil dan tidak banyak terpengaruh oleh kondisi global, serta masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi.

Di tengah tren perlambatan ekonomi domestik, inflasi meningkat tinggi sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi dan kenaikan harga pangan. Sementara itu, inflasi inti 2013 masih terkendali tertolong oleh permintaan domestik yang melambat, dampak lanjutan pelemahan nilai tukar yang belum terlalu kuat, serta harga komoditas global yang menurun. Inflasi pada tahun 2013 mencapai 8,4%, lebih tinggi dari inflasi 2012 sebesar 4,3%, dan jauh di atas kisaran sasaran inflasi $4,5\% \pm 1\%$. Berdasarkan regional, kenaikan inflasi tahun 2013 tercatat tertinggi di kawasan Sumatera dipengaruhi tingginya inflasi *volatile food* dan inflasi *administered price*, sedangkan inflasi inti tercatat rendah.

Perlambatan ekonomi dan kenaikan inflasi yang terjadi berdampak pada tertahannya tren perbaikan ketenagakerjaan dan kesejahteraan. Tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2013 tercatat sedikit meningkat dari tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2012. Sementara, tingkat kemiskinan juga sedikit meningkat pada September 2013 dibandingkan Maret 2013.

Mencermati perkembangan perekonomian yang kurang menguntungkan tersebut, Bank Indonesia dan Pemerintah merespons dengan berbagai kebijakan. Secara umum, respons kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah ini mampu menjaga stabilisasi perekonomian 2013. Hal ini tercermin pada perkembangan ekonomi sejak triwulan IV-2013. Inflasi bulanan sejak September 2013 kembali kepada pola normalnya, bahkan berada di bawah perilaku historisnya. Respons kebijakan yang ditempuh mengarahkan inflasi tahun 2013 lebih rendah dibandingkan dengan inflasi di saat terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi seperti pada 2005 dan 2008 yang mencatat inflasi *double digit*.

Respons kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah juga mampu membawa perekonomian tetap terkendali menuju arah yang lebih seimbang. Defisit transaksi berjalan menurun secara signifikan pada triwulan IV 2013. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga mencatat surplus dan diikuti meredanya pelemahan nilai tukar rupiah. Konsumsi rumah tangga tetap terkendali yang diikuti oleh kontraksi

impor secara riil. Secara keseluruhan, proses penyesuaian ekonomi tetap terkendali sehingga pertumbuhan ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, bahkan relatif tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan *peer countries*. Di samping itu, penyesuaian ekonomi yang tetap terkendali tersebut juga ditopang oleh ketahanan fiskal yang kuat sebagaimana tercermin pada defisit APBN-P 2013 yang dapat dikendalikan menjadi 2,3% dari PDB, setelah pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir Juni 2013.

Proses penyesuaian ekonomi domestik yang tetap terkendali juga ditopang stabilitas sistem keuangan yang tetap terjaga, terutama ketahanan perbankan yang tetap kuat. Ketahanan perbankan yang tetap kuat tercermin pada CAR yang tinggi dan NPL yang rendah. Ketahanan perbankan yang masih kuat tersebut cukup positif di tengah tren perlambatan pertumbuhan ekonomi yang kemudian berdampak pada pertumbuhan kredit yang melambat pada 2013. Sementara itu, pertumbuhan kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun lalu, meskipun terdapat kecenderungan mulai melambat sejak September 2013. Pertumbuhan kredit UMKM yang masih tinggi mengindikasikan besarnya peran UMKM dalam menopang perekonomian domestik di tengah kuatnya pengaruh perlambatan ekonomi global. Di lain pihak, kinerja pasar obligasi dan pasar saham dalam tren menurun dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global dan melambatnya ekonomi domestik.

Di samping itu, proses penyesuaian ekonomi yang terkendali juga ditopang sistem pembayaran yang tetap berjalan secara efisien, aman dan lancar. Keandalan sistem pembayaran non tunai sebagai infrastruktur sistem keuangan ditunjukkan dengan terpenuhinya tingkat ketersediaan (*availability*) sistem pembayaran sesuai tingkat layanan (*service level*) yang telah ditetapkan selama tahun 2013. Sementara itu, kinerja yang positif dari pengelolaan uang pada 2013 terlihat dari kemampuan Bank Indonesia dalam menyediakan uang kartal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar, ditengah meningkatnya kebutuhan akan uang kartal.



Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Perekonomian global yang tidak sesuai harapan, di tengah topangan struktur ekonomi domestik yang belum kuat dan belum seimbang, berkontribusi pada menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013. Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh berbagai kebijakan antisipatif guna membawa perekonomian lebih seimbang sehingga dapat mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan. Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah telah mulai memberikan hasil sesuai harapan pada triwulan IV 2013. Meskipun perlambatan ekonomi berdampak pada tertahannya tren perbaikan tingkat pengangguran dan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, bahkan masih lebih tinggi daripada *peer countries* dengan sumber pertumbuhan ekonomi yang mulai seimbang.

Perubahan ekonomi global yang tidak sesuai harapan di tengah topangan struktur ekonomi domestik yang belum kuat memberikan dampak kurang menguntungkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013. Ekonomi global 2013 yang ditandai melambatnya pertumbuhan, menurunnya harga komoditas dan berbaliknya arus modal, telah memberikan tekanan kepada ekonomi Indonesia baik melalui jalur perdagangan maupun finansial. Pada saat bersamaan, struktur domestik kurang dapat menopang perubahan eksternal tersebut sehingga penyesuaian ekonomi menjadi terhambat. Di satu sisi, impor tetap besar mengingat kapasitas sektor industri domestik yang belum cukup memadai dalam memenuhi kuatnya permintaan domestik dari kelas menengah yang terus meningkat. Di sisi lain, investasi, khususnya investasi nonbangunan, berada dalam tren menurun mengingat ada keterkaitan erat antara investasi nonbangunan dengan kinerja ekspor dan juga ketidakpastian ekonomi yang meningkat.

Dengan perkembangan ekonomi global dan domestik yang kurang menguntungkan tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama sampai dengan triwulan III 2013, berada dalam tren menurun dan dibarengi kurang berimbangnya sumber pertumbuhan. Penurunan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pengaruh kinerja ekspor riil yang masih terbatas dan menurunnya investasi, khususnya investasi nonbangunan. Di tengah terbatasnya kinerja ekspor riil, konsumsi rumah tangga masih cukup tinggi sehingga mendorong impor riil tetap tumbuh positif, bahkan meningkat pada triwulan III 2013. Secara keseluruhan, kondisi tidak berimbangnya sumber pertumbuhan ekonomi kemudian berkontribusi pada meningkatnya defisit transaksi berjalan sampai dengan triwulan III 2013. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena berdampak pada meningkatnya tekanan pada nilai tukar rupiah yang akhirnya dapat kembali memberikan tekanan kepada investasi dan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh berbagai kebijakan guna mengendalikan perekonomian domestik yang tidak sesuai harapan tersebut. Sinergi kebijakan diarahkan untuk membawa perekonomian kembali stabil dan lebih seimbang sehingga dapat mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan. Respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia serta Pemerintah secara garis besar terdiri dari tiga kelompok bauran kebijakan. Bauran kebijakan pertama terkait dengan bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, yang tidak hanya dengan menggunakan kebijakan suku bunga,

tetapi juga diperkuat dengan mengoptimalkan berbagai kebijakan lainnya seperti nilai tukar, operasi moneter, makroprudensial dan kerjasama dengan bank sentral. Bauran kebijakan kedua ialah bauran kebijakan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam mengelola permintaan domestik agar dapat menekan impor yang berlebihan dan menurunkan defisit transaksi berjalan. Dalam kaitan ini, kebijakan fiskal menempuh kebijakan pengurangan subsidi BBM dan instrumen pajak untuk menekan impor. Bauran kebijakan ketiga terkait dengan kebijakan yang bersifat siklikal jangka pendek dan kebijakan struktural seperti perbaikan iklim investasi dan upaya-upaya mendorong kemandirian ekonomi yang pada gilirannya dapat menopang NPI dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan.

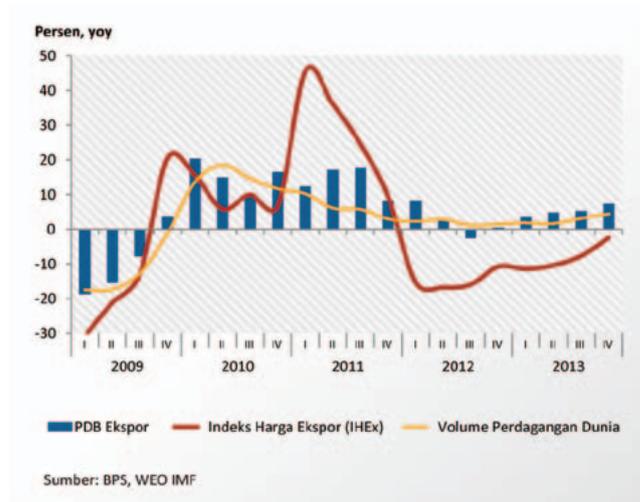
Respons kebijakan antisipatif yang ditempuh Bank Indonesia serta Pemerintah pada triwulan IV 2013 mulai tertransmisi sesuai harapan. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2013 berada pada arah yang lebih berimbang seperti tergambar pada permintaan domestik yang mengalami moderasi sejalan perlambatan konsumsi dan investasi, khususnya investasi nonbangunan. Impor mengalami kontraksi sejalan dengan permintaan domestik yang menurun dan nilai tukar rupiah yang melemah. Sementara itu, ekspor kembali meningkat ditopang permintaan dari negara maju seperti AS dan Jepang yang meningkat dan nilai tukar rupiah yang cukup kompetitif. Perkembangan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2013 sebesar 5,7% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2013. Sumber pertumbuhan ekonomi yang mulai seimbang juga berdampak pada menurunnya defisit transaksi berjalan pada triwulan IV 2013 sehingga menjadi 2,0% dari PDB, dibandingkan dengan defisit pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,9% dari PDB.

Secara keseluruhan tahun 2013, bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dapat pula menopang penyesuaian pertumbuhan ekonomi sehingga tetap terkendali di tengah gejolak global yang belum mereda. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 tercatat 5,8% sehingga masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi *peer countries*. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang melambat memang mengakibatkan tertahannya proses penurunan tingkat pengangguran yang terjadi sejak 2005. Tingkat kemiskinan juga sedikit meningkat pada September 2013 dibandingkan dengan level pada Maret 2013.

3.1. PDB Penggunaan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 berada dalam tren melambat dipengaruhi oleh kondisi global yang tidak sesuai harapan dan topangan struktur ekonomi domestik yang tidak mendukung. Ekonomi global yang melambat dan dibarengi oleh harga komoditas global yang menurun mendorong perbaikan kinerja ekspor riil menjadi tidak terlalu kuat. Ekspor yang belum kuat dan ketidakpastian yang masih tinggi pada gilirannya menurunkan investasi, khususnya investasi nonbangunan. Namun, pada sisi lain konsumsi rumah tangga masih cukup besar didorong kelompok kelas menengah yang membesar. Di tengah topangan kapasitas industri domestik yang belum memadai, kondisi ini pada gilirannya mendorong impor masih tercatat cukup besar. Berbagai kondisi tersebut kemudian berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang berada dalam tren menurun sehingga tumbuh 5,8% pada tahun 2013 dan dibarengi oleh sumber pertumbuhan yang kurang berimbang (Tabel 3.1).

Kinerja ekspor riil masih terbatas dipengaruhi melambatnya perekonomian global dan masih menurunnya harga komoditas. Kedua faktor global yang kemudian mendorong menurunnya volume perdagangan dunia mengakibatkan tetap belum kuatnya pertumbuhan ekspor, meskipun daya saing rupiah meningkat sejalan tren pelemahan rupiah (Grafik 3.1). Ekspor riil sampai triwulan III 2013 masih tumbuh di bawah 5% (yoy). Permasalahan struktural terkait komposisi ekspor yang didominasi komoditas berbasis sumber daya alam (SDA) juga berkontribusi pada belum kuatnya kinerja ekspor. Dengan struktur ini, kinerja ekspor komoditas SDA menurun sejalan dengan harga komoditas global yang menurun. Berdasarkan komoditas, terbatasnya ekspor



Grafik 3.1. Ekspor Riil, IHEx, dan Perdagangan Dunia

terutama karena lemahnya kinerja ekspor komoditas manufaktur dan pertambangan. Perlambatan ekspor pada sektor manufaktur terjadi pada kelompok barang tekstil dan produk dari tekstil (TPT) serta *crude palm oil* (CPO), dan kelompok barang dari karet (Tabel 3.2). Sementara itu, ekspor komoditas pertambangan juga tumbuh melambat seiring terbatasnya pertumbuhan negara tujuan utama yaitu China dan India.

Ekspor yang belum kuat di tengah ketidakpastian yang tinggi pada gilirannya mendorong investasi melambat cukup dalam pada tahun 2013. Investasi pada tahun 2013 tumbuh 4,7%, menurun tajam dari pertumbuhan tahun 2012 sebesar 9,7%. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan ekspor akibat ketidakpastian

Tabel 3.1. Pertumbuhan PDB Sisi Penggunaan

	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Konsumsi Rumah Tangga	5,3	4,9	4,7	4,7	5,3	5,2	5,2	5,5	5,3	5,3
Konsumsi Pemerintah	10,4	15,7	0,3	3,2	1,3	0,4	2,2	8,9	6,5	4,9
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	11,9	3,3	8,5	8,3	9,7	5,5	4,5	4,5	4,4	4,7
PMTB Bangunan	7,6	7,1	7,0	6,1	7,4	6,8	6,6	6,2	6,7	6,6
PMTB Nonbangunan	25,3	-6,7	13,1	14,9	15,8	2,4	-0,6	0,4	-1,5	0,1
Ekspor	9,5	-9,7	15,3	13,7	2,0	3,6	4,8	5,3	7,4	5,3
Impor	10,0	-15,0	17,3	13,3	6,7	0,0	0,7	5,1	-0,6	1,2
Produk Domestik Bruto	6,0	4,6	6,2	6,5	6,3	6,0	5,8	5,6	5,7	5,8

Sumber: BPS

Tabel 3.2. Ekspor Nonmigas Berdasarkan Komoditas

Komoditas	2011		2012		2013	
	Pertumbuhan (% yoy)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (%yoy)	Pangsa (%)	Pertumbuhan (%yoy)	Pangsa (%)
Tekstil dan Produk Tekstil	9,6	15,8	-3,4	15,0	3,9	14,9
Batubara	12,6	10,7	7,9	11,3	11,6	12,0
Alat Listrik	-9,4	5,8	-0,2	5,7	12,5	6,1
Karet	28,7	6,3	-18,7	5,0	-2,7	4,7
Minyak Kelapa Sawit	0,3	4,5	16,8	5,2	6,5	5,3
Lainnya	15,5	57,0	2,8	57,7	3,8	57,1
Total	12,4	100,0	1,5	100,0	5,0	100,0

Sumber: BPS

kondisi ekonomi global, yang kemudian berdampak pada penundaan investasi, baik investasi bangunan maupun nonbangunan. Pada saat bersamaan, perlambatan investasi tahun 2013 juga dipengaruhi oleh penurunan peringkat daya saing Indonesia. Dalam publikasi *Doing Business 2014*, Indonesia menempati peringkat ke-120, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang menempati posisi 116 (Tabel 3.3). Penurunan daya saing terjadi di 9 dari 10 indikator yang menjadi standar pengukuran dalam publikasi *Doing Business 2014*, terutama pada aspek pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dukungan infrastruktur yang perkembangannya kurang menggembirakan. Selain faktor struktural tersebut, investasi yang melambat pada 2013 juga dipengaruhi rendahnya belanja modal Pemerintah.

Perlambatan investasi terdapat pada investasi nonbangunan, meskipun investasi bangunan juga menurun. Investasi nonbangunan hanya tumbuh sebesar 0,1% dipengaruhi penggunaan kapasitas produksi yang

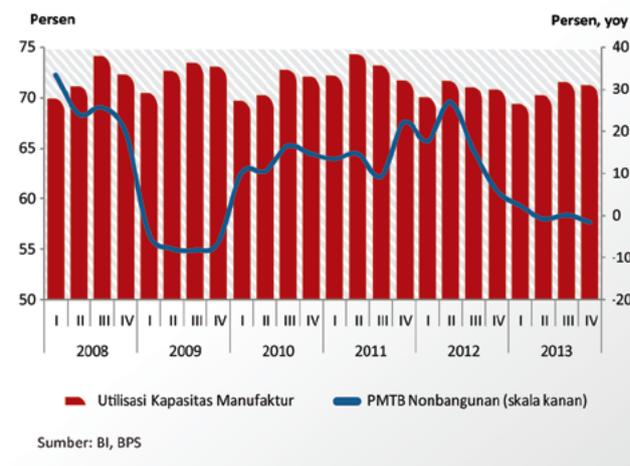
berada di batas bawah rata-rata historisnya (70%-75%) (Grafik 3.2). Selain itu, investasi tahun 2012 yang tumbuh cukup tinggi juga menyebabkan tertahannya respons pelaku usaha untuk menambah investasi di tahun 2013. Pada investasi bangunan, melambatnya pertumbuhan bersumber dari mulai tertahannya laju permintaan properti terutama properti komersial. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga masih terbatas, antara lain tergambar pada infrastruktur listrik dengan realisasi proyek 10.000 MW tahap I pada 2013 yang baru mencapai 69% dari yang ditargetkan. Investasi infrastruktur yang cukup baik terjadi pada infrastruktur jalan tol yang pengoperasiannya meningkat dari 3,7 km pada tahun 2012 menjadi 30,2 km pada tahun 2013.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa perlambatan investasi terutama dipengaruhi menurunnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) masih tumbuh stabil. Perlambatan PMDN terutama terjadi pada

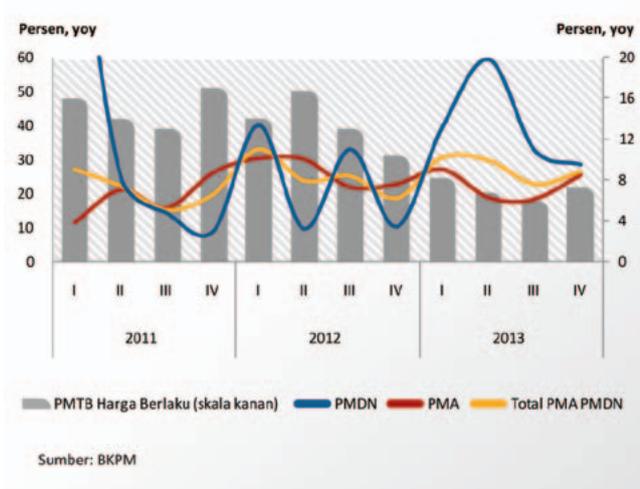
Tabel 3.3. Indikator Kemudahan Berusaha di Indonesia

Peringkat	Indonesia	
	2013	2014
Peringkat <i>Doing Business</i>	116	120
Memulai Bisnis	171	175
Pengurusan IMB	77	88
Permohonan Sambungan Listrik	121	121
Pendaftaran Hak Merek	97	101
Akses Kredit Perbankan	82	86
Perlindungan Investor	51	52
Pembayaran Pajak	132	137
Perdagangan	52	54
Kepatuhan Terhadap Kontrak	146	147
Penyelesaian Kepailitan	142	144

Sumber: *Doing Business 2014*



Grafik 3.2. Utilisasi Kapasitas Sektor Manufaktur dan Pertumbuhan PMTB Nonbangunan



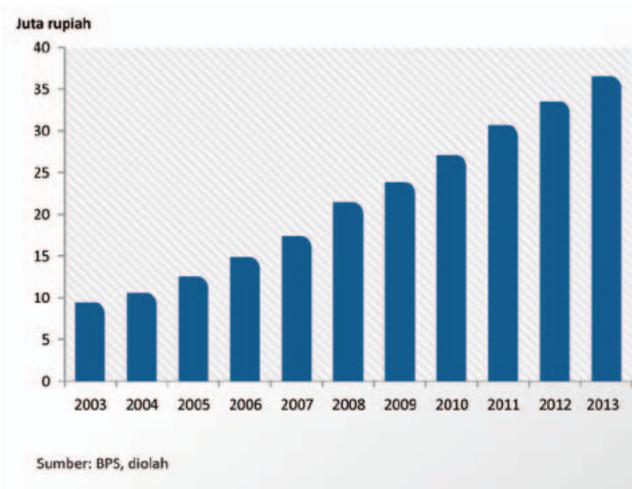
Grafik 3.3. Realisasi Investasi BKPM

semester II 2013 (Grafik 3.3). Secara sektoral, penurunan investasi PMDN terjadi di sektor sekunder (industri nonmineral dan tekstil) dan sektor primer (perkebunan), sedangkan investasi ke sektor jasa terutama sektor listrik, gas dan air minum meningkat signifikan. PMA sebagian besar mengarah kepada sektor industri, dengan pangsa subsektor alat angkut yang meningkat antara lain dipengaruhi meningkatnya permintaan dan dimulainya program mobil murah ramah lingkungan. Sementara itu, PMA pada sektor perdagangan dan komunikasi mengalami penurunan.

Berbeda dengan ekspor dan investasi, konsumsi rumah tangga tahun 2013 masih tetap tinggi ditopang oleh tren naiknya pendapatan dan membesarnya kelompok kelas menengah. Data 2013 menunjukkan pendapatan per kapita Indonesia meningkat dari 33,5 juta rupiah pada 2012 menjadi Rp36,5 juta rupiah (Grafik 3.4)¹. Dengan tingkat pendapatan perkapita tersebut, maka Indonesia masih berada dalam kelompok negara berpenghasilan menengah bawah (*lower middle income*), namun mendekati batas bawah negara berpenghasilan menengah atas (*upper middle income*)². Berdasarkan kelompok pendapatan, konsumsi rumah tangga tersebut ditopang besarnya konsumsi kelompok menengah ke atas, tercermin pada sekitar 20% atau 50 juta populasi penduduk Indonesia yang memiliki pertumbuhan

1 Pendapatan perkapita tahun 2013 ekuivalen dengan 3.499,9 dolar AS, sedikit menurun dibandingkan dengan pendapatan tahun sebelumnya karena faktor nilai tukar

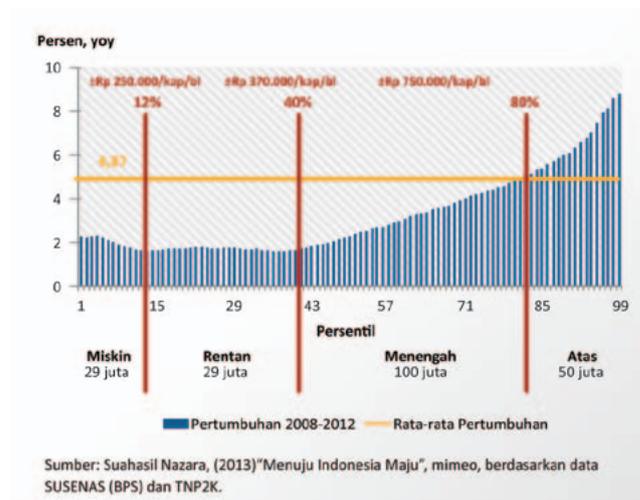
2 Menurut Bank Dunia, klasifikasi kelompok negara berdasarkan pendapatan perkapita adalah *low income* (≤ 1.005 dolar AS); *lower middle income* (1.006 - 3.975 dolar AS); *upper middle income* (3.976 - 12.275 dolar AS); and *high income* (≥ 12.276 dolar AS).



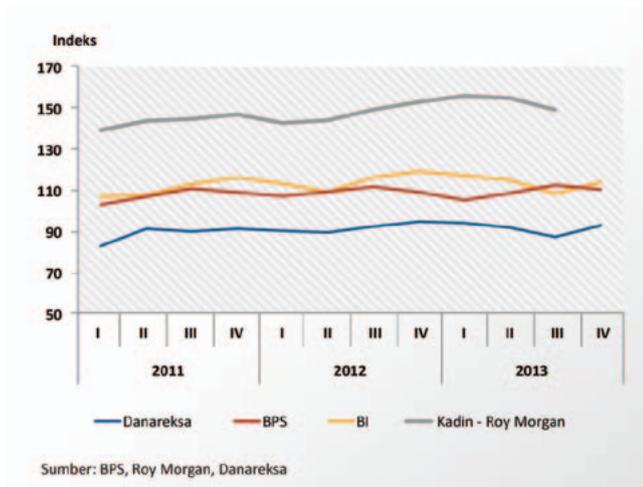
Grafik 3.4. Pendapatan Per Kapita

konsumsi yang lebih besar dari rata-rata pertumbuhan pengeluaran per kapita 2008-2012 sebesar 4,8% (Grafik 3.5). Bersamaan dengan tren kenaikan pendapatan tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi juga dipengaruhi stabilnya keyakinan konsumen. Indeks Keyakinan Konsumen Bank Indonesia dan BPS pada tahun 2013 masih stabil ditopang optimisme atas kondisi perekonomian saat ini (Grafik 3.6). Secara keseluruhan, berbagai perkembangan ini mendorong konsumsi rumah tangga 2013 tetap tumbuh sama dengan pertumbuhan 2012 sebesar 5,3% (Tabel 3.1).

Selain peran kelompok kelas menengah, konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi ditopang oleh masih terkendalinya konsumsi rumah tangga kelompok menengah ke bawah. Perkembangan ini ditopang terjaganya daya beli karena perbaikan komposisi tenaga



Grafik 3.5. Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita 2008-2012

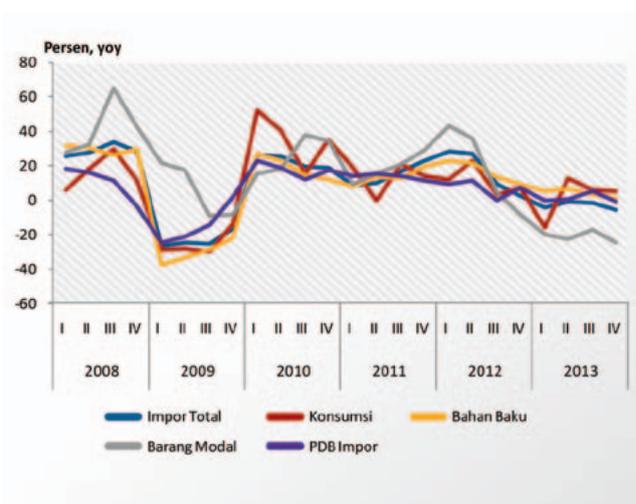


Grafik 3.6. Indeks Keyakinan Konsumen

kerja dan perbaikan penghasilan akibat kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Komposisi tenaga kerja yang membaik didorong oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang berdampak pada meningkatnya kelompok masyarakat berpendapatan tetap. Di sisi penghasilan, UMP riil pada tahun 2013 secara rata-rata meningkat 14%, lebih tinggi dari kenaikan tahun sebelumnya yang 7,0%. Tambahan pendapatan juga disumbang oleh kenaikan PTKP yang berlaku mulai 1 Januari 2013. Sementara pada kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah, penyaluran BLSM yang lebih cepat dan teratur pada 2013 mampu meredam penurunan daya beli setelah kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang tetap tinggi tersebut, konsumsi pemerintah secara riil 2013 juga meningkat didorong oleh akselerasi penyerapan belanja pemerintah di semester kedua. Akselerasi tercepat berasal dari belanja pegawai terutama terkait penghentian moratorium penerimaan PNS pada bulan Desember 2012. Sementara itu, belanja barang juga menunjukkan peningkatan didorong naiknya belanja bantuan sosial dan belanja kementerian dan lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Konsumsi rumah tangga yang masih tinggi kemudian berkontribusi pada masih positifnya pertumbuhan impor sampai triwulan III 2013. Impor yang masih besar ini tidak terlepas dari struktur sektor industri yang

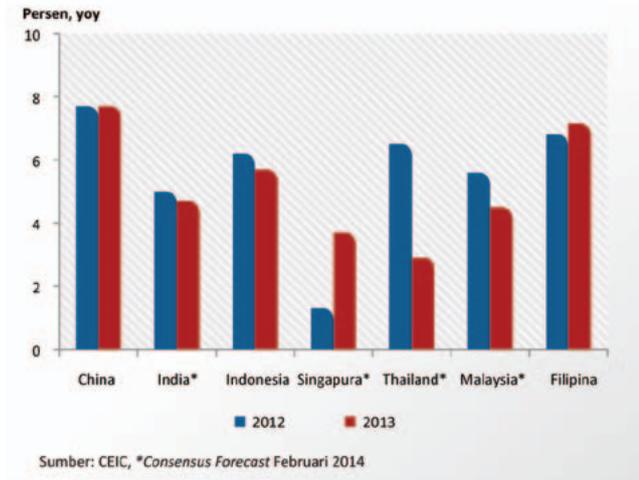


Grafik 3.7. Impor Nonmigas Berdasarkan Jenis Barang

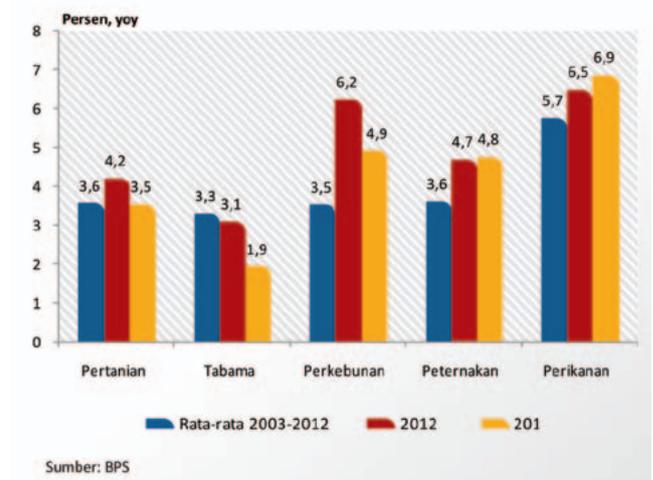
mempunyai kandungan impor yang tinggi (lihat Boks 3.1 .Struktur Ekspor Impor Berdasarkan Sektor Ekonomi). Pertumbuhan impor pada triwulan III 2013 bahkan meningkat 5,1% (yoy) (Tabel 3.1). Dilihat dari jenis barang, impor yang masih besar terutama dipengaruhi impor barang konsumsi, sedangkan impor barang modal dan impor bahan baku dalam tren menurun (Grafik 3.7). Impor bahan baku melambat sejalan dengan aktivitas sektor produksi yang melambat.

Pada triwulan IV 2013, kebijakan antisipatif yang ditempuh Bank Indonesia serta Pemerintah terindikasi mulai tertransmisi sesuai harapan. Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2013 berada pada arah yang lebih berimbang tergambar pada permintaan domestik yang mengalami moderasi sejalan perlambatan konsumsi dan investasi, khususnya investasi nonbangunan. Impor mengalami kontraksi sejalan dengan permintaan domestik yang menurun sedangkan ekspor kembali meningkat. Berbagai perkembangan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2013 mencapai 5,7% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III 2013.

Secara keseluruhan tahun 2013, bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dapat pula menopang penyesuaian pertumbuhan ekonomi tetap terkendali. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2013 yang tercatat 5,8% masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara-negara sekawasan seperti India, Malaysia, Singapura, dan Thailand (Grafik 3.8).



Grafik 3.8. Perekonomian Negara Kawasan



Grafik 3.9. Pertumbuhan Sektor Pertanian

3.2. PDB Sektoral

Dari sisi sektoral, tren melambatnya pertumbuhan terutama bersumber dari sektor-sektor penghasil barang. Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh pertumbuhan ekspor yang masih terbatas sehingga mengakibatkan menurunnya pertumbuhan sektor penghasil barang seperti sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri pengolahan (Tabel 3.4). Sementara itu, sektor penghasil jasa seperti sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa, serta sektor jasa-jasa masih mencatat kenaikan pertumbuhan (Tabel 3.4).

Sektor pertanian tumbuh melambat pada tahun 2013 akibat melambatnya permintaan ekspor komoditas berbasis perkebunan kelapa sawit dan rendahnya produksi

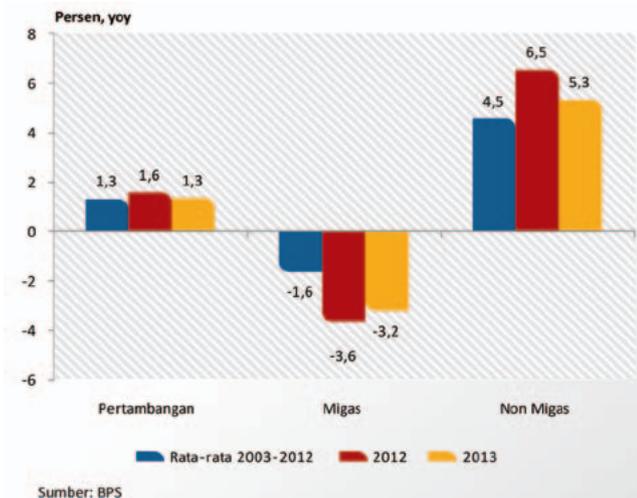
padi pada tahun 2013. Pertumbuhan sektor pertanian 2013 mencapai 3,5%, sedikit lebih rendah dari pola historis 2003-2012 sebesar 3,6% (Grafik 3.9). Terbatasnya pertumbuhan negara tujuan utama ekspor CPO yaitu China dan India menjadi faktor utama melambatnya kinerja subsektor perkebunan kelapa sawit. Pada sub-sektor tanaman bahan makanan (Tabama), produksi padi tahun 2013 menurut angka sementara (Asem) BPS tumbuh 3,2% lebih rendah dibanding tahun sebelumnya (5,0%). Lebih rendahnya produksi terkait lebih tingginya konversi lahan pertanian dibanding dengan pencetakan lahan pertanian baru.

Pertumbuhan sektor pertambangan pada tahun 2013 juga berada dalam tren yang melambat (Grafik 3.10). Menurunnya produksi minyak disertai melemahnya permintaan ekspor pertambangan nonmigas menjadi

Tabel 3.4. Pertumbuhan PDB Sisi Sektoral

Sektor Ekonomi	2008	2009	2010	2011	2012	2013				
						Q1	Q2	Q3	Q4	Total
Pertanian	4,8	4,0	3,0	3,4	4,2	3,7	3,3	3,3	3,8	3,5
Pertambangan	0,7	4,5	3,9	1,6	1,6	0,1	-0,6	2,0	3,9	1,3
Industri Pengolahan	3,7	2,2	4,7	6,1	5,7	6,0	6,0	5,0	5,3	5,6
Listrik, Gas dan Air	10,9	14,3	5,3	4,7	6,3	7,9	4,0	3,8	6,6	5,6
Bangunan	7,6	7,1	7,0	6,1	7,4	6,8	6,6	6,2	6,7	6,6
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	6,9	1,3	8,7	9,2	8,2	6,5	6,4	6,1	4,8	5,9
Pengangkutan dan Komunikasi	16,6	15,8	13,4	10,7	10,0	9,6	10,9	9,9	10,3	10,2
Keuangan, Persewaan dan Jasa	8,2	5,2	5,7	6,8	7,2	8,2	7,8	7,6	6,8	7,6
Jasa-jasa	6,2	6,4	6,0	6,8	5,3	6,5	4,5	5,6	5,3	5,5
Produk Domestik Bruto	6,0	4,6	6,2	6,5	6,3	6,0	5,8	5,6	5,7	5,8

Sumber: BPS

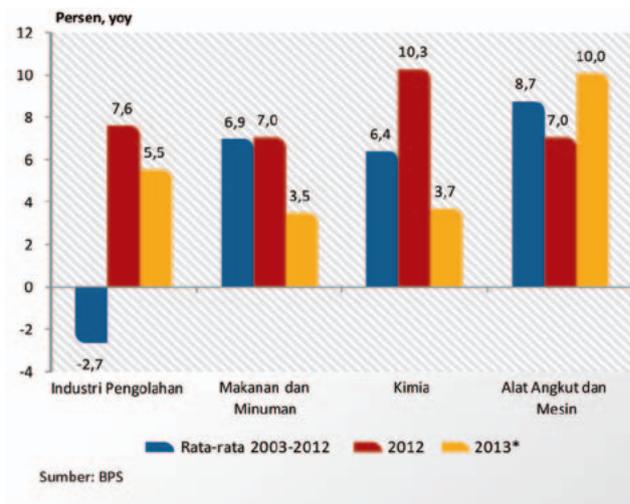


Grafik 3.10. Pertumbuhan Sektor Pertambangan

penyebab melambatnya pertumbuhan sektor ini. Tren penurunan produksi minyak terus berlanjut di 2013. Produksi minyak tahun 2013 turun sebesar 4,2% menjadi 826 barel per hari (bph) dari tahun lalu sebesar 862 bph. Hal ini disebabkan oleh penurunan produksi alamiah dan masih terbatasnya produksi sumber minyak baru. Di sisi lain, kinerja subsektor pertambangan nonmigas juga menunjukkan perlambatan akibat melemahnya permintaan ekspor dan turunnya harga komoditas. Selain itu, produksi tembaga dan emas mengalami gangguan terkait terhentinya operasi Freeport Indonesia selama dua bulan pada semester I 2013 karena runtuhnya tambang di areal Big Ghossan.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan 2013 tercatat 5,5%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya (Grafik 3.11). Lebih rendahnya pertumbuhan sektor ini terutama disebabkan oleh terbatasnya pertumbuhan ekspor. Hal ini terlihat pada melambatnya kinerja subsektor berorientasi ekspor seperti subsektor makanan dan minuman, subsektor kimia dan barang dari karet, dan subsektor logam dasar, besi, dan baja. Melambatnya subsektor makanan dan minuman berasal dari melemahnya ekspor *crude palm oil* (CPO) karena melemahnya harga komoditas tersebut. Sementara itu, kinerja subsektor logam dasar yang melambat selain karena melemahnya ekspor, juga karena melambatnya kinerja sektor konstruksi yang menurunkan permintaan barang input konstruksi.

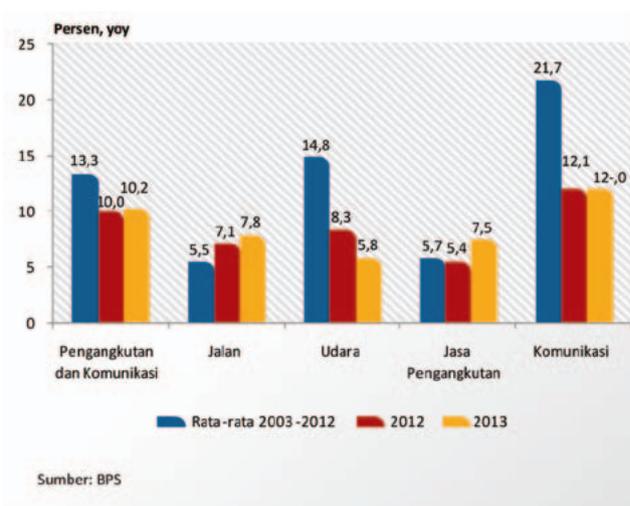
Selain dari subsektor berorientasi ekspor, melambatnya pertumbuhan sektor industri juga berasal dari menurunnya kinerja subsektor industri migas seiring menurunnya produksi minyak. Di lain pihak, kinerja subsektor industri alat angkut, mesin, dan peralatannya masih tumbuh meningkat. Penjualan kendaraan bermotor pada tahun



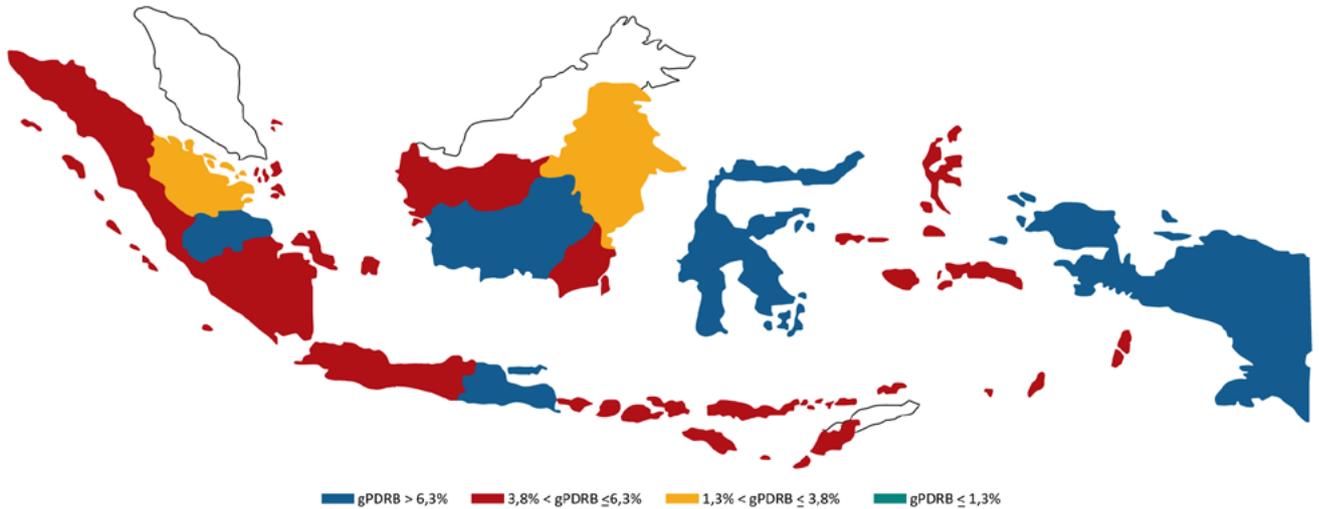
Grafik 3.11. Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

2013 masih tumbuh tinggi didorong masih kuatnya permintaan dan dimulainya program mobil murah ramah lingkungan. Namun, kinerjanya yang meningkat tidak didukung oleh perbaikan struktur produksi sehingga masih membutuhkan input impor yang tinggi. Meskipun program mobil ramah lingkungan diharuskan memiliki kandungan komponen domestik sebesar 80%, pada tahap awal produsen baru bisa memenuhi kandungan domestik sekitar 40%.

Berbeda dengan sektor penghasil barang, kinerja beberapa sektor penghasil jasa tercatat meningkat. Peningkatan tercatat pada sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa, serta sektor jasa-jasa masih mencatat kenaikan pertumbuhan. Sektor pengangkutan dan komunikasi tumbuh membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Grafik 3.12). Pada subsektor



Grafik 3.12. Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi



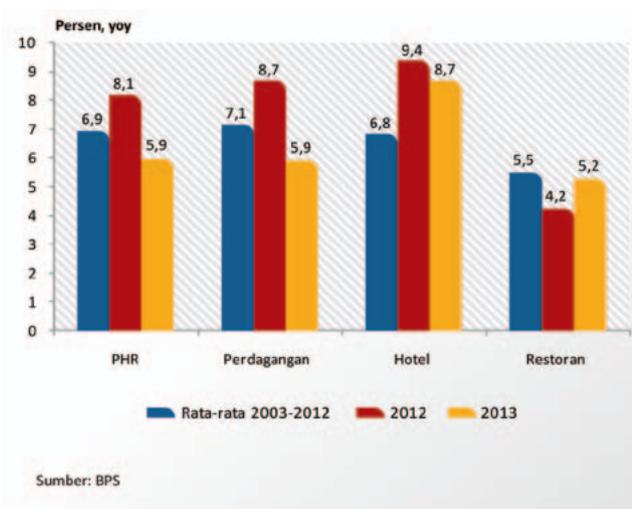
Sumber: BPS

Gambar 3.1. Peta Pertumbuhan Ekonomi Regional

pengangkutan, seluruh moda transportasi mengalami peningkatan kecuali pengangkutan udara yang mengalami moderasi pertumbuhan. Pada subsektor komunikasi, meningkatnya penggunaan komunikasi data dan *internet* menjadi pendorong membaiknya pertumbuhan di tengah relatif terbatasnya penggunaan komunikasi seluler (suara dan sms). Perbaikan kinerja sektor ini ditopang oleh meningkatnya aktivitas terkait Pemilu yang mulai dirasakan pada semester II 2013. Kinerja sektor keuangan, persewaan, dan jasa tumbuh membaik pada tahun 2013 ditopang subsektor bank yang mampu tumbuh lebih baik. Selain itu, kinerja subsektor jasa perusahaan juga tumbuh membaik terkait faktor Pemilu.

Kinerja sektor penghasil jasa lainnya tercatat menurun, seperti pada sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) serta sektor bangunan, dan sektor listrik, gas dan

air bersih (LGA). Lebih rendahnya pertumbuhan sektor PHR terutama bersumber dari melambatnya subsektor perdagangan karena masih terbatasnya perdagangan ekspor dan melambatnya kinerja sektor penghasil barang (Grafik 3.13). Sementara itu, subsektor hotel dan subsektor restoran tumbuh membaik terkait meningkatnya jumlah kedatangan wisatawan dan meningkatnya aktivitas Pemilu pada semester II 2013. Pada sektor bangunan, perlambatan pertumbuhan dipengaruhi menurunnya aktivitas investasi dan konstruksi. Kondisi ini sejalan dengan hasil survei properti komersial dan residensial Bank Indonesia yang menunjukkan terbatasnya penambahan stok properti terutama untuk properti komersial dan lahan industri. Selain itu, pelaku usaha properti juga menahan ekspansi terkait dengan peningkatan suku bunga kredit dan kebijakan pengetatan uang muka (*Loan To Value*) properti.



Grafik 3.13. Pertumbuhan Sektor PHR

3.3. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Secara spasial, perlambatan ekonomi terjadi di hampir seluruh kawasan, dengan perlambatan terbesar terjadi di Jakarta dan Jawa (Tabel 3.5 dan Gambar 3.1).³

³ Bank Indonesia membagi analisis ekonomi daerah dalam empat kawasan, yaitu: Sumatera (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau); Jakarta (Provinsi DKI Jakarta); Jawa (Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta); Kawasan Timur Indonesia (Provinsi Bali, NTB, dan NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat).

Tabel 3.5. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Persen, yoy

Kawasan/Wilayah	2011	2012				2012	2013				2013
		I	II	III	IV		I	II	III	IV	
SUMATERA	6,2	5,9	5,7	5,9	5,8	5,7	5,4	5,2	5,0	5,5	5,6
Sumatera Bagian Utara	6,3	6,0	6,0	6,1	5,9	5,9	5,9	5,7	5,5	5,4	5,6
Sumatera Bagian Tengah	5,9	5,4	5,2	5,7	5,5	5,2	4,7	4,5	4,2	5,0	4,6
Sumatera Bagian Selatan	6,5	6,5	6,2	5,9	6,2	6,2	6,0	5,8	5,6	6,4	5,9
JAKARTA	6,7	6,5	6,8	6,4	6,5	6,5	6,5	6,3	6,2	5,6	6,1
JAWA	6,6	6,7	6,8	6,6	6,2	6,6	6,1	6,4	6,1	6,0	6,1
Jawa Bagian Barat	6,5	6,3	6,5	6,4	5,6	6,2	6,0	6,1	5,7	6,2	6,0
Jawa Bagian Tengah	5,9	6,6	7,3	5,8	6,1	6,2	5,5	6,2	6,0	5,4	5,8
Jawa Bagian Timur	7,2	7,3	6,5	7,4	7,1	7,3	6,6	6,9	6,5	6,2	6,5
KTI	5,8	6,2	6,5	5,0	6,0	5,9	5,9	4,6	6,1	6,6	5,7
Bali dan Nusa Tenggara	5,1	3,4	5,2	3,2	4,3	4,0	6,1	5,2	5,9	5,8	5,8
Kalimantan	5,0	6,1	5,7	3,9	3,7	4,8	3,1	3,2	3,8	3,8	3,5
Sulawesi, Maluku dan Papua	7,2	7,6	8,1	7,0	9,7	8,1	9,4	6,2	9,1	10,4	8,7
TOTAL	6,5	6,3	6,3	6,2	6,2	6,3	6,0	5,8	5,6	5,7	5,8

Sumber: BPS

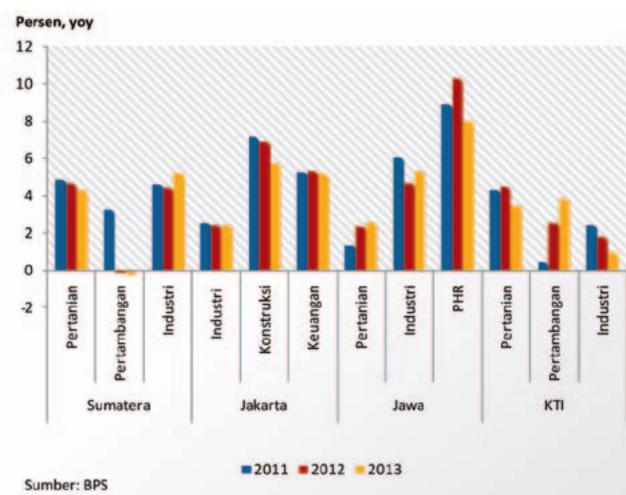
Pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan kawasan Jawa menurun, masing-masing dari 6,5% dan 6,6% pada 2012 menjadi 6,1% pada 2013. Sementara itu, kawasan Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia menurun sedikit dari masing-masing 5,7% dan 5,9% pada 2012 menjadi masing-masing sebesar 5,6% dan 5,7%,

Perlambatan ekonomi di Jakarta tidak terlepas dari pengaruh melambatnya kinerja sektor konstruksi, sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan, dan sektor industri pengolahan (Grafik 3.14). Pelemahan tersebut salah satunya disebabkan oleh tertahannya beberapa proyek konstruksi akibat kenaikan harga bahan bangunan khususnya barang impor dan terbatasnya permintaan akibat kebijakan stabilisasi Bank Indonesia. Selain itu, kinerja sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan juga melambat sejalan dengan perlambatan perekonomian Jakarta. Perlambatan sektor ini bersumber dari terbatasnya kinerja perbankan dan lembaga keuangan nonbank, memburuknya kinerja pasar modal, dan perlambatan aktivitas bisnis persewaan dan penjualan properti. Menurunnya kinerja perbankan juga tercermin dari realisasi penyaluran kredit yang mengalami perlambatan.

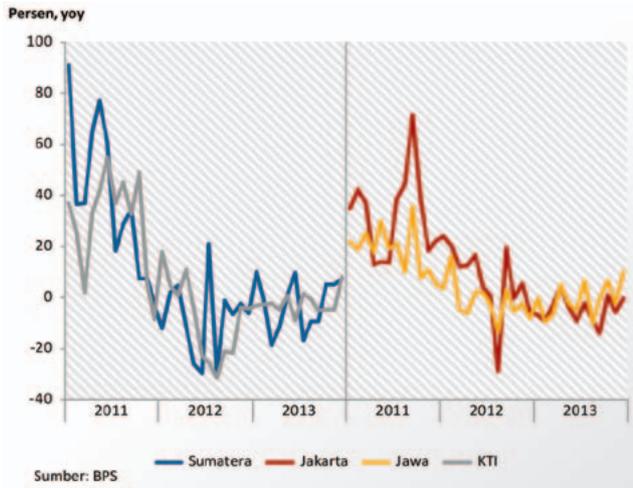
Perlambatan ekonomi Jawa disebabkan oleh penurunan kinerja sektor perdagangan, hotel, dan restoran (Grafik 3.14). Penjualan kendaraan bermotor di Kawasan Jawa mengalami penurunan khususnya pada pertengahan tahun. Hal tersebut diduga turut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebaliknya kinerja sektor utama Jawa lainnya, yaitu sektor industri pengolahan masih mencatatkan

sedikit pertumbuhan. Namun, pertumbuhan sektor industri pengolahan terutama tertahan oleh kinerja industri pengolahan kimia dan kertas karena penurunan harga komoditas tersebut di pasar internasional.

Di kawasan Sumatera, perlambatan ekonomi berasal dari perlambatan sektor pertambangan dan sektor pertanian (Grafik 3.14). Perlambatan sektor pertambangan kawasan Sumatera terutama disebabkan oleh penurunan *lifting* migas di Provinsi Riau, Sumatera Bagian Selatan. Penurunan *lifting* minyak bumi tersebut akibat usia sumur yang telah tua. Sementara itu, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas belum terlihat efektifitasnya, ditambah lagi belum terdapat upaya untuk



Grafik 3.14. Perkembangan Sektor Utama Berdasarkan Kawasan



Grafik 3.15. Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Kawasan

membuka atau mencari sumur baru. Perlambatan kinerja sektor pertanian kawasan Sumatera, khususnya subsektor perkebunan tidak terlepas dari masih terbatasnya permintaan global dan relatif masih rendahnya harga komoditas. Hal tersebut juga tercermin dari penurunan ekspor kawasan Sumatera terutama ekspor komoditas CPO (Grafik 3.15).

Di Kawasan Timur Indonesia (KTI), perlambatan pertumbuhan ekonomi khususnya didorong oleh perlambatan sektor industri pengolahan di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) dan wilayah Kalimantan (Grafik 3.14). Perlambatan tersebut terutama terjadi pada sektor industri pengolahan *Liquefied Natural Gas* (LNG) di Provinsi Papua Barat dan Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan faktor produksi (*train*) sejak akhir 2012 yang memengaruhi kinerja

produksi LNG di Papua Barat dan penurunan produksi secara alamiah (*natural decline*). Kontribusi hasil produksi sumur gas baru di Mahakam Selatan masih sangat minimal dalam mengurangi besarnya angka penurunan sumur gas tua di Blok Mahakam. Perlambatan juga terjadi pada industri pengolahan CPO karena penurunan produksi kelapa sawit terutama di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.

3.4. Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Seiring melambatnya aktivitas perekonomian, daya serap ekonomi terhadap tenaga kerja pada tahun 2013 juga menurun. Pada Agustus 2013, tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,3%, meningkat dibandingkan pada Agustus 2012 (6,1%), setelah menurun sejak tahun 2005 (Tabel 3.6). Penurunan penyerapan tenaga kerja terutama terjadi di sektor pertanian dan sektor industri pengolahan, seiring masih lemahnya permintaan ekspor. Selain itu, kinerja sektor bangunan yang melambat juga berdampak pada menurunnya permintaan tenaga kerja pada sektor ini.

Dari sisi kualitas, komposisi tenaga kerja masih menunjukkan kualitas yang membaik ditunjukkan pangsa tenaga kerja formal yang terus meningkat dari 40,0% pada 2012 menjadi 40,4% pada 2013. Selain itu, tenaga kerja berdasarkan pendidikan masih berada dalam tren yang membaik tercermin dari meningkatnya pangsa tenaga kerja berpendidikan SMA dan di atasnya (Grafik 3.16).

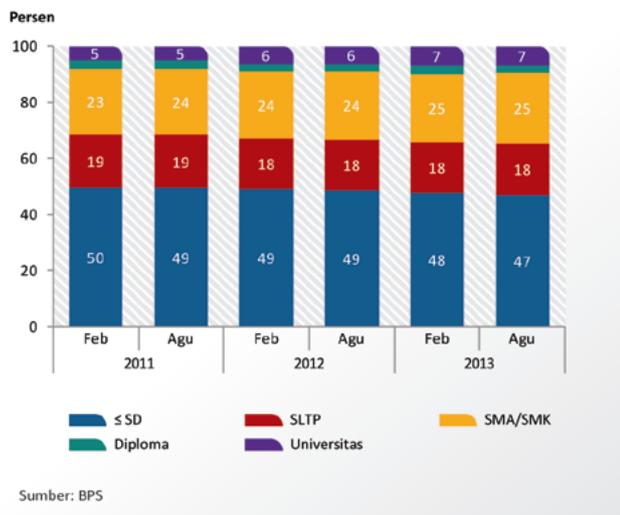
Namun kondisi yang kurang baik ditunjukkan oleh komposisi tenaga kerja yang sedikit bergeser dari pekerja penuh waktu (62,6%) ke pekerja paruh waktu (21,9%).

Tabel 3.6. Angkatan Kerja dan Pengangguran

Juta orang kecuali dinyatakan lain

No	Kegiatan Utama	2011		2012		2013	
		Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
1	Penduduk Usia Produktif (15th +)	170,7	171,7	172,9	173,9	175,1	176,7
	- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,0	68,3	69,7	67,9	69,2	66,9
2	Angkatan Kerja	119,4	117,4	120,4	118,0	121,2	118,2
	- Pekerja Penuh (%)	64,6	64,0	64,2	64,8	64,6	62,6
	- Pekerja Paruh Waktu (%)	15,5	17,9	17,2	18,2	18,3	21,9
	- Setengah Pengangguran (%)	13,2	11,5	12,3	10,8	11,2	9,2
	- Penganggur Terbuka (%)	6,8	6,6	6,3	6,1	5,9	6,3

Sumber: BPS



Grafik 3.16. Tenaga Kerja Berdasarkan Pendidikan

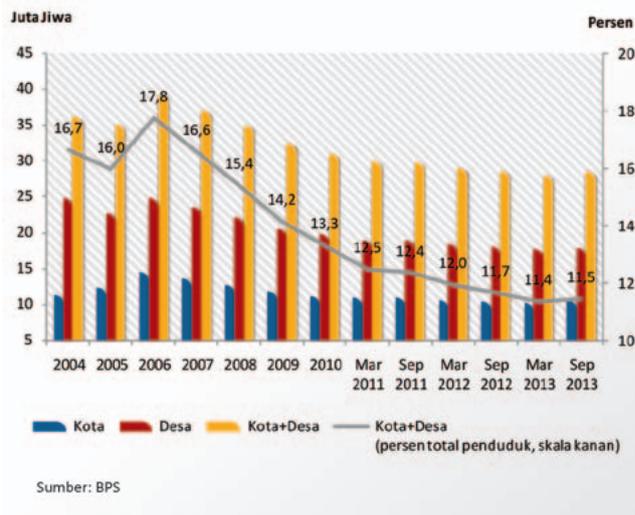
Perlambatan ekonomi juga berdampak kurang menguntungkan pada tingkat kesejahteraan. Secara keseluruhan tahun, jumlah penduduk miskin pada September 2013 mencapai 28,55 juta orang (11,5% dari jumlah penduduk), turun 0,14% dibandingkan dengan bulan September 2012 yang sebesar 28,59 juta orang (11,7% dari jumlah penduduk) (Grafik 3.17). Namun, jika dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2013, jumlah penduduk miskin pada bulan September 2013 meningkat sebesar 1,7%. Kenaikan angka kemiskinan tersebut antara lain dipengaruhi melambatnya perekonomian dan perkembangan harga-harga yang meningkat karena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juni 2013.

Tren kenaikan angka kemiskinan dari Maret 2013 ke September 2013 juga diikuti belum berubahnya

Tabel 3.7. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
2004	2,18	3,43	2,89
2005	2,05	3,34	2,78
2006	2,61	4,22	3,43
2007	2,15	3,78	2,99
2008	2,07	3,42	2,77
2009	1,91	3,05	2,50
2010	1,57	2,80	2,21
Mar 2011	1,52	2,63	2,08
Sep 2011	1,48	2,61	2,05
Mar 2012	1,40	2,36	1,88
Sep 2012	1,38	2,42	1,90
Mar 2013	1,25	2,24	1,75
Sep 2013	1,41	2,37	1,89

Sumber: BPS. 2000-2013 (September).



Grafik 3.17. Tingkat Kemiskinan

kesenjangan pendapatan. Indeks kedalaman kemiskinan relatif tidak berubah yaitu menjadi 1,89 pada bulan September 2013 dibandingkan dengan 1,90 pada bulan September 2012 (Tabel 3.7).⁴ Angka indeks tersebut menunjukkan bahwa jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan tidak mengalami perbaikan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan yang tidak mengalami perubahan yaitu 0,48 pada bulan September 2013 (Tabel 3.8).⁵ Hal ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin masih sama dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Belum membaiknya kesenjangan juga tercermin dari angka gini ratio pada tahun 2013 yang mencapai 0,41, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.⁶

4 Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas miskin.

5 Indeks Keparahkan Kemiskinan merupakan ukuran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

6 Sumber: BPS. Gini ratio adalah ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan.

Tabel 3.8. Indeks Keparahan Kemiskinan

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
2004	0,58	0,90	0,78
2005	0,60	0,89	0,76
2006	0,77	1,22	1,00
2007	0,57	1,09	0,84
2008	0,56	0,95	0,76
2009	0,52	0,82	0,68
2010	0,40	0,75	0,58
Mar 2011	0,39	0,70	0,55
Sep 2011	0,39	0,68	0,53
Mar 2012	0,36	0,59	0,47
Sep 2012	0,36	0,61	0,48
Mar 2013	0,31	0,56	0,43
Sep 2013	0,37	0,60	0,48

Sumber: BPS, 2000-2013 (September).

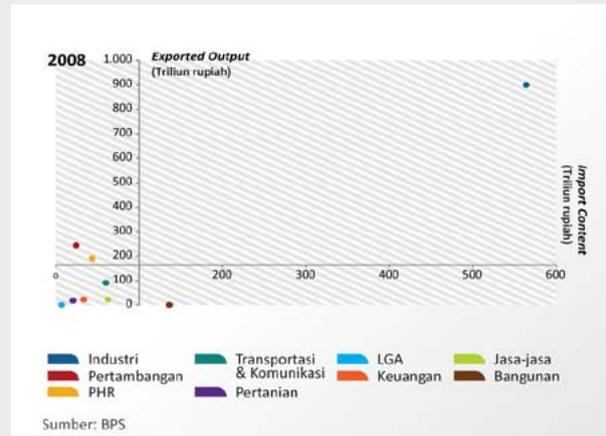
Boks 3.1. Struktur Ekspor Impor Berdasarkan Sektor Ekonomi

Pemahaman mengenai struktur ekspor impor sektor industri dapat menjadi dasar bagi penetapan kebijakan sektoral, terkait upaya meminimalkan defisit transaksi berjalan. Di samping sebagai sektor yang diandalkan untuk semakin berkontribusi dalam meningkatkan ekspor Indonesia, sektor industri juga merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap permintaan impor. Karakteristik ini tidak secara merata dimiliki oleh seluruh kelompok jenis usaha dalam sektor industri. Beberapa diantaranya memiliki net ekspor (nilai ekspor dikurangi nilai impor) yang tinggi, seimbang, dan net ekspor yang negatif karena impornya lebih tinggi dari ekspor. Dengan keragaman ini, kebijakan terkait transaksi berjalan tidak dapat diterapkan secara seragam pada sektor industri secara keseluruhan, namun perlu diarahkan lebih spesifik ke setiap jenis usaha dalam sektor industri.

Berdasarkan tabel Input Output (I/O) 2008, sektor industri merupakan sektor yang mempunyai kandungan impor paling tinggi, sekaligus merupakan sektor pengekspor utama, jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya (Grafik 1). Sejalan dengan itu, dengan menggunakan data ekspor impor dari 350 perusahaan yang mewakili sekitar 50% dari total impor¹ pada tahun 2012, sektor industri tetap merupakan sektor dengan kegiatan ekspor dan impor yang paling besar dibandingkan dengan sektor lainnya (Grafik 2).

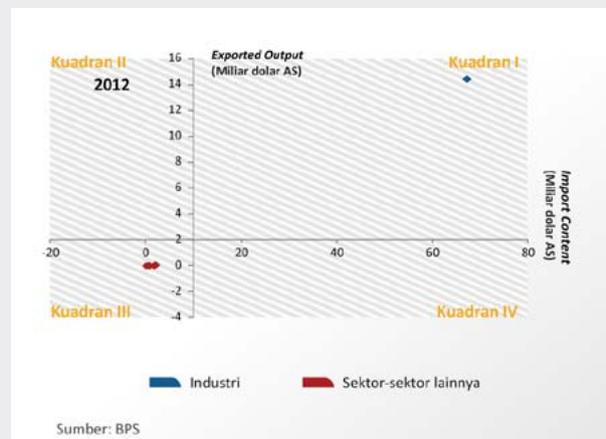
Dilihat dari subsektornya, subsektor transportasi, peralatan dan mesin mempunyai ekspor yang relatif tinggi dibandingkan subsektor lain. Namun demikian, subsektor tersebut juga melakukan impor dengan nilai yang lebih besar dari nilai ekspornya. Produk dari korporasi yang bergerak di bidang alat transportasi dan peralatan elektronik lebih banyak ditujukan untuk pemenuhan pasar domestik. Selain itu, subsektor industri kimia dan makanan minuman juga mempunyai kandungan impor yang relatif tinggi dibandingkan ekspornya dengan pasar yang juga lebih berorientasi domestik (Grafik 3).

1 Pengelompokan sektoral korporasi berdasarkan output yang diekspor.

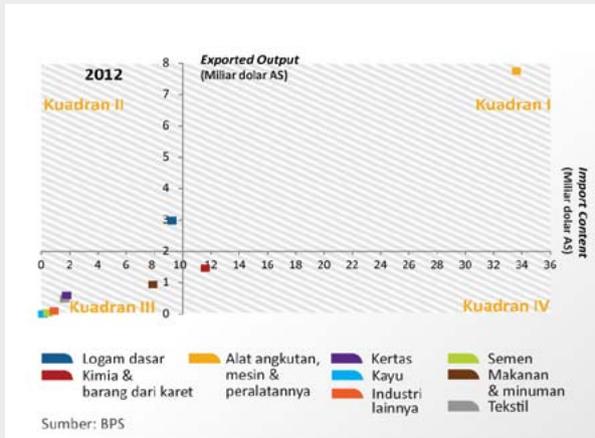


Grafik 1. Ekspor Impor Berdasarkan I/O 2008

Dilihat dari tujuan pasar domestiknya, produk akhir dari subsektor industri kimia terutama ditujukan sektor pertanian, khususnya tanaman bahan makanan. Pada industri bahan pangan, pasar domestiknya sebagian langsung menyentuh konsumen dan sebagian mengarah pada industri makanan ternak. Produk dari korporasi di bidang makanan ternak ini digunakan oleh sektor pertanian, khususnya subsektor peternakan. Sementara itu, pasar domestik dari subsektor alat transportasi lebih banyak tertuju langsung ke konsumen akhir.



Grafik 2. Ekspor Impor Berdasarkan Data Ekspor Impor Korporasi



Grafik 3. Ekspor Impor Subsektor-subsektor Manufaktur

Korporasi yang membutuhkan impor yang tinggi namun memiliki pangsa pasar yang lebih berorientasi ke domestik perlu lebih banyak mendapat perhatian. Terlebih lagi jika produk tersebut lebih terarah langsung konsumen akhir sebagai produk yang lebih bersifat konsumtif seperti produk dari industri alat transportasi. Meredam permintaan produk transportasi tersebut menjadi hal yang patut dipertimbangkan dalam menjaga kesinambungan neraca transaksi berjalan. Sementara, untuk sektor yang memiliki impor yang besar namun memiliki *forward linkage* yang kuat, penyediaan substitusi impor bahan baku bisa menjadi pilihan kebijakan.



Neraca Pembayaran Indonesia

Tekanan negatif terhadap Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) meningkat pada tahun 2013. Kondisi ini dipengaruhi oleh ekonomi global yang melambat, harga komoditas yang menurun, serta aliran modal ke negara berkembang yang menyusut, di tengah struktur ekonomi domestik yang kurang menopang ketahanan eksternal. Bank Indonesia dan Pemerintah bersinergi menempuh berbagai langkah guna menurunkan defisit transaksi berjalan dan memperkuat NPI. Respons kebijakan tersebut pada triwulan IV 2013 terlihat mulai mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat, sehingga NPI kembali mencatat surplus, disertai ketahanan sektor eksternal yang tetap terjaga.

Pada 2013, perekonomian global yang melemah, di tengah struktur perekonomian domestik yang tidak mendukung, telah meningkatkan tekanan negatif kepada Neraca Pembayaran Indonesia (NPI). Di satu sisi, perekonomian global yang melambat akibat menurunnya pertumbuhan negara-negara *emerging market* telah mengurangi permintaan terhadap ekspor Indonesia. Kinerja ekspor semakin berkurang karena pada saat yang bersamaan *terms of trade* Indonesia memburuk sejalan dengan kondisi harga komoditas global yang masih turun. Di tengah permasalahan struktural terkait komposisi ekspor komoditi sumber daya alam yang masih dominan, pemburukan *terms of trade* tersebut menyebabkan kinerja ekspor komoditi Indonesia menurun. Sementara itu, impor masih besar akibat struktur produksi domestik yang belum mampu memenuhi permintaan kelompok kelas menengah yang terus meningkat, khususnya untuk barang-barang berteknologi tinggi. Impor minyak juga tetap besar seiring dengan struktur pasokan energi nasional yang masih sangat tergantung pada minyak, sedangkan ekspor gas menunjukkan tren menurun. Secara keseluruhan, kondisi ini kemudian meningkatkan defisit transaksi berjalan.

Di sisi lain, indikasi membaiknya kinerja perekonomian Amerika Serikat mendorong otoritas moneter negara tersebut untuk mulai melakukan pengurangan stimulus moneter (*tapering off*). Respons tersebut kemudian secara berangsur-angsur mengurangi pasokan likuiditas ke negara-negara *emerging market*, termasuk Indonesia. Akibatnya aliran modal asing ke Indonesia menjadi berkurang terutama sejak Mei 2013. Persepsi negatif investor asing semakin bertambah seiring dengan meningkatnya defisit transaksi berjalan, dan ekspektasi inflasi. Kondisi ini pada gilirannya menurunkan surplus transaksi modal dan finansial sehingga penurunan kinerja NPI terus berlanjut sampai triwulan III 2013.

Tekanan negatif yang cukup kuat terhadap NPI terutama terjadi pada triwulan II 2013 dan triwulan III 2013. Pada triwulan II 2013, defisit transaksi berjalan tercatat meningkat menjadi 4,4% dari PDB, dari semula 2,7% dari PDB pada triwulan I 2013. Di neraca modal dan finansial, aliran modal keluar mulai meningkat pada Juni 2013 yang dipicu oleh isu global terkait rencana *tapering off* oleh Bank Sentral Amerika Serikat (the Fed). Pada triwulan III 2013, defisit transaksi berjalan masih cukup besar mencapai 3,9% dari PDB. Aliran modal keluar juga berlanjut pada Juli-Agustus 2013 akibat isu *tapering off* yang masih kuat serta persepsi terhadap transaksi berjalan yang memburuk sehingga memberikan tekanan pada neraca finansial pada triwulan III 2013.

Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh berbagai kebijakan guna mengurangi defisit transaksi berjalan ke arah yang sehat. Respons kebijakan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar. Pertama adalah bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia, bukan hanya dengan menggunakan kebijakan suku bunga, tetapi juga dengan mengoptimalkan berbagai kebijakan lainnya seperti nilai tukar dan makroprudensial. Kedua ialah bauran kebijakan fiskal melalui pengurangan subsidi BBM dan instrumen pajak untuk menekan impor. Sinergi bauran kebijakan moneter dan fiskal tersebut diarahkan untuk mengelola permintaan domestik sehingga dapat menekan impor yang berlebihan. Bauran kebijakan ketiga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat struktural seperti perbaikan iklim investasi dan upaya-upaya mendorong kemandirian ekonomi yang pada gilirannya dapat menopang NPI dalam jangka menengah panjang.

Kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan Pemerintah mampu mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih seimbang dan kembali memperkuat kinerja NPI secara keseluruhan. Defisit transaksi berjalan di triwulan IV 2013 menurun signifikan menjadi 2,0% dari PDB. Hal ini dipengaruhi impor yang menurun seiring dengan permintaan domestik yang termoderasi dan pelemahan nilai tukar rupiah ke arah yang sesuai dengan fundamental. Perbaikan transaksi berjalan juga didukung oleh kenaikan ekspor sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi negara maju dan nilai tukar rupiah yang lebih berdaya saing. Selain itu, surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan IV juga kembali meningkat. Surplus ini bersumber dari penarikan pinjaman luar negeri korporasi, penarikan simpanan bank domestik di luar negeri, dan arus masuk investasi langsung yang tetap stabil. Surplus pada transaksi modal dan finansial ini cukup memadai dalam membiayai defisit transaksi berjalan sehingga NPI pada triwulan IV 2013 kembali mencatat surplus setelah pada tiga triwulan sebelumnya mencatat defisit. Perkembangan positif ini kemudian berkontribusi pada peningkatan posisi cadangan devisa dari 95,6 miliar dolar AS pada triwulan III 2013 menjadi 99,4 miliar dolar AS pada triwulan IV 2013.

Dengan perkembangan pada triwulan IV tersebut, NPI keseluruhan 2013 mencatat defisit 7,3 miliar dolar AS, berbalik arah dari tahun 2012 yang mencatat surplus 0,2 miliar dolar AS. Defisit NPI 2013 dipengaruhi defisit transaksi berjalan yang mencapai 28,4 miliar dolar AS atau 3,3% dari PDB, meningkat dari defisit tahun 2012 sebesar 24,4 miliar dolar AS atau 2,8% dari PDB. Implikasi dari defisit NPI 2013 adalah turunnya posisi cadangan devisa dari sebelumnya sebesar 112,8 miliar dolar AS pada akhir 2012 menjadi 99,4 miliar dolar AS pada akhir Desember 2013 (Tabel 4.1). Meskipun demikian, di tengah kondisi NPI

Tabel 4.1. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia

Juta dolar AS

RINCIAN	2008	2009	2010	2011	2012*	2013**				
						I	II	III	IV	Total**
I. Transaksi Berjalan	126	10.628	5.144	1.685	-24.418	-5.905	-9.998	-8.529	-4.018	-28.450
A. Barang, neto	22.916	30.932	30.627	34.783	8.618	1.628	-517	145	4.894	6.149
- Ekspor	139.606	119.646	158.074	200.788	188.496	45.231	45.554	44.148	48.616	183.548
- Impor	-116.690	-88.714	-127.447	-166.005	-179.878	-43.603	-46.071	-44.003	-43.722	-177.399
1. Nonmigas	15.130	25.560	27.395	35.433	13.857	4.483	1.587	2.771	7.011	15.851
a. Ekspor	107.885	99.030	129.416	162.721	152.925	36.758	37.640	35.610	39.951	149.960
b. Impor	-92.755	-73.470	-102.021	-127.288	-139.068	-32.276	-36.053	-32.840	-32.941	-134.109
2. Minyak	-8.362	-4.016	-8.653	-17.526	-20.436	-6.356	-5.102	-5.664	-5.354	-22.476
a. Ekspor	15.387	10.790	15.691	19.576	17.891	4.298	4.243	4.812	4.536	17.889
b. Impor	-23.749	-14.806	-24.344	-37.102	-38.327	-10.654	-9.345	-10.476	-9.890	-40.365
3. Gas	16.147	9.388	11.886	16.876	15.197	3.501	2.998	3.038	3.237	12.775
a. Ekspor	16.333	9.826	12.968	18.491	17.680	4.175	3.670	3.725	4.129	15.700
b. Impor	-186	-438	-1.082	-1.615	-2.483	-674	-672	-688	-892	-2.925
B. Jasa-Jasa, neto	-12.998	-9.741	-9.324	-10.632	-10.331	-2.511	-3.365	-2.675	-2.877	-11.428
C. Pendapatan, neto	-15.155	-15.140	-20.790	-26.676	-26.800	-6.126	-7.130	-6.881	-7.090	-27.227
D. Transfer Berjalan, neto	5.364	4.578	4.630	4.211	4.094	1.104	1.014	883	1.056	4.056
II. Transaksi Modal & Finansial	-1.832	4.852	26.620	13.567	24.896	-394	8.300	5.587	9.238	22.731
A. Transaksi modal	294	96	50	33	51	1	7	5	8	21
B. Transaksi finansial	-2.126	4.756	26.571	13.534	24.845	-395	8.293	5.582	9.230	22.710
- Aset	-17.949	-14.395	-6.901	-15.657	-16.242	-7.930	2.643	-3.084	-966	-9.337
- Kewajiban	15.823	19.151	33.471	29.191	41.087	7.535	5.650	8.666	10.196	32.047
1. Investasi langsung	3.419	2.628	11.106	11.528	13.716	3.789	3.700	5.681	1.597	14.767
a. Ke luar negeri	-5.900	-2.249	-2.664	-7.713	-5.422	-206	-901	-87	-2.482	-3.676
b. Di Indonesia (PMA)	9.318	4.877	13.771	19.241	19.138	3.996	4.601	5.768	4.079	18.444
2. Investasi portofolio	1.764	10.336	13.202	3.806	9.206	2.760	3.389	1.942	1.756	9.848
a. Aset	-1.294	-144	-2.511	-1.189	-5.467	-965	202	-670	140	-1.293
b. Kewajiban	3.059	10.480	15.713	4.996	14.673	3.726	3.187	2.612	1.617	11.141
3. Investasi lainnya	-7.309	-8.208	2.262	-1.801	1.922	-6.945	1.203	-2.041	5.877	-1.906
a. Aset	-10.755	-12.002	-1.725	-6.754	-5.353	-6.759	3.342	-2.328	1.376	-4.368
b. Kewajiban	3.446	3.794	3.987	4.954	7.275	-187	-2.139	287	4.501	2.462
III. Total (I + II)	-1.706	15.481	31.765	15.252	478	-6.300	-1.698	-2.943	5.221	-5.720
IV. Selisih Perhitungan Bersih	-238	-2.975	-1.480	-3.395	-262	-315	-779	297	-808	-1.605
V. Neraca Keseluruhan (III+IV)	-1.945	12.506	30.285	11.857	215	-6.615	-2.477	-2.645	4.412	-7.325
VI. Cadangan Devisa dan yang terkait Memorandum:	1.945	-12.506	-30.285	-11.857	-215	6.615	2.477	2.645	-4.412	7.325
- Posisi Cadangan Devisa	51.639	66.105	96.207	110.123	112.781	104.800	98.095	95.675	99.387	99.387
- Dalam Bulan Impor dan Pembayaran Utang Luar Negeri Pemerintah	4,0	6,5	7,4	6,5	6,1	5,7	5,4	5,2	5,5	5,5
Transaksi Berjalan/PDB (%)	0,02	1,95	0,72	0,20	-2,78	-2,66	-4,41	-3,85	-1,98	-3,26

*) Angka sementara

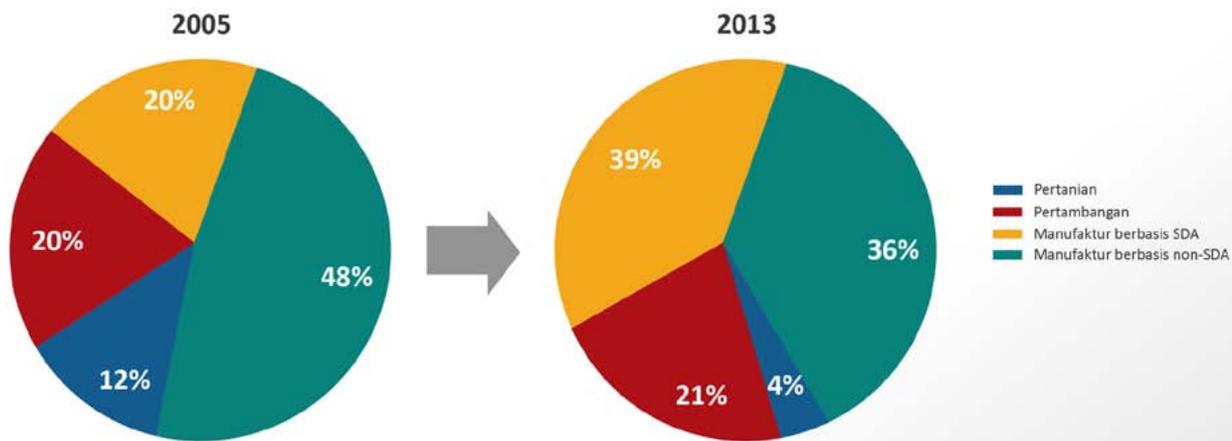
**) Angka sangat sementara

yang kurang menguntungkan tersebut, beberapa indikator menunjukkan ketahanan eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga.

4.1. Transaksi Berjalan

Defisit transaksi berjalan yang mulai terjadi sejak triwulan IV 2011 masih berlanjut pada tahun 2013 dan diikuti dengan nilai defisit yang membesar. Transaksi berjalan

pada 2013 mencatat defisit 28,4 miliar dolar AS (3,3% dari PDB), naik dari defisit tahun 2012 sebesar 24,4 miliar dolar AS (2,8% dari PDB). Kenaikan defisit transaksi berjalan terutama disebabkan oleh surplus neraca perdagangan barang yang menurun, pada saat neraca jasa dan neraca pendapatan mencatat kenaikan defisit. Penurunan surplus neraca perdagangan barang disebabkan oleh penurunan ekspor yang lebih besar daripada penurunan impor. Nilai ekspor pada tahun 2013 tercatat lebih rendah dari tahun 2012 atau terkoreksi 2,6%, sedangkan nilai impor terkoreksi 1,4% dari tahun sebelumnya.



Grafik 4.1. Porsi Ekspor Nonmigas Indonesia 2005 – 2013

Defisit transaksi berjalan yang meningkat tidak terlepas dari kondisi ekonomi global yang masih menurun. Pada satu sisi, pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun dari 3,1% pada tahun 2012 menjadi 3,0% pada tahun 2013 akibat perlambatan ekonomi negara *emerging market*, khususnya China dan India, telah mengakibatkan belum kuatnya permintaan terhadap barang ekspor Indonesia.¹ Pada sisi lain, perlambatan ekonomi dunia tersebut juga menyebabkan berakhirnya era harga komoditas tinggi. Hal ini telah menurunkan *terms of trade* Indonesia dan pada akhirnya semakin menekan surplus neraca perdagangan barang.

Defisit transaksi berjalan semakin besar karena struktur ekonomi Indonesia, khususnya di sisi ekspor, masih sangat mengandalkan barang-barang berbasis sumber daya alam (SDA). Kontribusi ekspor yang berbasis SDA terhadap total ekspor nonmigas bahkan justru meningkat dari 52% pada tahun 2005 menjadi 64% pada tahun 2013 (Grafik 4.1). Permasalahan tersebut makin mengemuka karena upaya meningkatkan peran ekspor non-SDA melalui peningkatan investasi langsung belum optimal. Meskipun investasi langsung asing di Indonesia terus meningkat dengan porsi terbesar pada sektor manufaktur, porsi produksi yang ditujukan untuk ekspor justru berada dalam tren menurun sejak tahun 2000, khususnya pada sektor manufaktur (Tabel 4.2). Hal ini mengindikasikan bahwa investasi asing yang dilakukan di Indonesia lebih ditujukan untuk memenuhi permintaan domestik daripada untuk mendorong ekspor.

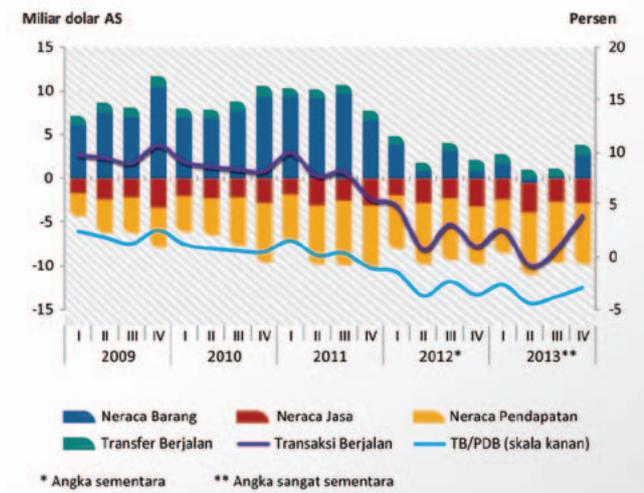
Tabel 4.2. Porsi Produksi Sektorial yang Berorientasi Ekspor

Sektor	Output yang diekspor		
	2000	2005	2008
1. Pertanian	2,4	3,3	1,9
2. Pertambangan	39,2	49,5	34,1
3. Industri Pengolahan	36,2	27,1	23,7
4. Listrik, Gas dan Air	0,0	0,0	0,0
5. Bangunan	0,0	0,0	0,0
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	14,4	13,8	14,2
7. Pengangkutan dan Komunikasi	17,6	14,9	13,8
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa	7,4	4,6	3,1
9. Jasa-jasa	4,9	4,6	2,5
Keseluruhan	21,1	17,2	14,1

Sumber: Tabel Input Output 2000, 2005, 2008 - BPS

Permasalahan struktural lainnya yang menurunkan kinerja defisit transaksi berjalan adalah tingkat ketergantungan perekonomian domestik terhadap barang-barang impor yang masih tinggi. Tingginya kandungan impor pada barang-barang produksi dalam negeri menyebabkan tingkat ketergantungan industri domestik terhadap bahan baku impor masih besar. Selain itu, kapasitas produksi domestik yang belum cukup memadai dalam memenuhi permintaan domestik, termasuk untuk memenuhi permintaan dari penduduk berpendapatan menengah yang semakin besar, turut mengakibatkan ketergantungan pada barang-barang impor semakin besar. Kondisi serupa juga terjadi di sektor energi. Permintaan domestik yang masih kuat mendorong impor energi, khususnya minyak, semakin besar karena terbatasnya pasokan energi di dalam

1 Analisis lengkap mengenai perkembangan ekonomi global lihat Bab 1. Ekonomi Global dan Bab 2. Respons Kebijakan Ekonomi Global



Grafik 4.2. Neraca Transaksi Berjalan

negeri. Kapasitas produksi domestik yang tidak mampu mengimbangi peningkatan permintaan domestik tersebut sesuai hasil kajian Bank Indonesia, menyebabkan elastisitas impor terhadap permintaan domestik cenderung meningkat sejak tahun 2000.

Dinamika permasalahan siklikal dan struktural tersebut mewarnai perkembangan triwulanan transaksi berjalan selama 2013. Tekanan defisit transaksi berjalan meningkat tinggi pada triwulan II 2013 (4,4% dari PDB) disebabkan oleh menyusutnya surplus neraca perdagangan nonmigas yang cukup signifikan akibat tingginya impor, khususnya impor bahan baku dan barang konsumsi sejalan dengan kenaikan konsumsi domestik yang secara historis selalu tinggi pada triwulan II. Selain itu, kenaikan defisit transaksi berjalan pada triwulan II 2013 juga turut dikontribusi oleh peningkatan defisit neraca jasa. Peningkatan defisit neraca jasa terjadi seiring dengan peningkatan impor nonmigas dan peningkatan defisit neraca pendapatan akibat meningkatnya nilai pembayaran bunga/kupon utang luar negeri, sesuai pola triwulannya. Dalam perkembangannya, defisit transaksi berjalan masih cukup besar pada triwulan III 2013 yakni 3,9% dari PDB, meskipun lebih rendah dari defisit pada triwulan II 2013.

Pada triwulan IV 2013, defisit transaksi berjalan mengalami penurunan menjadi 2,0% dari PDB (Grafik 4.2). Perkembangan ini mengindikasikan bahwa kebijakan stabilisasi yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah mampu mengarahkan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat. Perbaikan neraca perdagangan berkontribusi besar terhadap penurunan defisit transaksi berjalan pada triwulan IV 2013 dengan mencatat surplus

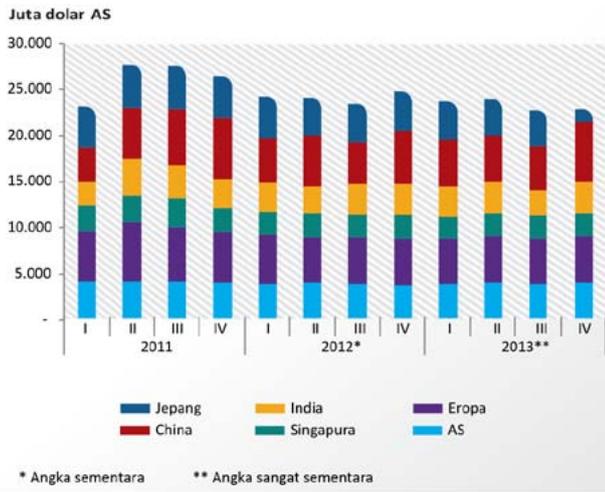
4,9 miliar dolar AS. Perbaikan neraca perdagangan tersebut terutama dipengaruhi oleh membaiknya neraca perdagangan nonmigas akibat meningkatnya ekspor nonmigas. Peningkatan ekspor nonmigas dipengaruhi oleh mulai pulihnya permintaan negara-negara maju seperti AS dan Jepang, serta nilai tukar rupiah yang semakin berdaya saing. Di sisi lain, nilai impor nonmigas relatif sama dengan triwulan sebelumnya. Perkembangan impor nonmigas yang terkendali tersebut antara lain dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya permintaan domestik sejalan dengan kebijakan pengetatan moneter dan fiskal yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Sementara itu, neraca perdagangan migas masih defisit terutama didorong oleh konsumsi minyak di dalam negeri yang masih tinggi.

Neraca Perdagangan Nonminyak dan Gas (Nonmigas)

Berdasarkan komponennya, defisit transaksi berjalan yang cenderung membesar dan masih berada pada level yang tinggi hingga triwulan III 2013 banyak dipengaruhi oleh penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas selama periode tersebut. Kinerja neraca perdagangan nonmigas kemudian membaik pada triwulan IV 2013 akibat ekspor yang meningkat. Dengan perkembangan tersebut neraca perdagangan nonmigas mencatat surplus sebesar 15,8 miliar dolar AS, lebih besar dari surplus tahun 2012 sebesar 13,9 miliar dolar AS.

Kinerja neraca perdagangan nonmigas yang menurun sampai dengan triwulan III 2013 tersebut disebabkan oleh tertekannya kinerja ekspor nonmigas Indonesia. Ekspor nonmigas selama tiga triwulan pertama tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 3,9%(yoy) akibat turunnya permintaan mitra dagang utama seperti China, Eropa, Jepang, dan Amerika (Grafik 4.3). Selain itu, tren penurunan harga komoditas global yang masih berlangsung juga memberikan dampak cukup besar terhadap ekspor nonmigas yang masih didominasi oleh produk primer berbasis sumber daya alam (SDA). Pada tahun 2013, ekspor produk primer turun 3,5%, sedangkan ekspor manufaktur masih naik walaupun hanya sebesar 0,2% (Grafik 4.4).

Penurunan surplus neraca perdagangan nonmigas juga disebabkan oleh koreksi pada impor nonmigas yang tidak sebesar koreksi pada ekspor nonmigas. Pada tiga triwulan pertama tahun 2013, impor nonmigas turun 2,5% (yoy), sedangkan ekspor nonmigas dalam periode yang sama turun lebih tajam sebesar 3,9%(yoy). Penurunan



Grafik 4.3. Ekspor Nonmigas Menurut Negara Tujuan Utama

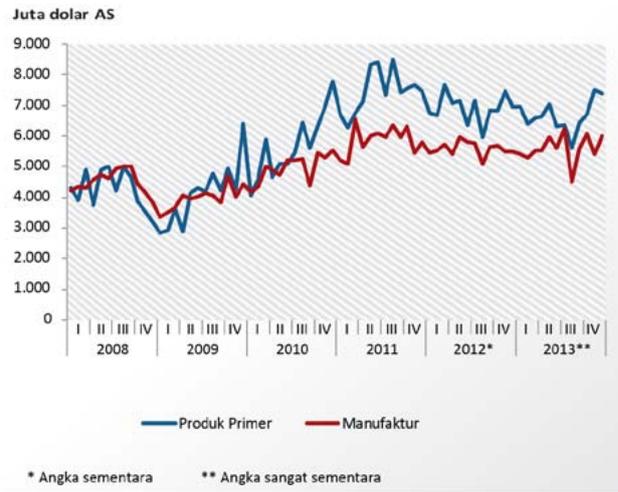
Impor nonmigas tersebut dipengaruhi oleh penurunan permintaan domestik sejalan dengan tren perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik, pelemahan nilai tukar rupiah dan berbagai kebijakan pengendalian impor yang dilakukan oleh Bank Indonesia maupun Pemerintah, khususnya sejak triwulan III 2013.

Di tengah tren perlambatan permintaan domestik, impor barang konsumsi masih tumbuh 3,2%. Sementara itu, impor bahan baku yang pangsa mencapai 69% mengalami penurunan sebesar 0,6%. Penurunan impor paling tajam terjadi pada kelompok barang modal yaitu mencapai 14,3% dibandingkan tahun sebelumnya.

Neraca Perdagangan Minyak dan Gas (Migas)

Faktor paling dominan di balik pemburukan defisit transaksi berjalan tahun 2013 adalah terus melebarnya defisit neraca perdagangan migas. Pada tahun 2013, defisit neraca perdagangan migas tercatat 9,7 miliar dolar AS, membesar dibandingkan dengan defisit pada 2011 sebesar 0,7 miliar dolar AS dan 5,2 miliar dolar AS pada 2012 (lihat Boks 4.1. Neraca Perdagangan Minyak dan Gas).

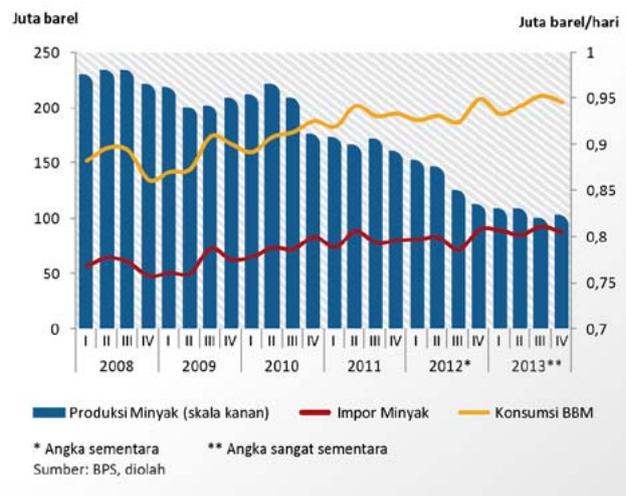
Defisit neraca perdagangan migas yang membesar tidak terlepas dari pengaruh impor minyak yang masih tinggi. Pada tahun 2013, impor minyak mencapai 40,4 miliar dolar AS, meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 38,3 miliar dolar AS. Peningkatan impor minyak tersebut dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi bahan bakar minyak di dalam negeri, khususnya



Grafik 4.4. Perkembangan Pertumbuhan Ekspor Produk Primer dan Manufaktur

di sektor transportasi di tengah ketersediaan energi alternatif yang terbatas. Peningkatan impor juga dipengaruhi oleh permasalahan struktural terkait produksi minyak yang masih terus menurun yakni dari 862 ribu barel/hari pada 2012 menjadi 827 ribu barel/hari pada 2013 (Grafik 4.5).

Defisit neraca perdagangan migas juga dipengaruhi oleh penurunan ekspor gas yang cukup besar. Ekspor gas pada tahun 2013 tercatat 15,7 miliar dolar AS, turun 11,2% dibandingkan tahun 2012. Penurunan ekspor gas tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah melakukan konversi energi dari bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas melalui pemanfaatan produksi



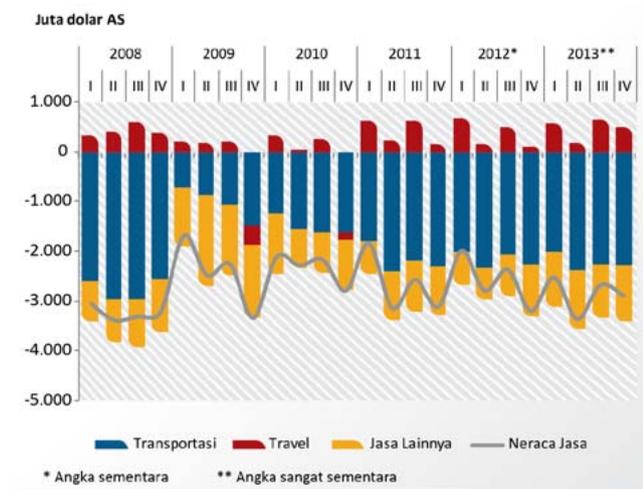
Grafik 4.5. Perkembangan Produksi Minyak, Impor Minyak, dan Konsumsi BBM

gas di dalam negeri. Meskipun menyebabkan ekspor gas turun cukup dalam, kebijakan tersebut di sisi lain mampu mencegah peningkatan impor minyak yang lebih tinggi.

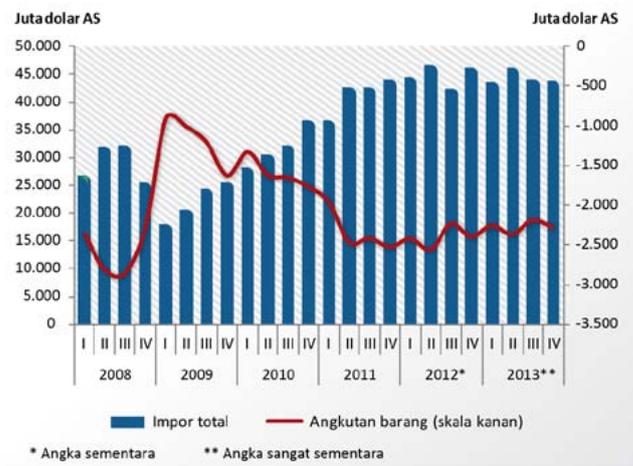
Neraca Jasa, Pendapatan dan Transfer Berjalan

Peningkatan defisit transaksi berjalan juga dipengaruhi oleh neraca jasa yang masih mencatat defisit. Defisit neraca jasa bahkan meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, neraca jasa mengalami defisit sebesar 11,4 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 10,3 miliar dolar AS (Grafik 4.6).

Sama dengan tahun-tahun sebelumnya, defisit neraca jasa tetap dominan dipengaruhi oleh defisit pada jasa transportasi. Defisit jasa transportasi pada 2013 tercatat 8,9 miliar dolar AS, meningkat dari 8,7 miliar dolar AS pada 2012. Namun demikian, berdasarkan komponennya, terdapat perubahan komposisi penyebab peningkatan defisit jasa transportasi tersebut. Peningkatan defisit neraca jasa pada tahun 2013 terutama didorong oleh kenaikan defisit jasa transportasi untuk penumpang yakni dari defisit 1,14 miliar dolar AS menjadi defisit 1,42 miliar dolar AS. Perkembangan ini mengindikasikan semakin banyaknya penduduk kelas menengah Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri, namun memanfaatkan jasa penyedia perjalanan asing. Sementara itu, defisit pada komponen jasa pengangkutan, khususnya angkutan barang (*freight*), pada tahun 2013 tercatat menurun dari 7,56 miliar dolar AS menjadi 7,33 miliar dolar AS. Penurunan defisit jasa pengangkutan barang



Grafik 4.6. Perkembangan Neraca Jasa

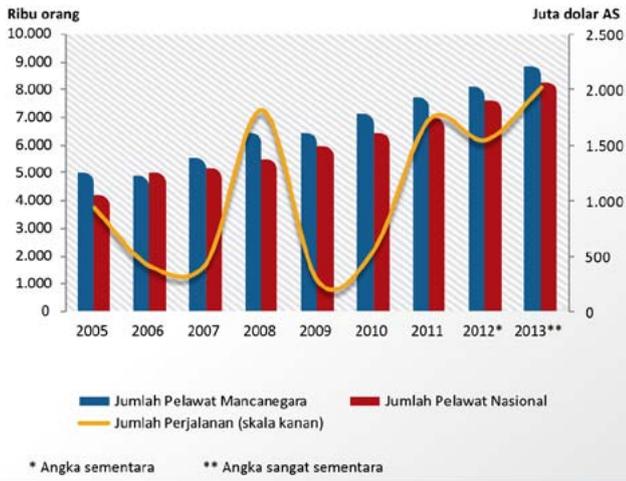


Grafik 4.7. Perkembangan Impor dan Jasa Pengangkutan Barang

tersebut dipengaruhi oleh penurunan impor (Grafik 4.7). Kendati menurun, transaksi jasa pengangkutan barang yang masih defisit tersebut tetap mengangkat permasalahan struktural terkait masih terbatasnya penyedia jasa dalam negeri yang bergerak di bidang pengangkutan barang. Keterbatasan jasa pengangkutan barang ini mengakibatkan kegiatan pengangkutan ekspor dan impor sebagian besar masih menggunakan sarana transportasi asing.

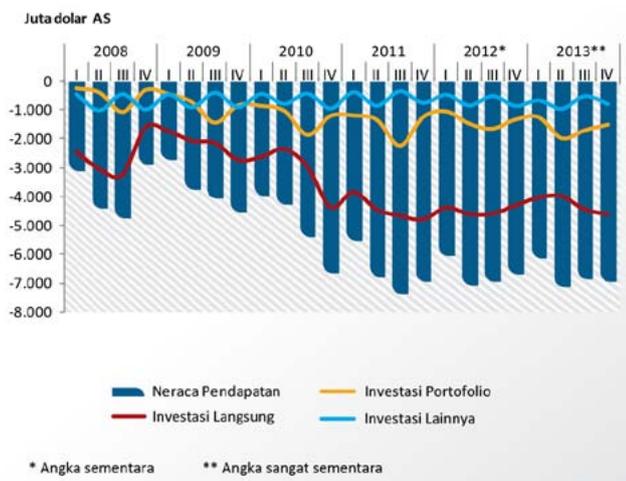
Defisit pada neraca jasa sedikit dapat dikurangi oleh jasa perjalanan (*travel*) yang secara neto mencatat kenaikan surplus. Kenaikan surplus tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, antara lain sebagai dampak dari pelaksanaan beberapa kegiatan dengan lingkup internasional yang dilakukan di Indonesia seperti pertemuan tingkat tinggi negara anggota APEC (Grafik 4.8).

Neraca pendapatan yang juga masih defisit, turut berkontribusi pada kenaikan defisit transaksi berjalan. Pada tahun 2013, defisit neraca pendapatan masih tercatat tinggi 27,2 miliar dolar AS, naik dari tahun 2012 sebesar 26,8 miliar dolar AS (Grafik 4.9). Defisit neraca pendapatan tersebut antara lain terkait dengan kegiatan investasi langsung (*Foreign Direct Investment-FDI*), yang meningkat signifikan sejak 2010. Kenaikan FDI secara umum akan mendorong kenaikan pendapatan investasi (*investment income*) yang harus dibayarkan kepada investor asing, baik dalam bentuk pembayaran keuntungan (repatriasi pendapatan) ke luar negeri maupun laba yang ditanamkan kembali, dan pada akhirnya turut mendorong defisit neraca pendapatan.

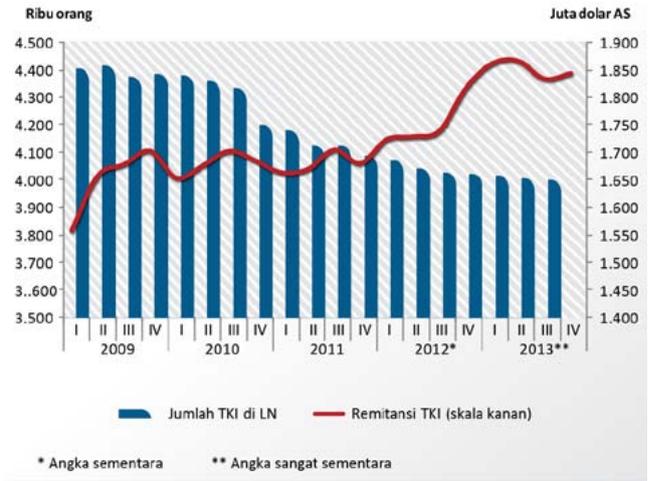


Grafik 4.8. Jumlah Pelawat Mancanegara & Penggunaan Jasa Perjalanan

Sementara itu, salah satu komponen transaksi berjalan yang lain, yaitu neraca transfer berjalan, mencatat surplus dalam jumlah yang relatif sama dengan surplus pada tahun sebelumnya. Surplus neraca transfer berjalan pada 2013 terutama ditopang oleh kenaikan remitansi dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri. Nilai remitansi TKI pada 2013 tercatat naik yakni dari 7,1 miliar dolar AS pada 2012 menjadi 7,4 miliar dolar AS pada 2013. Perkembangan itu cukup positif mengingat jumlah TKI yang bekerja di luar negeri berkurang terkait dampak penghentian sementara pengiriman TKI (moratorium) ke beberapa negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia, Kuwait, Suriah, dan Yordania. Perkembangan tersebut mengindikasikan kenaikan rata-rata upah yang diterima pekerja Indonesia di luar negeri (Grafik 4.10).



Grafik 4.9. Perkembangan Neraca Pendapatan



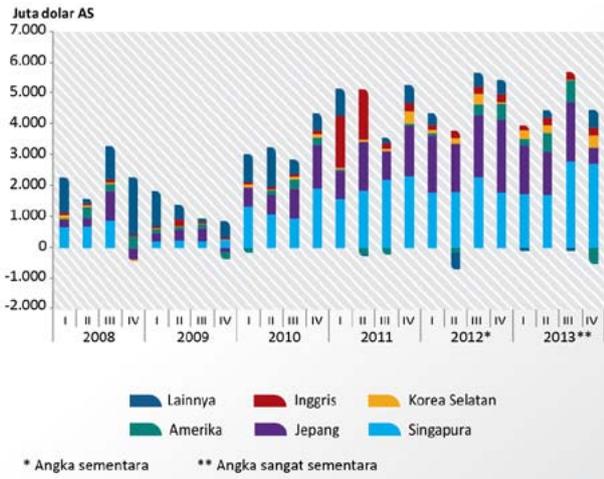
Grafik 4.10. Perkembangan Jumlah dan remitansi TKI

4.2. Transaksi Modal dan Finansial

Surplus transaksi modal dan finansial yang menurun turut memberikan tekanan negatif terhadap kinerja NPI 2013. Sepanjang 2013 surplus transaksi modal dan finansial tercatat sebesar 22,7 miliar dolar AS, turun 8,7% dibandingkan dengan surplus tahun sebelumnya sebesar 24,9 miliar dolar AS (Tabel 4.1). Penurunan surplus tersebut bersumber dari defisit pada investasi lainnya. Sementara itu, investasi langsung dan investasi portofolio mencatat kenaikan surplus.

Penurunan surplus tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global terkait rencana pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) di AS yang menurunkan aliran masuk modal asing ke Indonesia dan persepsi negatif terhadap defisit transaksi berjalan serta ekspektasi inflasi yang meningkat pasca kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013. Aliran modal asing keluar dari perekonomian Indonesia mulai meningkat pada Mei 2013 dan berlanjut pada Juli sampai dengan Agustus 2013. Namun demikian, penurunan lebih besar pada surplus transaksi modal dan finansial dapat dicegah karena pada saat yang sama penempatan investasi penduduk (*resident*) di luar negeri juga menurun karena terpengaruh oleh prospek pertumbuhan ekonomi global yang lebih rendah dari perkiraan semula.

Secara triwulanan, perkembangan positif terjadi di triwulan IV 2013 sebagai dampak dari berbagai respons yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengendalikan perekonomian ke arah yang lebih seimbang. Berbagai respons kebijakan tersebut berhasil memulihkan persepsi investor terhadap prospek penempatan modal di Indonesia. Neraca modal dan



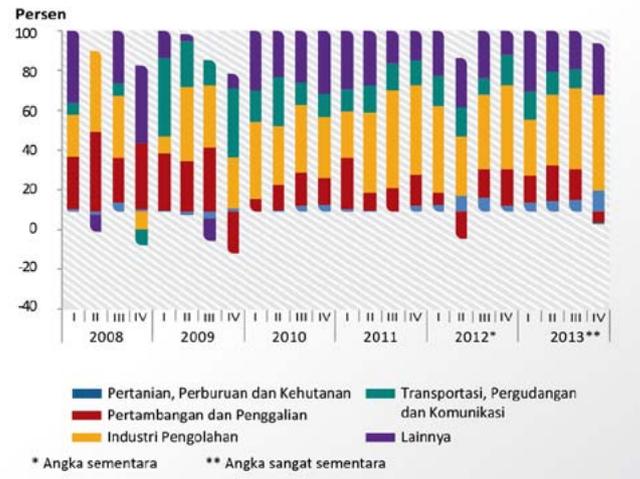
Grafik 4.11. Investasi Langsung Asing Menurut Negara Investor Utama

finansial pada triwulan IV 2013 mencatat surplus 9,2 miliar dolar AS, lebih besar daripada surplus pada triwulan-triwulan sebelumnya. Kenaikan surplus pada transaksi modal dan finansial dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada investasi lainnya dan investasi portofolio, khususnya pada instrumen Surat Utang Negara (SUN). Sementara itu, komponen investasi langsung mencatat surplus meskipun turun dibandingkan dengan surplus pada triwulan sebelumnya.

Investasi Langsung

Faktor global dan domestik yang kurang kondusif mendorong penurunan investasi langsung asing (PMA) di Indonesia. Investasi langsung asing di Indonesia turun dari 19,1 miliar dolar AS pada tahun 2012 menjadi 18,4 miliar dolar AS. Transaksi investor domestik yang melakukan akuisisi saham asing pada perusahaan ritel serta perusahaan minyak dan gas di Indonesia juga berkontribusi pada penurunan investasi langsung asing di Indonesia. Di sisi lain, arus investasi langsung Indonesia ke luar negeri pada 2013 juga turun signifikan dari 5,4 miliar dolar AS pada tahun 2012 menjadi 3,7 miliar dolar AS sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Karena penurunan investasi langsung Indonesia di luar negeri lebih besar daripada penurunan investasi langsung asing di Indonesia (PMA), surplus investasi langsung secara neto justru mengalami kenaikan dari 13,7 miliar dolar AS pada 2012 menjadi 14,8 miliar dolar AS pada 2013.

Berdasarkan negara asal, investasi langsung asing yang masuk ke Indonesia didominasi oleh investor dari Singapura dan Jepang. Investasi kedua negara tersebut



Grafik 4.12. Investasi Langsung Asing Menurut Sektor Ekonomi

mencapai 14,8 miliar dolar AS atau 78% dari total PMA di Indonesia, tetapi lebih rendah daripada pangsa tahun 2012 yang mencapai 82% (Grafik 4.11). Sementara itu, investasi langsung dari negara-negara ASEAN pada tahun 2013 mencapai 47% dari total investasi langsung asing di Indonesia dengan Singapura tercatat sebagai investor utama, disusul kemudian oleh Malaysia dan Thailand.

Sebagaimana tahun sebelumnya, tiga sektor yakni sektor industri manufaktur, sektor pertambangan dan sektor transportasi menjadi sektor utama yang menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Nilai investasi langsung asing pada sektor manufaktur tercatat sebesar 8,8 miliar dolar AS atau mencapai 48% dari total investasi langsung tahun 2013, dengan Jepang dan Singapura sebagai investor terbesar. Sementara itu, nilai investasi di sektor tambang dan transportasi masing-masing sebesar 2,3 miliar dolar AS dan 1,9 miliar dolar AS (Grafik 4.12). Tetap tingginya minat asing berinvestasi di tiga sektor utama tersebut tidak terlepas dari masih tingginya konsumsi domestik dan kegiatan ekspor yang bertumpu pada sektor energi. Tingginya minat berinvestasi di sektor manufaktur dan pertambangan juga sejalan dengan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang pada 2013 pangasanya mencapai 72% dari total Penanaman Modal Asing di Indonesia.²

² Nilai realisasi investasi yang dicatat oleh BKPM adalah keseluruhan nilai proyek dari perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) yang dilaporkan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara triwulanan. Nilai tersebut diluar investasi Sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor terkait.

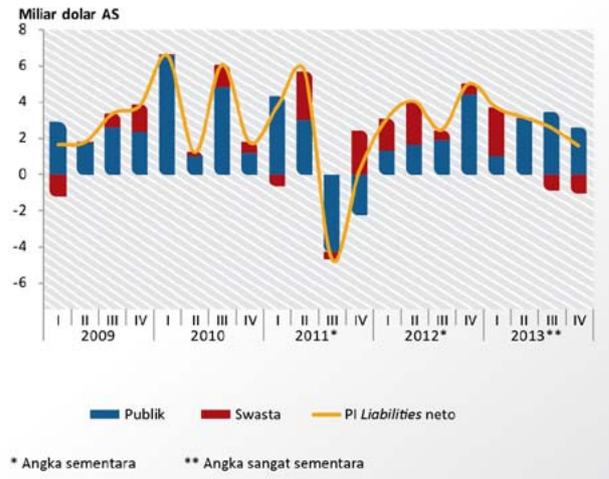
Investasi Portofolio

Investasi portofolio asing di Indonesia (sisi kewajiban) juga menurun pada tahun 2013, terpengaruh oleh permasalahan global dan domestik. Namun, karena investasi portofolio Indonesia ke luar negeri (sisi aset) turun dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan investasi portofolio asing di Indonesia, maka secara neto, investasi portofolio mencatat peningkatan surplus yakni dari 9,2 miliar dolar AS pada 2012 menjadi 9,8 miliar dolar AS.

Pada tahun 2013, aliran masuk dana asing investasi portofolio di Indonesia menurun tajam dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi portofolio asing di Indonesia tercatat 11,1 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2013 sebesar 14,7 miliar dolar AS. Penurunan yang tajam terutama terjadi pada triwulan III dan triwulan IV 2013. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakpastian global terkait rencana pengurangan stimulus moneter di AS, persepsi negatif investor asing terhadap kondisi transaksi berjalan, dan ekspektasi inflasi yang sempat meningkat setelah kenaikan harga BBM bersubsidi.

Penurunan investasi portofolio asing di Indonesia terutama terjadi pada sektor swasta (Grafik 4.13), khususnya di pasar saham. Perkembangan bursa saham sepanjang 2013 mencatatkan net penjualan asing 1,8 miliar dolar AS, berbalik arah dari tahun sebelumnya yang mencatatkan net pembelian 1,7 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut turut mendorong tren penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sementara itu, koreksi penempatan asing di pasar obligasi korporasi tidak setajam pasar saham. Sektor swasta mencatatkan pembelian surat-surat berharga (SSB) oleh asing sebesar 2,7 miliar dolar AS, turun dari tahun sebelumnya sebesar 3,7 miliar dolar AS. Pembelian asing atas obligasi swasta tersebut banyak dilakukan pada semester awal 2013 saat kondisi ekonomi masih kondusif untuk penerbitan Surat-Surat Berharga.

Perkembangan berbeda terlihat pada investasi portofolio asing di sektor publik yang mencatat kenaikan surplus. Kenaikan surplus terutama didorong penerbitan obligasi global pemerintah dalam bentuk *Global Medium Term Notes* (GMTN) dan Sukuk. Surplus sektor publik juga ditopang oleh arus masuk dana asing pada SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sebagai dampak perubahan kebijakan masa endap minimum (*month holding period*) dari sebelumnya selama 6 bulan menjadi 1 bulan yang mulai berlaku sejak September 2013. Akumulasi transaksi SBI pada tahun 2013 mencatatkan net pembelian asing 305 juta dolar AS, setelah pada tahun sebelumnya mencatatkan net pelepasan asing 789 juta dolar AS.



Grafik 4.13. Investasi Portofolio Asing di Indonesia

Peningkatan surplus investasi portofolio asing di sektor publik tertahan oleh penurunan pembelian investor asing di instrumen SUN. Pada tahun 2013, penempatan asing di instrumen SUN denominasi Rupiah secara neto tercatat 4,7 miliar dolar AS, turun 0,7 miliar dolar AS dari tahun sebelumnya. Berbeda dengan pasar saham, penurunan penempatan asing di SUN rupiah terutama terjadi sejak Mei 2013 hingga triwulan III 2013. Kondisi itu tidak terlepas dari pengaruh isu global terkait rencana *tapering off* sejak Mei 2013 dan isu *government shutdown* di Amerika Serikat. Selain itu, kondisi domestik terkait persepsi terhadap kondisi transaksi berjalan serta ekspektasi inflasi yang sempat meningkat juga berpengaruh pada penempatan asing di instrumen SUN.

Investasi Lainnya

Penurunan surplus neraca modal dan finansial juga dipengaruhi oleh transaksi investasi lainnya yang mencatat defisit pada 2013. Investasi lainnya secara neto tercatat defisit sebesar 1,9 miliar dolar AS, berkebalikan dengan tahun sebelumnya yang mencatat surplus sebesar 1,9 miliar dolar AS.

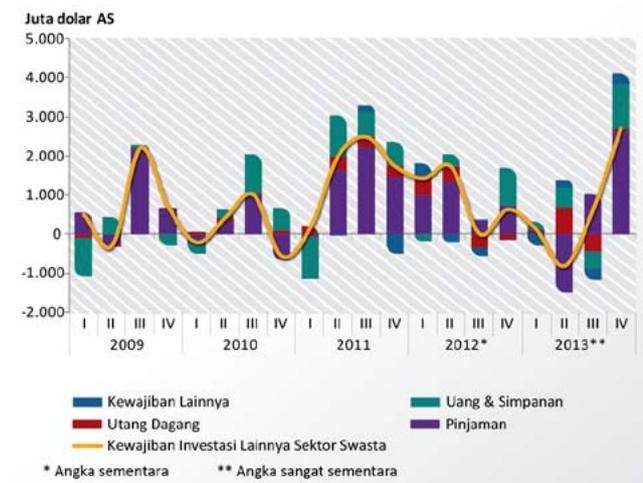
Perkembangan ekonomi global dan domestik yang diwarnai perlambatan juga berdampak pada penurunan arus masuk dana asing pada investasi lainnya di Indonesia. Selama 2013, investasi asing lainnya di Indonesia (sisi kewajiban) turun signifikan dari sebelumnya surplus 7,3 miliar dolar AS menjadi surplus 2,5 miliar dolar AS. Dalam periode yang sama investasi Indonesia lainnya ke luar negeri (sisi aset) yang mencatat penurunan defisit dari 5,4 miliar dolar AS menjadi 4,4 miliar dolar.

Penurunan surplus pada investasi asing lainnya di Indonesia terutama berasal dari sektor publik. Investasi asing lainnya di sektor publik mengalami defisit sejalan dengan kondisi *net* pembayaran utang luar negeri (ULN) pemerintah sebesar 0,5 miliar dolar AS, menurun dari *net* pembayaran tahun sebelumnya. Sementara itu, investasi asing lainnya di sektor swasta mencatat surplus yang disumbang oleh neto penarikan ULN swasta non afiliasi dan kenaikan simpanan bukan penduduk pada bank domestik. Pinjaman swasta nonafiliasi mencatat *net* penarikan 2,2 miliar dolar AS, turun dari net penarikan tahun sebelumnya sebesar 3,4 miliar dolar AS. Sementara itu, simpanan bukan penduduk pada bank domestik meningkat menjadi 1,4 miliar dolar AS, lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 1,1 miliar dolar AS (Grafik 4.14).

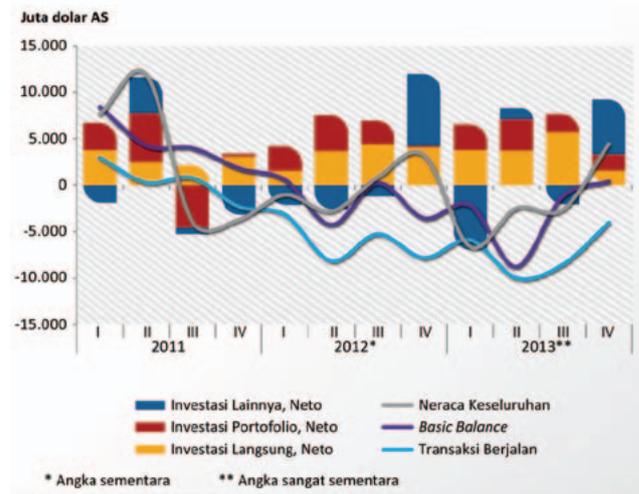
Secara triwulanan, komponen investasi lainnya secara neto kembali mencatat surplus cukup besar pada triwulan IV 2013 mencapai 5,9 miliar dolar AS. Surplus tersebut terutama dipengaruhi oleh meningkatnya penarikan pinjaman luar negeri korporasi dan penarikan simpanan domestik di luar negeri. Penarikan simpanan domestik di luar negeri ini terlihat pada komponen aset investasi luar negeri lainnya di sektor swasta. Penarikan simpanan terutama dilakukan oleh perbankan domestik untuk memenuhi kebutuhan nasabah mereka dan untuk ditempatkan pada instrumen yang disediakan oleh Bank Indonesia.

4.3. Ketahanan Eksternal

Meskipun NPI mengalami tekanan negatif yang cukup besar, beberapa indikator menunjukkan ketahanan



Grafik 4.14. Kewajiban Investasi Lainnya Sektor Swasta



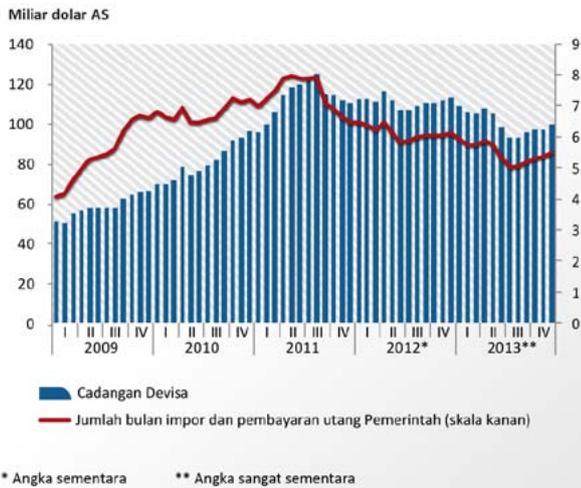
Grafik 4.15. Perkembangan *Basic Balance* NPI

eksternal ekonomi Indonesia tetap terjaga. Sejalan dengan perbaikan NPI pada triwulan IV 2013, kemampuan pembiayaan transaksi berjalan yang berasal dari sumber dana jangka panjang meningkat. Hal ini tercermin pada perhitungan *basic balance* NPI yang juga turut meningkat (Grafik 4.15).³

Indikator ketahanan eksternal lainnya yaitu cadangan devisa, meskipun menurun dari tahun sebelumnya, pada akhir 2013 mencapai 99,4 miliar dolar AS atau setara dengan 5,5 bulan impor dan pembayaran ULN. Angka ini masih berada di atas standar kecukupan internasional (Grafik 4.16).

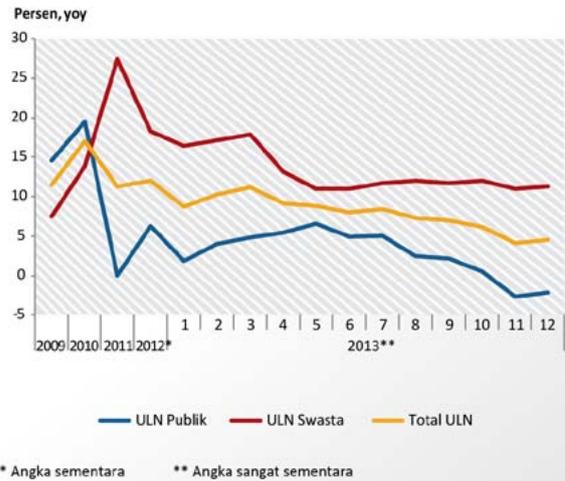
Perkembangan ULN menunjukkan pula bahwa eksposur luar negeri Indonesia masih tetap terjaga dan terkendali. Pertumbuhan utang luar negeri Indonesia berada dalam tren perlambatan yakni 4,6% (yoy) pada tahun 2013, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 12,0% (yoy). Tren perlambatan ULN tidak terlepas dari pengaruh melambatnya pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi kebutuhan pembiayaan perekonomian. Secara keseluruhan rasio ULN terhadap PDB pada 2013 masih cukup sehat yakni tercatat 30,2%, meskipun sedikit naik dari rasio tahun sebelumnya sebesar 28,7%. Rasio ULN terhadap PDB tersebut masih berada dalam area aman dan berada pada kisaran rasio negara-negara *peer group* (Grafik 4.17).

3 *Basic Balance* NPI menunjukkan kemampuan pembiayaan transaksi berjalan dengan sumber dari pendanaan jangka panjang. Persamaan yang digunakan : $Basic\ Balance = transaksi\ berjalan + Net\ Direct\ Investment + Net\ Other\ Investment$ jangka panjang



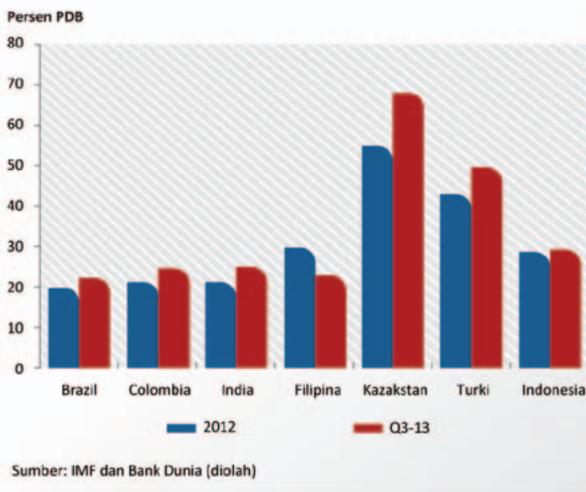
Grafik 4.16. Perkembangan Cadangan Devisa

Perlambatan pertumbuhan ULN Indonesia terjadi baik pada ULN sektor publik maupun sektor swasta. Posisi ULN Indonesia per Desember 2013 sebesar 264,1 miliar dolar AS (30,2% dari PDB), yang terdiri dari ULN sektor publik sebesar 123,5 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta sebesar 140,5 miliar dolar AS (Grafik 4.18). ULN sektor publik pada 2013 berkontraksi sebesar 2,0% (yoy) atau secara posisi lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012. Tren perlambatan pertumbuhan juga terjadi di ULN sektor swasta yang pada tahun 2013 tumbuh 11,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 18,3% (yoy) (Lihat boks 4.2. Utang Luar Negeri Swasta).

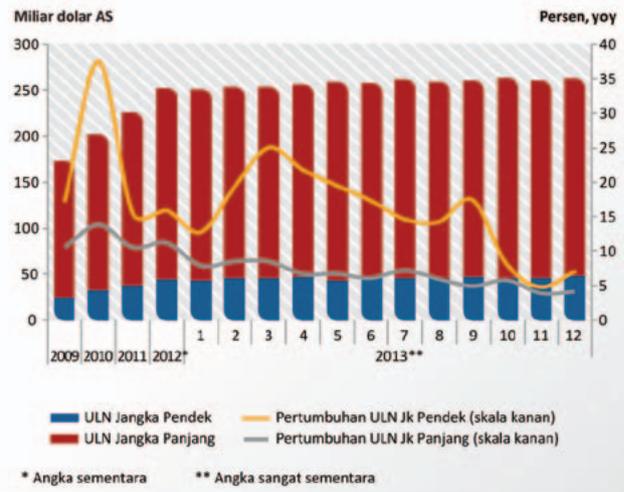


Grafik 4.18. Pertumbuhan ULN Indonesia Berdasarkan Peminjam

Berdasarkan komposisi jangka waktu, struktur ULN Indonesia juga relatif sehat karena didominasi ULN berjangka waktu panjang. ULN jangka panjang tetap dominan hingga Desember 2013, yaitu mencapai 82,1% dari total ULN. Dominasi ULN berjangka panjang tersebut terjadi baik pada ULN sektor publik maupun sektor swasta. Pangsa ULN berjangka panjang pada sektor publik mencapai 94,6% dari total ULN sektor publik, sedangkan ULN berjangka panjang pada sektor swasta mencapai 71,1% dari ULN sektor swasta (Grafik 4.19). Tren perlambatan pertumbuhan utang luar negeri berjangka pendek tahun 2013 lebih curam dibandingkan dengan tren perlambatan utang luar negeri berjangka panjang.



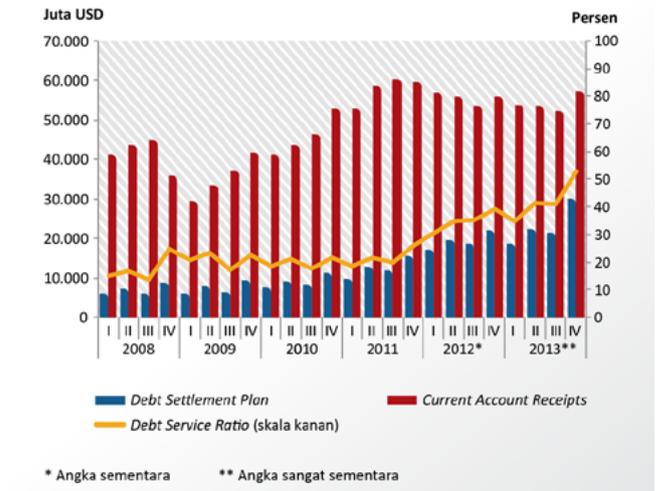
Grafik 4.17. Perbandingan Debt to GDP ratio Peer Group



Grafik 4.19. Perkembangan ULN Indonesia Menurut Jangka Waktu Asal (Original Maturity)

Satu indikator yang sering mendapat perhatian terkait dengan kesinambungan ULN ialah *Debt Service Ratio* (DSR). Indikator DSR keseluruhan tahun 2013 yang dihitung dari rasio pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman luar negeri jangka panjang maupun jangka pendek terhadap penerimaan transaksi berjalan tercatat 42,7%, meningkat dari level sebelumnya 35,0% di tahun 2012. DSR 42,7% tersebut terdiri dari DSR sektor publik 3,1% dan DSR sektor swasta 39,6%. Peningkatan DSR ini, pada satu sisi, tidak terlepas dari pengaruh penerimaan dari transaksi berjalan yang turun 2,4% pada 2013 sejalan dengan menurunnya ekspor. Pada sisi lain, pembayaran cicilan pokok dan bunga ULN tahun 2013 meningkat 19% dibandingkan tahun 2012 sejalan dengan jumlah ULN yang masih tumbuh positif.

DSR Indonesia yang meningkat pada 2013 tidak langsung berimplikasi pada meningkatnya kerentanan kemampuan pembayaran ULN Indonesia. Metode perhitungan DSR yang dilakukan oleh Bank Indonesia lebih konservatif daripada yang dilakukan oleh Bank Dunia. Berbeda dengan metode Bank Dunia, DSR yang dihitung oleh Bank Indonesia turut memasukkan pembayaran dari pinjaman jangka pendek seperti utang dagang. Ruang lingkup perhitungan yang lebih luas ini cukup konservatif mengingat risiko jenis pinjaman jangka pendek yang terkait dengan aktivitas perdagangan dan modal kerja cukup rendah karena dapat segera dibayar kembali dari hasil operasional perusahaan dan pada umumnya tidak memiliki saldo posisi yang besar. Selain itu, sebagian dari pinjaman



Grafik 4.20. Perkembangan DSR Indonesia

jangka pendek ini adalah transaksi antar perusahaan dalam satu grup korporasi atau transaksi dengan mitra dagang yang telah terjalin lama sehingga risiko gagal bayarnya juga rendah. Bila DSR tidak memperhitungkan pembayaran pinjaman-pinjaman jangka pendek seperti yang digunakan Bank Dunia maka DSR Indonesia pada triwulan IV 2013 akan tercatat di kisaran 33%, jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan metode Bank Indonesia sebesar 52,7% (Grafik 4.20). Angka DSR Indonesia menggunakan metode Bank Dunia tersebut berada pada kisaran rasio negara-negara *peer group*.

Boks 4.1. Neraca Perdagangan Minyak dan Gas

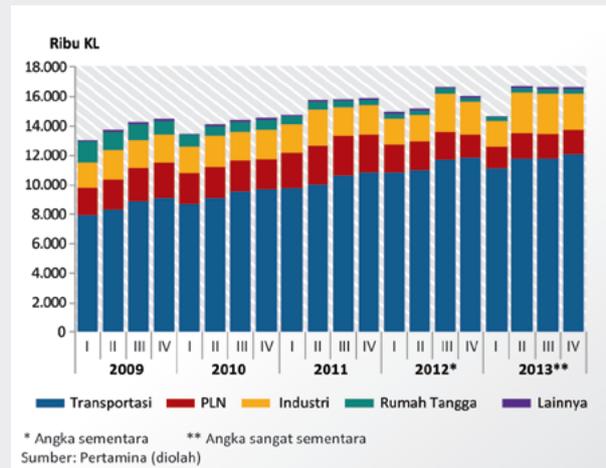
Neraca perdagangan migas secara struktural memiliki tren defisit yang akan terus melebar. Kondisi ini terkait dengan produksi minyak yang terus menurun, sedangkan konsumsi BBM terus mengalami peningkatan. Surplus neraca gas sudah tidak mampu lagi menopang defisit neraca minyak yang terus melebar sehingga neraca migas mulai mencatatkan angka defisit sejak tahun 2011. Defisit tersebut terus melebar di tahun-tahun selanjutnya sehingga berkontribusi besar terhadap defisit neraca transaksi berjalan di tahun 2012 dan 2013. Peningkatan defisit neraca minyak tahun 2013 disertai dengan penurunan surplus di neraca gas, seiring dengan kebijakan realokasi penggunaan gas sebagai pengganti BBM.¹

Dari sisi impor, dominasi sektor transportasi semakin meningkat dalam mengkonsumsi BBM. Konsumsi BBM sektor transportasi tumbuh 3% dibandingkan tahun sebelumnya, seiring pertumbuhan industri kendaraan bermotor di Indonesia yang mencapai 6%. Dengan perkembangan ini, pangsa sektor transportasi dalam konsumsi BBM pada tahun 2013 mencapai 72%. Sementara itu, sektor-sektor lain, selain pangasanya yang relatif kecil, pertumbuhannya juga tidak setinggi sektor transportasi, bahkan beberapa sektor mengalami pertumbuhan negatif (Grafik 1).

Ditinjau dari jenisnya, impor produk minyak terbesar adalah premium. Sepanjang lima tahun terakhir, premium tetap merupakan jenis produk minyak yang mencatat impor paling besar (Grafik 2). Pada tahun 2013, impor premium mencapai 70% dari total impor minyak, diikuti kemudian oleh solar dan HOMC (*high octane mogas components*).

Dari sisi ekspor, volume ekspor minyak 2013 mengalami peningkatan sebesar 4,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, seiring dengan tren penurunan harga minyak dan energi di pasar internasional, harga ekspor minyak turun sebesar 6,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, peningkatan volume ekspor diset-

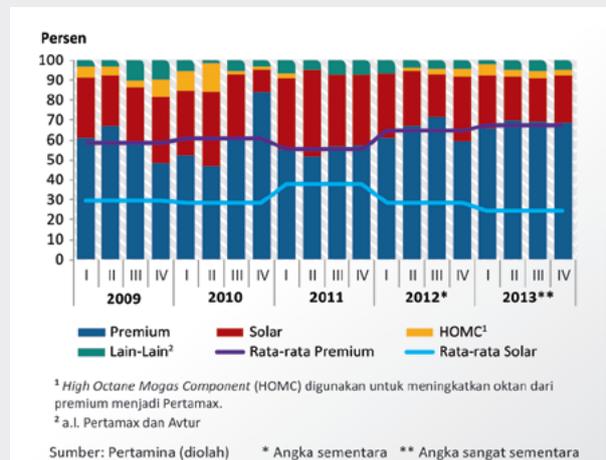
1 Realokasi penggunaan gas sebagai pengganti BBM dapat mengurangi impor minyak yang lebih tinggi.



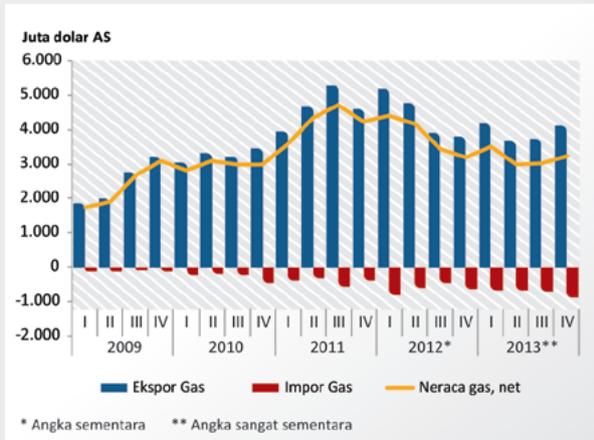
Grafik 1. Perkembangan Konsumsi BBM Sektoral

off oleh penurunan harga ekspor sehingga kinerja ekspor minyak tahun 2013 mencapai 17,89 miliar dolar AS, relatif sama dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya.

Sementara itu, kinerja neraca perdagangan gas pada tahun 2013 tidak sebaik tahun sebelumnya. Neraca perdagangan gas mencatat penurunan surplus akibat turunnya volume ekspor dan turunnya harga seiring tren penurunan harga komoditas dunia (Grafik 3). Volume ekspor gas (*Liquefied Natural Gas/LNG* dan *Natural Gas/NG*) selama 2013 tercatat sebesar 1,2



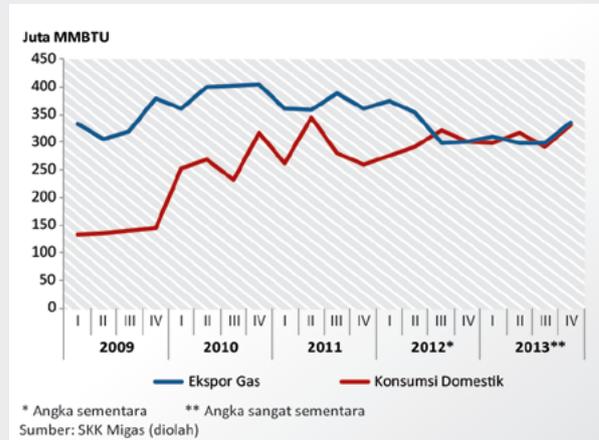
Grafik 2. Perkembangan Porsi Impor Produk Minyak



Grafik 3. Neraca Perdagagan Gas

miliar *Million Metric British Thermal Unit* (MMBTU), turun 6,5% dari tahun sebelumnya yang tercatat 1,3 miliar MMBTU. Meningkatnya alokasi gas untuk pemenuhan konsumsi dalam negeri diindikasikan memberikan dampak pada berkurangnya volume gas untuk diekspor (Grafik 4).

Di sisi lain, impor gas (*Liquefied Petroleum Gas*/LPG) pada tahun 2013 meningkat dibandingkan



Grafik 4. Perkembangan alokasi Gas (LNG dan NG)

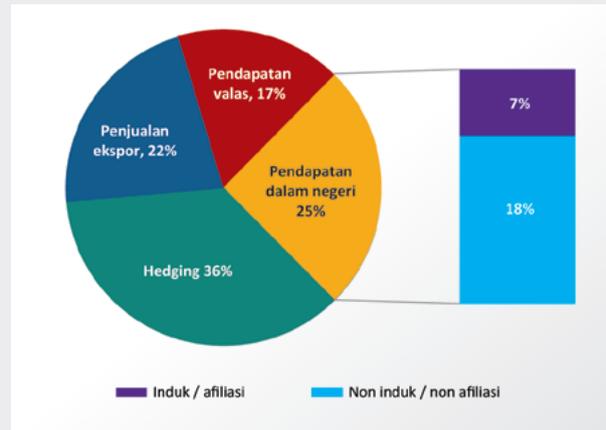
dengan tahun sebelumnya. Nilai impor gas pada tahun 2013 mencapai 2,9 miliar dolar AS atau meningkat 18% dari impor tahun 2012 sebesar 2,5 miliar dolar AS. Peningkatan impor gas ini lebih didorong oleh faktor volume dibandingkan dengan faktor harga. Volume impor gas meningkat 29% seiring dengan kenaikan konsumsi gas yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri.

Boks 4.2. Utang Luar Negeri Swasta

Pertumbuhan Utang Luar Negeri (ULN) swasta Indonesia pada 2013 mengalami penurunan. Meskipun secara posisi ULN sektor swasta tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2012, tren pertumbuhannya melambat. ULN sektor swasta tahun 2013 tumbuh 11,3% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang mencapai 18,3% (yoy).

Dari keseluruhan jumlah ULN swasta tahun 2013 yang mencapai 140,5 miliar dolar AS, ULN swasta non bank mencapai 82,8%, sedangkan ULN bank hanya mencapai 17,2%. Pada kelompok swasta nonbank, ULN Perusahaan Bukan Lembaga Keuangan (PBLK) non-Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendominasi dengan pangsa mencapai 62,5% dari total ULN sektor swasta. Dari sisi sektoral, sektor yang memiliki ULN terbesar adalah sektor keuangan, sektor manufaktur dan pertambangan. Sementara itu, dilihat dari jenis instrumen utang, proporsi *loan agreement* mencapai 66,8%, *debt securities* sebesar 18,2%, dan *fasilitas trade financing* sebesar 5,2% (Bagan 1). Ditinjau dari kreditornya, porsi ULN sektor swasta¹ yang berasal dari

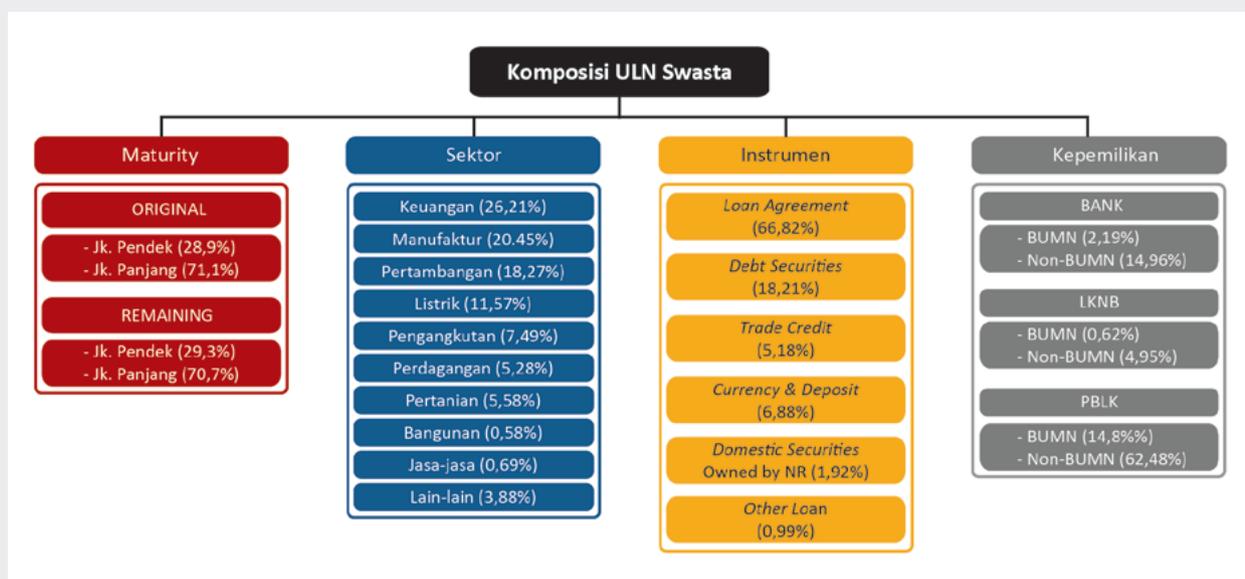
1 Di luar surat utang domestik, simpanan valas bukan penduduk, dan kewajiban lainnya kepada bukan penduduk



Grafik 1. Struktur Risiko ULN Swasta

kreditor terafiliasi baik sebagai induk maupun anak perusahaan sebanyak 34%, sisanya merupakan ULN dari kreditor nonafiliasi.

Risiko *currency mismatch* pada ULN sektor swasta relatif rendah karena sudah dilindungi nilai (*hedge*), baik secara formal maupun natural (*naturally hedge*). Hasil survei terhadap debitor besar ULN sektor swasta pada semester II 2013 menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak melakukan *hedging* trennya semakin menurun. Dari sekitar 64% perusahaan yang tidak melakukan *hedging* pada 2013, hanya sebesar



Bagan 1. Komposisi ULN Swasta 2013

25% yang memperoleh pendapatan dalam rupiah, sisanya memperoleh pendapatan dalam valuta asing (valas), baik dari hasil ekspor maupun penempatan valas lainnya. Dari perusahaan yang berpendapatan dalam rupiah tersebut, sekitar 18% memperoleh utang dari kreditor nonafiliasi sehingga perusahaan tersebut

dinilai paling rentan terhadap risiko pergerakan nilai tukar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum, perusahaan yang memiliki utang luar negeri, sebagian besar telah melakukan *naturally hedge* sehingga relatif terhindar dari risiko *currency mismatch* (Grafik 1).



Nilai Tukar

Rupiah pada 2013 berada dalam tren melemah akibat kinerja Neraca Pembayaran Indonesia yang menurun. Tekanan pelemahan rupiah terutama meningkat sejak Mei 2013 dipicu dari sisi eksternal oleh rencana pengurangan stimulus moneter di AS dan dari sisi domestik oleh ekspektasi inflasi yang meningkat, serta persepsi negatif investor terhadap defisit transaksi berjalan. Tekanan pelemahan rupiah mulai mereda pada triwulan IV 2013 ditopang respons bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk kebijakan nilai tukar, yang diarahkan untuk menurunkan tekanan inflasi dan defisit transaksi berjalan. Respons kebijakan pemerintah untuk mengendalikan defisit transaksi berjalan juga berkontribusi pada meredanya tekanan terhadap rupiah.

Nilai tukar rupiah pada tahun 2013 berada dalam tren melemah. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah tersebut tidak terlepas dari pengaruh ekonomi global yang melambat dan harga komoditas internasional yang menurun, yang kemudian mendorong melebarnya defisit transaksi berjalan Indonesia. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah semakin kuat sejak akhir Mei 2013 saat terjadinya aliran keluar modal asing dari pasar keuangan domestik. Peningkatan aliran keluar modal asing tersebut dipicu oleh ketidakpastian global akibat rencana pengurangan stimulus moneter di AS (*tapering off*), ekspektasi inflasi dan angka aktual inflasi yang sempat naik tinggi setelah kenaikan harga BBM bersubsidi akhir Juni 2013, serta persepsi negatif investor terhadap prospek defisit transaksi berjalan. Struktur pasar valuta asing domestik yang tipis turut berkontribusi terhadap besarnya laju depresiasi rupiah karena dalam situasi tersebut kenaikan permintaan valuta asing dalam jumlah kecil sudah cukup untuk mendorong pelemahan rupiah dalam jumlah besar.

Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh serangkaian bauran kebijakan untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan ekspektasi inflasi guna meredam tekanan depresiasi rupiah tersebut. Berbagai kebijakan tersebut pada triwulan IV 2013 telah mulai memberikan hasil yang diharapkan. Pada triwulan IV 2013, defisit transaksi berjalan menyusut tajam dan surplus transaksi modal kembali meningkat. Sejalan dengan perbaikan fundamental tersebut, laju depresiasi melambat dari 14,3% pada triwulan III 2013 menjadi 4,9% pada triwulan IV 2013 (Diagram 5.1). Perkembangan positif ini juga disertai menurunnya volatilitas pergerakan rupiah dari 17,6% menjadi 15,3%.¹ Selain itu, respons kebijakan yang diambil juga telah berhasil memperbaiki struktur mikro di pasar valuta asing seperti tercermin pada meningkatnya volume transaksi harian di pasar valuta asing dan menyempitnya *spread* antara kurs transaksi nasabah dan kurs transaksi antarbank.²

Dengan perkembangan tersebut, rupiah pada akhir 2013 ditutup di level Rp12.170 per dolar AS, melemah 20,8% dibandingkan dengan level penutupan tahun 2012 sebesar Rp9.638 per dolar AS. Rupiah secara rata-rata juga terdepresiasi 10,4%, dari Rp9.358 per dolar AS pada tahun 2012 menjadi Rp10.445 per dolar AS. Pelemahan rupiah diikuti meningkatnya volatilitas rupiah yang secara rata-rata harian tercatat sebesar 0,6%, meningkat dari 0,3%

1 Volatilitas dihitung dengan menggunakan rata-rata harian pada tahun terkait dihitung dari deviasi kurs harian terhadap rata-rata bergerak 10 hari. Apabila dihitung menggunakan *'annualized factor'* maka volatilitas nilai tukar naik dari 4,3% (2012) menjadi 9,7% di 2013.

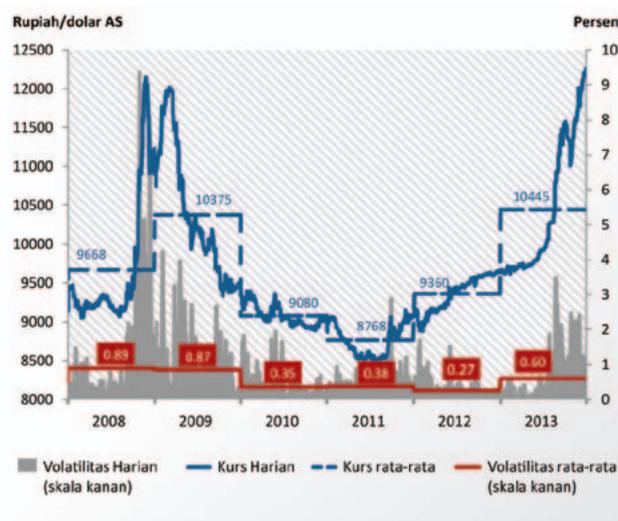
2 Kebijakan Nilai tukar secara detail dapat dibaca di Bab 10. Kebijakan Moneter

pada tahun sebelumnya (Grafik 5.1). Secara keseluruhan, pelemahan nilai tukar rupiah riil pada 2013 dapat mendorong daya saing ekspor dan mendukung upaya perbaikan kinerja sektor eksternal secara keseluruhan.

5.1. Dinamika Nilai Tukar

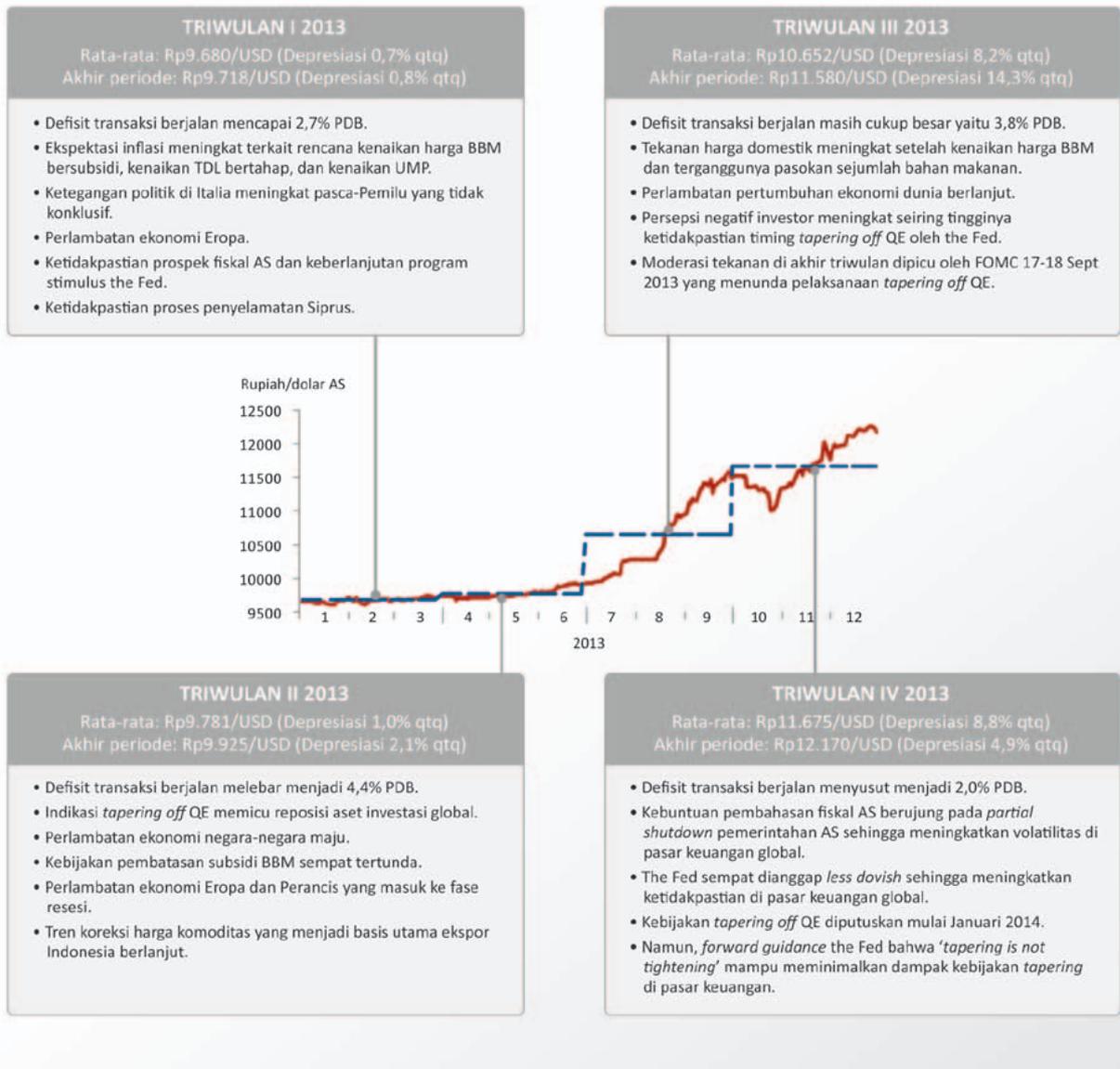
Pada 2013, tren pelemahan nilai tukar rupiah mulai terjadi sejak awal tahun, meskipun masih terbatas. Pada triwulan I 2013, rupiah ditutup pada level Rp9.718 per dolar AS, melemah 0,82% dibandingkan dengan level penutupan akhir triwulan IV 2012. Secara rata-rata, rupiah pada triwulan I 2013 juga melemah 0,70% menjadi Rp9.680 per dolar AS dibandingkan Rp9.613 per dolar AS pada triwulan IV 2012.

Pelemahan rupiah masih terbatas di triwulan I 2013 karena tekanan negatif pada sektor eksternal masih belum terlalu kuat. Defisit transaksi berjalan yang mencapai 2,7% dari PDB pada triwulan I 2013 dapat diimbangi oleh aliran masuk dana nonresiden ke pasar keuangan yang masih cukup besar (Diagram 5.1). Aliran masuk modal asing tersebut didorong oleh menariknya imbal hasil investasi di aset rupiah dibandingkan dengan negara-negara kawasan. Meskipun demikian, dalam triwulan tersebut sempat terjadi beberapa gangguan terhadap arus modal asing akibat terjadi peningkatan ketidakpastian global dan ekspektasi inflasi domestik. Beberapa ketidakpastian global tersebut antara lain berkaitan dengan kemungkinan pengetatan fiskal dan masalah penentuan *debt ceiling* AS, serta ketidakpastian prospek pemulihan ekonomi Eropa.



Grafik 5.1. Volatilitas Nilai Tukar Rupiah

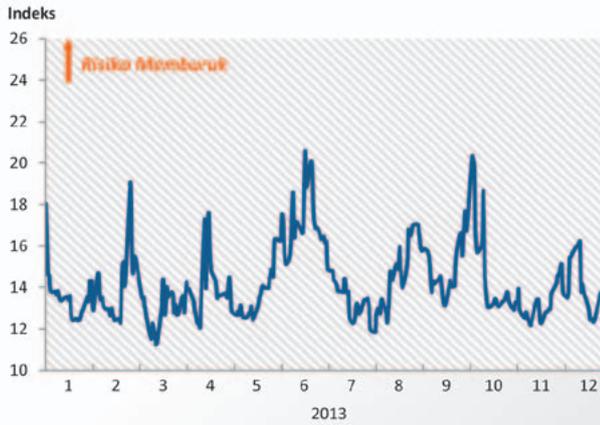
Diagram 5.1. Faktor-faktor Penggerak Nilai Tukar Rupiah Tahun 2013



Tekanan depresiasi rupiah terus meningkat sejak pertengahan triwulan II 2013. Perkembangan tersebut dipicu oleh peningkatan ketidakpastian global yang disebabkan oleh rencana pengurangan stimulus moneter oleh the Fed (*tapering off*) di tengah indikasi masih menurunnya aktivitas ekonomi dan harga komoditas dunia. Peningkatan ketidakpastian global tersebut tercermin pada VIX (*volatility index* dari S&P 500) yang meningkat tajam sejak Mei 2013 (Grafik 5.2). Ketidakpastian global kemudian mendorong meningkatnya aliran keluar modal asing di pasar keuangan negara berkembang, termasuk di Indonesia. Selain faktor global, aliran modal keluar dari Indonesia juga dipicu oleh meningkatnya ekspektasi inflasi sebagai antisipasi kenaikan harga BBM bersubsidi. Secara keseluruhan, aliran modal asing di pasar keuangan

Indonesia pada triwulan II 2013 secara neto mencatat defisit 2,6 miliar dolar AS (Grafik 5.3). Aliran modal keluar tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya tekanan depresiasi.

Tekanan depresiasi nilai tukar rupiah bertambah besar karena pada saat bersamaan defisit transaksi berjalan di triwulan II 2013 melebar menjadi 4,4% dari PDB. Kondisi ini secara fundamental meningkatkan permintaan terhadap valuta asing. Akibatnya, rupiah pada akhir triwulan II 2013 melemah 2,1% dibandingkan akhir Maret 2013, lebih tinggi dari pelemahan di triwulan I 2013 sebesar 0,8%. Pelemahan terbesar terjadi sejak 22 Mei 2013 yakni dari Rp9.766 menjadi Rp9.925 pada akhir Juni 2013, atau melemah 1,6%.



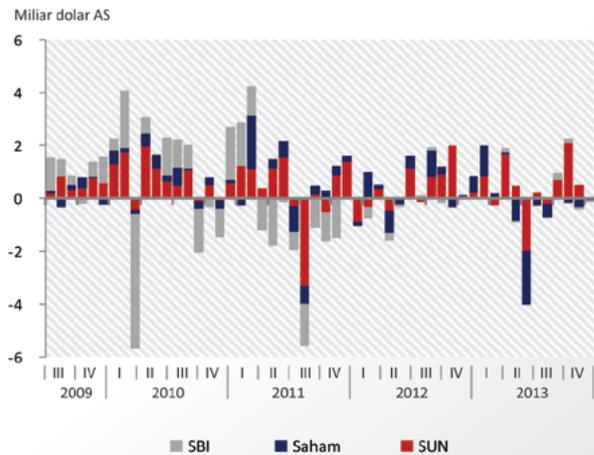
Sumber: Bloomberg

Grafik 5.2. Indeks Volatilitas S&P 500 (VIX)

Pada triwulan III 2013, tekanan pelemahan rupiah semakin membesar. Rupiah pada akhir triwulan III 2013 tercatat Rp11.580, melemah 14,3% dibandingkan dengan level akhir Juni 2013. Secara rata-rata rupiah juga tercatat melemah 8,2%, lebih tinggi dari pelemahan di triwulan II 2013. Pelemahan rupiah tersebut juga disertai oleh meningkatnya volatilitas pergerakan rupiah menjadi 17,7% dibandingkan 3,1% pada triwulan II 2013.

Peningkatan laju depresiasi rupiah tersebut tidak terlepas dari masih besarnya tekanan negatif pada neraca pembayaran, baik pada transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Meskipun menyusut dibandingkan triwulan sebelumnya, defisit transaksi berjalan triwulan III 2013 masih besar yaitu mencapai 3,9% dari PDB. Dalam periode yang sama, surplus transaksi modal dan finansial berkurang signifikan akibat aliran modal keluar di pasar keuangan yang masih cukup besar, terutama pada Juli – Agustus 2013 (Grafik 5.3). Aliran modal keluar tersebut dipicu memburuknya persepsi investor terhadap prospek defisit transaksi berjalan setelah publikasi defisit transaksi berjalan triwulan II-2013 di awal Agustus 2013 yang tercatat membesar menjadi 4,4% PDB, dan kenaikan ekspektasi inflasi sebagai dampak kenaikan harga BBM dan kenaikan harga pangan. Persepsi negatif investor tercermin pada berbagai indikator risiko seperti *Credit Default Swap* (CDS) dan selisih imbal hasil antara obligasi Pemerintah Indonesia dan UST-Note (*US Treasury Note*) yang meningkat (Grafik 5.4). Selain itu, aliran modal keluar di pasar keuangan domestik juga dipengaruhi makin menguatnya ekspektasi *tapering off* oleh the Fed.

Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan, termasuk kebijakan nilai tukar, guna merespons menurunnya



Grafik 5.3. Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan

kinerja sektor eksternal dan mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah. Pemerintah juga menempuh berbagai kebijakan guna menurunkan defisit transaksi berjalan yang selanjutnya dapat berkontribusi terhadap pemulihan stabilitas rupiah. Kebijakan nilai tukar yang ditempuh Bank Indonesia diarahkan untuk menjaga agar nilai tukar rupiah bergerak stabil sesuai dengan nilai fundamentalnya. Upaya menjaga stabilitas rupiah cukup penting mengingat peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah dapat menimbulkan lingkaran berulang yang semakin membesar antara ekspektasi inflasi dan depresiasi. Nilai tukar juga diarahkan untuk bergerak sesuai dengan nilai fundamentalnya sehingga dapat membantu mengurangi defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat.



Sumber: Bloomberg

Grafik 5.4. Indikator Risiko

Dalam kaitan ini, ruang gerak nilai tukar diperlebar sehingga dapat mempercepat upaya menurunkan defisit transaksi berjalan.

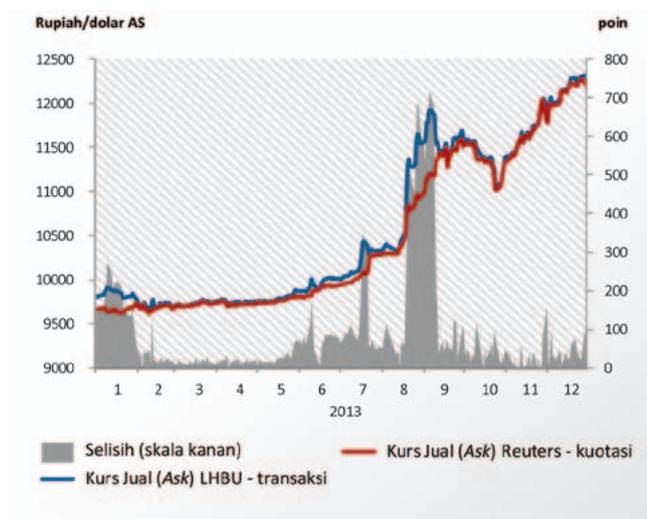
Dalam kerangka kebijakan nilai tukar rupiah tersebut maka Bank Indonesia menempuh strategi *dual intervention*, yaitu intervensi di pasar valas dan pasar surat berharga negara (SBN) yang dilakukan secara bersamaan. Kebijakan intervensi di pasar valas dilakukan secara terukur untuk meminimalkan volatilitas rupiah di tengah kondisi pasar valas yang masih belum dalam. Bersamaan dengan itu, intervensi di pasar SBN, diarahkan untuk menjaga likuiditas rupiah tetap mencukupi, setelah sebelumnya sempat berkurang akibat intervensi di pasar valas. Dengan demikian, melalui intervensi di pasar SBN diharapkan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga sehingga tidak memberikan tekanan tambahan kepada perekonomian.

Selain kebijakan nilai tukar tersebut, Bank Indonesia juga memperkuat pengelolaan arus modal guna menjaga ketahanan sektor eksternal. Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah untuk mengelola permintaan valas perusahaan BUMN. Bank Indonesia juga menerbitkan peraturan mengenai transaksi lindung nilai kepada bank. Pada peraturan ini, keuntungan yang timbul dari transaksi lindung nilai yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai dianggap sebagai pendapatan dalam rangka lindung nilai. Sebaliknya, jika terjadi kerugian maka dianggap sebagai biaya atau premi dari transaksi lindung nilai. Pengelolaan valas juga dilakukan melalui pengaturan utang luar negeri perbankan yang merelaksasi ketentuan ULN jangka pendek bank dengan menambah jenis pengecualian. Sementara itu, perluasan cakupan *swap* lindung nilai, penambahan variasi tenor *term deposit*

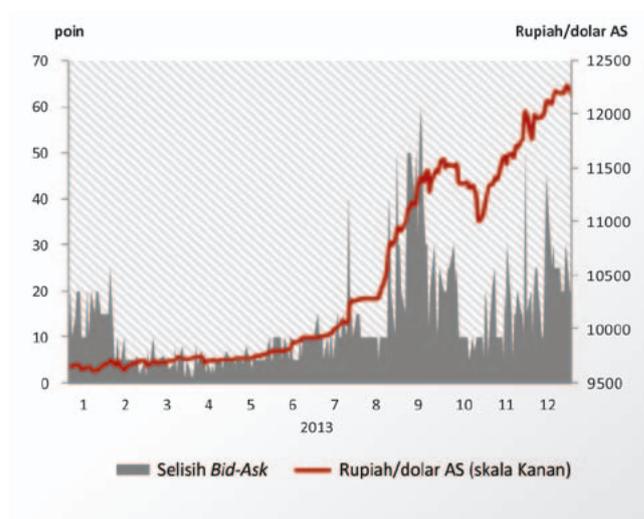
(TD) valas, dan penggunaan JISDOR ditempuh Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar sehingga mendukung efisiensi pembentukan harga di pasar valas dan stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam konteks pengelolaan devisa ini, kebijakan penguatan operasi moneter terkait pengurangan *Minimum Holding Period* (MHP) SBI dari 6 bulan menjadi 1 bulan.

Bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan pemerintah berhasil meredakan tekanan terhadap rupiah pada triwulan IV 2013. Depresiasi rupiah pada triwulan akhir 2013 tercatat 4,9%, lebih rendah daripada depresiasi pada triwulan III 2013 sebesar 14,3%. Perkembangan positif ini juga disertai menurunnya volatilitas pergerakan rupiah menjadi 15,3% dibandingkan 17,7% pada triwulan III 2013. Tekanan terhadap rupiah yang berkurang juga tercermin pada perbaikan struktur mikro pasar valuta asing domestik. Perbaikan tersebut berupa menyempitnya selisih antara kurs transaksi dan kurs kuotasi ke level di bawah 100 poin, dari titik tertingginya mendekati 900 poin pada akhir Agustus 2013 (Grafik 5.5). Perkembangan ini sekaligus mengindikasikan proses pembentukan harga di pasar yang membaik. Sejalan dengan perbaikan tersebut, selisih *bid-ask* di pasar *spot* juga relatif menyempit, meskipun kembali sedikit meningkat pada bulan Desember 2013 akibat kembali menguatnya spekulasi dipercepatnya *tapering off* menyusul keputusan the Fed pada FOMC Desember 2013 (Grafik 5.6).

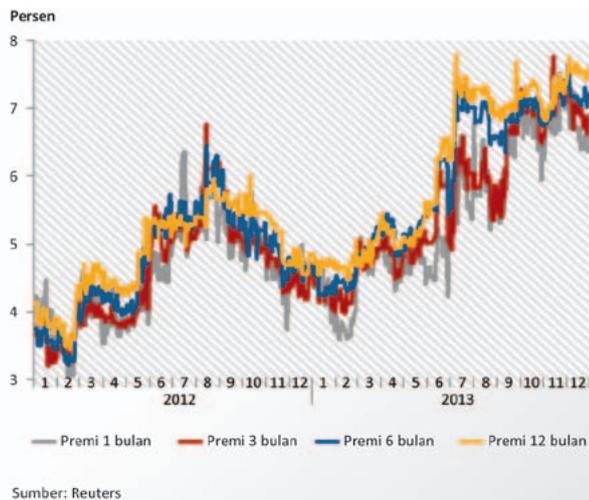
Tekanan depresiasi rupiah mereda pada triwulan IV 2013 karena membaiknya kondisi fundamental ekonomi sejalan dengan respons yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Pada triwulan IV 2013, defisit transaksi



Grafik 5.5. Selisih Kurs Transaksi dan Kuotasi



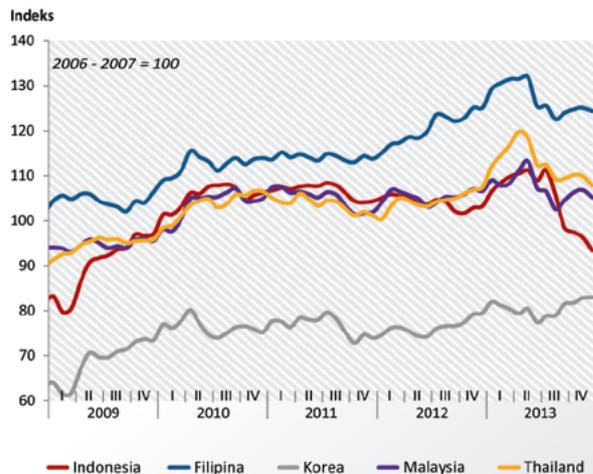
Grafik 5.6. Selisih Bid-Ask Rupiah



Grifik 5.7. Premi Swap

berjalan menurun tajam menjadi 2,0% dari PDB sejalan dengan melambatnya permintaan domestik (impor turun) dan membaiknya permintaan eksternal (ekspor naik) sehingga berkontribusi pada menurunnya permintaan valas. Pada triwulan yang sama, surplus transaksi modal dan finansial kembali meningkat dipengaruhi meningkatnya aliran modal asing di instrumen keuangan domestik seperti Surat Utang Negara pada Oktober 2013. Peningkatan arus modal masuk tersebut dipicu oleh membaiknya persepsi investor sejalan dengan defisit transaksi berjalan yang menurun serta tekanan inflasi yang berkurang. Perbaikan persepsi investor asing tersebut tercermin antara lain pada menurunnya CDS ke level 185 di Oktober 2013 dan menurunnya premi *swap* di semua tenor (Grifik 5.7). Peningkatan aliran modal masuk juga dipengaruhi perbaikan kondisi global seperti penundaan kebijakan *tapering off* oleh the Fed dan indikasi membaiknya ekonomi global di triwulan IV 2013.

Dengan berbagai dinamika tersebut, rupiah pada 2013 ditutup di level Rp12.170 per dolar AS, melemah 20,8% dibandingkan dengan level penutupan tahun 2012 yaitu Rp9.638 per dolar AS. Rupiah secara rata-rata juga terdepresiasi 10,4% menjadi Rp10.445 per dolar AS dari Rp9.358 per dolar AS pada tahun 2012. Pelemahan rupiah diikuti meningkatnya volatilitas rupiah yang secara rata-rata harian tercatat sebesar 0,6%, dibandingkan dari 0,3% pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan pelemahan rupiah secara nominal tersebut, secara riil nilai tukar rupiah pada tahun 2013 juga melemah signifikan sehingga telah membantu memperkuat daya saing ekspor dan mendukung perbaikan kinerja sektor eksternal secara keseluruhan. Nilai tukar rupiah secara riil (*Real Effective Exchange Rate* – REER, tahun dasar 2006) pada akhir



Grifik 5.8. Nilai Tukar Riil Efektif

2013 tercatat 93,41, melemah sekitar 16% dibandingkan Mei 2013 sebesar 111,21 (Grifik 5.8).

5.2. Struktur Pasar Valas Domestik

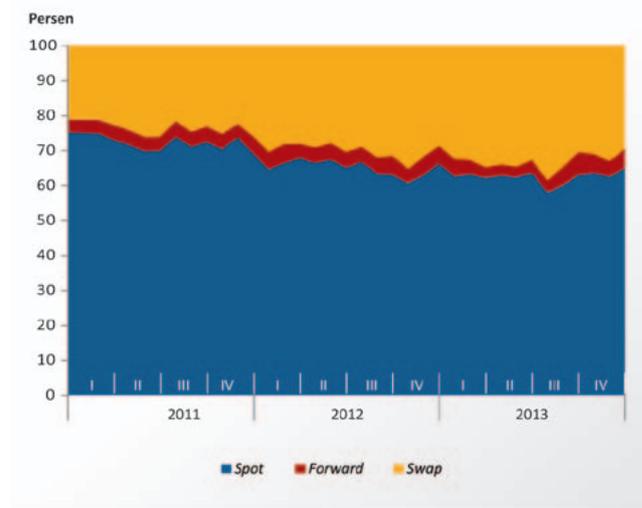
Sejalan dengan kinerja NPI 2013 yang menurun, pasar valuta asing mencatat defisit akibat kuatnya permintaan. Pada tahun 2013, pasar valuta asing domestik mengalami kenaikan permintaan sehingga secara neto mencatat defisit sebesar 34,9 miliar dolar AS. Permintaan valuta asing terutama berasal dari pelaku dalam negeri sebesar 33,96 miliar dolar AS sejalan dengan tingginya kebutuhan valuta asing untuk impor dan pembayaran utang luar negeri. Sementara itu, pelaku nonresiden membukukan neto permintaan valuta asing yang lebih kecil yaitu sebesar 949 juta dolar AS, setelah pada tahun sebelumnya menjadi pemasok valuta asing. Kondisi ini menunjukkan volume pasokan valuta asing masih belum memadai dalam memenuhi permintaan yang meningkat. Sejak penerapan kewajiban penerimaan devisa hasil ekspor (DHE) melalui perbankan domestik pada awal 2012, porsi DHE ke perbankan domestik terhadap transaksi ekspor terus meningkat sehingga pada tahun 2013 tercatat sekitar 84%, meningkat dari 80% pada 2011. Namun, besarnya porsi DHE melalui bank domestik tersebut tidak serta merta menambah pasokan valuta asing ke pasar domestik karena tidak seluruh DHE tersebut dikonversikan ke mata uang rupiah.

Tekanan depresiasi terhadap rupiah juga menurunkan volume transaksi valuta asing, terutama sejak Mei 2013. Setelah sebelumnya sempat meningkat, volume rata-rata



Grafik 5.9. Volume Harian Transaksi Valuta Asing

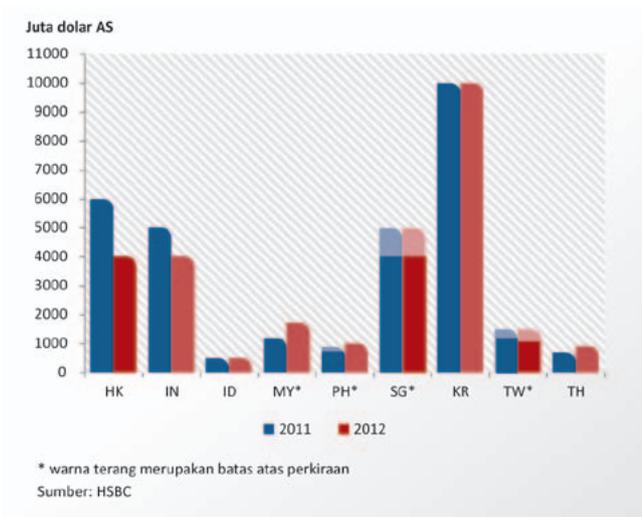
harian transaksi valuta asing di triwulan III 2013 tercatat di kisaran 1,9 miliar dolar AS per hari, turun tajam dari volume transaksi valuta asing di triwulan sebelumnya yang mencapai 2,6 miliar dolar AS per hari (Grafik 5.9). Perkembangan volume transaksi harian tersebut secara umum juga menggambarkan struktur pasar valuta asing di Indonesia yang belum dalam. Kondisi pasar valuta asing yang dangkal tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah mudah bergejolak saat ada sedikit kenaikan permintaan valuta asing, seperti yang terjadi pada 2013. Data historis menunjukkan pasar valuta asing domestik masih belum sebesar pasar valuta asing di negara-negara kawasan. Volume transaksi valuta asing antarbank di pasar domestik pada tahun 2012 sekitar 500 juta dolar AS, jauh lebih rendah bahkan dibandingkan dengan negara ASEAN



Grafik 5.11. Pangsa Transaksi Valuta

lain seperti Malaysia, Filipina dan Thailand (Grafik 5.10). Volume transaksi yang masih terbatas tersebut juga lebih didominasi oleh transaksi di pasar *spot* (Grafik 5.11).

Dalam perkembangannya, struktur pasar valas cenderung membaik pada triwulan IV 2013. Berbagai respons kebijakan yang ditempuh, khususnya yang terkait dengan penggunaan JISDOR dan penggunaan *term deposit* valas dan lelang *swap* valas, telah berhasil memperbaiki kinerja pasar valas seperti tercermin pada volume pasar valas yang kembali meningkat. Sementara itu, transaksi valas menggunakan transaksi *forward* juga meningkat. Selisih antara kurs transaksi dan kuotasi juga menyempit ke level di bawah 100 poin dan diikuti selisih *bid-ask* di pasar *spot* yang mengecil.



Grafik 5.10. Rata-rata Harian Volume Pasar Spot Interbank Asing



Inflasi

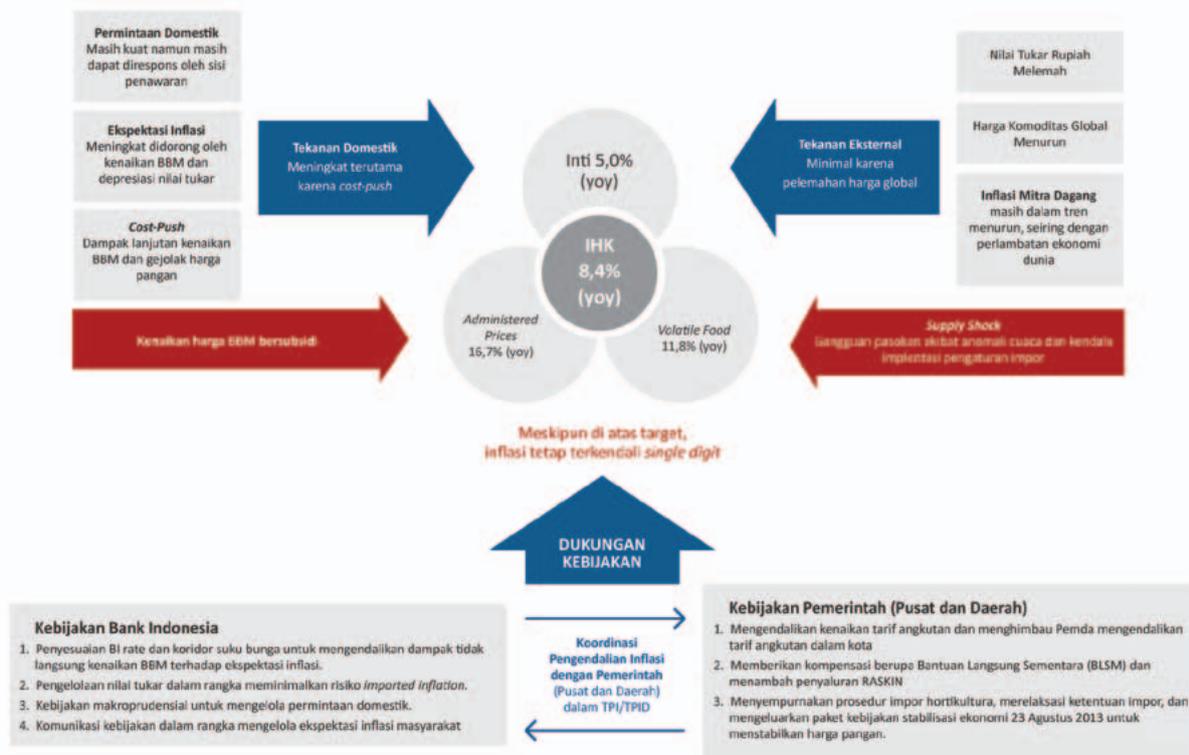
Tekanan inflasi 2013 meningkat cukup tinggi dipicu kenaikan harga pangan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta beberapa permasalahan struktural yang masih mengemuka. Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan guna memastikan inflasi dapat segera kembali ke lintasan sasaran $4,5\pm 1\%$ dan $4,0\pm 1\%$ pada 2014 dan 2015, serta meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah. Respons kebijakan tersebut dapat segera mengendalikan inflasi ke pola normal sejak September 2013 dan mendorong inflasi keseluruhan tahun 2013 tidak melebihi angka dua digit seperti yang terjadi pada periode-periode saat terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi di 2005 dan 2008.

Tekanan inflasi meningkat cukup kuat pada tahun 2013 dipicu kenaikan harga pangan dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi (Bagan 6.1). Pada triwulan I 2013, tekanan inflasi banyak dipengaruhi kenaikan harga pangan akibat kebijakan pembatasan impor produk hortikultura dan anomali cuaca. Tekanan inflasi semakin kuat sejak Juni 2013 saat Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, sebagai upaya menjaga ketahanan fiskal. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut juga memberikan dampak lanjutan (*second round effect*) kepada harga kelompok barang-barang lain seperti tarif transportasi. Pada saat bersamaan, inflasi *volatile food* pada bulan Juni-Agustus 2013 juga meningkat akibat dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi dan gangguan produksi dalam negeri akibat masa panen yang mundur. Kenaikan harga di kedua kelompok tersebut pada gilirannya memberikan dampak lanjutan kepada inflasi inti yang kemudian secara keseluruhan mendorong inflasi pada Agustus 2013 naik menjadi 8,8% (yoy).

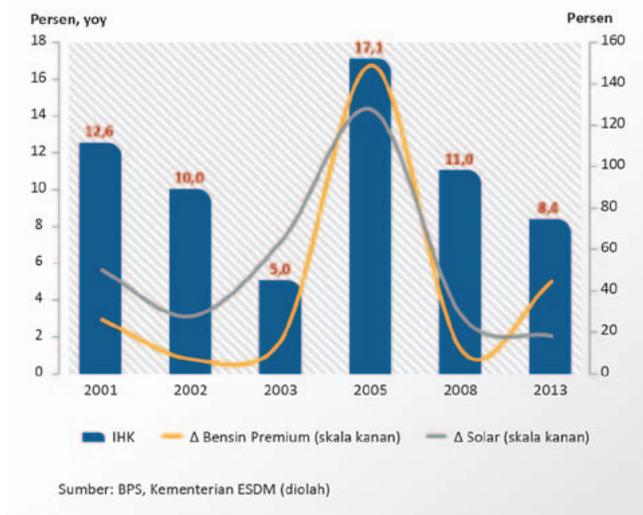
Perkembangan inflasi 2013 tersebut juga mengangkat beberapa permasalahan struktural yang kemudian turut berkontribusi pada meningkatnya tekanan inflasi. Tekanan inflasi *volatile food* tidak terlepas dari pengaruh ketahanan pangan yang belum cukup kuat sehingga perkembangan harga pangan domestik menjadi rentan terhadap harga global dan pasokan dari impor. Selain itu, masalah distribusi akibat infrastruktur yang belum

memadai juga menambah tekanan harga, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. Tekanan harga dari dampak kenaikan BBM yang tinggi juga mengangkat permasalahan tentang ketahanan dan pengelolaan energi domestik. Hal ini terkait dengan produksi dalam negeri yang terus menurun, di tengah permintaan energi yang terus meningkat didorong harga yang relatif rendah akibat besarnya subsidi BBM. Pengaruh ketahanan pangan dan energi tersebut terhadap inflasi semakin mengemuka karena pada sisi lain terdapat permasalahan lain terkait struktur pasar beberapa barang yang masih cenderung oligopolistik baik dari sisi produksi maupun distribusi. Hal ini pada gilirannya memperlebar disparitas antara harga di tingkat produsen dan konsumen, seperti yang terjadi pada komoditas bawang merah dan cabai merah. Selain itu, pelaku pasar yang masih memberikan bobot yang besar pada perkembangan harga sebelumnya (*backward looking*) dibandingkan proyeksi harga ke depan (*forward looking*) juga memberikan tantangan bagi pengendalian inflasi di Indonesia.

Bank Indonesia dan Pemerintah menempuh berbagai kebijakan guna mengendalikan kenaikan inflasi tersebut. Respons kebijakan segera dan antisipatif ditempuh agar kenaikan harga pangan dan harga BBM bersubsidi tidak memicu kenaikan ekspektasi inflasi secara berlebihan dan berisiko memberikan dampak lanjutan secara permanen kepada inflasi kelompok barang lain. Dalam



Bagan 6.1. Inflasi 2013 dan Faktor-faktor yang Memengaruhi



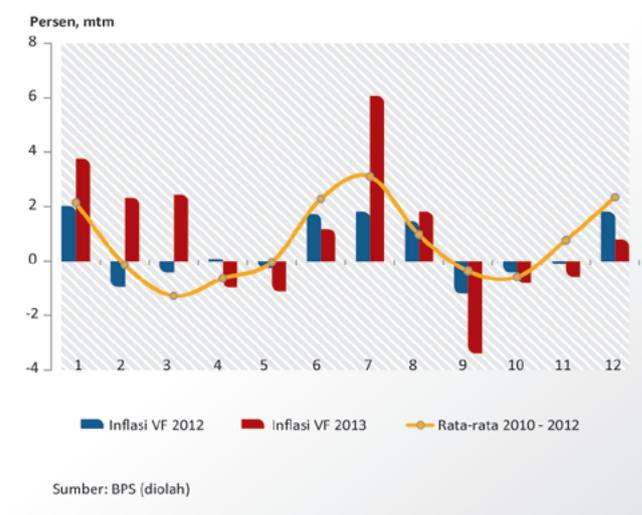
Grafik 6.1. Inflasi Pada Periode Kenaikan Harga BBM

kaitan ini, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan guna memastikan inflasi dapat segera kembali kepada lintasan sasaran $4,5 \pm 1\%$ pada 2014 dan $4,0 \pm 1\%$ pada 2015. Kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia juga diarahkan untuk menyeimbangkan perekonomian sehingga dapat menekan defisit transaksi berjalan menuju level yang lebih sehat dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Respons kebijakan Bank Indonesia juga diperkuat koordinasi kebijakan pengendalian inflasi dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah berpengaruh positif kepada inflasi yang mulai September 2013 menurun kembali kepada pola historis. Kondisi ini dipengaruhi tekanan harga pangan yang menurun dan bahkan mencatat deflasi. Dampak lanjutan kenaikan harga BBM juga mulai mereda dipengaruhi ekspektasi inflasi yang mereda. Selain itu, pengaruh depresiasi rupiah terhadap inflasi (*exchange rate pass-through*) juga minimal sehingga tekanan terhadap inflasi inti tetap terkendali. Berbagai perkembangan positif tersebut mendorong inflasi bulanan kembali kepada pola normal mulai September 2013, bahkan berada di bawah perilaku historis.

Tekanan inflasi yang mereda mulai September 2013 mendorong inflasi keseluruhan tahun 2013 tidak melebihi angka *dua digit* seperti terjadi pada periode-periode kenaikan harga BBM bersubsidi di 2005 dan 2008 (Grafik 6.1).¹ Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2013

1 Sebelum tahun 2013, hanya di tahun 2003 inflasi IHK di periode kenaikan BBM bersubsidi tidak mencapai dua digit. Hal ini terutama didorong oleh deflasi volatile food yang sangat dalam.



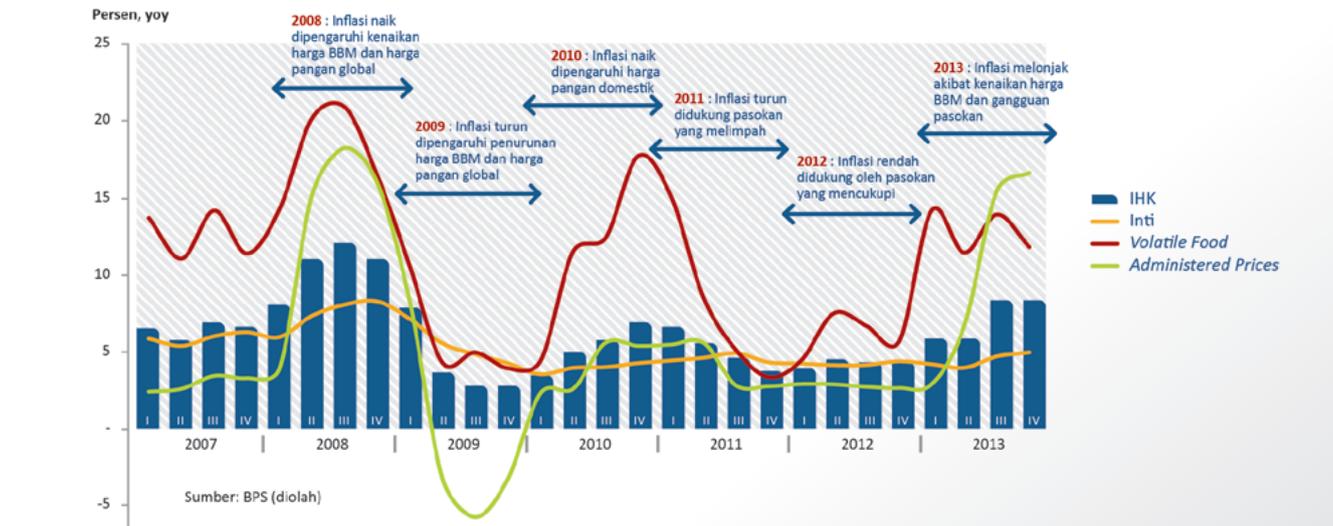
Grafik 6.2. Pola Historis Inflasi Volatile Food

tercatat mencapai 8,4%, lebih tinggi dari inflasi tahun 2012 yang sebesar 4,3%, dan berada di atas kisaran sasaran yang ditetapkan sebesar $4,5 \pm 1\%$ (Grafik 6.2). Berdasarkan komponennya, kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh tingginya inflasi *administered prices* dan inflasi *volatile food* yang masing-masing mencapai 16,7% dan 11,8%. Sementara itu, inflasi inti masih cukup terkendali yakni sebesar 5,0%, meskipun sedikit meningkat bila dibandingkan inflasi inti tahun sebelumnya yang sebesar 4,4%.

6.1. Inflasi Volatile Food

Tekanan inflasi *volatile food* yang tinggi di 2013, hingga mencapai 11,8%, terutama terjadi pada triwulan I 2013 dan bulan Juni - Agustus 2013 (Grafik 6.3). Pada triwulan I 2013, kenaikan inflasi *volatile food* dipengaruhi kenaikan harga aneka bumbu serta aneka sayur dan buah akibat berkurangnya pasokan karena gangguan cuaca, produksi dalam negeri yang minimal, dan kebijakan pengaturan impor hortikultura.² Kenaikan inflasi *volatile food* pada triwulan I 2013 juga didorong oleh berlanjutnya kenaikan harga daging sapi akibat permasalahan terbatasnya kuota impor di tengah kondisi produksi domestik yang juga belum memadai. Pada bulan Juni-Agustus 2013, tekanan kembali meningkat dipengaruhi oleh dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun, perkembangan inflasi *volatile food* kembali menurun pada akhir tahun sejalan dengan

2 Pengaturan impor berdasarkan Permendag No.60/M-Dag/PER/9/2012 dan Permentan No. 60/OT.140/9/2012



Grafik 6.3. Perkembangan Inflasi

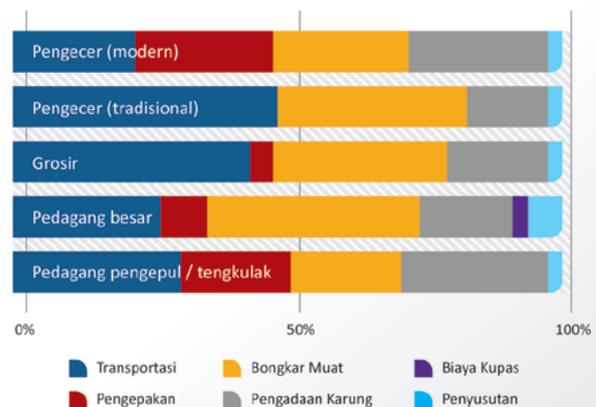
dampak positif dari berbagai respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah.

Tekanan inflasi pada kelompok *volatile food* 2013 secara umum masih dipengaruhi beberapa permasalahan struktural. Pertama, kenaikan inflasi *volatile food* dipengaruhi terbatasnya pasokan domestik dalam memenuhi permintaan. Keterbatasan pasokan domestik kemudian dipenuhi oleh impor seperti yang terjadi pada komoditas bawang merah dan bawang putih (Tabel 6.1). Dalam kondisi ini, kendala implementasi kebijakan pengaturan tata niaga impor seperti pada komoditas hortikultura dan daging sapi akan mendorong kenaikan harga domestik. Faktor kedua terkait dengan belum optimalnya dukungan infrastruktur yang kemudian meningkatkan biaya distribusi seperti ongkos transportasi dan ongkos bongkar muat sebagaimana terjadi pada komoditas cabai merah³(Grafik 6.4). Faktor ketiga terkait pembentukan harga yang belum transparan antara lain akibat struktur pasar yang cenderung oligopolistik. Identifikasi oleh Bank Indonesia menunjukkan bahwa faktor ketiga ini memperlebar disparitas antara harga di tingkat produsen dan konsumen, seperti yang terjadi pada komoditas bawang merah dan cabai merah.

Untuk mengatasi permasalahan struktural tersebut, kebijakan Pemerintah dalam bidang pangan diarahkan

untuk mendorong terciptanya kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri serta menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan produksi pangan strategis lokal melalui target pembangunan pertanian sejak tahun 2009 dengan pencapaian program swasembada dan swasembada berkelanjutan pada tahun 2014.

Berdasarkan komoditas, tekanan inflasi terutama bersumber dari kenaikan harga pada bawang merah, cabai merah, daging sapi, beras, jeruk dan daging ayam (Tabel 6.2). Harga bawang merah dan cabai merah masing-masing meningkat sebesar 90,0% dan 113,4%, dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,4% dan 0,3% terhadap inflasi 2013. Tingginya inflasi kedua komoditas ini disebabkan



Sumber: Tumpak, et.al¹² (2011)

3 Studi Tumpak et.al (2011) dan Ridhwan et.al (2012) menunjukkan besarnya porsi ongkos transportasi dan bongkar muat dalam biaya distribusi cabai merah. Analisis lengkap lihat Silalahi, Tumpak, et.al. (2011). "Pemetaan Struktur Pasar dan Pola Distribusi Komoditas Strategis Penyumbang Inflasi". Kertas Kerja. Bank Indonesia; Ridhwan, M.M., et.al. (2012). "Perdagangan Antar Daerah, Distribusi, Transportasi, dan Pengelolaan Stok Komoditas Pangan Strategis di Indonesia". Kertas Kerja. Bank Indonesia.

Grafik 6.4. Porsi Komponen Biaya Distribusi Cabai Merah

Tabel 6.1. Porsi Impor Komoditas Hortikultura

Komoditi	Persen				
	2000	2005	2009	2010	2011
Bawang Merah	6,9	6,8	6,3	6,3	15,1
Bawang Putih	74,7	93,2	96,4	97,6	96,6
Cabai	0,1	0,0	0,1	0,1	0,4
Kentang	0,2	0,5	2,2	2,2	7,6
Kubis	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Wortel	0,1	1,6	7,7	7,7	7,4
Nenas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Melon		0,3	0,4	0,4	0,3
Pisang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pepaya		0,0	0,1	0,1	0,0
Mangga	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

Sumber: Kementan, BPS (diolah)

oleh penerapan kebijakan pembatasan impor hortikultura di tengah minimnya produksi domestik akibat gangguan cuaca pada semester satu. Namun, kenaikan harga bawang merah dan cabai merah dapat tertahan, bahkan sejak bulan September harga komoditas tersebut mengalami koreksi seiring dengan mundurnya jadwal panen akibat anomali cuaca. Penurunan harga bawang merah dan cabai merah tersebut dipengaruhi respons Pemerintah yang merelaksasi pembatasan impor hortikultura. Hal ini sejalan dengan rekomendasi TPI berupa perlunya relaksasi pengaturan dan percepatan realisasi impor mengingat pasokan dalam negeri yang terbatas. Dampak relaksasi kebijakan pengaturan impor hortikultura juga terlihat pada harga komoditas bawang putih yang terus mencatat deflasi mulai April hingga Desember 2013 (Tabel 6.2)⁴.

Tekanan kenaikan harga daging sapi yang terjadi pada tahun 2012 masih berlanjut hingga tahun 2013. Harga daging sapi meningkat sebesar 11,1%, dengan kontribusi terhadap inflasi sebesar 0,1%. Kenaikan harga daging sapi mulai triwulan III 2013 kembali mereda dipengaruhi oleh beberapa kebijakan pemerintah. Untuk menstabilkan harga daging sapi, Pemerintah telah melakukan beberapa langkah kebijakan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait pembebasan kuota impor untuk jenis daging tertentu, percepatan realisasi impor, dan keikutsertaan Badan Usaha Logistik (Bulog) dalam upaya menstabilkan harga.⁵

4 Perbaikan kebijakan importasi hortikultura tertuang dalam Permendag No. 16/2013 (Revisi Permendag No. 60/2012) dan Permentan No. 47/2013 (Revisi Permentan No. 60/2012).

5 Penguatan peran Bulog terletak pada distribusi daging sapi dan kedelai impor.

Tabel 6.2. Penyumbang Utama Inflasi *Volatile Food*

Komoditas	2013	
	%yoy	Kontribusi (%yoy)
Inflasi		
Bawang Merah	90,0	0,4
Cabai Merah	113,4	0,3
Beras	3,4	0,2
Jeruk	18,2	0,1
Daging Ayam Ras	7,9	0,1
Daging Sapi	11,1	0,1
Deflasi		
Bawang Putih	-22,2	-0,1
Wortel	-4,9	-0,0

Sumber: BPS

Dalam perjalanannya, Pemerintah terus menyempurnakan peraturan-peraturan tersebut antara lain dengan mengubah tata niaga impor daging sapi dan produk hortikultura dari berbasis kuota menjadi berbasis harga referensi pada Agustus 2013 (lihat Boks 6.1. Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan dalam rangka Pengendalian Inflasi).

Di tengah kenaikan harga berbagai komoditas pangan tersebut, harga beras cukup terkendali. Sepanjang tahun 2013, kenaikan harga beras tercatat sebesar 3,4% sehingga berada di bawah rata-rata historisnya dalam lima tahun terakhir yang sebesar 11,4%. Dalam beberapa bulan terakhir di 2013, kenaikan harga beras tercatat lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga di tahun sebelumnya. Hal ini didukung oleh produksi dalam negeri yang mampu memenuhi kebutuhan domestik, antara lain tercermin dari kemampuan Bulog dalam melakukan penyerapan beras domestik dengan cukup baik yang mencapai 3,5 juta ton atau hampir 99,8% dari target 2013. Kemampuan Bulog dalam melakukan pembelian beras domestik juga diimbangi kelancaran dalam penyalurannya seperti tercermin dari penyaluran beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) yang hampir mencapai 100% dari target 2013 dan operasi pasar beras yang mencapai 107 ribu ton.

6.2. Inflasi *Administered Prices*

Inflasi *administered prices* pada 2013 meningkat tinggi sebesar 16,7%, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM bersubsidi yang naik sebesar Rp2.000/liter untuk bensin premium dan Rp1.000/liter untuk solar pada

tanggal 22 Juni 2013⁶. Kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut meningkatkan inflasi *administered prices* pada bulan Juni dan Juli 2013, dan secara keseluruhan menyumbang kenaikan inflasi IHK tahun 2013 sebesar 1,2% (Grafik 6.5 dan Tabel 6.3). Kebijakan pemerintah tersebut diambil sebagai upaya menjaga ketahanan fiskal di tengah risiko ekonomi yang dapat memperlebar defisit APBN 2013.

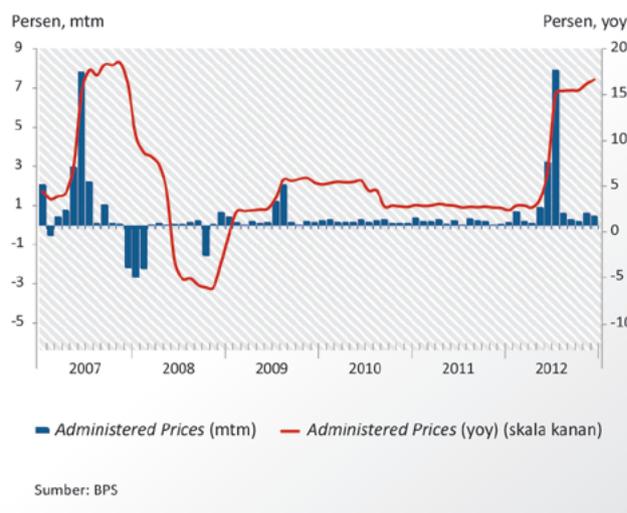
Secara umum dampak tidak langsung kenaikan tinggi harga BBM bersubsidi pada tahun 2013 kepada harga barang lain cukup terkendali. Hal ini antara lain terlihat pada dampak tidak langsung (*second round effect*) terhadap tarif angkutan serta inflasi inti dan inflasi *volatile food* yang moderat. Data BPS menunjukkan tarif angkutan dalam negeri secara rata-rata meningkat 31,5% sehingga menyumbang kenaikan inflasi IHK tahun 2013 sebesar 0,8% (Tabel 6.3). Selanjutnya, estimasi Bank Indonesia menunjukkan dampak kenaikan BBM bersubsidi terhadap inflasi inti dan inflasi *volatile food* menyumbang kenaikan inflasi sebesar 0,6%.⁷ Dengan perkembangan ini, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi pada tahun 2013 kepada inflasi tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada tahun-tahun sebelumnya saat terjadi kenaikan harga BBM yaitu pada Maret 2005, Oktober 2005 dan Mei 2008.

Dampak lanjutan kenaikan harga BBM terhadap harga barang lain yang terkendali tersebut tidak terlepas dari langkah – langkah koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi baik di pusat maupun daerah. Langkah koordinasi tersebut berkontribusi pada terkendalinya kenaikan tarif angkutan antarkota antarprovinsi. Hal itu dilakukan dengan mengimbau Pemda untuk mengendalikan tarif angkutan dalam kota dan meningkatkan pengawasan terhadap upaya penyelundupan serta penimbunan BBM⁸. Selain itu, bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia juga dapat mengendalikan ekspektasi inflasi yang meningkat.

6 Analisis kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dan pengaruhnya terhadap Operasi Keuangan Pemerintah dapat dilihat pada Bab 7 Fiskal.

7 Hal ini didukung oleh elastisitas inflasi inti dan inflasi *volatile food* terhadap 10% kenaikan harga BBM bersubsidi yang lebih rendah dibandingkan periode kenaikan harga BBM di tahun – tahun sebelumnya.

8 Dalam upaya meredam dampak lanjutan kenaikan harga BBM tersebut terhadap inflasi, TPI dan Pokjnas TPID merekomendasikan batas toleransi kenaikan tarif angkutan darat antar kota dan penetapan kenaikan tarif angkutan dalam kota dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dampaknya terhadap inflasi.



Grafik 6.5. Perkembangan Inflasi *Administered Prices*

Selain kenaikan harga BBM bersubsidi, sumber tekanan inflasi juga berasal dari kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL), kenaikan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT), dan kenaikan tarif cukai rokok. Kenaikan TTL yang dilakukan bertahap per triwulan menyumbang inflasi sebesar 0,4% (Tabel 6.3).⁹ Sementara kenaikan BBRT dipicu oleh kelangkaan pasokan dan penyesuaian biaya distribusi yang menyumbang inflasi sebesar 0,2%. Kenaikan tarif cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan besaran rata-rata 8,5% dan kemudian mendorong kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) rokok dan menyumbang inflasi sebesar 0,2%.¹⁰ Sementara, kebijakan *administered prices* lainnya berdampak minimal. Kebijakan tersebut antara lain penyesuaian harga tarif tol, tarif kereta api, dan tarif air minum Perusahaan Air Minum (PAM) di beberapa daerah.

6.3. Inflasi Inti

Di tengah kenaikan tinggi inflasi *volatile food* dan inflasi *administered prices*, kenaikan inflasi inti tahun 2013 cukup terkendali. Inflasi inti pada tahun laporan tercatat 5,0%, sedikit meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 4,4%. Meskipun meningkat, inflasi inti tahun 2013

9 Kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) ditetapkan per 1 Januari 2013 dengan besaran rata – rata sekitar 4% (per triwulan). Kenaikan TTL berlaku untuk pelanggan golongan rumah tangga dan industri di atas 1.300 VA.

10 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau pada 12 November 2012, dengan ketentuan tarif cukainya mulai berlaku pada 25 Desember 2012.

Tabel 6.3. Penyumbang Utama Inflasi Administered Prices

Komoditas	2013	
	%,yoy	Kontribusi (% ,yoy)
Inflasi		
Bensin	41,9	1,2
Angkutan Dalam Kota	31,5	0,8
Tarif Listrik	15,9	0,4
Rokok Kretek Filter	8,7	0,2
Bahan Bakar Rumah Tangga	6,7	0,2

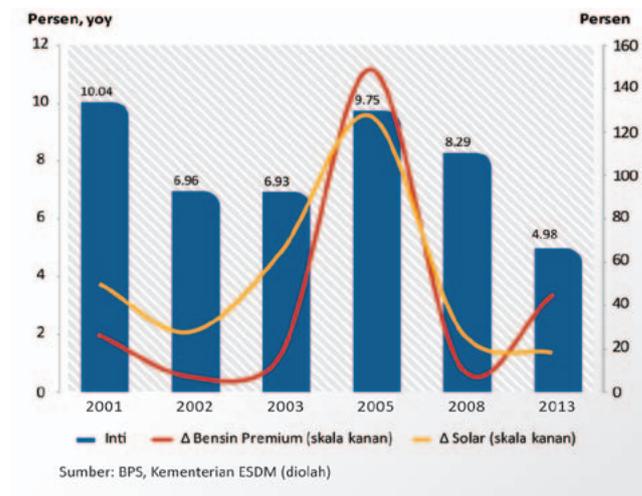
Sumber: BPS

tercatat lebih rendah dibandingkan dengan inflasi inti pada periode kenaikan harga BBM bersubsidi tahun 2005 dan 2008, yang meningkat tajam hingga di atas 8% (Grafik 6.6).

Kenaikan inflasi inti tahun 2013 dipengaruhi dampak lanjutan kenaikan harga pangan dan kebijakan harga BBM bersubsidi, yang memberikan tekanan langsung kepada biaya produksi (*cost push inflation*) pada barang-barang kelompok inflasi inti. Pengaruh *cost push inflation* pada inflasi inti terutama terjadi pada inflasi inti kelompok makanan yang meningkat dari 5,5% pada tahun 2012 menjadi 7,9% pada tahun 2013 (Grafik 6.7). Sementara itu, kenaikan inflasi inti kelompok nonpangan seperti kelompok inti perumahan meningkat secara terbatas.

Di luar pengaruh *cost push* tersebut, tekanan dari faktor-faktor lain yang memengaruhi inflasi inti secara umum masih terkendali. Tekanan inflasi dari permintaan domestik terlihat moderat dipengaruhi pertumbuhan ekonomi yang melambat dari 6,2% pada 2012 menjadi 5,8% pada 2013.¹¹ Menurunnya tekanan dari sisi permintaan domestik tercermin pada beberapa indikator dini seperti pertumbuhan penjualan riil yang berada dalam tren menurun. Selain itu, indikator kapasitas terpakai yang masih sekitar 70% juga mengindikasikan belum kuatnya pengaruh permintaan domestik terhadap inflasi inti.

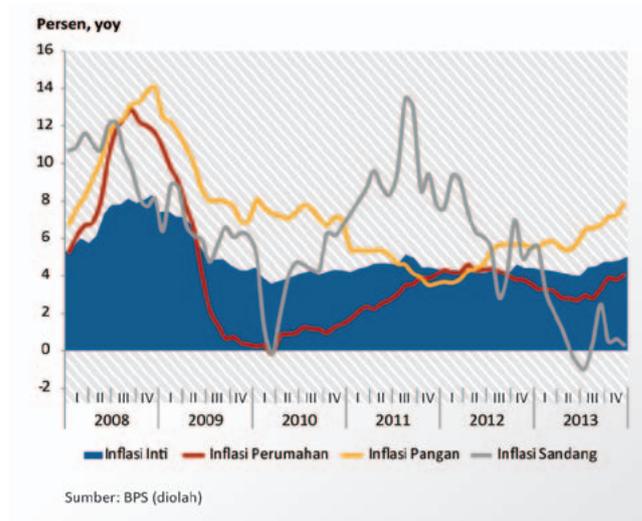
Tekanan inflasi inti dari sisi permintaan hanya terjadi di sektor perumahan yang tercermin pada inflasi inti



Grafik 6.6. Perkembangan Inflasi Inti pada Episode Kenaikan BBM

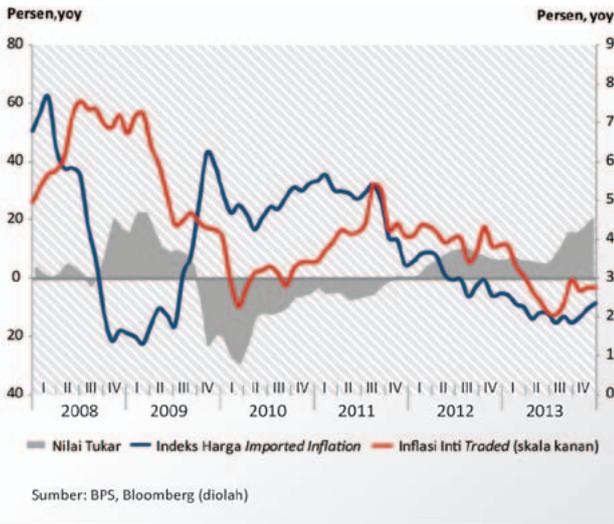
kelompok perumahan yang berada pada tren meningkat. Permintaan yang masih kuat di sektor ini tercermin pada sejumlah indikator dini seperti kapasitas terpakai yang meningkat di industri semen, barang galian nonlogam serta industri logam dasar besi dan baja.

Sejalan dengan tekanan dari permintaan, tekanan inflasi inti dari faktor eksternal tercatat minimal. Hal ini disebabkan oleh masih menurunnya harga komoditas global dan terbatasnya dampak depresiasi nilai tukar rupiah. Pengaruh penurunan harga global tercermin pada pergerakan indeks harga *imported inflation* yang



Grafik 6.7. Inflasi Inti Kelompok Sandang, Pangan, dan Papan

¹¹ Analisis perkembangan pertumbuhan ekonomi 2013 secara lengkap terdapat pada Bab 3 Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan



Grafik 6.8. Inflasi Inti *Traded* dan Faktor Eksternal

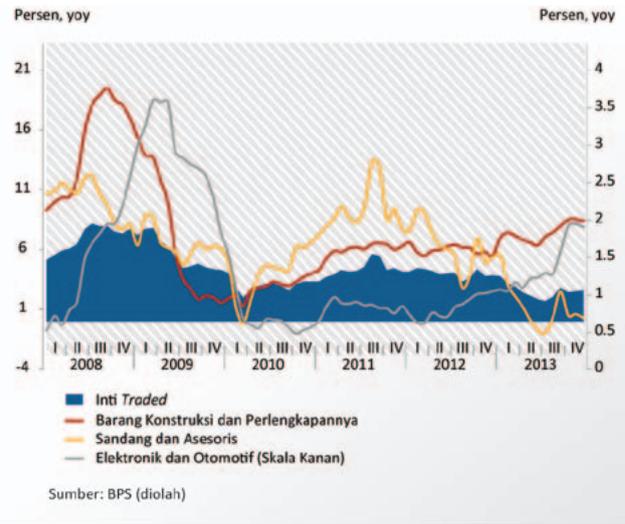
menurun sebesar 12,3% (Grafik 6.8).¹² Secara keseluruhan, pengaruh eksternal yang minimal tercermin pada inflasi inti *traded* yang menurun dari tahun sebelumnya yakni sebesar 3,9% menjadi 2,6%.¹³ Pengaruh eksternal yang minimal terhadap inflasi inti juga masih terlihat bila dilakukan penghitungan dengan mengeluarkan pengaruh harga emas yang menurun pada tahun 2013.¹⁴ Hasil penghitungan menunjukkan inflasi inti *traded* di luar emas hanya meningkat sedikit dari 3,2% pada 2012 menjadi 3,5%.

Beberapa faktor diperkirakan menjadi penyebab terbatasnya pengaruh pelemahan rupiah terhadap kenaikan inflasi inti, meskipun pengaruhnya di beberapa komoditas seperti barang konstruksi dan elektronik cukup kuat (Grafik 6.9). Hasil survei Bank Indonesia menemukan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak serta merta menaikkan harga jual, bahkan cenderung menahan harga jual di saat terjadi pelemahan rupiah. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang melambat dan kemudian berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat mengakibatkan produsen tidak bisa optimal mentransmisikan dampak pelemahan nilai tukar rupiah ke tingkat konsumen. Kedua, penetapan harga

12 Indeks komposit harga global dengan *weighted average* (berdasar persentase impor dan bobot di IHK) dari komoditas pangan (CPO, gandum, gula, jagung dan kedelai), dan non pangan (minyak dunia (WTI), emas, kapas, dan besi).

13 Definisi '*traded*' adalah barang yang diperdagangkan baik secara ekspor maupun impor yang tercermin dalam neraca perdagangan.

14 Emas sepanjang tahun 2013 mengalami penurunan harga sebesar -5,3% (yoy) dan memberikan dampak deflasi sebesar -0,1% (yoy).



Grafik 6.9. Inflasi Inti *Traded* dan Inflasi Beberapa Kelompok Barang

dipengaruhi oleh kontrak bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu sehingga produsen tidak leluasa menaikkan harga meskipun terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Ketiga, tingkat persaingan usaha yang tinggi menyebabkan pelaku usaha cenderung menjadi *price taker* dan bahkan apabila penyesuaian harga harus ditempuh maka hal tersebut akan dilakukan secara bertahap.

Kenaikan inflasi inti yang terbatas juga dipengaruhi faktor ekspektasi inflasi yang terkendali, setelah sebelumnya sempat meningkat di beberapa periode. Ekspektasi inflasi yang sempat meningkat dipengaruhi dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dan depresiasi nilai tukar. Peningkatan ekspektasi inflasi yang cukup tinggi terutama terjadi setelah implementasi kenaikan harga BBM bersubsidi di bulan Juni 2013. Ekspektasi inflasi yang cukup tinggi tersebut berlanjut hingga Agustus 2013. Pada perkembangannya, ekspektasi inflasi kemudian menurun sejalan dengan berbagai respons kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bauran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia untuk mengendalikan tekanan inflasi serta berbagai upaya yang ditempuh Pemerintah mengurangi tekanan kenaikan harga pangan, terlihat cukup efektif dalam mengendalikan ekspektasi inflasi para pelaku ekonomi dan pada gilirannya menahan tekanan inflasi yang lebih tinggi.

Hasil survei *consensus forecast* menunjukkan ekspektasi inflasi sempat meningkat setelah kenaikan harga BBM bersubsidi pada Juni 2013, namun kemudian kembali menurun mulai September 2013. Survei *consensus forecast* bahkan menunjukkan ekspektasi inflasi 2014 akan terus menurun hingga kembali berada dalam sasaran

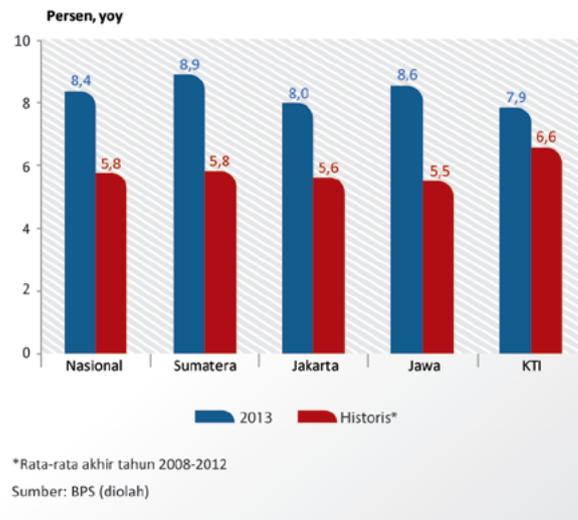


Grafik 6.10. Ekspektasi Inflasi *Consensus Forecast*

inflasi 4,5±1% (Grafik 6.10). Hasil survei ekspektasi inflasi di level konsumen dan pedagang eceran menunjukkan hasil yang serupa dengan tekanan yang menurun di triwulan akhir 2013.

6.4. Inflasi Regional

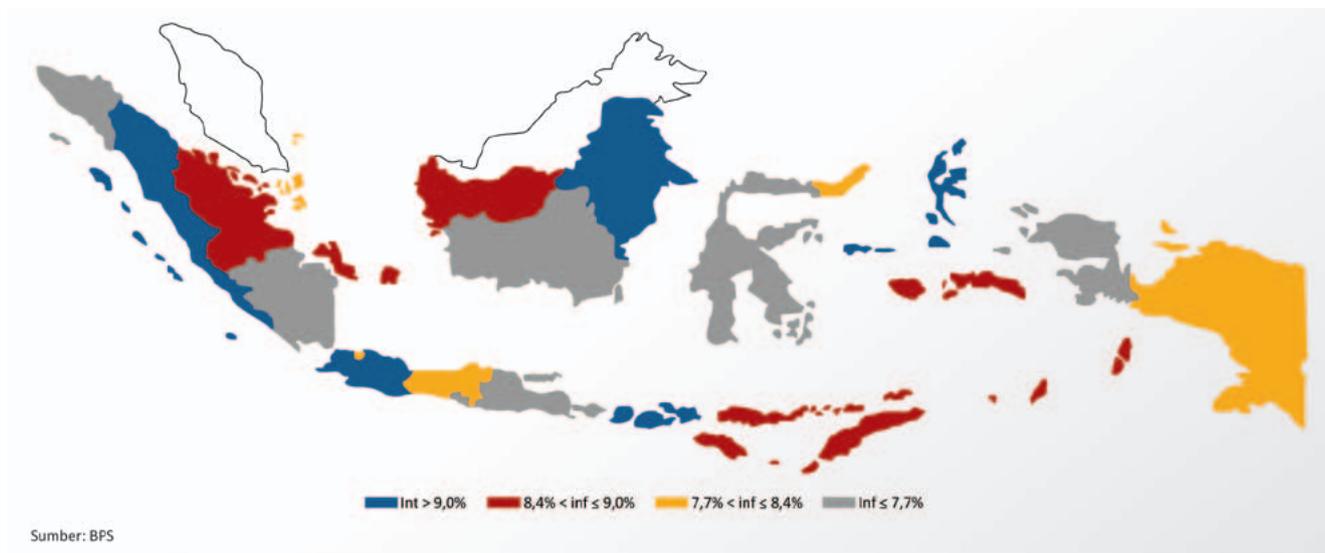
Dari perkembangan regional, kenaikan inflasi tahun 2013 tercatat cukup tinggi di Kawasan Sumatera. Provinsi Sumatera Barat mencatat inflasi tertinggi di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 10,9%, diikuti oleh Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Bengkulu masing-masing sebesar 10,2% dan 9,9%. Provinsi lain yang juga mencatat inflasi cukup



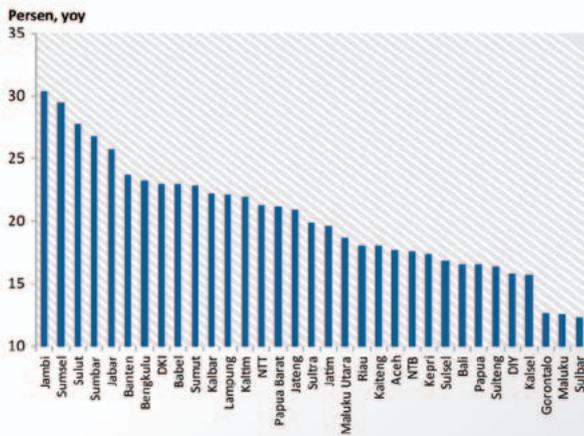
Grafik 6.11. Inflasi Daerah 2013 dan Historis

tinggi pada 2013 adalah Maluku Utara, yakni sebesar 9,8%. Adapun inflasi terendah di Indonesia pada tahun 2013 tercatat di Provinsi Gorontalo yang sebesar 5,8% (Gambar 6.1). Tingginya inflasi beberapa provinsi di Sumatera tersebut secara keseluruhan menyebabkan inflasi 2013 di kawasan Sumatera tercatat 8,9%, lebih tinggi dibandingkan tiga kawasan lainnya yakni Jawa (8,5%), Jakarta (8,0%) dan Kawasan Timur Indonesia (7,9%) (Grafik 6.11).¹⁵

15 Bank Indonesia membagi analisis ekonomi daerah dalam 4 (empat) kawasan, yaitu: Sumatera (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung, Sumatera Barat, Riau, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau); Jakarta (Provinsi DKI Jakarta); Jawa (Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta); Kawasan Timur Indonesia (Provinsi Bali, NTB, dan NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan



Gambar 6.1. Peta Inflasi Indonesia Tahun 2013



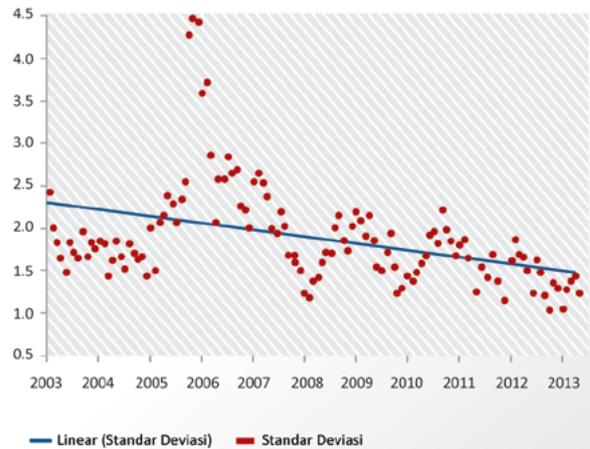
Sumber: BPS (diolah)

Grafik 6.12. Inflasi Subkelompok Transportasi (Juli 2013)

Inflasi di kawasan Sumatera yang tercatat lebih tinggi dari kawasan lain dipengaruhi lebih tingginya inflasi *volatile food* dan inflasi *administered prices*, sedangkan inflasi inti tercatat lebih rendah. Inflasi *volatile food* tercatat sebesar 12,3% dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat erupsi Gunung Sinabung dan dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi. Kondisi tersebut menyebabkan tetap kuatnya inflasi *volatile food* kawasan Sumatera pada semester kedua 2013. Tingginya dampak kenaikan BBM terhadap tarif angkutan di Sumatera dibandingkan dengan kawasan lain menyebabkan tingginya inflasi *administered prices* di kawasan Sumatera. Perkembangan ini tercermin dari banyaknya daerah di kawasan Sumatera yang mencatat inflasi tinggi di subkelompok transportasi (Grafik 6.12).

Tekanan inflasi *volatile food* di kawasan Jawa dan kawasan Jakarta, tidak setinggi inflasi di kawasan Sumatera. Inflasi *volatile food* di kawasan Jawa dan kawasan Jakarta masing-masing tercatat sebesar 11,6% dan 11,4%. Pada triwulan I 2013, inflasi *volatile food* di kawasan Jawa dihadapkan pada permasalahan pasokan akibat masalah perizinan yang menahan truk impor hortikultura dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta turut menambah tekanan terhadap kenaikan inflasi bahan pangan. Hal ini dipengaruhi arus distribusi barang yang terkendala dan bahkan sempat terhenti selama beberapa waktu karena

Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat).



Sumber: Ridhwan et.al

Grafik 6.13. Konvergensi Inflasi Antarprovinsi

terputusnya jalur masuk distribusi barang ke beberapa wilayah di Jakarta. Tekanan inflasi *volatile food* juga muncul dari subkelompok daging dan hasil-hasilnya, khususnya daging ayam ras dan daging sapi.

Perkembangan positif terkait inflasi terjadi di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang pada tahun 2013 tercatat sebagai kawasan dengan inflasi terendah di Indonesia yakni 7,9%. Kondisi ini berbeda dengan kondisi tahun 2012 ketika KTI menjadi kawasan yang mencatat inflasi tertinggi di Indonesia yakni sebesar 5,2%. Beberapa provinsi di KTI yang mencatat inflasi rendah adalah Gorontalo dan Sulawesi Tenggara masing-masing sebesar 5,8% dan 5,9%. Perkembangan inflasi KTI yang rendah tersebut dipengaruhi oleh rendahnya inflasi *volatile food*.

Secara keseluruhan, dinamika inflasi spasial 2013 menunjukkan bahwa inflasi antarprovinsi di Indonesia sudah semakin konvergen sesuai dengan hasil kajian Bank Indonesia (Grafik 6.13).¹⁶ Temuan ini merupakan perkembangan positif bagi pengendalian inflasi di Indonesia karena menunjukkan penyempitan perbedaan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku inflasi di Indonesia.

16 Ridhwan, M.M., Werdaningtyas, H., dan Grace, M.V. (2013), "Analisis Dekomposisi, Determinan, dan Konvergensi Inflasi Regional di Indonesia", Bank Indonesia, mimeo, menunjukkan adanya penurunan standar deviasi inflasi antar provinsi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir (2003-2013). Estimasi dilakukan terhadap data inflasi bulanan 30 provinsi tahun 2003-2013 dengan menggunakan pendekatan panel data *fixed effects*. Perhitungan *speed of convergence* dengan menggunakan *half life deviation* diperoleh sebesar ± 29 bulan.

Upaya pemerintah untuk mendorong terciptanya kedaulatan pangan antara lain ditempuh melalui pengendalian impor pangan. Upaya mendorong kedaulatan pangan ini dilakukan dalam rangka melindungi produksi pertanian di pasar dalam negeri. Pengendalian impor dilakukan secara bertahap dan mulai diimplementasikan pada pertengahan tahun 2012 dengan membatasi pintu masuk dan pengaturan tata niaga impor. Kebijakan ini dilanjutkan pada tahun 2013 dengan melakukan pengaturan impor melalui pelarangan maupun pembatasan kuota.

Dalam implementasinya, kebijakan pengendalian impor tersebut menghadapi kendala karena pada saat bersamaan produksi domestik masih belum memadai sehingga pasokan sempat terhambat. Terbatasnya pasokan mendorong tingginya tekanan inflasi terutama pada produk hortikultura dan daging sapi. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan terkait stabilisasi harga untuk mengatasi tekanan harga tersebut. Peraturan tersebut diharapkan mampu mengatasi persoalan suplai yang terbatas sehingga mengurangi tekanan inflasi *volatile food*. Dalam hal ini, Pemerintah mengeluarkan empat peraturan relaksasi ketentuan dan tata niaga impor daging sapi dalam rangka menambah suplai dalam negeri. Secara umum, tiga peraturan pertama mengatur tentang tata cara impor dan persyaratannya, baik kegiatan impor maupun jenis daging yang diimpor. Sementara itu, peraturan keempat untuk mengatur tataniaga impor sapi/daging sapi (Tabel 1).

Terkait dengan relaksasi impor, Pemerintah juga mengubah tata niaga impor sapi/daging sapi dari berbasis kuota menjadi harga. Hal ini tertuang dalam Permendag No.46/M-DAG/KEP/8/2013 yang terdiri dari tiga hal utama yaitu penetapan harga referensi, pemicu impor, dan pengaturan hal-hal teknis. Harga referensi¹ yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp76.000/kg. Harga ini ditetapkan berdasarkan harga eceran rata-rata dalam beberapa tahun sebelumnya dan perhitungan biaya usaha produksi dan distribusi. Impor dapat diijinkan atau dihentikan berdasarkan patokan deviasi

harga eceran dengan harga referensi. Deviasi yang ditoleransi bersifat statis dan asimetris dengan rentang yang ditetapkan antara 5% dan 15%. Jika proyeksi harga daging sapi 2 bulan ke depan di bawah harga referensi maka impor daging sapi ditunda sampai harga kembali ke harga referensinya. Jika proyeksi harga 2 bulan ke depan lebih dari 15% harga referensi maka keran impor dibuka. Sementara itu untuk hal-hal teknis meliputi aturan jangka waktu permohonan persetujuan impor yang dibagi menjadi 4 (empat) triwulan, jumlah impor yang harus direalisasikan minimal 80% dari akumulasi persetujuan impor selama 1 tahun, dan pengecualian jenis daging *prime cut* dari pengaturan referensi harga (Bagan 1). Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian terkait kebijakan stabilisasi harga daging sapi. Hal-hal tersebut terkait dengan penentuan batas kuota impor di awal tahun guna menghindari fluktuasi harga, penentuan harga referensi dan deviasinya, monitoring realisasi impor dan sanksinya.

Di sisi lain, kebijakan Pemerintah terkait komoditas hortikultura, diarahkan untuk mendorong peningkatan produksi domestik sekaligus melindungi konsumen sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura. Beberapa kebijakan yang telah ditempuh antara lain pembatasan pintu masuk impor bagi produk hortikultura, pengaturan prosedur perijinan importasi hortikultura dan pengaturan tata niaga impor produk hortikultura. Tidak memadainya produksi dalam negeri di tengah kebijakan pengendalian impor kemudian mendorong tekanan harga pada komoditas hortikultura. Terkait hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan empat peraturan yang bertujuan untuk menstabilkan harga dalam negeri (Tabel 2).

Pemerintah juga mengubah pengaturan impor produk hortikultura,² khususnya untuk cabai dan bawang merah, menjadi berdasarkan harga referensi,³ seperti halnya pada daging sapi. Hal ini ditujukan untuk mengurangi tekanan harga mengingat

1 Harga referensi adalah harga acuan penjualan di tingkat pengecer yang ditetapkan oleh Tim Pemantau Harga Daging Sapi. Penetapan harga referensi akan dievaluasi secara berkala.

2 Produk hortikultura untuk kebutuhan industri pengolahan dikecualikan dari pengaturan referensi harga

3 Harga referensi ditetapkan oleh Tim Pemantau Harga Produk Hortikultura

Tabel 1. Peraturan dalam rangka Stabilisasi Harga Daging Sapi

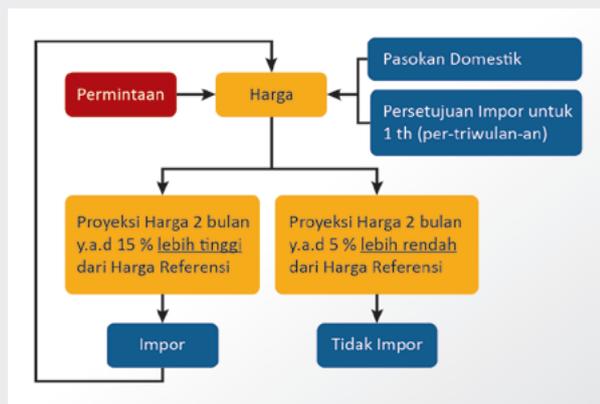
No.	Peraturan	Perihal	Pokok-pokok Pengaturan	Tanggal Implementasi
1	Permendag No.22/M-DAG/PER/5/2013	Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan	Penyederhanaan proses perijinan dan tertib administrasi impor serta memberikan kepastian berusaha.	28 Mei 2013
2	Kepmendag No.699/M-DAG/KEP/7/2013	Stabilisasi Harga Daging Sapi	Tata cara penambahan pasokan sapi dengan mengimpor dalam jumlah cukup dilakukan secara bertahap.	18 Juli 2013
3	Permentan No.84/Permentan/PD.410/8/2013	Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/ atau Olahannya ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Tata cara, lembaga yang berwenang, syarat negara importir, tujuan, dan permohonan rekomendasi pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya.	28 Agustus 2013
4	Permendag No.46/M-DAG/KEP/8/2013	Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan	Perubahan tata niaga impor sapi/daging sapi dari berbasis kuota menjadi berbasis harga/referensi.	30 Agustus 2013

Sumber: Kementerian Perdagangan

kontribusinya yang cukup tinggi terhadap inflasi. Melalui Keputusan Direktur Jendral Perdagangan Dalam Negeri No.118/PDN/KEP/10/2013, harga referensi cabai merah besar/keriting ditetapkan sebesar Rp26.300/kg, cabai rawit merah Rp28.000/kg, dan bawang merah Rp25.700/kg. Harga referensi ini didasarkan pada pendekatan struktur biaya dan sudah memperhitungkan koefisien keragaman sebesar 9%. Sementara itu, impor cabai dan bawang merah untuk konsumsi mendapat kelonggaran ijin. Ijin impor cabai dan bawang merah untuk konsumsi dapat diajukan sewaktu-waktu dengan menggunakan harga referensi yang ditetapkan oleh Tim Pemantau

Harga Produk Hortikultura.⁴ Sejalan dengan ketentuan impor daging sapi, pada impor produk hortikultura juga diberlakukan kewajiban realisasi impor minimal 80% dari persetujuan impor setiap periode.

Kebijakan-kebijakan relaksasi impor daging sapi dan produk hortikultura diindikasikan berhasil mengendalikan harga komoditas. Dalam perkembangannya, tekanan pada inflasi *volatile food* menurun setelah diberlakukannya kebijakan tersebut. Dalam jangka pendek, untuk lebih meningkatkan efektivitas kebijakan stabilisasi harga pangan di atas, beberapa hal perlu mendapat perhatian. Hal ini terkait dengan penentuan kuota impor, penetapan toleransi deviasi harga, mekanisme dan waktu evaluasi harga, serta monitoring realisasi impor beserta sanksinya. Selanjutnya, dalam jangka yang lebih panjang tetap diperlukan kebijakan-kebijakan struktural untuk mendukung peningkatan produksi dalam negeri. Peningkatan kemampuan sisi suplai diharapkan mampu mengurangi tekanan inflasi akibat *volatile food* secara lebih permanen sehingga perekonomian lebih berdaya tahan dan berkesinambungan.



Bagan 1. Mekanisme Impor Daging Sapi

4 Ijin impor produk hortikultura lainnya diajukan menggunakan sistem periodisasi: Desember tahun sebelumnya untuk Semester I tahun berjalan, Juni untuk Semester II. Ijin ini berlaku hingga 6 bulan.

Tabel 2. Peraturan dalam rangka Stabilisasi Harga Cabai dan Bawang Merah

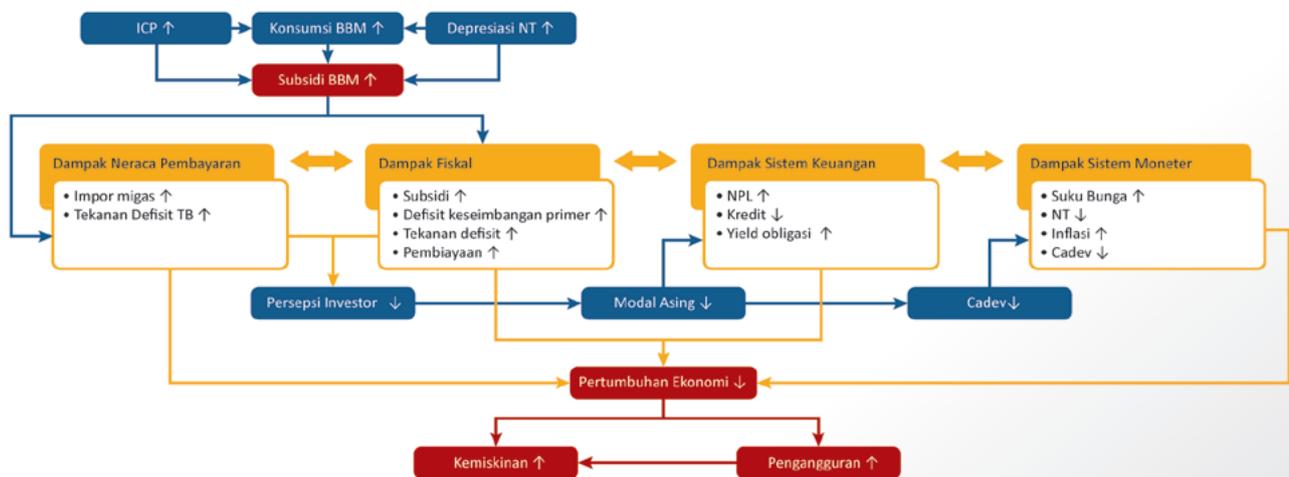
No.	Peraturan	Perihal	Pokok-pokok Pengaturan	Tanggal Implementasi
1	Permentan No.47/Permentan/OT.140/4/2013	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH)	Prosedur pengajuan impor online dan penerbitan RIPH bersifat semesteran (dua kali dalam setahun)	19 April 2013
2	Permendag No.16/M-DAG/PER/4/2013	Ketentuan Impor Produk Hortikultura	Tata cara permohonan importir dan surat persetujuan impor, pengurangan pos tarif menjadi 39 komoditas (sebelumnya 57 komoditas), pemberlakuan kartu kendali realisasi impor	22 April 2013
3	Permentan No.86/OT.140	Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH)	Pengaturan impor cabai dan bawang merah berdasarkan referensi	30 Agustus 2013
4	Permendag No.47/M-DAG/KEP/8/2013	Perubahan atas Permendag No.16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura	Tataniaga impor bawang merah dan cabai berbasis harga/referensi, sementara produk hortikultura lainnya tidak berlaku harga referensi	30 Agustus 2013

Sumber: Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian



Fiskal

Kondisi fiskal tahun 2013 menghadapi tantangan yang tidak ringan dan berisiko mengganggu prospek kesinambungan fiskal. Respons pemerintah, antara lain melalui kenaikan harga BBM bersubsidi, berhasil mengendalikan defisit fiskal pada level 2,3% PDB, serta berkontribusi pada permintaan domestik yang terkendali dan defisit transaksi berjalan yang mulai menurun ke arah yang sehat. Ke depan, beberapa penguatan kebijakan fiskal baik di pusat maupun di daerah masih perlu terus ditempuh, guna menopang ketahanan fiskal dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.



Sumber: Nota Keuangan RAPBN-P 2013, diolah

Gambar 7.1. Risiko yang Memengaruhi APBN-P 2013

Kondisi fiskal tahun 2013 menghadapi tantangan yang tidak ringan akibat dinamika perekonomian global dan domestik yang realisasinya tidak sesuai dengan asumsi dalam APBN 2013. Komponen utama yang terkena imbas dari berubahnya dinamika global dan domestik tersebut adalah risiko membengkaknya subsidi BBM akibat masih kuatnya konsumsi BBM bersubsidi, sejalan dengan permintaan domestik yang masih besar. Selain itu, perkembangan nilai tukar yang berada dalam tren melemah dan realisasi harga minyak yang di atas asumsi APBN 2013 juga semakin meningkatkan risiko beban subsidi BBM. Risiko membengkaknya subsidi BBM perlu mendapat perhatian mengingat pada saat bersamaan, terdapat risiko berkurangnya penerimaan akibat penurunan *lifting* migas dan perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil perhitungan, risiko meningkatnya subsidi BBM di tengah kondisi menurunnya potensi penerimaan dapat meningkatkan defisit APBN 2013 jauh lebih tinggi dari perkiraan awal sebesar 1,7% dari PDB menjadi di atas 3,8% dari PDB.¹

Tantangan yang dihadapi kebijakan fiskal 2013 mengangkat isu struktural tentang peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal dan berkesinambungan. Isu tersebut terutama

terkait dengan komposisi belanja APBN yang banyak terserap untuk subsidi BBM. Besarnya subsidi BBM telah mengurangi ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan bahkan dapat mengganggu ketahanan fiskal. Pada satu sisi, subsidi BBM yang berlebihan mengurangi kualitas belanja pemerintah karena belanja akan banyak terserap kepada subsidi BBM. Akibatnya pengeluaran untuk belanja modal yang dapat memberikan dampak pengganda lebih luas kepada perekonomian menjadi terbatas. Pada sisi lain, subsidi BBM yang berlebihan dapat memicu alokasi penggunaan sumber daya alam menjadi kurang efisien. Secara keseluruhan, besarnya beban subsidi BBM dapat mengganggu kesinambungan fiskal dan memberikan tekanan lanjutan kepada perekonomian berupa gangguan kepada neraca pembayaran, kondisi moneter, stabilitas sistem keuangan, dan akhirnya mengganggu upaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah panjang (Gambar 7.1).

Pemerintah mengambil beberapa langkah strategis guna mengendalikan defisit APBN 2013 tersebut sehingga kesinambungan fiskal tetap terjaga. Berbagai asumsi makroekonomi yang digunakan sebelumnya, yakni pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, harga minyak internasional, serta *lifting* minyak dan gas, diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada (Tabel 7.1). Selain itu, satu keputusan strategis yang diambil ialah kenaikan harga BBM bersubsidi (Grafik 7.1). Kenaikan harga BBM bersubsidi pada satu sisi diarahkan untuk mengendalikan beban subsidi BBM dan defisit APBN-P 2013 yang setelah penyesuaian diperkirakan dapat menjadi 2,4% dari PDB (Tabel 7.2). Pada sisi lain,

1 Dalam pembuka Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2013 tanggal 1 Mei 2013 di Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa jika subsidi tidak dikendalikan maka defisit fiskal dapat meningkat hingga mencapai 3,8% dari PDB (Sumber: <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6272-kenaikan-bbm-agar-subsidi-lebih-adil-dan-tepat-sasaran.html>).

Tabel 7.1. Perkembangan Asumsi Makro Tahun 2013

Asumsi Makro	2012			2013		
	APBN	APBN-P	Realisasi	APBN	APBN-P	Realisasi
Pertumbuhan ekonomi yoy (%)	6,7	6,5	6,2	6,8	6,3	5,8
Inflasi yoy (%)	5,3	6,8	4,3	4,9	7,2	8,4
Nilai tukar (rupiah terhadap dolar AS)	8.800	9.000	9.638	9.300	9.600	10.452
Rata-rata suku bunga SPN 3 bln (%)	6,0	5,0	3,2	5,0	5,0	4,5
Harga minyak internasional (dolar AS per barel)	90	105	113	100	108	106
Lifting minyak Indonesia (ribu barel per hari)	950	930	860	900	840	825
Lifting gas Indonesia (juta barel setara minyak per hari)	-	-	1260	1360	1240	1213

Sumber: KESDM dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2012, Siaran Pers Kementerian Keuangan tanggal 5 Januari 2014

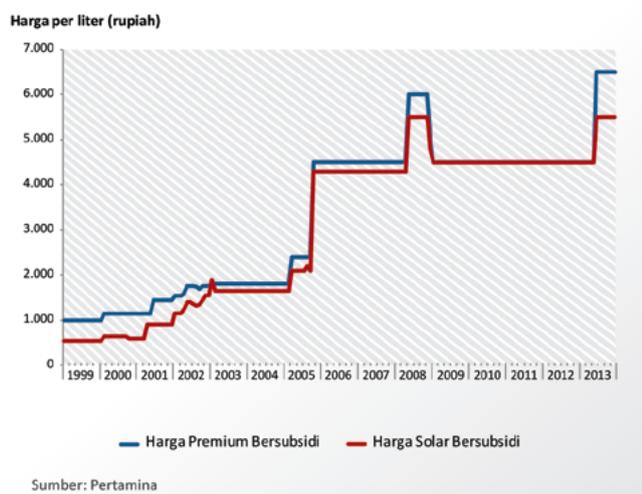
keputusan strategis kenaikan harga BBM juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya alam dan mendukung upaya pengendalian permintaan domestik ke arah yang lebih seimbang. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai ketentuan-ketentuan teknis dalam paket-paket kebijakan guna memastikan konsistensi perbaikan struktural dalam jangka menengah panjang.² Secara keseluruhan, arah kebijakan APBN-P 2013 dan berbagai ketentuan teknis pendukung menjadi sinergi kuat dengan arah kebijakan Bank Indonesia dalam mengendalikan permintaan domestik sehingga dapat menopang upaya menurunkan defisit transaksi berjalan ke level yang sehat dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan.

Kebijakan fiskal dalam merespons tantangan ekonomi tahun 2013 memberikan hasil positif, tidak hanya bagi posisi keuangan pemerintah tetapi juga bagi kegiatan ekonomi. Meskipun lebih tinggi dari defisit tahun 2012 sebesar 1,9% dari PDB, defisit APBN-P 2013 dapat

dikendalikan menjadi 2,3% dari PDB (Tabel 7.2). Realisasi defisit APBN-P 2013 tersebut lebih rendah dari ketentuan UU No. 33 Tahun 2004 yaitu sebesar 3% dari PDB dan juga target semula sebesar 2,4% dari PDB. Lebih jauh dari itu, sinergi positif respons kebijakan fiskal dan kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia juga berkontribusi positif pada pengendalian permintaan domestik sehingga mulai mengarahkan perekonomian menjadi lebih seimbang dan menopang penurunan defisit transaksi berjalan pada triwulan IV 2013.

Ke depan, beberapa hal perlu terus diperkuat guna mendukung ketahanan fiskal, baik pusat maupun daerah. Penguatan tersebut termasuk diarahkan untuk memperkuat kembali kondisi keseimbangan primer yang pada tahun 2013 kembali mencatat defisit sebesar 1,1% dari PDB. Dari sisi penerimaan, intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan perlu terus ditempuh sehingga dapat mendukung peningkatan penerimaan berbasis domestik. Upaya peningkatan *lifting* migas juga perlu terus dilakukan. Dari sisi belanja, daya serap belanja, baik dari sisi jumlah maupun waktu penyerapan, serta peran belanja modal perlu diperkuat sehingga meningkatkan kualitas belanja. Dalam kaitan ini, optimalisasi penggunaan subsidi BBM dan LPG 3 kilogram menjadi penting, termasuk berbagai upaya pengendaliannya melalui program konversi energi. Berbagai penguatan komponen penerimaan dan belanja juga perlu ditempuh oleh kebijakan fiskal di daerah. Pendapatan asli daerah perlu ditingkatkan. Daya serap belanja pemerintah daerah juga perlu semakin dioptimalkan, termasuk upaya peningkatan peran belanja modal sehingga dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penguatan ketahanan fiskal di tahun-tahun mendatang juga dibutuhkan untuk menopang terjaganya kesinambungan pertumbuhan ekonomi, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain berkaitan dengan langkah menurunkan tingkat



Grafik 7.1. Harga BBM Bersubsidi

2 Selengkapnya mengenai paket kebijakan pemerintah dapat dilihat dalam Bab 13. Koordinasi Kebijakan.

Tabel 7.2. Perkembangan Operasi Keuangan Pemerintah Tahun 2012 -2013

Rincian	APBN-P 2012 Triliun Rp	Realisasi 2012				APBN-P 2013 Triliun Rp	Realisasi 2013*			
		Triliun Rp	%PDB	%yoy	%APBN-P		Triliun Rp	%PDB	%yoy	%APBN-P
A. Pendapatan Negara dan Hibah	1.358,2	1.338,1	16,2	10,5	98,5	1.502,0	1.429,5	15,7	6,8	95,2
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.357,4	1.332,3	16,2	10,5	98,2	1.497,5	1.425,0	15,7	7,0	95,2
1. Penerimaan Perpajakan	1.016,2	980,5	11,9	12,2	96,5	1.148,3	1.072,1	11,8	9,3	93,4
- Pajak Dalam Negeri	968,3	930,9	11,3	13,6	96,1	1.099,9	1.024,8	11,3	10,1	93,2
- Pajak Perdagangan Internasional	47,9	49,7	0,6	-8,3	103,6	48,4	47,4	0,5	-4,6	97,9
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	341,1	351,8	4,3	6,1	103,1	349,2	352,9	3,9	0,3	101,0
II. Hibah	0,8	5,8	0,1	10,1	701,3	4,5	4,5	0,0	-22,5	99,6
B. Belanja Negara	1.548,3	1.491,2	18,1	15,1	96,3	1.726,2	1.639,0	18,0	9,9	94,9
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.069,5	1.010,6	12,3	14,4	94,5	1.196,8	1.125,7	12,4	11,4	94,1
1. Belanja Pegawai	212,3	197,9	2,4	12,6	93,2	233,0	221,4	2,4	11,9	95,0
2. Belanja Barang	162,0	140,9	1,7	13,0	87,0	206,5	167,8	1,8	19,1	81,2
3. Belanja Modal	176,1	145,1	1,8	23,1	82,4	192,6	171,8	1,9	18,4	89,2
4. Pembayaran Bunga Utang	117,8	100,5	1,2	7,8	85,3	112,5	112,8	1,2	12,2	100,2
5. Subsidi	245,1	346,4	4,2	17,3	141,4	348,1	355,0	3,9	2,5	102,0
6. Belanja Hibah	1,8	0,1	0,0	-75,0	4,2	2,3	1,3	0,0	1.644,6	56,9
7. Bantuan Sosial	86,0	75,6	0,9	6,4	87,9	82,5	92,1	1,0	21,8	111,7
8. Belanja Lain-lain	68,5	4,1	0,0	-25,5	5,9	19,3	3,6	0,0	-12,1	18,6
II. Transfer Ke Daerah	478,8	480,6	5,8	16,9	100,4	529,4	513,3	5,7	6,8	97,0
1. Dana Perimbangan	408,4	411,3	5,0	18,4	100,7	445,5	430,4	4,7	4,6	96,6
2. Dana Otsus & Penyesuaian	70,4	69,4	0,8	8,2	98,5	83,8	82,9	0,9	19,5	98,9
C. Keseimbangan Primer	-72,3	-52,6	-0,6	-696,4	72,7	-111,7	-96,8	-1,1	84,0	86,6
D. Surplus/Defisit Anggaran	-190,1	-153,1	-1,9	81,3	80,5	-224,2	-209,5	-2,3	36,9	93,5
E. Pembiayaan	190,1	182,7	2,2	39,5	96,1	224,2	230,1	2,4	26,0	102,6
I. Pembiayaan Dalam Negeri	194,5	198,6	2,4	33,5	102,1	241,1	243,4	2,6	22,6	101,0
II. Pembiayaan Luar Negeri (neto)	-4,4	-16,0	-0,2	-10,3	360,6	-16,9	-13,3	-0,1	-16,7	78,7

Sumber: Kementerian Keuangan

*Realisasi sementara (*unaudited*) (Siaran Pers Kementerian Keuangan tanggal 5 Januari 2014)

kemiskinan, yang pada tahun 2013 tercatat 11,4%, berada di atas batas maksimal rentang target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010–2014 sebesar 8,0%-10,0% pada tahun 2014. Selain itu, upaya meningkatkan kesejahteraan juga berhubungan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran yang pada tahun 2013 tercatat 6,25%, juga masih di atas target RPJMN tahun 2010–2014 sebesar 5,0%-6,0% pada tahun 2014.³

3 Pembahasan lebih lanjut mengenai kemiskinan dan pengangguran terdapat dalam Bab 3. Pertumbuhan Ekonomi dan Ketenagakerjaan.

7.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi APBN-P 2013 menunjukkan beberapa indikator pendapatan negara dan hibah dalam tren menurun dibandingkan dengan tahun 2012. Meskipun secara nominal meningkat dari Rp1.338,1 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp1.429,5 triliun, beberapa indikator lain menunjukkan pendapatan negara dan hibah dalam tren melambat. Pertumbuhan pendapatan negara dan hibah tahun 2013 tercatat 6,8%, lebih lambat dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 10,5% (Tabel 7.2). Rasio pendapatan negara dan hibah terhadap PDB juga turun dari 16,2% menjadi 15,7% (Grafik 7.2). Realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2013 tercatat 95,2% dari target APBN-P 2013, juga lebih rendah dari

pencapaian tahun 2012 yang sebesar 98,5% dari target APBN-P 2012.

Melambatnya pendapatan negara dan hibah tahun 2013 terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak. Selain pengaruh perlambatan pertumbuhan ekonomi, tertahannya peningkatan penerimaan perpajakan juga dipengaruhi kendala belum kuatnya *database* perpajakan. Hal ini antara lain akibat belum cukup optimalnya implementasi Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), meskipun Pemerintah telah menerbitkan peraturan pendukungnya pada tahun 2012. Ketentuan tersebut mengharuskan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Penerimaan perpajakan pada tahun 2013 tumbuh 9,3%, melambat dibandingkan pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2012 sebesar 12,2% (Tabel 7.2). Berdasarkan komponennya, perkembangan ini dipengaruhi menurunnya Pajak Penghasilan (PPH) nonmigas, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, dan pajak perdagangan internasional. Secara sektoral, penerimaan pajak dari sektor pertambangan sebagai salah satu sektor andalan penerimaan perpajakan, juga mencatat penurunan pertumbuhan cukup dalam yaitu dari sebesar 14% menjadi 0,5%. Sementara peningkatan penerimaan pajak dari sektor lain seperti industri pengolahan, properti, jasa keuangan, konstruksi dan ritel yang meningkat, terlihat belum cukup kuat menutupi penurunan yang terjadi pada sektor pertambangan.⁴

Pertumbuhan penerimaan pajak yang melambat pada tahun 2013 secara keseluruhan mengakibatkan *tax ratio* pada tahun 2013 menurun. Rasio pajak terhadap PDB menurun dari 11,9% menjadi 11,8% pada tahun 2013, sehingga mengindikasikan menurunnya kontribusi pajak dalam perekonomian (Grafik 7.2). Perkembangan ini perlu dicermati karena bila dibandingkan dengan negara kawasan, *tax ratio* di Indonesia tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian di beberapa negara kawasan, meskipun untuk tarif pajak badan dan tarif pajak orang pribadi di Indonesia telah berada di atas rata-rata (Tabel 7.3).⁵

4 Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/14/01/06/myz70e-penerimaan-pajak-negara-turun>.

5 Rata-rata tarif pajak penghasilan efektif untuk badan di Asia Pasifik adalah sebesar 26,9%/26,6% (D. Endres et al (eds), "Company Taxation in the Asia-Pacific Region, India, and Russia," Springer, 2010). Dua rata-rata tarif disebabkan ada negara seperti India yang menerapkan tarif yang berbeda atas laba perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen dengan laba ditahan.

Tabel 7.3. Perbandingan *Tax Ratio* dan *Tax Rate* Negara Kawasan

Negara	Tax Ratio	Tarif Wajib Efektif Pajak Badan	Tarif Maks. Pajak Orang Pribadi
Thailand	17,6%	30,0%	37,0%
China*	17,0%	35,0%	45,0%
Malaysia	15,3%	25,0%	26,0%
Vietnam*	13,8%	25,0%	35,0%
Filipina	12,4%	30,5%	32,0%
Indonesia	11,8%	28,0%	30,0%
India ¹	10,4%	45,2%/34,0%	33,0%
Kamboja	10,0%	20,0%	n.a.

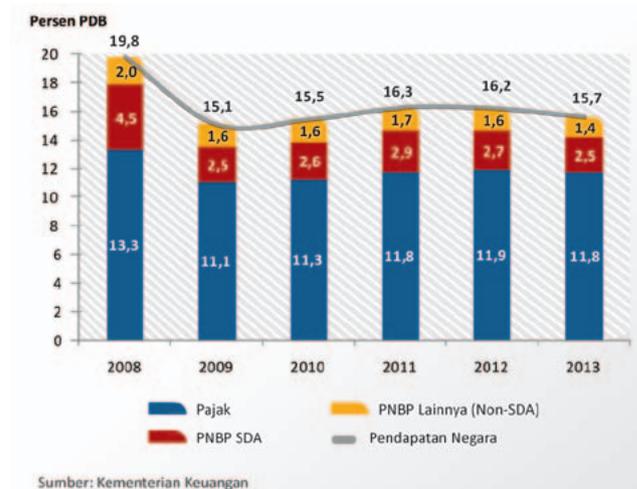
Sumber:

Tax Ratio: World Bank Indicators 2011, *Heritage Foundation 2012

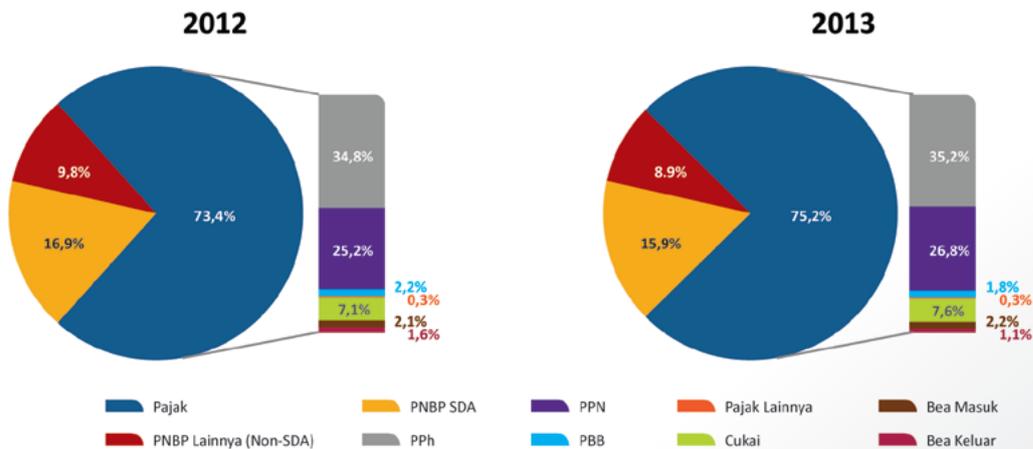
Pajak Badan: D. Endres et al (eds), "Company Taxation in the Asia-Pacific Region, India, and Russia," Springer, 2010

1 India mengenakan tarif 45,2% untuk laba perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen. Tarif 34% dikenakan terhadap laba ditahan perusahaan.

Faktor lain yang mendorong perlambatan pendapatan negara dan hibah adalah capaian *lifting* minyak bumi dan gas alam yang tidak mencapai target. Kondisi ini pada gilirannya mengakibatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya PNBP migas tahun 2013, menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012. Selain itu, capaian PNBP nonmigas juga menurun karena dipengaruhi melambatnya ekonomi dan terhambatnya pembayaran dividen dari beberapa perusahaan besar terkait adanya gangguan operasional. Meskipun melebihi target APBN-P, secara keseluruhan PNBP tahun ini hanya mencapai Rp352,9 triliun, turun 2,1% dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Berdasarkan komposisinya, PNBP Sumber Daya Alam turun dari 16,9% menjadi 15,9% sedangkan PNBP lainnya turun dari 9,8% menjadi 8,9% (Grafik 7.3). Penurunan PNBP ini pada gilirannya berperan dalam turunnya pendapatan negara.



Grafik 7.2. Perkembangan Rasio Pendapatan Negara Terhadap PDB



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

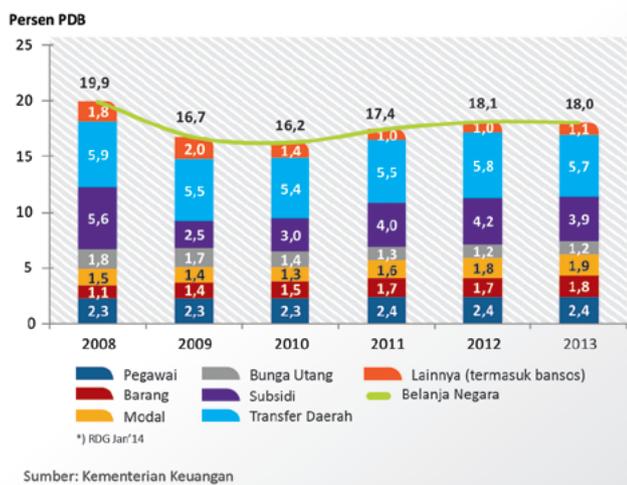
Grafik 7.3. Perbandingan Komposisi Pendapatan Negara Tahun 2012 dan 2013

7.2. Belanja Negara

Respons Pemerintah dalam menjaga ketahanan fiskal di tengah meningkatnya berbagai risiko ekonomi berimplikasi pada menurunnya pertumbuhan belanja negara tahun 2013. Realisasi belanja negara mencapai Rp1.639,0 triliun, tumbuh sebesar 9,9% atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan belanja tahun 2012 yang mencapai 15,1% (Tabel 7.2). Penurunan ini mengakibatkan porsi belanja negara dibandingkan PDB juga menurun dari 18,1% pada 2012 menjadi 18,0% pada tahun 2013 (Grafik 7.4). Penyerapan belanja dari pagu yang ditetapkan APBN-P juga tercatat menurun yakni dari 96,3% di tahun 2012 menjadi 94,9% (Tabel 7.2). Penyerapan belanja yang lebih rendah ini antara lain tidak terlepas dari pengaruh penurunan penerimaan

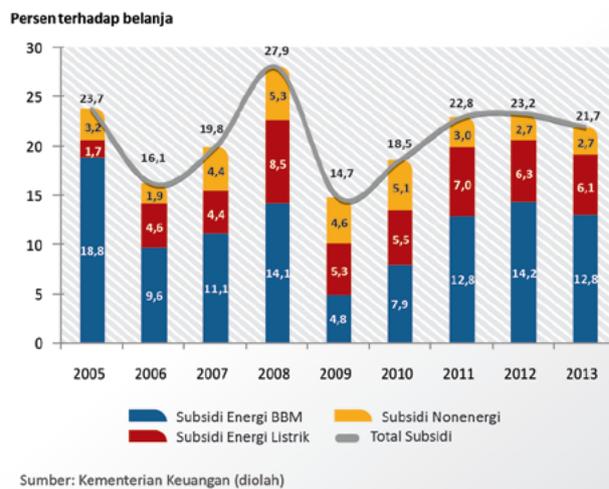
negara, sehingga pada akhir tahun Pemerintah melakukan beberapa langkah pengendalian anggaran.

Penurunan pertumbuhan belanja negara tahun 2013 banyak dipengaruhi dampak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi. Pengeluaran untuk subsidi pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp355,0 triliun atau 102,0% dari pagu APBN-P 2013. Meskipun nilai subsidi tersebut sedikit melampaui pagu dalam APBN-P 2013, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dapat menurunkan porsi belanja subsidi secara relatif terhadap total belanja yaitu dari 23,2% pada 2012 menjadi 21,9% pada tahun 2013. Penurunan porsi subsidi tersebut khususnya didorong penurunan subsidi energi BBM yang menurun cukup besar dari 14,2% pada 2012 menjadi 12,8% dari total subsidi (Grafik 7.5). Penurunan ini tidak terlepas dari menurunnya



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 7.4. Rasio Komponen Belanja Negara Terhadap PDB



Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Grafik 7.5. Rasio Subsidi Terhadap Belanja Negara

laju peningkatan volume konsumsi BBM bersubsidi sehingga dapat lebih rendah dari pagu APBN-P. Realisasi tersebut masih belum termasuk kewajiban *carry over* subsidi BBM dan LPG 3 kilogram tahun 2013 yang akan dibayarkan pada tahun-tahun berikutnya.

Komponen belanja negara lain yang cukup signifikan mendorong penurunan pertumbuhan belanja negara ialah belanja modal dan transfer ke daerah. Pada tahun 2013, pertumbuhan belanja modal tercatat 18,4%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2012 yang sebesar 23,1%. Sejalan dengan perkembangan ini, pertumbuhan transfer ke daerah pada tahun 2013 turun tajam dari 16,9% pada 2012 menjadi 6,8% dengan pangsa transfer ke daerah dalam belanja negara sedikit turun dari 32,2% menjadi 31,3%. Pertumbuhan yang melambat pada transfer ke daerah dipengaruhi oleh menurunnya daya serap anggaran terhadap pagu yang sudah disediakan. Daya serap transfer ke daerah hanya mencapai 97%, menurun dibandingkan daya serap tahun 2012 yang dapat optimal 100,4%.

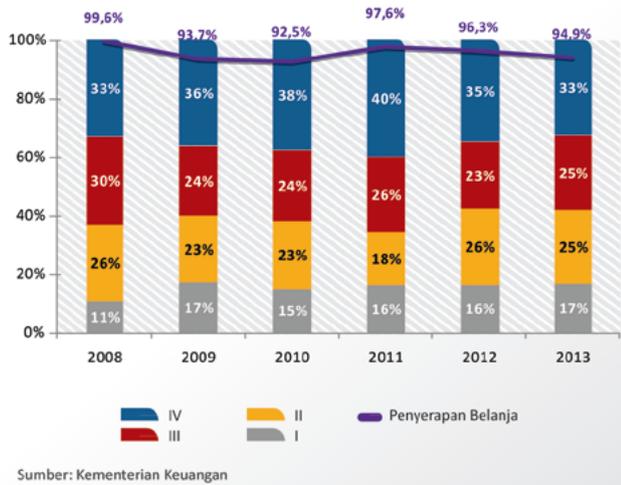
Komponen belanja lain seperti belanja pegawai, pembayaran bunga utang dan belanja lainnya secara umum mencatat penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2012. Penyerapan belanja pegawai meningkat dari 93,2% menjadi 95,0%, dipengaruhi penghentian moratorium PNS baru pada bulan Desember 2012. Pembayaran bunga utang juga sesuai pagu anggaran, meningkat dibandingkan pengeluaran pada 2012 yang mencapai 85,3% dari pagu anggaran. Pembayaran bunga utang tercatat meningkat sejalan dengan depresiasi nilai tukar rupiah dan peningkatan suku bunga. Sebaliknya penyerapan belanja barang mengalami penurunan menjadi 81,2% pada tahun 2013 namun secara nominal pertumbuhannya masih meningkat yaitu dari 13,0% pada tahun 2012 menjadi 19,1% pada tahun 2013.

Belanja modal juga mencatatkan peningkatan penyerapan anggaran. Bila pada 2012 tercatat 82,4%, daya serap belanja modal tahun 2013 meningkat menjadi 89,2%. Kenaikan ini dipengaruhi upaya pemerintah meningkatkan serapan belanja modal antara lain melalui penyederhanaan prosedur pencairan anggaran, koordinasi lintas kementerian/lembaga, ekstensifikasi dan intensifikasi perizinan satu atap dan komunikasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian teknis. Peningkatan belanja modal pada semester II 2013 terlihat banyak diarahkan untuk membangun infrastruktur yang dapat efektif mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di industri semen, besi, baja, dan konstruksi.

Peningkatan penyerapan belanja juga terlihat pada bantuan sosial. Penyerapan bantuan sosial tercatat melebihi anggaran yakni 111,7% dari sebesar 87,9% pada tahun 2012. Peningkatan penyerapan bantuan sosial dipengaruhi program pemerintah dalam meminimalkan dampak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, khususnya terhadap daya beli masyarakat miskin. Pemerintah dalam APBN-P 2013 melakukan penghematan belanja atas Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp13,2 triliun dan mengalokasikan dana sebesar Rp29,4 triliun untuk bantuan sosial.

Bantuan sosial tersebut meliputi 4 program utama. Pertama, Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang merupakan bantuan tunai langsung sebesar Rp150.000 per bulan selama empat bulan untuk 15,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang disalurkan dalam 2 tahap. Realisasi penyaluran BLSM tahap I yang mencapai 98,5% dan tahap II mencapai 98,1%. Kedua, tambahan alokasi subsidi pangan dalam bentuk Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) sebanyak 15 kilogram per rumah tangga selama 3 bulan yaitu bulan Juni, Juli, dan September 2013 sehingga alokasi beras per Rumah Tangga Miskin (RTM) menjadi 30 kilogram per bulan. Ketiga, tambahan nilai bantuan dan jumlah cakupan siswa penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM). Cakupan BSM meningkat dari sebelumnya sebesar 8,7 juta anak usia sekolah menjadi 16,6 juta anak usia sekolah. Keempat, tambahan nilai bantuan untuk 2,4 juta rumah tangga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) dari rata-rata sebesar Rp1,4 juta per tahun menjadi Rp1,8 juta per tahun. Selain itu Pemerintah juga menjalankan Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur (P4I) yang terdiri dari : (i) Program Infrastruktur Permukiman yang mencakup 13.000 desa dan 1.200 kelurahan; (ii) Program Sistem Penyediaan Air Minum yang mencakup 159 kawasan di 28 provinsi, 341 kawasan perkotaan di 31 provinsi, dan 260 desa rawan air di 29 provinsi, dan (iv) Program Infrastruktur Sumber Daya Air di 27 provinsi rawan air.

Kenaikan daya serap pada beberapa komponen belanja negara seperti belanja pegawai, belanja modal dan bantuan sosial terlihat juga dibarengi perbaikan pola waktu pelaksanaan pencairan belanja. Hal ini tergambar pada penyerapan belanja pada triwulan IV 2013 yang menurun dibandingkan dengan pola tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, penyerapan belanja triwulan IV 2013 tercatat sebesar 33% dari total realisasi belanja, menurun bila dibandingkan dengan penyerapan pada triwulan IV 2012 sebesar 35% dari total belanja (Grafik 7.6). Pola penyerapan



Grafik 7.6. Perkembangan Penyerapan Belanja Triwulanan

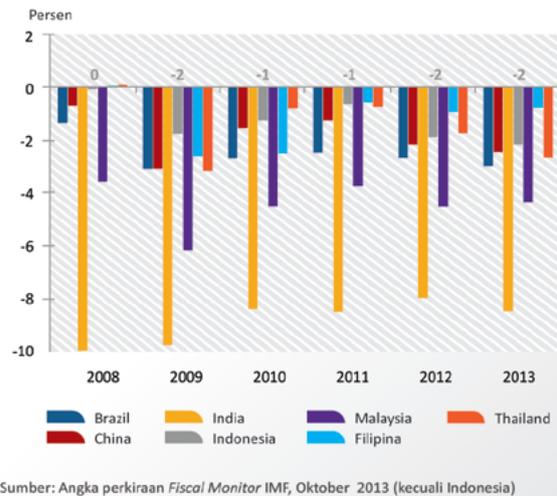
pada triwulan IV 2013 bahkan lebih baik dari rata-rata penyerapan pada triwulan IV selama 6 tahun terakhir yang mencapai 36,2%.

Pada tahun 2013 langkah-langkah Pemerintah telah berhasil meningkatkan penyerapan anggaran pada beberapa komponen belanja. Namun demikian secara keseluruhan, penyerapan belanja masih belum optimal. Belum optimalnya penyerapan ini disebabkan oleh beberapa kendala dari sisi penerimaan serta beberapa masalah dalam penyerapan belanja Pemerintah seperti kendala teknis perijinan/pembebasan lahan (Lihat Boks 7.1. Penyerapan Belanja Pemerintah Pusat).

7.3. Pembiayaan

Secara keseluruhan, respons Pemerintah dalam memitigasi risiko yang dapat mengganggu ketahanan fiskal tahun 2013 dapat mengendalikan operasi keuangan pemerintah tahun 2013. Meskipun meningkat dibandingkan dengan defisit APBN-P 2012 sebesar Rp152,9 triliun atau setara 1,9% dari PDB, defisit APBN-P 2013 dapat dikendalikan pada level Rp209,5 triliun atau setara 2,3% dari PDB. Realisasi defisit APBN-P 2013 ini juga jauh lebih kecil dari potensi kenaikan hingga 3,8% dari PDB bila Pemerintah tidak merespons berbagai risiko dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Bila dibandingkan dengan negara-negara *emerging market* lainnya, defisit APBN-P 2013 juga tercatat masih lebih kecil, kecuali dengan Filipina (Grafik 7.7).

Namun, di balik defisit APBN-P 2013 yang terkendali tersebut, keseimbangan primer pada APBN-P 2013



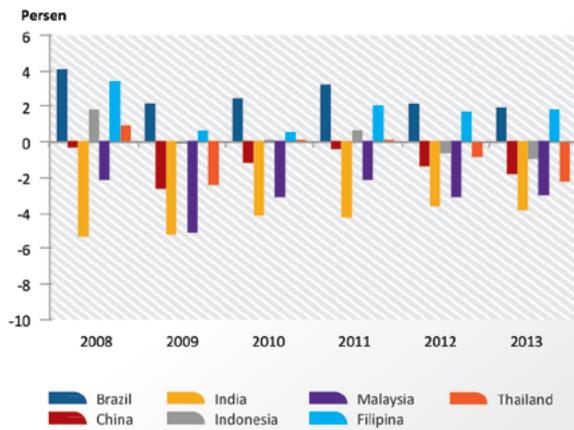
Grafik 7.7. Rasio Defisit Fiskal Beberapa Negara *Emerging Market*

kembali mencatat defisit. Perkembangan ini akibat masih besarnya belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Defisit keseimbangan primer pada tahun 2013 tercatat Rp96,8 triliun atau 1,1% PDB, meningkat dibandingkan dengan defisit tahun lalu yang sebesar Rp52,6 triliun atau 0,6% terhadap PDB. Meskipun demikian, defisit keseimbangan primer Indonesia relatif masih terkendali, seperti tergambar pada defisit APBN-P 2013 yang lebih kecil bila dibandingkan dengan defisit di beberapa negara *emerging market* (Grafik 7.8).⁶

Pada tahun 2013, pembiayaan defisit APBN-P 2013 didukung oleh strategi untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan risiko pembiayaan. Sumber pembiayaan Pemerintah terutama berasal dari pembiayaan dalam negeri. Strategi *front loading* tidak lagi digunakan, tetapi diubah dengan waktu penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang disesuaikan dengan kebutuhan kas negara. Perubahan strategi ini mengakibatkan realisasi penerbitan SBN secara periodik hampir selalu lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Namun, peningkatan efisiensi tersebut menghadapi tantangan terkait imbal hasil SBN yang meningkat cukup tinggi sejalan dengan kenaikan inflasi setelah kenaikan harga BBM bersubsidi pada tanggal 22 Juni 2013. Peningkatan imbal hasil SBN tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada pertengahan bulan September 2013.

Untuk pembiayaan defisit APBN-P 2013 tersebut, selain menerbitkan SBN reguler, pada tahun 2013 Pemerintah

⁶ Kecuali Indonesia, data tahun 2013 merupakan prakiraan IMF dengan PDB yang digunakan adalah PDB dengan *Purchasing Power Parity (PPP)*.



Sumber: Angka perkiraan *Fiscal Monitor* IMF, Oktober 2013 (kecuali Indonesia)

Grafik 7.8. Keseimbangan Primer Beberapa Negara Emerging Market

juga menerbitkan Obligasi Ritel Indonesia (ORI), *global bond*, dan SUN (Surat Utang Negara) valas di pasar perdana domestik. Penerbitan *global bond* adalah bagian dari rencana penerbitan *Global Medium Term Notes (GMTN)* sebesar total 25 miliar dolar AS, sementara penerbitan ORI dan SUN berdenominasi valas bagi pasar domestik adalah bagian dari strategi pendalaman pasar SBN. Keseluruhan penerbitan ini memperoleh respons pasar yang cukup baik.

Secara keseluruhan, strategi pembiayaan defisit APBN-P 2013 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp20,5 triliun.⁷ Total pembiayaan tahun 2013 mencapai Rp230,1 triliun atau 102,6% dari pembiayaan APBN-P 2013 (Grafik 7.9). Capaian pembiayaan yang melebihi rencana ini disebabkan penerbitan SBN yang masih dijalankan sesuai anggaran dan terdapat rencana investasi Pemerintah yang tidak terealisasi pada tahun 2013. Akumulasi SiLPA dapat digunakan untuk memenuhi pembayaran kewajiban *carry over* di tahun-tahun berikutnya seperti pembayaran sebagian subsidi BBM dan LPG 3 kilogram tahun 2013 yang belum dibayarkan pada tahun 2013.

Terkendalnya defisit APBN-P 2013 yang didukung oleh strategi pembiayaan tersebut pada gilirannya mendukung tetap terjaganya utang pemerintah dalam tingkat yang sehat. Meskipun secara nominal meningkat dari Rp1.991 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp2.371 triliun, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada tahun 2013 hanya

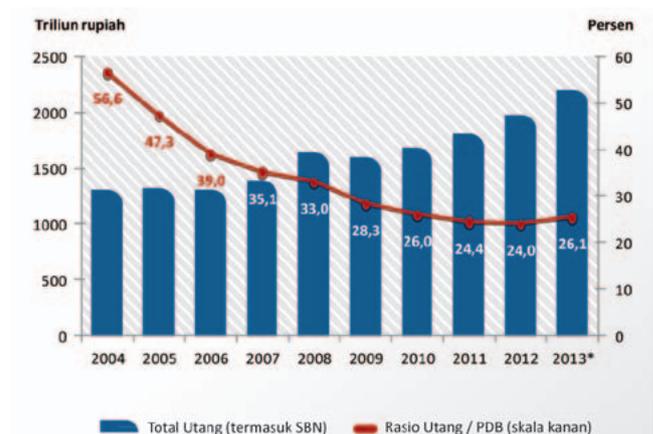
⁷ Berdasarkan Siaran Pers Kemenkeu tanggal 5 Januari 2014. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan disebut SiLPA, dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran disebut SiKPA, sementara hasil akumulasinya disebut Saldo Anggaran Lebih (SAL).



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 7.9. Perkembangan Pembiayaan APBN

mengalami sedikit peningkatan dari 24,0% PDB menjadi 26,1% PDB pada tahun 2013 (Grafik 7.10). Secara historis, peningkatan rasio ini baru pertama kali terjadi sepanjang tren penurunan rasio utang sejak tahun 2001. Meskipun perkembangan ini perlu dicermati, tingkat rasio saat ini masih di bawah batasan maksimal rasio utang dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebesar 60% dari PDB.⁸ Rasio utang ini menunjukkan bahwa utang pemerintah masih dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi menjadi lebih besar.



Sumber: Kementerian Keuangan

Grafik 7.10. Perkembangan Utang Pemerintah

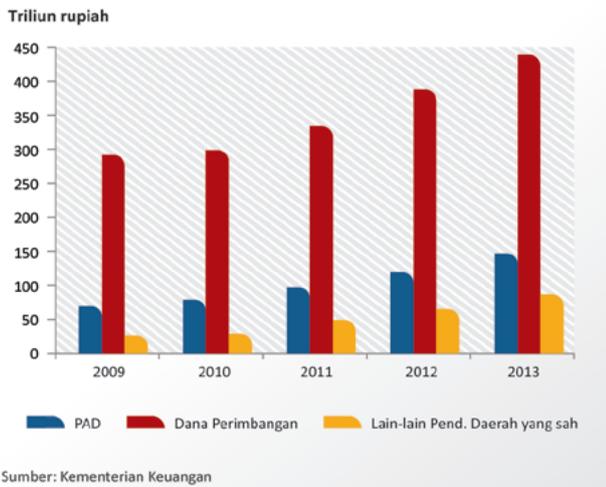
⁸ Penjelasan pasal 12 ayat 3 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa "Jumlah pinjaman (utang) dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto". Angka ini merujuk pada batasan maksimal dalam Maastricht treaty.

7.4. Fiskal Daerah

Di tengah kondisi tetap terkendalinya keuangan pemerintah pusat dalam APBN-P 2013, kinerja fiskal daerah terindikasi belum cukup optimal. Dari sisi pendapatan daerah, perkembangan tahun 2013 menunjukkan peran dana perimbangan masih cukup dominan sebagai sumber pendapatan di sebagian besar daerah. Meskipun pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat cukup tinggi yakni 24,5% pada tahun 2013, secara nasional peran Dana Perimbangan masih cukup besar yakni Rp432,7 triliun atau sekitar 66,3% dari total pendapatan daerah (Grafik 7.11).

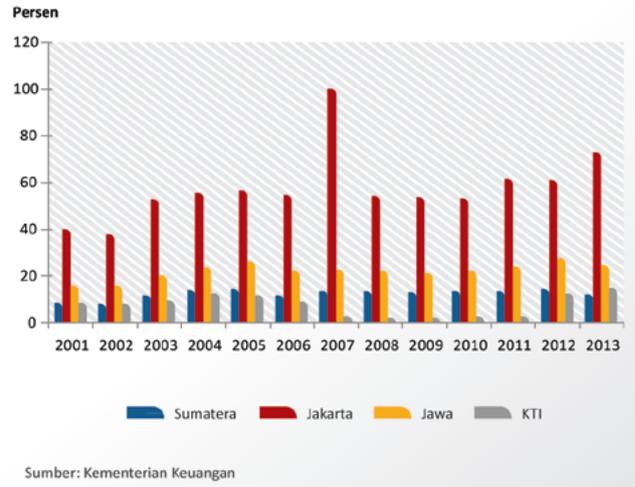
Peran besar dana perimbangan dalam pendapatan daerah terjadi di hampir semua kawasan. Hal ini tercermin dari rata-rata rasio kemandirian di berbagai kawasan yang masih cukup rendah yakni sekitar 29,5% (Grafik 7.12).⁹ Dalam hal ini kawasan Jakarta merupakan pengecualian. Pangsa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta terhadap total pendapatan dalam 3 tahun terakhir mencapai lebih dari 60%. Tingginya PAD di kawasan Jakarta bersumber dari pendapatan pajak terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, dan pajak reklame. Peran PAD di Jakarta yang besar tersebut juga tercermin pada rasio kemandirian yang cukup tinggi dan dalam tren meningkat sejak tahun 2011 (Grafik 7.12).

Dari sisi belanja, peran fiskal daerah belum cukup kuat sebagaimana tercermin dari masih belum optimalnya



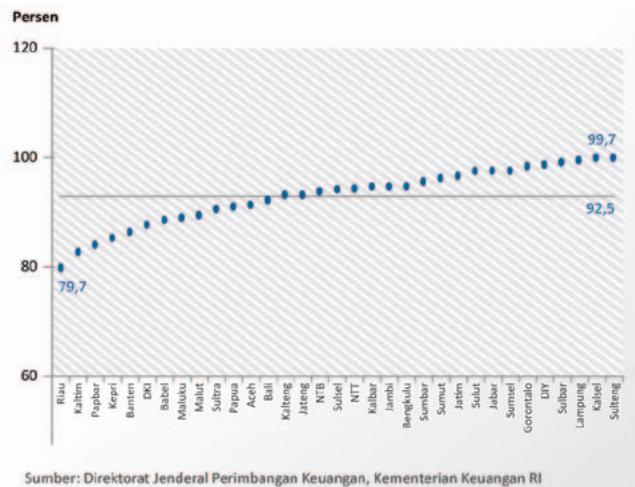
Grafik 7.11. Komposisi Pendapatan Daerah dalam APBD

9 Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah.

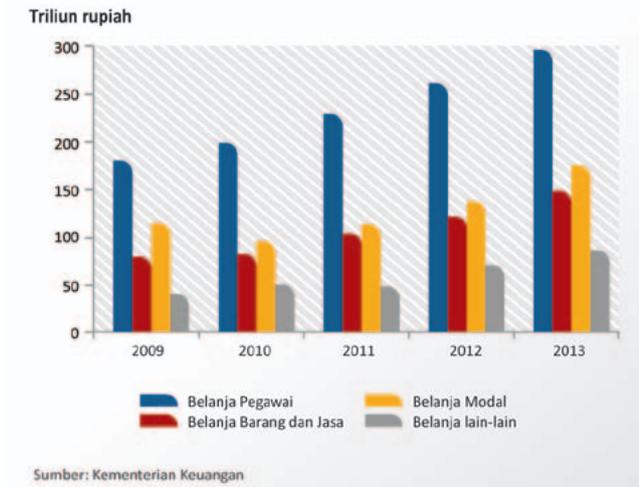


Grafik 7.12. Rasio Kemandirian Daerah

daya serap belanja daerah terhadap APBD, meskipun daya serap terhadap dana perimbangan sudah meningkat. Data menunjukkan bahwa daya serap belanja pemda terhadap dana perimbangan pada tahun 2013 sedikit meningkat dari 95,4% pada tahun 2012 menjadi 101,1%. Namun, rata-rata penyerapan belanja daerah tersebut terlihat masih belum optimal karena diperkirakan baru mencapai 92,5% dari anggaran. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi periode yang sama tahun 2012 (96,2%) dan tahun 2011 (98,8%). Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 13 provinsi yang memiliki realisasi belanja di bawah rata-rata dengan estimasi realisasi belanja terendah terjadi di Provinsi Riau, yakni sebesar 79,7%. Sebaliknya, terdapat 20 provinsi dengan realisasi belanja di atas rata-rata,



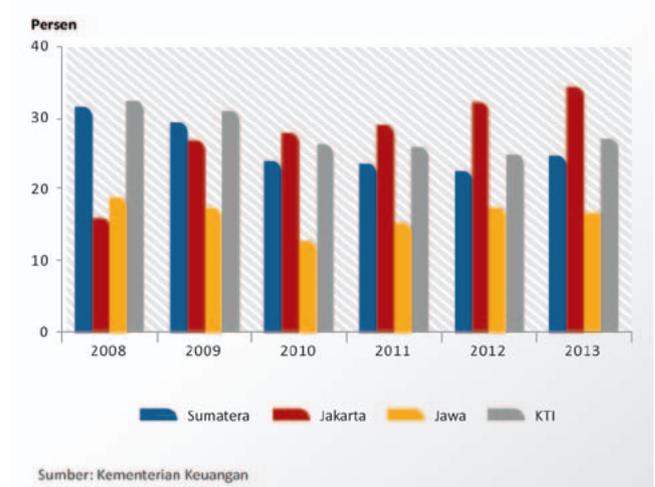
Grafik 7.13. Estimasi Realisasi Belanja Daerah



Grafik 7.14. Komposisi Belanja Daerah dalam APBD 2009-2013

dengan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai provinsi dengan penyerapan tertinggi sebesar 99,7% (Grafik 7.13). Daya serap belanja daerah yang belum optimal ini kemudian berdampak pada posisi rekening pemda di perbankan masih berada pada level cukup tinggi yakni sebesar Rp181,1 triliun, atau naik Rp15 triliun dari posisi akhir tahun 2012.

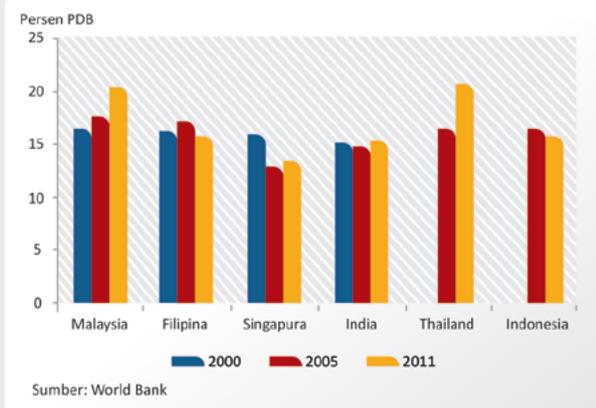
Peran belanja daerah yang belum optimal juga tergambar pada komponen belanja daerah. Secara nasional, belanja pegawai di daerah masih cukup dominan dalam belanja daerah yakni mencapai Rp296 triliun atau 41,9% terhadap total belanja pada tahun 2013 (Grafik 7.14). Berdasarkan kawasan, penggunaan



Grafik 7.15. Pangsa Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

terbesar belanja pegawai terhadap total belanja daerah terdapat di kawasan Jawa dan Sumatera, sedangkan di Jakarta tercatat cukup rendah. Sementara itu, belanja modal masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yakni mencapai 24,8% pada tahun 2013, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 23,2%. Rendahnya penyerapan belanja modal antara lain disebabkan masalah agraria terkait pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur dan kendala administratif pengadaan. Rendahnya belanja modal juga terkait dengan prioritas utama alokasi belanja beberapa pemerintah daerah yang lebih terserap pada pembangunan dan renovasi gedung pemerintahan (Grafik 7.15).

Boks 7.1. Penyerapan Belanja Pemerintah Pusat



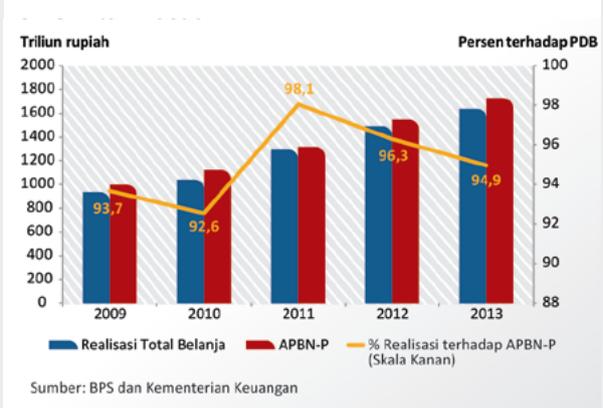
Grafik 1. Belanja Pemerintah Negara Kawasan

Pemerintah melalui kebijakan fiskal mempunyai peran penting dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu alat yang dapat digunakan pemerintah untuk tetap menjaga kinerja perekonomian adalah melalui belanja pemerintah. Pada saat perekonomian mengalami *overheating*, Pemerintah mengendalikan belanjanya sebagai upaya untuk menjaga stabilitas perekonomian. Sementara itu, pada saat terjadi perlambatan perekonomian, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan belanja pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian juga pada saat terjadinya *shock* eksternal, belanja pemerintah berperan sebagai stabilisator bagi perekonomian.¹ Secara empiris, penelitian dengan menggunakan sampel 30 negara berkembang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi.²

Jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan, rasio anggaran belanja pemerintah Indonesia relatif tidak berbeda dengan negara-negara di kawasan. Selama kurun waktu 2005-2011, anggaran belanja pemerintah mencapai rata-rata 16,6% dari PDB, lebih

1 Kebijakan fiskal sebagai penyeimbang pertumbuhan ekonomi dikenal dengan istilah *countercyclical*.

2 Bose, Niloy et al, *Public Expenditure and Economic Growth: A Disaggregated Analysis for Developing Countries*, Juni 2003 mengikutsertakan Indonesia sebagai sampel.



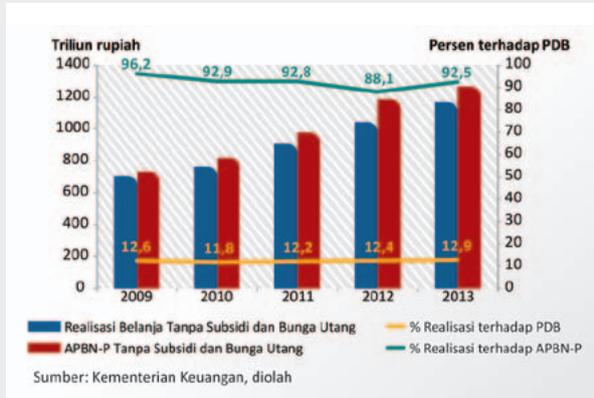
Grafik 2. Perkembangan Penyerapan Belanja Pemerintah Pusat

tinggi dibandingkan Singapura & India sementara anggaran belanja Malaysia, Thailand dan Filipina masing-masing mencapai rata-rata 19,2%, 18,2% dan 16,8% (Grafik 1).

Meskipun demikian, daya serap anggaran belanja pemerintah terindikasi belum maksimal. Hal ini tampak dari penyerapan belanja pemerintah pusat yang selalu di bawah pagu yang ditetapkan sejak tahun 2008 dan bahkan mengalami tren penurunan selama tiga tahun terakhir (Grafik 2). Cukup sejalan dengan hal tersebut, kontribusi konsumsi Pemerintah terhadap PDB juga relatif stagnan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Grafik 3).



Grafik 3. Porsi Belanja dan Konsumsi Pemerintah terhadap PDB

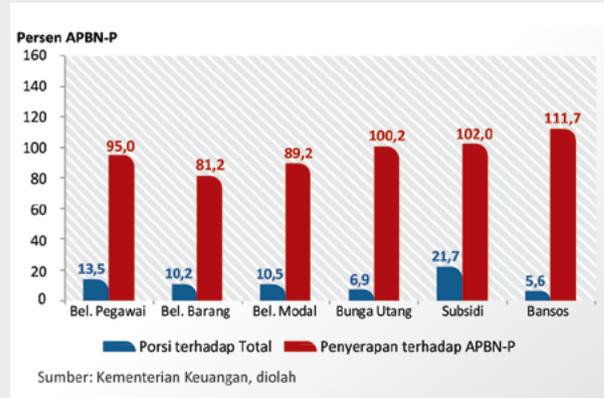


Grafik 4. Porsi Belanja Pemerintah Tanpa Subsidi dan Bunga Utang

Apabila tidak memperhitungkan belanja subsidi dan pembayaran bunga utang, tren penurunan penyerapan belanja pemerintah dapat terlihat dalam 5 tahun terakhir, walaupun sedikit meningkat pada tahun 2013³ (Grafik 4). Peningkatan belanja yang besar terutama terjadi pada komponen belanja barang yang terdorong oleh aktivitas pemilu, sebagaimana terlihat dari peningkatan porsi belanja barang terhadap total belanja (Grafik 5).

Penyerapan belanja Pemerintah tahun 2013 terkendala faktor pembebasan lahan, tingkat kehati-hatian, dan penurunan penerimaan. Masalah pembebasan lahan dan tingkat kehati-hatian (*prudential level*) turut memengaruhi kecepatan dan ketepatan daya serap anggaran. Selain kendala-kendala yang melekat pada belanja, faktor penurunan penerimaan, khususnya penerimaan perpajakan ditengarai turut memengaruhi daya serap anggaran pada tahun 2013. Berkurangnya pendapatan dari pajak tersebut menyebabkan Pemerintah harus mengerem tingkat belanjanya untuk menjaga tingkat kesinambungan fiskal yang antara lain terindikasi dari total defisit dan keseimbangan primer yang memburuk. Total realisasi defisit tahun 2013 adalah sebesar 2,3% dari PDB, meningkat dari total defisit tahun lalu yang sebesar 1,9% dari PDB. Keseimbangan primer sejak tahun lalu telah mencatatkan defisit yang jumlahnya semakin meningkat yaitu dari 0,6% dari

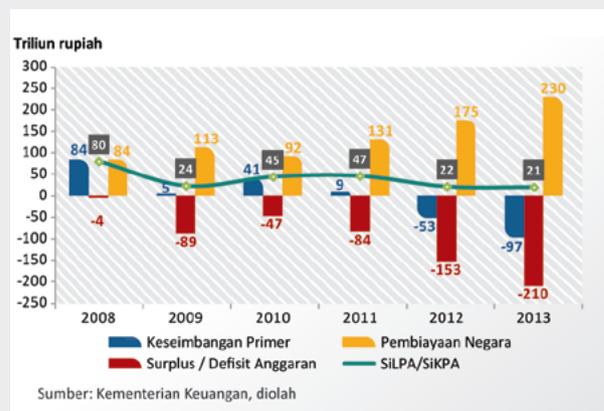
3 Dalam hal ini belanja subsidi dan bunga utang dalam perekonomian dipandang sebagai belanja yang dikeluarkan oleh masyarakat (konsumsi swasta).



Grafik 5. Penyerapan dan Komposisi Komponen Belanja 2013

PDB pada tahun 2012 menjadi 1,1% dari PDB pada tahun 2013.

Di sisi lain, Pemerintah juga harus menanggung biaya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang merupakan deviasi antara pembiayaan yang dihimpun pemerintah dan realisasi defisit pemerintah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir SiLPA tercatat cukup besar, dengan rata-rata mencapai 25,4% dari total pembiayaan. Implikasi dari keberadaan SiLPA adalah terdapatnya potensi dana yang masih dapat digunakan, sementara Pemerintah sudah harus membayar bunga atau imbal hasil atas dana tersebut. Pada akhir tahun 2013, operasi keuangan Pemerintah telah menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp30,0 triliun namun diperkirakan menghasilkan tambahan SiLPA baru sebesar Rp20,5 triliun (Grafik 6).



Grafik 6. Perkembangan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA)



Sistem Keuangan

Stabilitas sistem keuangan secara umum tetap terjaga sehingga mendukung penyesuaian ekonomi. Stabilitas sistem keuangan ditopang oleh ketahanan perbankan yang tetap kuat. Sementara itu, kinerja pasar saham dan pasar obligasi menurun dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global dan melambatnya ekonomi domestik.

Stabilitas sistem keuangan (SSK) pada tahun 2013 tetap terjaga, meskipun sempat mengalami tekanan pada paruh kedua 2013 terimbas perlambatan ekonomi dan gejolak pasar keuangan global. Hal ini tercermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan pada 2013 yang tercatat sebesar 1,08 atau relatif stabil dibandingkan dengan 2012.

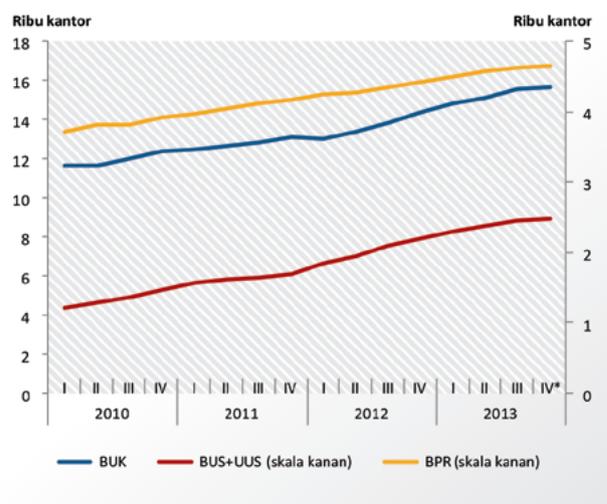
Tetap terjaganya SSK sejalan dengan tetap meningkatnya kinerja perbankan nasional yang tercermin dari naiknya volume kredit dan laba perbankan, dengan didukung oleh perbaikan efisiensi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh perbankan dalam mempertahankan profitabilitas di tengah perlambatan ekonomi domestik. Kinerja perbankan nasional yang meningkat juga didukung ketahanan perbankan yang kuat. Ketahanan perbankan yang kuat dan kinerja yang meningkat telah memberi ruang yang cukup bagi industri perbankan untuk menyerap peningkatan risiko-risiko, terutama potensi peningkatan risiko kredit. Namun demikian, potensi risiko ini tetap perlu dimitigasi dengan baik.

Sementara itu, tekanan terhadap SSK terutama dirasakan di pasar saham dan obligasi, namun dapat kembali pulih di penghujung tahun 2013. Kinerja pasar saham domestik tercatat menurun terimbas faktor risiko eksternal dan domestik yang meningkat. Meskipun menurun, kinerja pasar saham Indonesia masih lebih baik dibandingkan bursa saham di negara kawasan, seperti China dan Thailand. Di penghujung tahun 2013, IHSG yang terkoreksi mampu berbalik arah (*rebound*) dan menahan kejatuhan yang lebih dalam. Pasar obligasi Surat Berharga Negara (SBN) juga mengalami koreksi. Penurunan kinerja pasar SBN ditunjukkan oleh kenaikan imbal hasil tiap tenor, termasuk SBN dengan tenor 10 tahun. Momentum kenaikan imbal hasil dan penurunan harga pada pasar SBN dimanfaatkan oleh investor nonresiden dengan menambah kepemilikannya.

8.1. Kinerja Perbankan

Kinerja industri perbankan, sebagai bagian dari sektor keuangan Indonesia, tetap solid dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga. Stabilitas sistem keuangan didukung oleh kinerja perbankan yang positif baik dari sisi fungsi intermediasi perbankan maupun efisiensi.

Secara keseluruhan, industri perbankan yang terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) juga masih mendominasi struktur sistem keuangan Indonesia. Hal ini



Grafik 8.1. Jumlah Kantor Bank Tahun 2010-2013

terlihat pada peningkatan pangsa pasar total aset industri perbankan terhadap sistem keuangan, yang tercatat sebesar 78,8%, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 77,9%.¹ Peningkatan total aset didukung oleh perluasan jaringan usaha Bank, meskipun jumlah Bank Umum masih tetap sebesar 120 bank, dengan komposisi 109 Bank Umum Konvensional (BUK) dan 11 Bank Umum Syariah (BUS)². Perluasan jaringan usaha bank terlihat dari peningkatan jumlah kantor BUK serta BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS) (Grafik 8.1). Jumlah kantor BUK tercatat sebesar 16.062 kantor, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 14.398 kantor. Sementara itu, jumlah kantor BUS dan UUS mencapai 2.492 kantor, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 2.227 kantor.³ Sebaliknya, jumlah BPR pada tahun 2013 mengalami penurunan sebanyak 14 BPR, terkait adanya pencabutan izin usaha (5 BPR) dan merger (17 BPR) yang diikuti dengan pembukaan BPR baru (8 BPR). Pencabutan izin usaha dan merger beberapa BPR tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan industri BPR.⁴

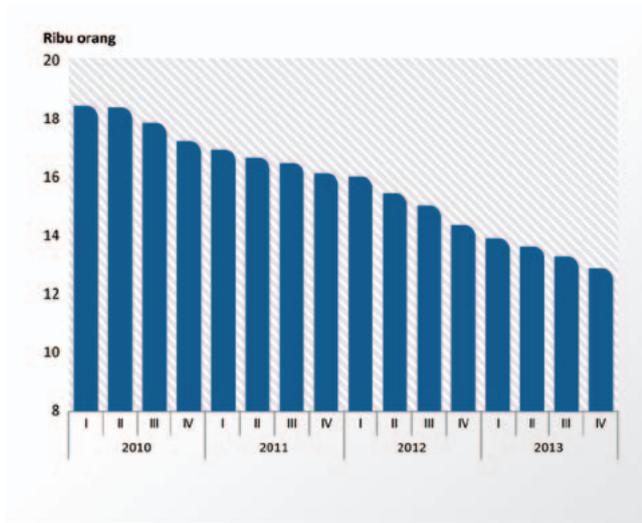
Peningkatan jaringan kantor bank tersebut, selain untuk mendukung ekspansi usaha juga mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap sistem keuangan (*financial inclusion*). Peningkatan akses tersebut antara lain dapat diukur dengan rasio antara jumlah kantor bank dan jumlah

1 Kajian Stabilitas Keuangan (KSK) Maret 2014.

2 Jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) tercatat sebanyak 554 unit, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebanyak 493 unit.

3 Angka sementara berdasarkan data BUS dan UUS November 2013.

4 Pada tahun 2013, jumlah BPR tercatat sebanyak 1.639 BPR terdiri dari 1.378 BPR Perseroan Terbatas, 228 BPR Perusahaan Daerah dan 33 BPR Koperasi.



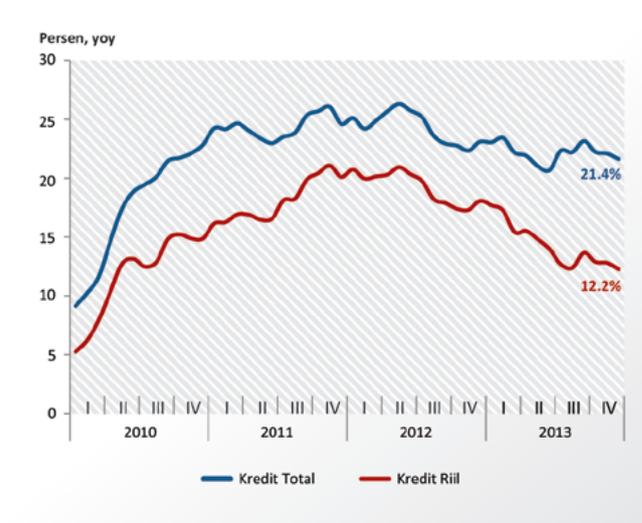
Grafik 8.2. Rasio Densitas

penduduk (*density ratio*). Dari tahun ke tahun, rasio *density* perbankan semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Selama tahun 2013, satu kantor bank dapat melayani 12.878 orang, membaik dibandingkan tahun lalu yang melayani 14.294 orang (Grafik 8.2).

Dari sisi intermediasi, kinerja perbankan masih menunjukkan perkembangan positif meskipun cenderung melambat. Sejalan dengan perlambatan ekonomi, industri perbankan telah melakukan penyesuaian kecepatan pertumbuhannya sehingga hanya tumbuh 21,4% dibandingkan tahun lalu yang mencapai 23,1%. Hal ini dilakukan oleh bank untuk memitigasi potensi risiko kredit (Grafik 8.3). Secara riil, pertumbuhan kredit pada tahun ini jauh melambat dibandingkan tahun lalu yaitu dari 18,02% menjadi sebesar 12,2%. Perlambatan pertumbuhan kredit terutama terjadi di sektor konsumsi khususnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) sebagai dampak kebijakan *Loan to Value (LTV)*⁵ yang ditempuh Bank Indonesia sejak Juni 2012. Selain itu, perbankan juga menahan ekspansi kredit kepada korporasi yang dianggap sensitif terhadap perlambatan ekonomi.

Sementara itu, peran perbankan dalam pembangunan nasional semakin meningkat yang tercermin dari rasio kredit terhadap PDB Indonesia pada 2013 yang tercatat sebesar 36%, meningkat dari tahun 2012 yang sebesar 32%. Namun demikian, rasio tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan negara kawasan seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang telah berada di atas 100%

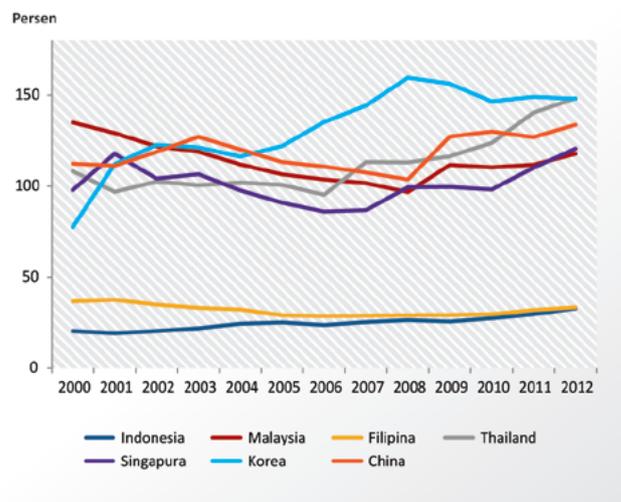
⁵ Penjelasan lebih lanjut mengenai penyesuaian kebijakan LTV dapat dilihat pada Bab 11 Kebijakan Makroprudensial dan Mikroprudensial.



Grafik 8.3. Pertumbuhan Kredit

(Grafik 8.4). Relatif rendahnya rasio kredit terhadap GDP antara lain disebabkan oleh suku bunga kredit perbankan yang masih cukup tinggi dibandingkan negara lain terkait tingginya biaya dana (*cost of funds*).

Berdasarkan tujuannya, penyaluran kredit produktif masih tetap dominan dibandingkan dengan kredit konsumsi. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan Kredit Investasi (KI) yang cukup besar yaitu 35%, dari tahun 2012 yang sebesar 27,4% (Grafik 8.5). Secara riil, KI juga meningkat menjadi 24,5% dari tahun 2012 yang sebesar 22,16%. Pertumbuhan Kredit investasi yang meningkat di tengah penurunan sumbangan investasi terhadap PDB, menunjukkan bahwa kalangan pebisnis masih optimis terhadap kondisi perekonomian nasional dalam jangka menengah panjang. Disamping



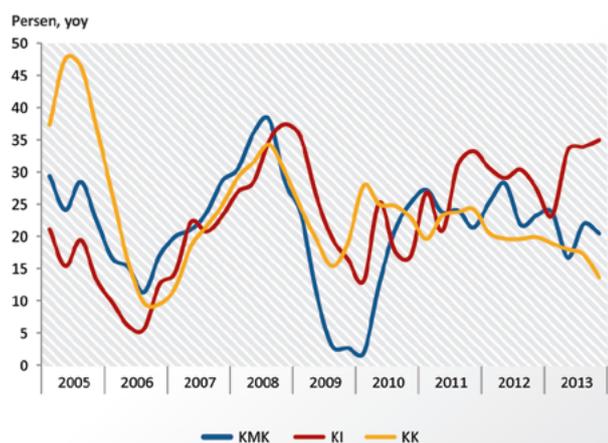
Grafik 8.4. Rasio Kredit Terhadap PDB

itu, hal ini juga menunjukkan bahwa korporasi yang dibiayai KI pada 2013 masih memerlukan waktu untuk memberikan hasil kontribusi terhadap perekonomian. Sementara itu, pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) cenderung melambat. Pertumbuhan KMK tercatat hanya mencapai 20,43%, melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 23,21%. Terkait Kredit Konsumsi (KK), pertumbuhannya tercatat sebesar 15,25%, melambat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 19,87%. Hal ini sebagai dampak dari kebijakan LTV dan *Down Payment* (DP) yang berlaku sejak Juni 2012 serta perluasan kebijakan LTV yang secara efektif berlaku mulai 30 September 2013. Di samping itu, perlambatan pertumbuhan KK juga disebabkan oleh perbankan yang lebih selektif dalam menyalurkan kredit. Hal ini untuk memitigasi risiko penurunan kemampuan mengangsur masyarakat golongan menengah ke bawah, sebagai dampak dari perlambatan ekonomi dan peningkatan inflasi.

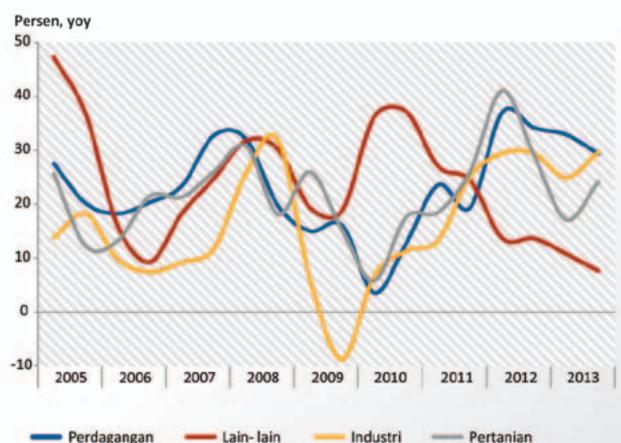
Berdasarkan sektornya, pada 2013, hampir semua sektor ekonomi mengalami perlambatan pertumbuhan kredit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan empat sektor ekonomi dengan pangsa kredit terbesar, perlambatan kredit terutama terjadi pada sektor lain-lain, sektor perdagangan dan sektor pertanian (Grafik 8.6). Perlambatan kredit di sektor lain-lain sejalan dengan perlambatan kredit konsumsi. Sementara itu, perlambatan kredit di sektor perdagangan sejalan dengan perlambatan ekonomi dan kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, sehingga pedagang cenderung bertindak lebih rasional dengan menjaga persediaan barang sesuai dengan jumlah permintaan. Perlambatan kredit di sektor perdagangan juga sejalan dengan perlambatan penjualan barang-barang impor sebagai dampak dari kebijakan

Pemerintah dan Bank Indonesia terkait pengendalian defisit neraca berjalan. Selanjutnya, perlambatan kredit di sektor pertanian terutama terjadi pada kredit ke sub sektor kelapa sawit. Hal ini disebabkan harga *Crude Palm Oil* (CPO) di pasar internasional cenderung turun sejak 2012. Perlambatan ekonomi dan pelemahan mata uang di beberapa negara tujuan terhadap dolar AS, seperti China dan India, juga menyebabkan penurunan ekspor CPO Indonesia dibandingkan tahun lalu. Selain itu, isu negatif tentang CPO Indonesia yang tidak ramah lingkungan oleh beberapa negara Eropa dan AS serta penurunan produksi CPO terkait siklus tanam juga turut memicu perlambatan ekspor CPO Indonesia.

Di lain pihak, di tengah perlambatan ekonomi, pertumbuhan Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada Desember 2013 tercatat sebesar 15,7%, membaik dibandingkan bulan Desember tahun sebelumnya yang hanya mencapai sebesar 14,9% (Grafik 8.7). Dibandingkan dengan pertumbuhan kredit non UMKM yang telah melambat sejak awal tahun, perlambatan kredit UMKM baru terjadi sejak September 2013 yang sempat mencapai 21,21%. Karakteristik pengusaha UMKM yang umumnya lebih berorientasi pada pasar domestik dengan target pasar kalangan menengah bawah menyebabkan pengusaha UMKM lebih tahan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Kredit UMKM sebagian besar juga ditujukan pada sektor perdagangan dengan muatan kandungan impor yang rendah. Sementara penurunan kredit UMKM yang terjadi sejak triwulan IV 2013 lebih disebabkan oleh perlambatan ekonomi dan peningkatan inflasi yang berimbas pada penurunan daya beli masyarakat. Dalam situasi tersebut perbankan berupaya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam rangka memitigasi potensi kredit macet.



Grafik 8.5. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Penggunaan



Grafik 8.6. Pertumbuhan Kredit 4 Sektor Ekonomi Terbesar

Meskipun pertumbuhan kreditnya meningkat, pertumbuhan tersebut belum mampu meningkatkan pangsa pasar kredit UMKM terhadap total kredit perbankan. Hal ini terlihat dari rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan 2013 yang mencapai 19,4%, menurun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 20,4%. Konsentrasi penyaluran juga masih didominasi oleh penyaluran kredit kepada usaha menengah. Berdasarkan sektoral, konsentrasi penyaluran kredit UMKM masih ditujukan pada sektor perdagangan besar dan eceran (53,1%), industri pengolahan (9,9%) dan pertanian (7,9%). Dominasi penyaluran kredit UMKM ke sektor perdagangan terkait dengan kompetensi SDM analis kredit UMKM yang lebih kompeten di sektor perdagangan serta potensi risiko kreditnya yang lebih terukur. Selain itu, dukungan infrastruktur dan lokasi perbankan di perkotaan yang mayoritas berada di dekat sektor perdagangan mempermudah penyaluran dan pemantauan kredit ke sektor tersebut. Tingginya penyaluran kredit UMKM ke sektor perdagangan terlihat dari pertumbuhan kredit pada sektor ini sebesar 29,8% meningkat dari pertumbuhan kredit pada tahun 2012 yang sebesar 22,9%.

Secara umum, risiko kredit UMKM masih terjaga, tercermin dari angka NPL yang berada pada kisaran 3,2%-3,6% dan membaik dibanding tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 3,2%-3,9%. Hal ini juga menunjukkan bahwa risiko kredit UMKM masih dapat dimitigasi dengan baik oleh perbankan. Dengan demikian pangsa kredit UMKM masih berpotensi untuk ditingkatkan untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM minimal 20% pada 2018.

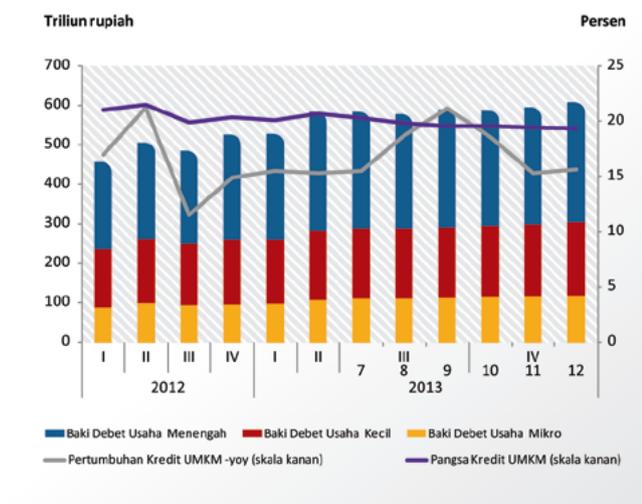
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2013 juga mencatat perkembangan positif. Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Perekonomian, penyaluran

KUR pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp40,8 triliun atau mencapai 113,4% dari target 2013. Akumulasi realisasi KUR sejak tahun 2007 hingga 2013 tercatat sebesar Rp137,7 triliun. Secara geografis, penyaluran KUR belum merata dan masih terpusat di wilayah Jawa (48,6%) yang merupakan pusat perekonomian nasional, diikuti dengan Sumatera (22,6%), Kalimantan (10,4%), Sulawesi (10,9%), Bali (4,5%), dan Papua-Maluku (3%). Dominasi penyaluran KUR di wilayah Jawa terkait dengan ketersediaan infrastruktur dan SDM bank.

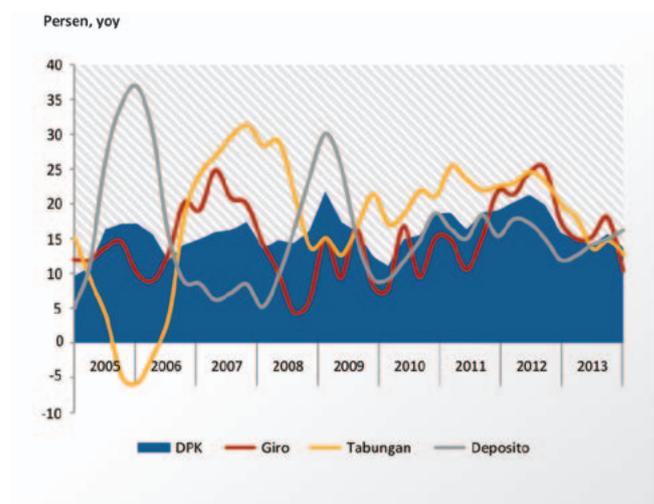
Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran KUR masih didominasi sektor perdagangan (62,9%) dan sektor pertanian termasuk perikanan (19,9%). Dominasi penyaluran kredit KUR ke sektor perdagangan dipengaruhi oleh perputaran usaha perdagangan yang lebih menguntungkan dan risiko yang lebih terukur dibandingkan sektor lainnya. Sementara rendahnya penyaluran KUR pada sektor pertanian disebabkan oleh penilaian risiko usaha yang cukup tinggi karena karakteristik usahanya yang banyak dipengaruhi oleh faktor alam.

Untuk mendukung ekspansi penyaluran kredit tersebut, perbankan masih mengandalkan DPK sebagai sumber utama pembiayaan kredit. DPK pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp3.526,2 triliun atau tumbuh sebesar 13,6%, melambat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 15,8% (Grafik 8.8). Peningkatan tertinggi terjadi pada giro dan deposito yang disebabkan terjadinya pergeseran dana masyarakat dari tabungan ke deposito sebagai dampak dari kebijakan moneter yang lebih ketat.

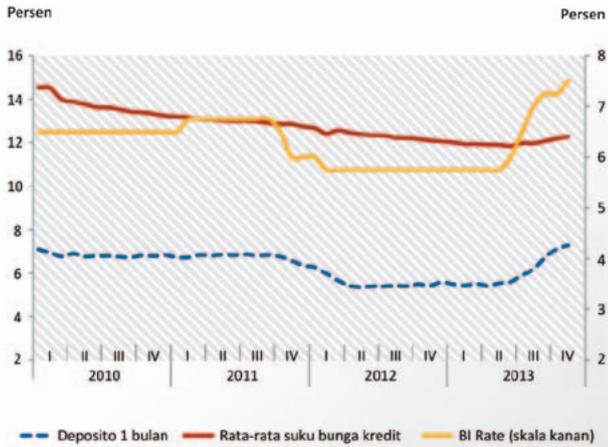
Peningkatan kredit yang tidak ditopang oleh peningkatan DPK telah mendorong Perbankan untuk mencairkan



Grafik 8.7. Penyaluran Kredit UMKM



Grafik 8.8. Perkembangan Dana Pihak Ketiga



Grafik 8.9. Perkembangan Rata-rata Suku Bunga Kredit, Suku Bunga Deposito Rupiah dan BI Rate

alat likuidnya. Pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dibandingkan DPK juga diikuti selisih nominal ekspansi kredit yang lebih besar dibandingkan selisih nominal pertambahan DPK. Hal ini menyebabkan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) meningkat dari 83,8% (2012) menjadi 89,9%. Untuk menutup selisih kekurangan pembiayaan kredit dari DPK, perbankan mencairkan aset likuid yang ditempatkan di Bank Indonesia dan bank lain serta obligasi korporasi. Pencairan sebagian penempatan dana bank di Bank Indonesia sampai akhir 2013 tidak berdampak pada risiko likuiditas sistem perbankan. Hal ini disebabkan rasio likuiditas secara industri masih berada pada level yang cukup tinggi dan masih memadai untuk mengantisipasi potensi risiko penarikan dana bank dalam beberapa periode ke depan.

Struktur pendanaan yang tidak seimbang antara kredit dan DPK menyebabkan persaingan perbankan dalam memperoleh DPK menjadi cenderung meningkat. Hal ini mendorong beberapa bank untuk menaikkan suku bunga dan memberikan *special rate* kepada deposan besar sehingga *spread* suku bunga perbankan menjadi cenderung mengecil. Kondisi ini juga terlihat dari dampak kenaikan BI rate yang langsung direspons oleh perbankan dengan menaikkan suku bunga DPK namun tidak sepenuhnya langsung berpengaruh terhadap suku bunga kredit. Hal ini sejalan dengan perilaku bank yang pada umumnya baru menyesuaikan suku bunga kredit antara 5-6 bulan sejak kenaikan BI Rate (Grafik 8.9).

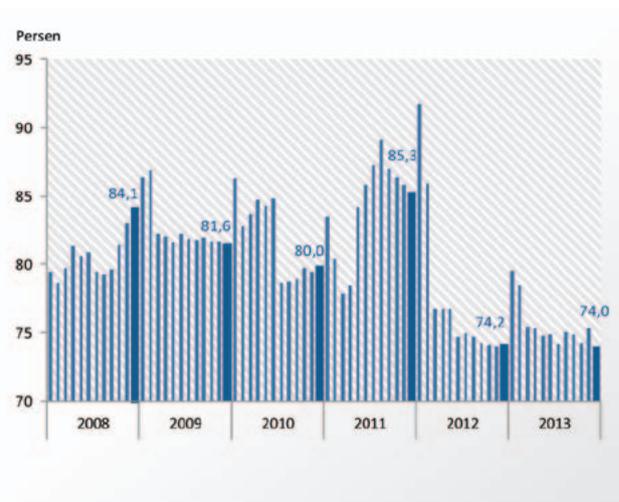
Dari sisi profitabilitas, perbankan mencatat pertumbuhan laba yang positif dan *Return on Assets* (ROA) yang masih terjaga pada kisaran 3% (Grafik 8.10). Rata-rata laba bersih per bulan industri perbankan mengalami peningkatan dari Rp7,74 triliun pada 2012 menjadi Rp8,9 triliun.



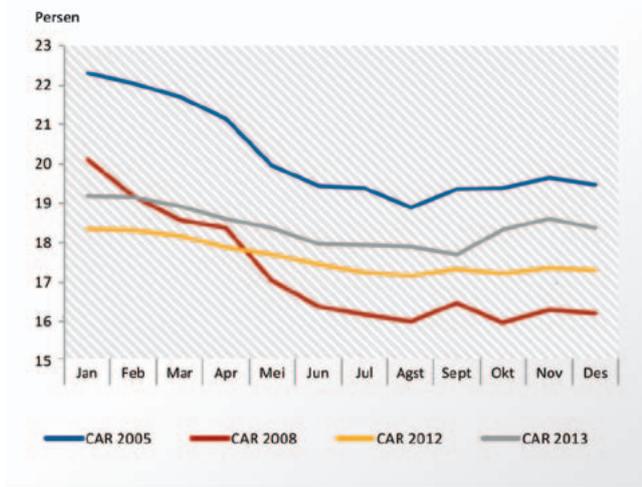
Grafik 8.10. Return on Assets (ROA)

Peningkatan laba berasal dari pendapatan bunga kredit sejalan dengan peningkatan volume dan suku bunga kredit. Disamping itu peningkatan laba juga berasal dari pendapatan nonoperasional lainnya, seperti penyesuaian Cadangan Kerugian Penyusutan Nilai (CKPN). Namun perlambatan perekonomian serta *spread* suku bunga DPK dan kredit yang semakin mengecil sejak semester 2 telah berdampak pada penurunan rasio *Net Interest Margin* (NIM) 2013 menjadi sebesar 4,9%, lebih rendah dari tahun 2012 yang sebesar 5,5%. NIM tersebut masih tetap jauh lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lain seperti Malaysia dan Singapura yang berada pada kisaran 2,6%.

Terkait efisiensi perbankan, rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) membaik. Rasio BOPO tercatat sebesar 74,0%, membaik dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 74,2% (Grafik 8.11). Dari



Grafik 8.11. Rasio BOPO



Grafik 8.12. Perkembangan CAR Perbankan

komponen biaya operasional, biaya dana tercatat meningkat seiring dengan kenaikan BI Rate. Namun demikian, perbankan berhasil melakukan efisiensi sehingga biaya operasional nonbunga (*overhead cost*) dapat ditekan. Dari sisi pendapatan, di samping peningkatan pendapatan dari bunga kredit, juga terdapat peningkatan pendapatan nonbunga (seperti *fee based income*) dan perbaikan CKPN yang cukup besar. Dengan demikian, peningkatan biaya operasional yang terjadi lebih rendah dibandingkan peningkatan perolehan pendapatan operasional.

Dari sisi permodalan, ketahanan perbankan nasional semakin meningkat di tengah tekanan perlambatan ekonomi. Hal ini tercermin dari modal bank umum konvensional pada tahun 2013 yang tercatat sebesar Rp643,4 triliun, meningkat dari tahun 2012 yang sebesar Rp496,8 triliun. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada tahun 2013 sebesar 18,4%, juga meningkat dari tahun 2012 yang sebesar 17,3% (Grafik 8.12). Peningkatan tersebut merupakan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia sehingga rasio permodalan perbankan tetap berada di atas level minimum yang dipersyaratkan⁶, bahkan lebih baik dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 2008. Peningkatan permodalan terutama disebabkan penambahan modal inti sebesar Rp135 triliun yang sebagian besar berasal dari kelompok bank

6 Berdasarkan PBI No.14/18/PBI/2012 tentang KPMM bahwa Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP). Bank Indonesia akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP). Perhitungan modal minimum sesuai profil risiko untuk pertama kali dilakukan untuk posisi Maret 2013 dengan menggunakan peringkat profil risiko posisi Desember 2012.



Grafik 8.13. Pertumbuhan Risiko Kredit

persero dan beberapa BUSN besar. Struktur permodalan bank masih didominasi modal inti (*tier 1 capital*) yang mencapai Rp582,1 triliun (90,5%), sementara komponen modal lainnya (*tier 2 dan tier 3*) hanya mencapai Rp61,3 triliun (9,5%)⁷. Masih tingginya rasio permodalan industri memberikan ruang bagi perbankan untuk melakukan ekspansi usaha dan menyerap tambahan risiko akibat perlambatan ekonomi.

Risiko kredit industri perbankan secara umum juga tetap terjaga. Hal ini tercermin dari masih terkendalinya rasio *Non Performing Loan* (NPL) gross industri perbankan pada 2013 yang hanya mencapai 1,77%, menurun dibandingkan NPL 2012 yang sebesar 1,87% (Grafik 8.13). Penurunan NPL disebabkan perbankan semakin meningkatkan aspek kehati-hatian dalam penyaluran kredit, di tengah melemahnya pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi dan depresiasi nilai tukar. Perbankan juga telah memitigasi risiko penyaluran kredit antara lain kepada beberapa sektor yang sensitif terhadap perlambatan ekonomi, debitur penerima pinjaman valuta asing dengan *cash flow* rupiah, dan debitur yang sensitif terhadap kenaikan suku bunga kredit. Upaya yang telah dilakukan oleh perbankan tersebut diharapkan dapat terus ditingkatkan pada tahun 2014 guna menjaga stabilitas sistem keuangan.

NPL kredit UMKM juga cukup terjaga pada kisaran 3,2% - 3,6%. NPL tertinggi terdapat di sektor konstruksi yang tercatat sebesar 4,8%, diakibatkan oleh kenaikan harga bahan baku yang sebagian besar merupakan barang

7 Tier 1 Capital adalah modal disetor ditambah dengan akumulasi laba. Tier 2 Capital adalah modal pelengkap. Tier 3 Capital adalah modal pelengkap tambahan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada PBI 10/58/PBI/2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

impor. Hal ini sebagai dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan kenaikan suku bunga. Namun, mengingat pangsa kredit UMKM pada sektor konstruksi relatif kecil, hal ini tidak berpengaruh secara signifikan kepada NPL kredit UMKM secara keseluruhan.

Sementara itu, peningkatan NPL KUR 2013 juga dapat dikendalikan seiring dengan adanya skema penjaminan kredit. NPL KUR 2013 tercatat sebesar 3,1%, menurun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,5% terkait dengan berbagai upaya mitigasi risiko yang dilakukan bank bersama Pemerintah.

Dari sisi likuiditas, risiko likuiditas juga masih terjaga di tengah gejolak eksternal dan kebijakan moneter yang ketat. Likuiditas industri perbankan pada paruh kedua 2013 sedikit menurun namun masih aman. Penurunan likuiditas tersebut akibat dari ekspansi kredit yang lebih tinggi dari DPK pada 2013 sehingga mendorong perbankan untuk menggunakan alternatif sumber pendanaan lainnya seperti pencairan sebagian penempatan dana bank di Bank Indonesia. Namun demikian rasio likuiditas industri masih memadai untuk mengantisipasi potensi risiko penarikan dana bank dalam beberapa periode ke depan. Untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan pada paruh kedua 2013, Bank Indonesia telah mengeluarkan bauran kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain penurunan batas atas GWM Sekunder dan GWM LDR.⁸ Upaya tersebut telah berpengaruh pada likuiditas perbankan yang meningkat sejak triwulan IV 2013 serta rasio LDR yang terjaga pada level 89,9% pada Desember 2013.

8.2. Pasar Keuangan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pasar Obligasi

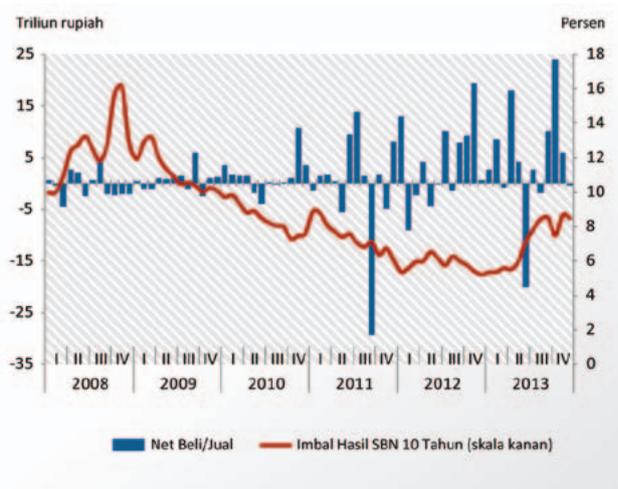
Sentimen negatif yang berasal dari perkembangan ekonomi global dan domestik telah menjadi penyebab turunnya kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN). Dari sisi global, sentimen dipengaruhi oleh risiko ketidakpastian global dan kekhawatiran *tapering off* oleh the Fed. Pernyataan Bernanke pada bulan Mei 2013 yang mengindikasikan *tapering off* akan dilaksanakan dalam waktu dekat merupakan salah satu *trigger* awal penurunan

8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013 tanggal 26 September 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

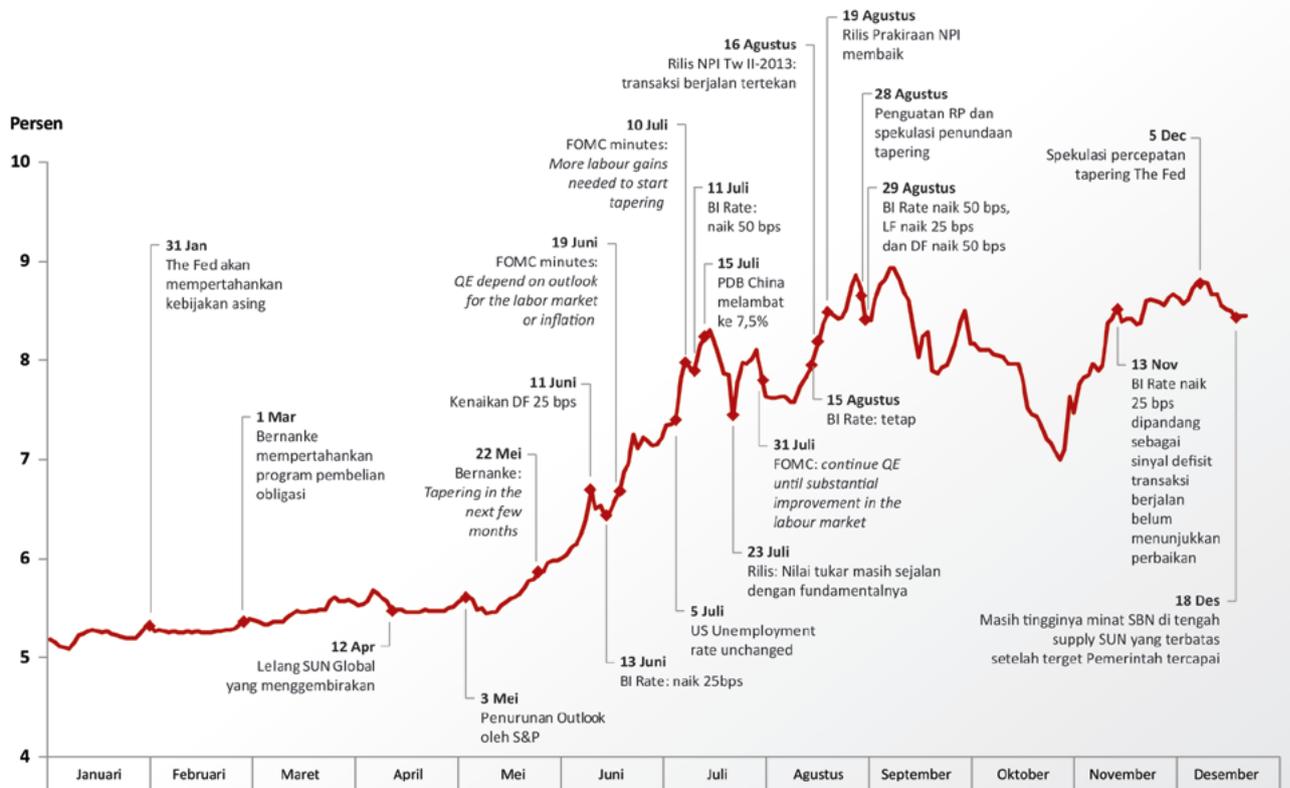
kinerja pasar SBN (Grafik 8.15). Dari sisi domestik, sentimen bersumber dari kekhawatiran meningkatnya inflasi setelah kenaikan harga BBM bersubsidi, perlambatan pertumbuhan ekonomi, ketidakseimbangan eksternal dan pelemahan nilai tukar rupiah. Respons kebijakan moneter ketat dengan menaikkan BI Rate pada tanggal 13 Juni (25 bps), 11 Juli (50 bps), 29 Agustus (50 bps), 12 September (25 bps), dan 12 November 2013 (25bps), juga berdampak signifikan pada kenaikan imbal hasil SBN. Tren kenaikan tersebut secara umum berlanjut hingga akhir tahun 2013.

Penurunan kinerja pasar SBN dapat tertahan sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia. Penurunan kinerja pasar SBN tersebut ditunjukkan oleh kenaikan imbal hasil tiap tenor, termasuk SBN dengan tenor 10 tahun (Grafik 8.14). Imbal hasil SBN dengan tenor 10 tahun pada akhir tahun 2013 tercatat 8,5%, naik sebesar 329 bps dibandingkan pada akhir tahun 2012 yang sebesar 5,2%. Meskipun demikian tren kenaikan imbal hasil SBN tersebut dapat sedikit tertahan, yang tidak terlepas dari strategi Bank Indonesia melaksanakan *dual intervention* di pasar SBN dan pasar valas. Strategi Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk memitigasi berlanjutnya risiko sekaligus mengelola likuiditas rupiah di pasar uang. Selain itu, rilis bulan Agustus mengenai prakiraan NPI yang membaik juga memiliki kontribusi dalam menahan kenaikan imbal hasil SBN lebih lanjut (Grafik 8.15).

Seiring dengan tertahannya kenaikan imbal hasil atau penurunan harga pada pasar SBN, investor nonresiden tercatat menambah kepemilikan SBN (Grafik 8.16). Setelah mengalami net jual pada bulan Juni 2013, investor nonresiden mencatat net beli pada bulan September dan Oktober 2013, masing masing sebesar Rp10,1 triliun dan



Grafik 8.14. Imbal Hasil SBN dan Net Beli Jual Asing



Grafik 8.15. Faktor-Faktor Penggerak Imbal Hasil SBN Tahun 2013

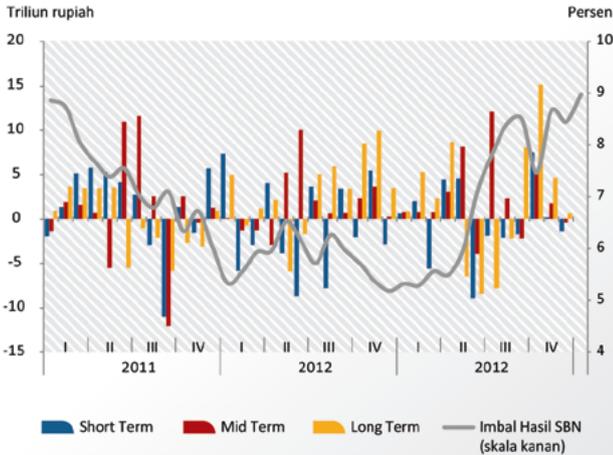
Rp24,0 triliun. Aksi beli oleh investor nonresiden tersebut juga terjadi seiring dengan persepsi positif pasar atas tren perbaikan kondisi fundamental Indonesia.

Di pasar perdana, kinerja pasar SBN mengalami penurunan sebagaimana terlihat dari tingginya imbal hasil yang ditawarkan. Sebagai contoh, imbal hasil SBN untuk tenor 1 tahun yang ditawarkan pada akhir tahun 2013 sebesar 6,6%, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 4,2%. Tingginya imbal hasil tersebut telah mendorong Pemerintah untuk tidak memenangkan beberapa kali lelang SBN, tanpa mengganggu pembiayaan fiskal. Sementara itu, di tengah kenaikan imbal hasil SBN tersebut, selama tahun 2013, jumlah penerbitan SBN (neto) mencapai Rp232,7 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp177,1 triliun.

Kinerja pasar obligasi korporasi menunjukkan sedikit penurunan khususnya pada pasar perdana. Selama tahun 2013, penerbitan obligasi korporasi hanya mencapai Rp55,3 triliun, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp65,7 triliun. Penerbitan obligasi korporasi tersebut didominasi oleh perusahaan *multifinance* dan

disusul oleh perbankan. Meskipun Pemerintah masih melanjutkan relaksasi peraturan pasar modal mengenai penerbitan obligasi yang berkelanjutan⁹, namun kinerja penerbitan obligasi korporasi masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini terkait tingginya risiko yang dihadapi korporasi jika melakukan penerbitan obligasi pada paruh kedua 2013. Risiko tersebut, terutama terkait dengan ketidakpastian global dan suku bunga yang lebih tinggi, akan berdampak pada meningkatnya biaya penerbitan emiten. Beberapa korporasi cenderung menunda penerbitan obligasi pada tahun 2013 dengan pertimbangan menunggu kondisi pasar yang lebih baik hingga tahun selanjutnya.

⁹ Obligasi Berkelanjutan adalah salah satu variasi baru dari obligasi, dimana BAPEPAM-LK (OJK) memberikan keleluasaan kepada perusahaan untuk menerbitkan obligasi dalam kurun waktu 2 tahun, dengan cukup hanya 1 kali meminta ijin pernyataan efektif (Peraturan BAPEPAM-LK IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan tanggal 30 Desember 2010).



Grafik 8.16. Net Beli/Jual Asing di Pasar SBN Per Tenor



Grafik 8.17. IHSIG dan BI Rate

Pasar Saham

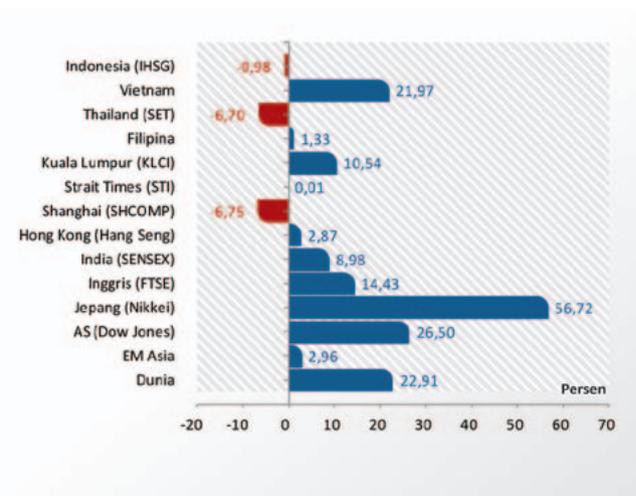
Pasar saham domestik menunjukkan penurunan kinerja pada tahun 2013, walaupun sempat mengalami penguatan pada paruh pertama tahun 2013. Pada paruh pertama tahun 2013, kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSIG) terus menguat dan diwarnai oleh ekspektasi pencapaian yang tinggi. Namun dalam perkembangannya, faktor risiko eksternal dan domestik yang kembali meningkat telah menyebabkan koreksi pada IHSIG. Pada akhir tahun 2013, IHSIG mencapai level 4.274,2, turun 0,98% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 4.316,7 (Grafik 8.17). Kinerja pasar saham Indonesia tersebut tercatat masih lebih baik dibandingkan bursa saham di negara kawasan, seperti China dan Thailand (Grafik 8.18).

Pasar saham domestik, yang menguat sampai bulan Mei 2013, dipengaruhi sentimen positif dari China dan AS (Grafik 8.19). Sentimen positif dari China terkait membaiknya data ekonomi negara tersebut pada bulan Januari 2013. Sementara itu, pernyataan Gubernur Bank Sentral AS Ben Bernanke pada bulan Maret 2013 untuk mempertahankan program pembelian obligasi merupakan sentimen positif yang mendorong penguatan kinerja IHSIG. Sejalan dengan peningkatan kinerja tersebut, investor nonresiden mencatat net beli sebesar Rp 18,77 triliun pada triwulan I 2013.

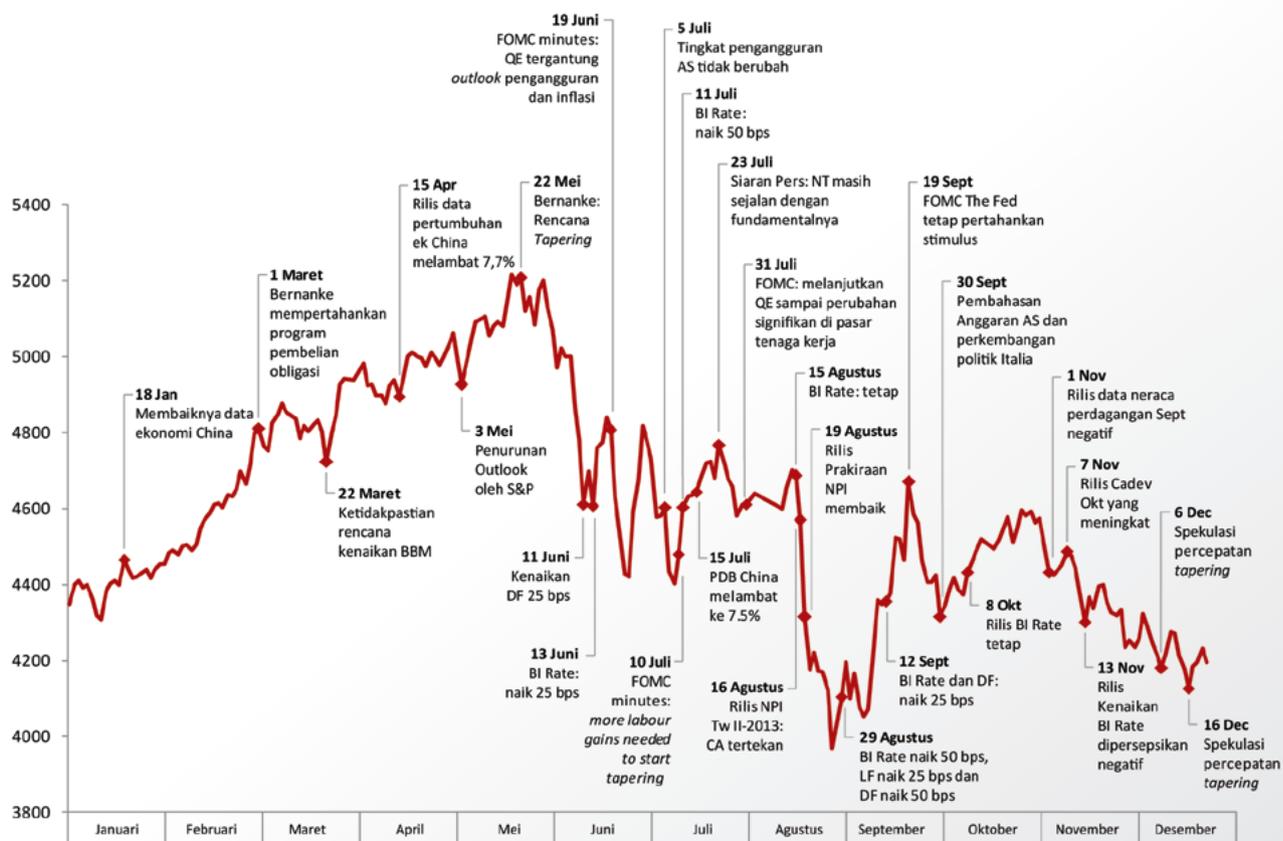
Kinerja pasar saham setelah bulan Mei 2013 mengalami tekanan seiring dengan *portfolio adjustment* yang dilakukan oleh investor di negara-negara *emerging market*, termasuk Indonesia. Tekanan pada pasar saham tersebut bersumber dari sentimen negatif baik yang berasal dari perkembangan ekonomi domestik maupun ekonomi global. Dari sisi domestik, sentimen negatif bersumber dari

kekhawatiran meningkatnya tekanan inflasi, pelemahan nilai tukar dan melebarnya defisit transaksi berjalan. Rilis data neraca pembayaran pada triwulan II 2013 yang mengindikasikan defisit transaksi berjalan yang cukup lebar menambah tekanan koreksi pada IHSIG. Dari sisi global, sentimen negatif dipengaruhi oleh faktor kekhawatiran dilakukannya *tapering off* oleh the Fed dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Pernyataan Bernanke pada bulan Mei 2013 yang mengindikasikan *tapering off* akan dilaksanakan dalam beberapa bulan lagi merupakan pemicu awal terjadinya koreksi pada IHSIG.

Sentimen negatif baik berasal dari domestik maupun global tersebut mendorong investor nonresiden mengurangi kepemilikannya di pasar saham. Pada triwulan II 2013, investor nonresiden mencatat net jual sebesar Rp19,8



Grafik 8.18. IHSIG dan Perkembangan Bursa Global 2013



Sumber: Bursa Efek Indonesia

Grafik 8.19. Faktor-Faktor Penggerak IHS Tahun 2013

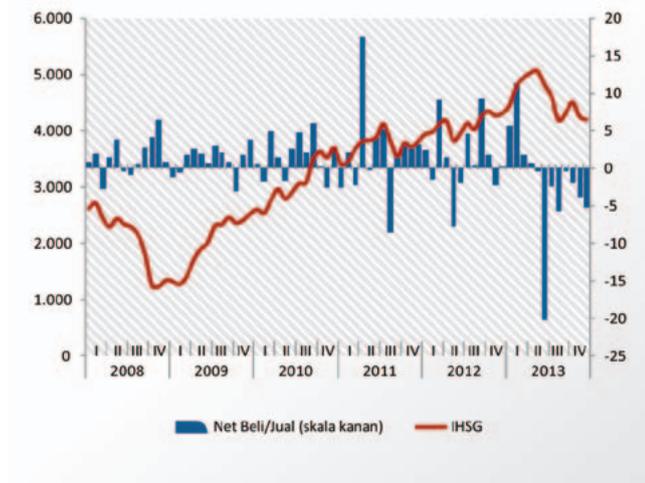
triliun. Sementara itu, pada paruh kedua 2013, investor nonresiden masih mencatat net jual sebesar Rp19,7 triliun (Grafik 8.20).

Menghadapi tekanan tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah berhasil merespons melalui bauran kebijakan yang secara tidak langsung berdampak positif dalam upaya pembalikan arah (*rebound*) pergerakan di pasar saham. Pada penghujung tahun 2013, IHSG mampu berbalik arah (*rebound*) dan menahan koreksi IHSG yang lebih dalam. Dalam konteks ini, pelaku pasar memberi apresiasi positif terhadap kebijakan moneter ketat dan paket kebijakan Pemerintah dalam mengendalikan neraca transaksi berjalan, menjaga nilai tukar rupiah, menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi. Bauran kebijakan moneter dan fiskal tersebut menjadi *guidance* bagi pasar mengenai arah dan prospek perekonomian Indonesia yang membaik di masa mendatang. Hal ini dapat diindikasikan pada kapitalisasi pasar saham domestik yang mencapai Rp4.219 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp4.127 triliun, meskipun secara umum IHSG pada tahun 2013 tercatat sedikit menurun dibandingkan dengan pada tahun 2012.

Kemampuan IHSG untuk kembali *rebound* juga menunjukkan bahwa topangan struktur fundamental emiten dan komposisi sektoral semakin baik. Dari sisi fundamental perusahaan, pertumbuhan laba bersih perusahaan sebesar 8,3% pada tahun 2013¹⁰ menjadi faktor positif penggerak IHSG. Sementara secara sektoral, kontribusi sektor-sektor utama yang berperan besar dalam pembentukan IHSG mengalami pergeseran cukup signifikan. Peran saham-saham sektor komoditas mengalami penurunan, sementara saham-saham sektor konsumsi dan perdagangan kembali menunjukkan kontribusinya yang besar terhadap IHSG.

Sementara itu, di tengah gejolak eksternal dan domestik, kinerja di pasar perdana menunjukkan peningkatan. Selama tahun 2013, jumlah pembiayaan dalam bentuk *right issue* di pasar perdana tercatat senilai Rp40,8 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp19,8 triliun. Sementara itu, setelah mengalami penurunan

10 Data Laporan Keuangan Emiten per September 2013 dibandingkan dengan September 2012, Bursa Efek Indonesia (BEI).



Grafik 8.20. IHSI dan Net Beli/Jual Asing

pada tahun 2012, jumlah pembiayaan dalam bentuk *Initial Public Offering* (IPO) meningkat. Pada tahun 2013, IPO tercatat mencapai Rp16,7 triliun, naik dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp10,4 triliun.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Di tengah gejolak yang dihadapi oleh pasar keuangan, industri asuransi, reksadana, perusahaan pembiayaan dan dana pensiun tetap mampu menunjukkan kinerja. Total aset industri asuransi meningkat signifikan mencapai Rp623,6 triliun. Kondisi yang sama juga terlihat dari peningkatan Nilai Aktiva Bersih (NAB) dari perusahaan reksadana yang secara keseluruhan mencapai Rp185,5 triliun. Sementara itu, perusahaan pembiayaan dan penyelenggara dana pensiun mencatat peningkatan nilai aset yang masing-masing mencapai Rp420,3 triliun dan Rp162,5 triliun. Secara keseluruhan, pangsa aset keuangan yang dimiliki oleh industri asuransi serta perusahaan pembiayaan dan dana pensiun masing-masing mencapai 9,9%, 6,7% dan 2,6% dari total aset sistem keuangan.¹¹

Secara umum, LKBB mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2013. Perusahaan asuransi mencatat pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2013, sehingga perannya dalam pengelolaan risiko pada pasar keuangan tetap terjaga. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan jumlah aset pada

tahun 2013 yang mencapai 9,2%. Perusahaan pembiayaan juga mencatat pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2013, sehingga kontribusinya terhadap perekonomian tetap terjaga. Pada tahun 2013, pertumbuhan jumlah aset perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 15,3%. Sementara itu, perusahaan dana pensiun mencatat pertumbuhan aset yang cukup positif, namun dalam jumlah yang kecil yaitu sebesar 2,6%.

Pertumbuhan positif LKBB, khususnya Asuransi dan Dana Pensiun, di pasar keuangan domestik tidak terlepas dari perubahan strategi investasi dan perbaikan struktur industri. Arah kebijakan investasi perusahaan asuransi dan dana pensiun mulai mengalami pergeseran. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh semakin meningkatnya jenis investasi berbasis saham, obligasi dan reksadana secara proporsional. Sebelumnya, jenis investasi yang dominan adalah dalam bentuk penempatan dana pada deposito. Selain berdampak positif bagi perkembangan pasar keuangan domestik, peningkatan tersebut mendorong peningkatan kinerja keuangan LKBB. Sementara itu, melanjutkan tren pada tahun sebelumnya, perbaikan struktur industri antara lain ditandai oleh semakin meningkatnya peran dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dibandingkan dana pensiun pemberi kerja (DPPK).

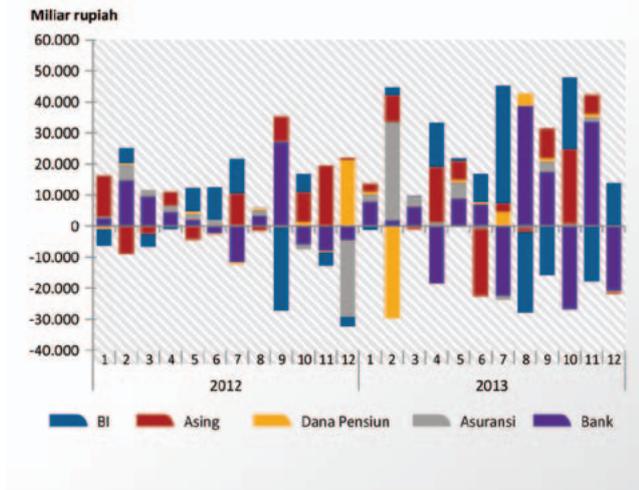
Struktur Investor

Dinamika di pasar saham nasional menunjukkan peran investor domestik mengalami penurunan. Hal ini ditunjukkan oleh pangsa investor domestik pada tahun 2013 sebesar 37,1%, menurun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 41,2%. Dengan demikian, kontribusi investor asing masih dominan dengan porsi 62,9% pada tahun 2013. Secara kelembagaan, kontribusi investor institusional, baik asing maupun domestik, masih cukup besar.

Meski peran investor domestik di pasar saham mengalami penurunan, investor domestik masih cukup berperan besar sebagai *shock absorber* dalam mengimbangi dominasi investor asing. Hal tersebut tercermin pada kemampuan IHSI yang tetap menguat meski investor asing terus membukukan net jual di pasar saham. Ke depan, struktur pasar yang relatif lebih berimbang akan berdampak pada peningkatan peran investor domestik sebagai *shock absorber*. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi positif dalam menjaga stabilitas pasar keuangan.

Pada pasar SBN, pelaku nonresiden dan perbankan domestik masih mendominasi pergerakan harga pada

¹¹ Data Asuransi dan Perusahaan Pembiayaan per September 2013, data Dana Pensiun per Oktober 2013 dan data Reksadana per Desember 2013 (Sumber: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan).



Grafik 8.21. Perilaku Investor Pasar SBN

tahun 2013 (Grafik 8.21). Sebagaimana pada tahun 2012, masih tingginya minat investor asing pada pasar SBN pada tahun 2013 merupakan cermin atas tingginya kepercayaan investor global pada kondisi perekonomian Indonesia dan ketertarikan atas imbal hasil yang kompetitif. Hal tersebut tampak pada perilaku investor asing yang terus menambah posisi kepemilikannya di pasar SBN meski *yield* terpantau mengalami kenaikan. Selama tahun 2013, kepemilikan nonresiden pada pasar SBN mencapai Rp323,8 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp270,5 triliun. Meski peran investor asing masih dominan, namun investor domestik secara bertahap mampu mengimbangi pengaruh pergerakan investor asing.

Sementara itu, meningkatnya peran perbankan, lembaga asuransi dan dana pensiun domestik pada pasar SBN secara bersamaan mampu menjadi stabilisator terhadap tekanan jual yang dilakukan investor nonresiden. Dinamika pasar SBN selama tahun 2013 juga menunjukkan semakin meratanya distribusi kepemilikan SBN di antara para

pelaku khususnya perbankan. Hal tersebut tidak terlepas dari intensi Bank Indonesia dalam penggunaan SBN sebagai instrumen moneter. Struktur pasar yang cukup merata tersebut berkontribusi positif bagi penciptaan harga yang semakin baik di pasar SBN.

Produk-produk Pasar Keuangan

Peningkatan kinerja pasar keuangan domestik tidak terlepas dari semakin beragamnya produk-produk investasi yang ditawarkan. Semakin bervariasinya produk yang ditawarkan bertujuan untuk memperluas basis investor sekaligus sebagai strategi diversifikasi risiko baik yang dilakukan untuk kepentingan investor maupun untuk kepentingan para pelaku. Aneka produk dengan fitur gabungan antara tujuan asuransi dan investasi yang terus diperkenalkan mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Penawaran produk investasi yang semakin beragam juga didorong oleh industri reksadana. Dalam hal ini produk berbasis kontrak investasi kolektif beragun aset, termasuk Dana Investasi *Real Estate* (DIRE), dan produk penyertaan terbatas menjadi alternatif pilihan investasi. Jumlah nilai aset kelolaan perusahaan reksadana mencapai Rp185,5 triliun.

Sementara itu, perusahaan pembiayaan semakin fokus kepada sektor-sektor konsumsi berjangka pendek. Mengingat sumber utama struktur pendanaan perusahaan pembiayaan berasal dari pinjaman bank, strategi penawaran produk pembiayaan lebih ditujukan kepada sektor-sektor konsumsi berjangka pendek. Hal ini dilakukan dengan tetap mempertimbangkan upaya perbaikan pada sisi manajemen risiko. Jumlah pembiayaan selama tahun 2013 mencapai Rp348 triliun, antara lain dalam bentuk pembiayaan konsumen (Rp223 triliun), leasing (Rp117,3 triliun), anjak piutang (Rp7,7 triliun) dan kartu kredit (Rp4 miliar).



Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran pada 2013 berjalan secara efisien, aman, lancar dan terpelihara dengan baik. Kondisi ini tergambar baik pada sistem pembayaran nontunai dan pengelolaan uang. Perkembangan sistem pembayaran yang tetap baik menopang terkendalinya penyesuaian ekonomi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan.

Kinerja sistem pembayaran nontunai dan pengelolaan uang pada tahun 2013 mampu mendukung terjaganya stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan serta memperlancar aktivitas perekonomian nasional. Keandalan sistem pembayaran sebagai infrastruktur sistem keuangan ditunjukkan dengan terpenuhinya tingkat ketersediaan (*availability*) sistem pembayaran sesuai tingkat layanan (*service level*) yang telah ditetapkan. Selama tahun 2013, sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia mampu melayani sekitar 4,0 miliar transaksi tanpa adanya kegagalan sistem. Jumlah transaksi ini meningkat 22,6% dari tahun 2012 yang mencapai 3,3 miliar transaksi. Kinerja sistem pembayaran nontunai yang baik merupakan dampak dari kebijakan Bank Indonesia yang secara konsisten memastikan sistem pembayaran nontunai dapat berjalan secara efisien, aman, lancar dan terpelihara dengan baik dalam menjalankan fungsinya sebagai urat nadi perekonomian Indonesia.

Sementara itu, kinerja pengelolaan uang terlihat dari kemampuan Bank Indonesia dalam menyediakan uang kartal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar, di tengah meningkatnya kebutuhan akan uang kartal. Meningkatnya kebutuhan uang kartal sejalan dengan perekonomian Indonesia yang terus tumbuh, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2013, rata-rata harian uang kartal yang diedarkan (UYD) tercatat sebesar Rp420,9 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp370,6 triliun. Meningkatnya kebutuhan akan uang kartal juga disebabkan oleh dampak dari berbagai kebijakan pemerintah yang meningkatkan daya beli masyarakat, seperti kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Masyarakat (BLSM). Selain itu, peningkatan kebutuhan uang kartal juga disebabkan tingginya aktivitas masyarakat terutama pada saat hari besar keagamaan dan masa liburan. Menyikapi peningkatan kebutuhan uang kartal tersebut, Bank Indonesia selalu mengantisipasi dengan melakukan seluruh tahapan kegiatan pengelolaan uang yakni perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, penarikan/pencabutan dan pemusnahan uang rupiah dengan baik.

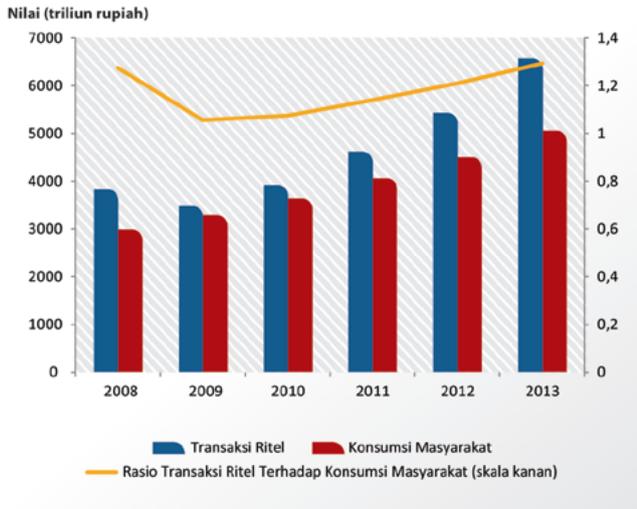
Sebagai otoritas yang mengeluarkan uang rupiah, Bank Indonesia juga terus berupaya menjaga kelayakan uang yang diedarkan dan mengoptimalkan upaya penanggulangan peredaran uang palsu. Dalam menjaga kelayakan uang yang diedarkan, Bank Indonesia menempuh langkah *clean money policy* melalui penarikan uang rupiah tidak layak edar (UTLE) untuk diganti dengan uang rupiah yang baru. Bank Indonesia juga secara konsisten dan berkelanjutan meminta kepada perbankan

dan masyarakat untuk melaporkan uang rupiah yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia.

9.1. Kinerja Sistem Pembayaran Nontunai

Peran sistem pembayaran nontunai dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat tetap terjaga di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia dan tekanan inflasi yang cukup tinggi. Kinerja sistem pembayaran pada periode laporan berjalan secara efisien, aman, lancar, dan terpelihara dengan baik dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana penyelesaian seluruh transaksi sistem pembayaran nontunai. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kegagalan sistem yang tercatat pada periode laporan, khususnya pada sistem yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Selama tahun 2013, sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia maupun industri mampu melayani transaksi senilai Rp97,5 ribu triliun, meskipun turun 6,9% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp104,8 ribu triliun. Penurunan nilai transaksi bukan disebabkan penurunan keandalan infrastruktur sistem pembayaran, namun hal tersebut lebih disebabkan menurunnya nilai transaksi operasi moneter (OM) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, sejalan dengan *stance* kebijakan moneter. Sepanjang tahun 2013, nilai transaksi OM tercatat sebesar Rp46,2 ribu triliun, turun 23,6% dari tahun 2012 yang mencapai Rp60,5 ribu triliun. Sementara itu, total volume transaksi sistem pembayaran nontunai pada tahun 2013 tercatat sebesar 4,0 miliar transaksi, meningkat 22,6% dari tahun 2012 yang mencapai 3,3 miliar transaksi.

Peran sistem pembayaran ritel dalam mendukung aktivitas perekonomian meningkat seiring semakin tingginya nilai transaksi sistem pembayaran ritel. Nilai transaksi melalui sistem pembayaran ritel yang terdiri atas nilai transaksi Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan uang elektronik, dengan porsi sebesar 6,0% dari total nilai transaksi sistem pembayaran nontunai, tercatat mencapai Rp6.566 triliun. Nilai tersebut meningkat 20,7% dari nilai transaksi tahun 2012 yang mencapai Rp5.439 triliun. Peningkatan peran sistem pembayaran ritel dalam mendukung aktivitas perekonomian juga ditunjukkan oleh rasio nilai transaksi sistem pembayaran ritel terhadap PDB yang meningkat. Pada tahun 2013, rasio tersebut tercatat sebesar 0,72, meningkat dibanding tahun 2012 sebesar 0,66. Hal ini sejalan dengan kenaikan nilai nominal (harga berlaku) konsumsi masyarakat pada tahun 2013 yang tumbuh mencapai 12,0%. Rasio nilai transaksi sistem pembayaran ritel terhadap nilai nominal (harga berlaku)



Grafik 9.1. Rasio Transaksi Ritel terhadap Konsumsi Masyarakat

konsumsi masyarakat pada tahun 2013 sebesar 1,29 kali dari nilai konsumsi masyarakat, lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencapai 1,21 kali dari nilai konsumsi masyarakat (Grafik 9.1).¹

Peningkatan volume transaksi sistem pembayaran nontunai didorong oleh perkembangan sistem pembayaran ritel sebagai alternatif instrumen pembayaran. Volume pembayaran ritel pada tahun 2013 mencapai 3,9 miliar transaksi, meningkat 23,0% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 3,2 miliar transaksi. Hal ini sebagai dampak kebijakan Bank Indonesia dalam meningkatkan penggunaan instrumen pembayaran nontunai, antara lain dengan mendorong interkoneksi antarprinsipal kartu *Automated Teller Machine (ATM)*/debit dalam penyelenggaraan sistem pembayaran khususnya fitur layanan transfer dana antarprinsipal dan kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong penggunaan uang elektronik.

Sistem Pembayaran Nontunai yang Diselenggarakan Bank Indonesia

Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*

Sebagai sarana penyelesaian akhir transaksi pembayaran nilai besar pada tahun 2013 yang memproses sebesar

¹ Rasio transaksi sistem pembayaran ritel terhadap konsumsi masyarakat pada 2009 menurun seiring turunnya rasio USD terhadap konsumsi dan transaksi melalui BI-RTGS. Hal ini sebagai konsekuensi turunnya nilai konsumsi masyarakat pada periode tersebut.



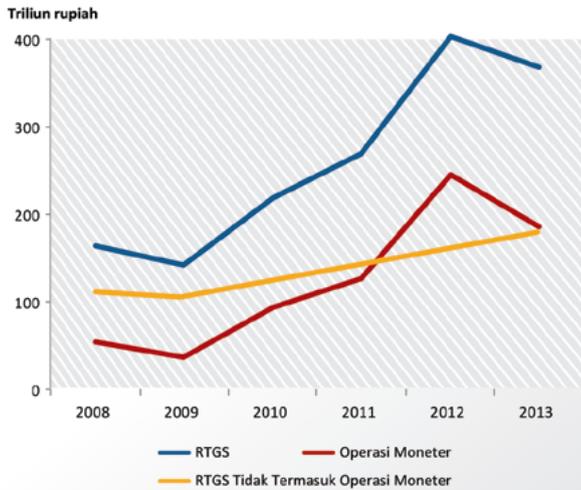
Grafik 9.2. Perkembangan Transaksi BI-RTGS

Rp90,9 ribu triliun, penggunaan sistem BI-RTGS² turun 8,0% dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar Rp99,4 ribu triliun. Namun secara volume, pertumbuhannya meningkat dibandingkan tahun 2012.³ Secara rata-rata harian, nilai transaksi yang menggunakan sistem BI-RTGS mencapai Rp368,5 triliun, turun 9,1% dari tahun 2012 yang mencapai Rp404,1 triliun (Grafik 9.2). Penurunan nilai transaksi sistem pembayaran nontunai yang diproses melalui sistem BI-RTGS pada tahun 2013 disebabkan oleh menurunnya nilai transaksi operasi moneter (OM) yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Sepanjang tahun 2013, nilai transaksi OM tercatat sebesar Rp46,2 ribu triliun atau turun 23,6% dari tahun 2012 sebesar Rp60,5 ribu triliun.⁴ Secara rata-rata harian, transaksi OM turun dari Rp245,9 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp 187,1 triliun pada tahun 2013. Kontribusi nilai transaksi OM melalui sistem BI-RTGS pada tahun 2013 tercatat sebesar 50,8% dari total nilai transaksi sistem pembayaran nontunai, sedangkan pada tahun 2012

² Sistem BI-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika. BI-RTGS berperan penting dalam proses aktivitas transaksi pembayaran, khususnya untuk memproses transaksi pembayaran yang termasuk *High Value Payment System (HVPS)* atau transaksi bernilai besar yaitu transaksi Rp100 juta atau lebih.

³ Aktivitas transaksi pembayaran yang diselesaikan melalui BI-RTGS terdiri atas transaksi operasi moneter, pemerintah, atas perintah nasabah, pasar modal, Pasar Uang Antar Bank (PUAB), penyelesaian jual beli valas antarbank dalam mata uang rupiah, penyelesaian transaksi valas antara bank dengan BI dalam mata uang rupiah dan lain-lain.

⁴ Penjelasan lebih lanjut mengenai *stance* kebijakan Bank Indonesia dalam operasi moneter dapat dilihat pada Bab 10 Kebijakan Moneter.

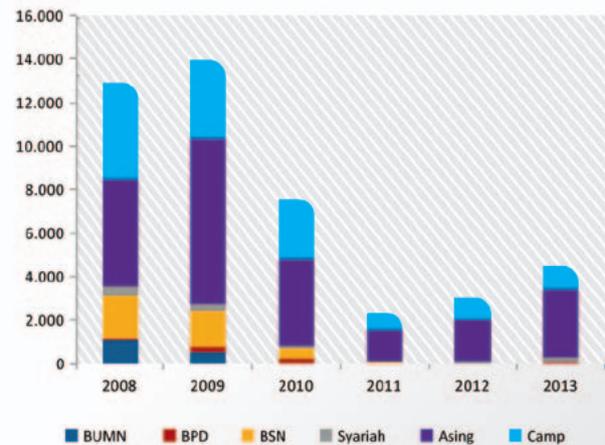


Grafik 9.3. Nilai Transaksi Rata-Rata Harian BI-RTGS

tercatat sebesar 60,9%. Namun demikian, nilai transaksi sistem pembayaran nontunai melalui sistem BI-RTGS tanpa memperhitungkan OM mengalami peningkatan. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai transaksi yang mencapai Rp44,8 ribu triliun atau meningkat 15,1% dari tahun 2012 yang sebesar Rp38,9 ribu triliun. Secara rata-rata harian, transaksi BI-RTGS tanpa memperhitungkan OM meningkat dari Rp158,1 triliun menjadi Rp181,2 triliun (Grafik 9.3). Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya transaksi yang dilakukan atas perintah nasabah pada tahun 2013.

Peningkatan volume pembayaran melalui sistem BI-RTGS tahun 2013 tidak terlepas dari keandalan dan ketersediaan sistem BI-RTGS. Hal ini ditunjukkan dari keberhasilan sistem BI-RTGS selama tahun 2013 dalam memenuhi dua prasyarat *service level* yang ditetapkan. Sistem BI-RTGS yang merupakan *Systemically Important Payment System* (SIPS) menunjukkan kinerja yang memuaskan dengan tidak adanya kegagalan sistem (*system down*) sepanjang tahun 2013. Total volume transaksi sistem BI-RTGS selama tahun 2013 tercatat sebesar 17,6 juta transaksi, dengan rata-rata harian 71,4 ribu transaksi. Transaksi harian terbanyak, yaitu sebesar 123,1 ribu transaksi, terjadi pada tanggal 27 Desember 2013 yang merupakan hari operasional pertama setelah liburan Natal. Volume transaksi pada tahun 2013 tercatat meningkat sebesar 0,8% dibandingkan dengan tahun 2012 yaitu 17,5 juta transaksi dan rata-rata harian tahun 2013 meningkat 0,1% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 71,3 ribu transaksi.

Pada tahun 2013, kondisi likuiditas dalam sistem BI-RTGS mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2012. Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan

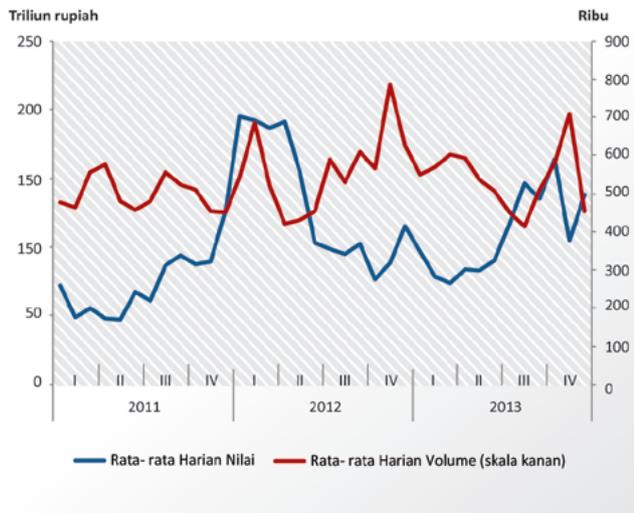


Grafik 9.4. Perkembangan Volume Antrian Kumulatif Sistem BI-RTGS per Kelompok Bank

meningkatnya jumlah antrian pada tahun 2013 yang mencapai 5.070 antrian, meningkat 48,6% dari tahun 2012 sebesar 3.412 antrian (Grafik 9.4), meskipun bila dibandingkan dengan total volume sistem BI-RTGS pada tahun 2013 yang mencapai 17,6 juta transaksi, volume antrian tersebut memiliki porsi yang sangat kecil yaitu sebesar 0,029%. Peningkatan volume antrian tersebut, menunjukkan makin tingginya kebutuhan likuiditas untuk menyelesaikan transaksi, meskipun jika dilihat dari saldo giro rata-rata peserta pada awal hari dalam sistem BI-RTGS pada tahun 2013 meningkat 10,2% bila dibandingkan dengan tahun 2012.

Selain antrian transaksi, indikator likuiditas lainnya dalam sistem BI-RTGS adalah *unsettled transactions* yaitu ada tidaknya transaksi yang tidak dapat diselesaikan *settlement*-nya karena sampai dengan akhir jam operasional tidak tersedia likuiditas yang cukup pada peserta. Sepanjang tahun 2013, tercatat sebanyak 72 *unsettled transactions* pada Sistem BI-RTGS dengan total nilai Rp1,99 triliun, meskipun bila dibandingkan dengan total nilai transaksi, volume dan nilai *unsettled transactions* hanya memiliki porsi masing-masing 0,004 permil dan 0,02 permil.

Dari dua indikator likuiditas dalam Sistem BI-RTGS, antrian transaksi dan *unsettled transactions*, dapat disimpulkan bahwa likuiditas dalam sistem BI-RTGS sangat baik. Tersedia dana yang cukup untuk menyelesaikan transaksi, dan mayoritas transaksi dapat diselesaikan seketika (*real time*). Hal ini sesuai dengan ekspektasi Bank Indonesia dan seluruh pengguna sistem BI-RTGS yang merupakan sistem penyelesaian transaksi nilai besar secara *real time* dan *gross* (per transaksi).



Grafik 9.5. Perkembangan Transaksi BI-SSSS

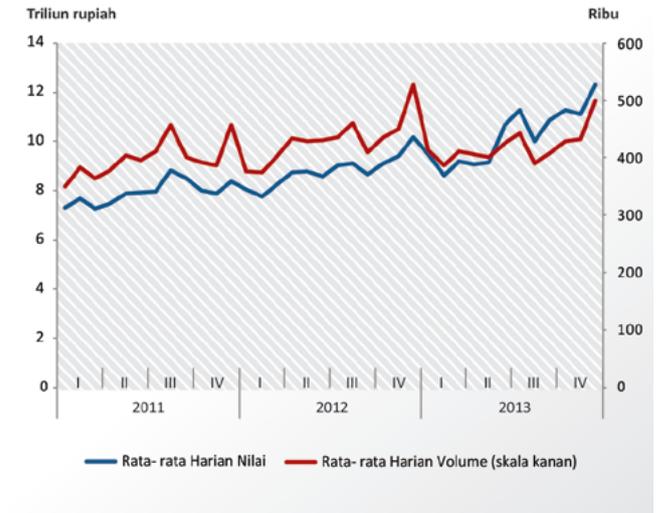
Bank Indonesia *Scriptless Securites Settlement System* (BI-SSSS)

Transaksi jual beli surat berharga pemerintah dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) melalui BI-SSSS, yang penyelesaian pembayarannya dilakukan melalui sistem BI-RTGS, selama tahun 2013 mengalami penurunan (Grafik 9.5). Nilai surat berharga yang ditatausahakan melalui BI-SSSS mencapai Rp26,6 ribu triliun, turun 18,2% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp32,5 ribu triliun. Nilai rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui sistem BI-SSSS mencapai Rp108,1 triliun, menurun 18,0% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp131,9 ribu triliun. Volume transaksi surat berharga yang ditatausahakan melalui BI-SSSS mencapai 131,7 ribu transaksi, menurun 4,0% dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 137,2 ribu transaksi. Volume rata-rata harian tercatat sebesar 535 transaksi, menurun 4,2% dari tahun 2012 yang sebesar 558 transaksi. Penurunan nilai transaksi sistem pembayaran non tunai pada tahun 2013 disebabkan menurunnya nilai transaksi operasi moneter (OM) yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)⁵

Peningkatan aktivitas ekonomi juga tercermin pada nilai transaksi pada SKNBI yang meningkat. Sebagai salah satu sarana sistem pembayaran ritel, SKNBI pada tahun 2013 memproses sebesar Rp2.542,3 triliun, meningkat 17,2% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai Rp2.170,2 triliun. Secara rata-rata harian, nilai transaksi melalui SKNBI

⁵ SKNBI adalah sistem transfer dana elektronik yang meliputi kliring debit dan kliring kredit yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara nasional.



Grafik 9.6. Perkembangan Transaksi SKNBI

tersebut mencapai Rp10,3 triliun, atau meningkat 16,4% dari tahun 2012 yang sebesar Rp8,8 triliun.

Berbeda dengan perkembangan nilai transaksi, volume transaksi melalui SKNBI pada tahun 2013 tercatat turun sebesar 1,7%, dari 106,1 juta transaksi pada tahun 2012 menjadi 104,3 juta transaksi pada tahun 2013. Sementara, volume rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui SKNBI tercatat sebesar 422,2 ribu transaksi, turun 2,4% dari tahun 2012 yang mencapai 432,7 ribu transaksi (Grafik 9.6). Penurunan volume transaksi melalui SKNBI merupakan kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan efisiensi yang diupayakan melalui kebijakan Bank Indonesia yang menaikkan batas maksimum nilai kliring kredit dari sebesar Rp100 juta menjadi Rp500 juta.⁶ Efektivitas kebijakan ini juga dapat dilihat dari rasio nilai per volume transaksi pada tahun 2013 yang mencapai 24,4, meningkat dari tahun 2012 yang sebesar 20,5.

Sistem Pembayaran Nontunai Yang Diselenggarakan Industri

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK)

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat, nilai dan volume transaksi melalui APMK, yang terdiri atas kartu ATM dan/atau kartu debit serta kartu kredit pada tahun

⁶ Surat Edaran Bank Indonesia No.15/8/DASP tanggal 30 April 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No.11/13/DASP tanggal 4 Mei 2009 perihal Batas Nominal Nota Debit dan Transfer Kredit dalam Penyelenggaraan SKNBI.



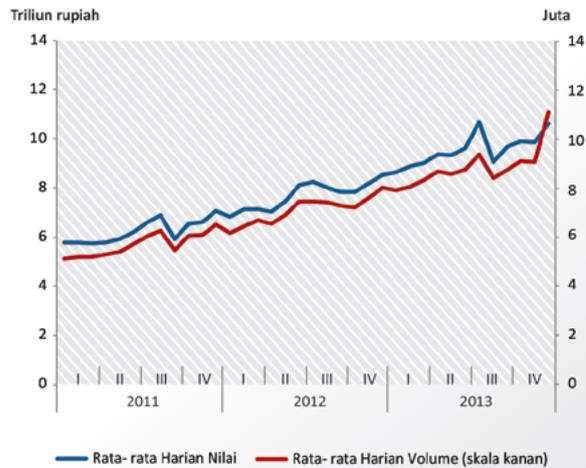
Grafik 9.7. Perkembangan Transaksi APMK

2013 meningkat. Nilai transaksi melalui APMK mencapai Rp4.020,7 triliun, meningkat 23,1% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp3.266,9 triliun. Nilai rata-rata harian transaksi melalui APMK mencapai Rp11,0 triliun, meningkat 23,4% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp8,9 triliun (Grafik 9.7). Peningkatan nilai transaksi melalui APMK menunjukkan bahwa konsumsi masih cukup kuat, dan konsekuensinya meningkatkan nilai transaksi pembayaran.

Dari sisi volume transaksi, pada tahun 2013 transaksi melalui APMK tercatat sebanyak 3,7 miliar transaksi, atau meningkat sebesar 23,1% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 3,0 miliar transaksi. Volume rata-rata harian transaksi yang dilakukan melalui APMK tercatat sebesar 10,3 juta transaksi, meningkat 23,4% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 8,3 juta transaksi (Grafik 9.7). Peningkatan volume transaksi ini sejalan dengan peningkatan infrastruktur pendukung berupa mesin ATM dan mesin *Electronic Data Capture* (EDC). Pada tahun 2013 jumlah mesin ATM tercatat sebanyak 75,9 ribu unit, meningkat 19,7% dibandingkan tahun 2012 sebanyak 63,4 ribu unit. Mesin EDC yang digunakan untuk kartu ATM/debet pada tahun 2013 tercatat sebanyak 634,7 ribu unit, meningkat 77,5% dibanding tahun 2012 yang mencapai 357,5 ribu unit.

ATM dan ATM/Debet

Kebijakan Bank Indonesia untuk mendorong interoperabilitas antar prinsipal dan antar penerbit kartu ATM/debet telah mendorong peningkatan penggunaan kartu ATM/debet sebagai instrumen pembayaran



Grafik 9.8. Perkembangan Transaksi ATM dan ATM/Debet

nontunai⁷. Pada tahun 2013, nilai transaksi menggunakan kartu ATM dan kartu ATM/debet mencapai Rp3.797,4 triliun, meningkat 23,9% dibandingkan tahun 2012 sebesar Rp3.065,9 triliun. Nilai rata-rata harian transaksi melalui kartu ATM dan kartu ATM/debet mencapai Rp10,4 triliun, meningkat 24,2% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp8,4 triliun (Grafik 9.8). Selain sebagai dampak kebijakan Bank Indonesia, peningkatan ini juga didukung oleh meningkatnya jumlah kartu ATM/debet yang beredar mencapai 89,5 juta kartu dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 77,8 juta kartu. Di samping itu, peningkatan volume dan transaksi ini sebagai dampak dari bertambahnya jumlah bank penerbit kartu yang sebelumnya pada tahun 2012 tercatat sebanyak 102 penerbit menjadi sebanyak 106 penerbit pada tahun 2013. Bank penerbit kartu didominasi oleh bank umum konvensional yang tercatat sebanyak 87 penerbit, diikuti oleh bank perkreditan rakyat sebanyak 11 penerbit, dan bank umum syariah sebanyak 8 penerbit (Tabel 9.1).

Sejalan dengan peningkatan nilai transaksi, volume transaksi menggunakan kartu ATM/debet pada tahun 2013 tercatat sebanyak 3,7 miliar transaksi, meningkat 23,1% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 3,0 miliar transaksi. Secara rata-rata harian, volume transaksi yang

⁷ Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana. Kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu. Kartu ATM/debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian. Kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu.

Tabel 9.1. Jumlah Penerbit kartu ATM/Debet

Penerbit	Jumlah
Bank Umum Konvensional	87
Bank Umum Syariah	8
BPR	11
Total	106

dilakukan melalui APMK tercatat sebesar 9,6 juta transaksi, meningkat 24,6% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 7,7 juta transaksi.

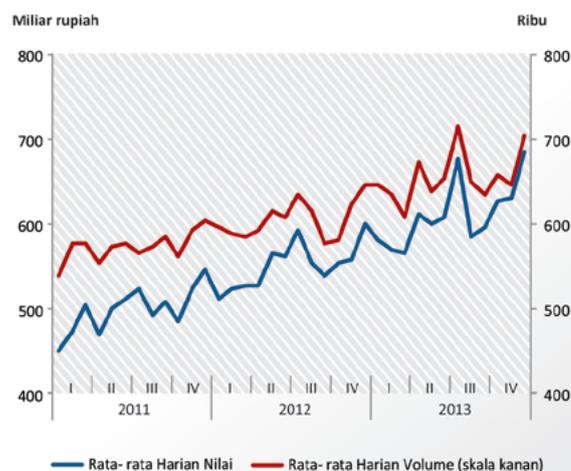
Peningkatan nilai dan volume transaksi menggunakan kartu ATM/debet meningkatkan nilai dan volume transaksi menggunakan APMK mengingat hingga saat ini kontribusi terbesar dalam transaksi APMK disumbang oleh kartu ATM/debet. Sepanjang tahun 2012 dan tahun 2013, laju pertumbuhan nilai dan volume transaksi menggunakan kartu ATM/debet sejalan dengan APMK.

Kartu Kredit⁸

Seiring dengan peningkatan konsumsi masyarakat, transaksi pembayaran menggunakan kartu kredit turut mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai transaksi menggunakan kartu kredit mencapai Rp223,4 triliun, meningkat 10,7% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp201,8 triliun. Secara rata-rata harian, nilai transaksi melalui kartu kredit pada tahun 2013 mencapai Rp611,6 miliar, meningkat 10,9% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp551,3 miliar (Grafik 9.9). Peningkatan tersebut didukung oleh meningkatnya jumlah kartu kredit yang beredar, mencapai 15,1 juta kartu, meningkat 1,9% dari tahun 2012 sebanyak 14,8 juta kartu.

Sejalan dengan peningkatan nilai transaksi, volume transaksi menggunakan kartu kredit pada tahun 2013 tercatat sebanyak 239,1 juta transaksi, meningkat 7,9% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 221,6 juta transaksi. Secara rata-rata harian, volume transaksi yang dilakukan menggunakan kartu kredit tercatat sebesar 654,9 ribu transaksi, meningkat 8,2% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 605,3 ribu transaksi. Peningkatan volume dan transaksi ini merupakan dampak dari bertambahnya jumlah penerbit pada tahun 2013, yang

⁸ Kartu kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (*charge card*) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

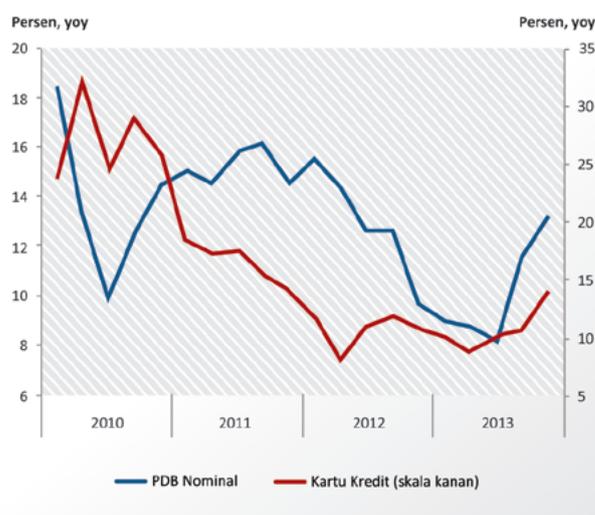


Grafik 9.9. Perkembangan Transaksi Kartu Kredit

tercatat sebanyak 22 penerbit, meningkat dari 20 penerbit pada tahun 2012.

Jika dikaitkan dengan pertumbuhan perekonomian, sejak awal tahun 2012 hingga akhir tahun 2013, tren pertumbuhan nilai transaksi kartu kredit selalu seiring dengan tren pertumbuhan PDB (harga berlaku) (Grafik 9.10). Hal ini mengindikasikan bahwa kartu kredit merupakan salah satu alternatif instrumen pembayaran nontunai yang menunjang kelancaran perekonomian, khususnya konsumsi masyarakat.

Pertumbuhan dalam industri kartu kredit dipertahankan dengan tetap menjaga kesehatan industri antara lain melalui kebijakan Bank Indonesia yang membatasi kepemilikan kartu kredit. Pembatasan kepemilikan kartu



Grafik 9.10. Pertumbuhan PDB Nominal dan Kartu Kredit

kredit dilandasi pertimbangan kemampuan finansial pemegang kartu kredit serta pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggara kartu kredit oleh Bank Indonesia. PBI No.14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) yang berlaku efektif sejak Januari tahun 2013 antara lain mengatur persyaratan dalam pemberian fasilitas kartu kredit seperti batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, dan jumlah maksimum penerbit yang dapat memberikan fasilitas kartu kredit.

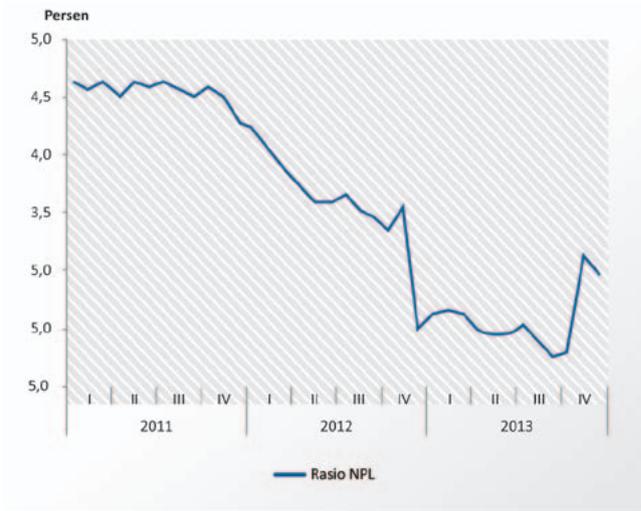
Efektivitas kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggara kartu kredit dalam menjaga kesehatan industri kartu kredit juga terlihat dari menurunnya rasio *Non Performing Loan* (NPL) pada tahun 2013 yang tercatat sebesar 2,5% dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 3,5% (Grafik 9.11). Rasio NPL yang relatif rendah dan dapat dipertahankan sepanjang tahun 2013 ini mencerminkan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko oleh penyelenggara kartu kredit serta pemahaman dan kedisiplinan masyarakat pengguna kartu kredit.

Uang Elektronik⁹

Kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong interoperabilitas dan interkoneksi dalam industri uang elektronik memiliki andil dalam mendorong peningkatan penggunaan uang elektronik sebagai salah satu alternatif dalam sistem pembayaran ritel.¹⁰ Pada tahun 2013, nilai transaksi menggunakan uang elektronik mencapai Rp2,9 triliun, meningkat 47,5% dari tahun 2012 yang mencapai Rp2,0 triliun. Secara rata-rata harian, nilai transaksi menggunakan uang elektronik mencapai Rp7,9 miliar, meningkat 47,8% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai Rp5,4 miliar. Peningkatan tersebut selain dari upaya Bank Indonesia melalui kebijakannya, dipengaruhi juga oleh peningkatan jumlah uang elektronik khususnya *chip based* pada tahun 2013 yang mencapai 36,2 juta

9 Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur (i) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit; (ii) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*; (iii) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan (iv) nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

10 Interoperabilitas dan interkoneksi dalam industri uang elektronik bertujuan untuk mendukung penggunaan satu instrumen uang elektronik untuk berbagai pembayaran, serta pengembangan kawasan *Less Cash Society* (LCS)



Grafik 9.11. Rasio NPL Kartu Kredit

kartu, meningkat 65,6% dari tahun 2012 yang mencapai 21,9 kartu.

Sejalan dengan peningkatan nilai transaksi, volume transaksi menggunakan uang elektronik pada tahun 2013 meningkat sebesar 37,0% yaitu tercatat sebanyak 137,9 juta transaksi dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 100,6 juta transaksi. Secara rata-rata harian, volume transaksi yang dilakukan menggunakan uang elektronik tercatat sebesar 376,7 ribu transaksi, meningkat 37,1% dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 274,8 ribu transaksi (Grafik 9.12).

Peningkatan nilai dan volume transaksi uang elektronik selain didorong oleh kebijakan Bank Indonesia dalam



Grafik 9.12. Perkembangan Transaksi Uang Elektronik

Tabel 9.2. Daftar Penerbit Uang Elektronik

Nama Penerbit	Jenis e-Money	Nama e-Money
Bank Central Asia Tbk	chip based	Flazz
Bank Mandiri (Persero) Tbk	chip based	Indomaret Card, Gaz card dan E-Toll
Bank Mega Tbk	chip based	Studio Pass Card dan Smart Card
Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Tbk	chip based	Java Jazz Card dan Kartuku
Bank Rakyat Indonesia	chip based	BRIZZI
B.P.D DKI Jakarta	chip based	Jak Card
PT. Indosat	chip based	Dometku
PT. Skye Sab Indonesia	server based	Skye Card
PT. Telekomunikasi Indonesia	chip based, server based	Flexy Cash dan i-Vas Card
PT. Telekomunikasi Selular	server based	T-Cash
PT. XL Axiata	server based	XL Tunai
PT. Finnet Indonesia	server based	FinChannel
PT. Artajasa Pembayaran Elektronik	server based	MYNT
Bank Permata Tbk	server based	BBMMoney
PT. Nusa Satu Inti Artha	server based	DokuPay
PT. Bank CIMB Niaga, Tbk	server based	Rekening Ponsel
PT. Bank National Nobu	server based	Nobu E-Money

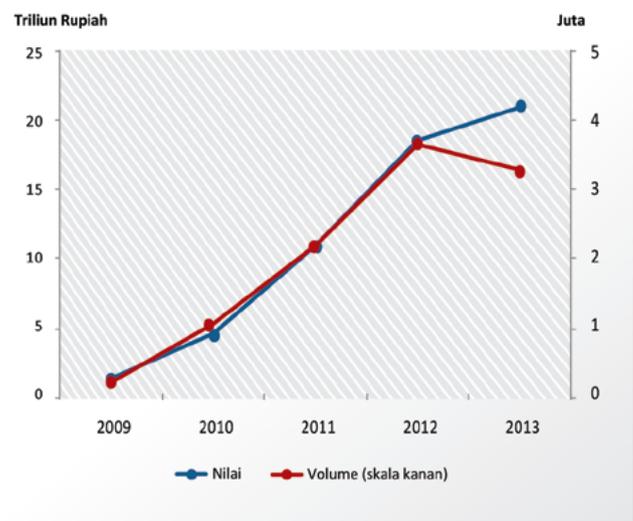
mewujudkan interoperabilitas dan interkoneksi uang elektronik serta pengembangan kawasan *Less Cash Society* (LCS), juga didorong oleh meningkatnya jumlah penerbit uang elektronik pada tahun 2013 yang mencapai 17 penerbit dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 12 penerbit (Tabel 9.2). Peningkatan jumlah penerbit sejalan dengan peningkatan jumlah pemegang uang elektronik dan infrastruktur, khususnya alat *reader* atau EDC yang telah mencapai 139,2 ribu unit pada tahun 2013, meningkat 43,8% dibandingkan dengan tahun 2012 yang sebesar 96,8 ribu unit. Penerbit uang elektronik didominasi oleh bank umum konvensional, sebanyak 9 penerbit diikuti oleh lembaga selain bank, sebanyak 8 penerbit.

Penyelenggaraan Transfer Dana Bukan Bank¹¹

Nilai transaksi penyelenggara transfer dana oleh lembaga bukan bank pada tahun 2013 meningkat, meskipun secara volume menurun (Grafik 9.13). Nilai transaksi transfer dana mencapai Rp20,8 triliun, meningkat 13,3% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp18,4 triliun. Nilai rata-rata harian transaksi transfer dana mencapai Rp57,2 miliar, meningkat 13,6% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp50,4 miliar. Porsi terbesar transaksi transfer dana dari sisi nilai dan volume transaksi pada tahun 2013 adalah transfer dana dari luar negeri ke Indonesia (*incoming*) dengan porsi nilai 47% dan volume 87% (Grafik 9.14 dan Grafik 9.15). Hal ini sejalan dengan tujuan awal

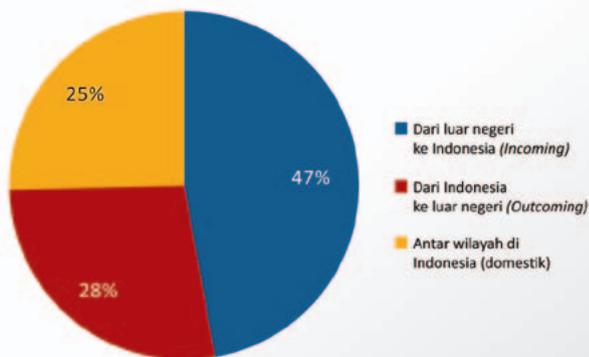
penyelenggaraan transfer dana bukan bank yang terutama untuk mengakomodasi kegiatan transfer dana oleh tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Pada umumnya pengguna jasa penyelenggara transfer dana oleh lembaga bukan bank ini adalah tenaga kerja yang bergerak di sektor informal yang kurang mengenal perbankan. Peningkatan nilai transfer dana atau remitansi khususnya *incoming transaction* dari luar negeri berperan serta meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah yang merupakan basis tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Jumlah penyelenggara transfer dana lembaga bukan bank berizin dan telah beroperasi serta dicantumkan dalam *website* Bank Indonesia, tercatat sebanyak 114



Grafik 9.13. Perkembangan Transaksi Transfer Dana

11 Transfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana sampai dengan diterimanya dana oleh penerima.



Grafik 9.14. Pangsa Nilai Transaksi Transfer Dana 2013

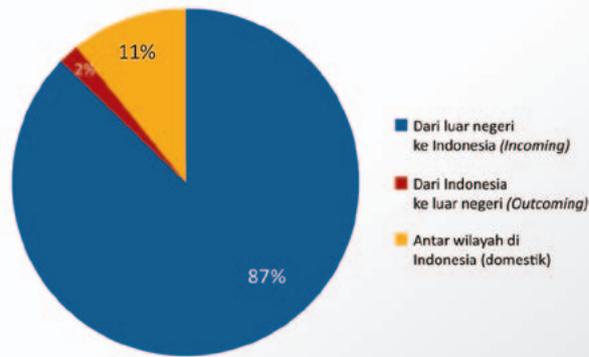
penyelenggara pada tahun 2013, meningkat 7,5% dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 106 penyelenggara. Berdasarkan sebaran lokasi penyelenggara transfer dana bukan bank dalam wilayah kerja Bank Indonesia, pusat konsentrasi adalah di Jabodetabek yaitu sebanyak 48 penyelenggara atau sebesar 42,0% dari total keseluruhan penyelenggara nasional (Grafik 9.16).

Pedagang Valuta Asing (PVA) Bukan Bank¹²

Peningkatan transaksi jual beli Uang Kertas Asing (UKA) yang dilakukan oleh PVA bukan bank pada tahun 2013 meningkat signifikan. Pada tahun 2013, total nilai transaksi jual beli UKA mencapai Rp188,3 triliun, meningkat 32,6% dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp142,0 triliun (Grafik 9.17). Pada tahun 2013 tercatat sebanyak 898 PVA bukan bank, meningkat 0,1% dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 897 PVA bukan bank. Menurut lokasinya, PVA bukan bank terbanyak berada di wilayah Jakarta yaitu sebanyak 347 PVA bukan bank. PVA bukan bank yang berada di wilayah Padang sebanyak 153, merupakan pintu masuk bagi wisatawan dari Singapura dan Malaysia. Sementara itu di wilayah Denpasar, dengan tingkat kunjungan wisatawan mancanegara cukup tinggi, terdapat 135 PVA bukan bank (Grafik 9.18).

Sepanjang tahun 2013, Bank Indonesia selaku pemberi izin dan pengawas PVA telah mencabut izin 33 PVA di seluruh Indonesia. Pencabutan izin tersebut baik atas inisiatif PVA karena tidak melanjutkan usahanya maupun

¹² PVA Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan perseroan melakukan kegiatan usaha jual beli Uang Kertas Asing (UKA) dan pembelian Traveller's Cheque (TC).



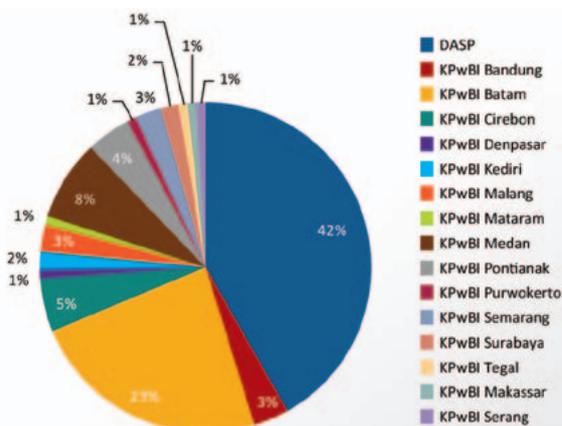
Grafik 9.15. Pangsa Volume Transaksi Transfer Dana 2013

atas inisiatif Bank Indonesia sebagai sanksi terhadap pelanggaran kewajiban laporan yang harus dilakukan oleh PVA. Pemberian sanksi ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan industri PVA sekaligus sebagai upaya penegakkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti peraturan Undang-undang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

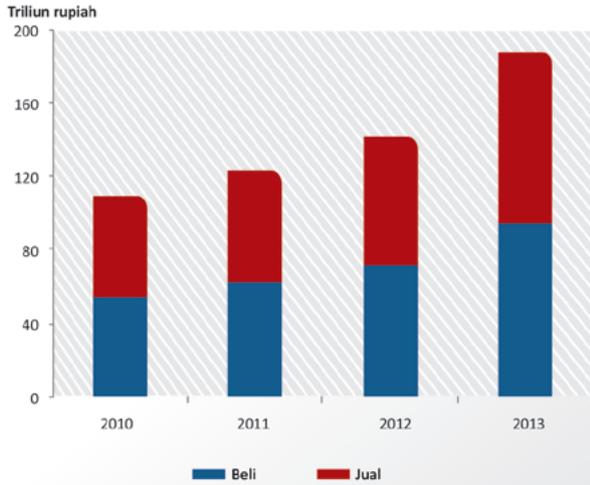
9.2. Kinerja Pengelolaan Uang

Ketersediaan Uang Kartal

Kebutuhan uang kartal meningkat seiring dengan ekonomi Indonesia yang terus tumbuh. Kuatnya konsumsi domestik

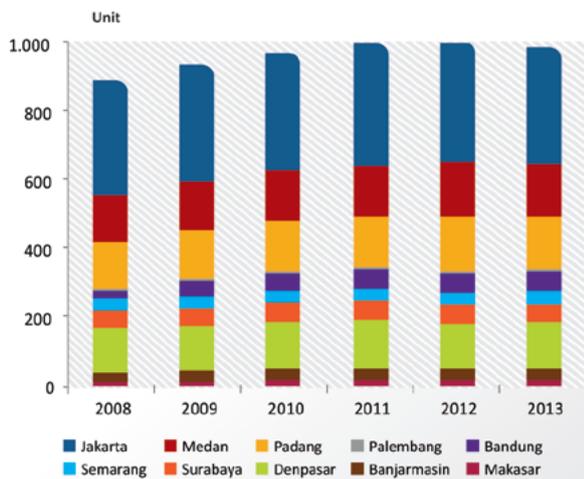


Grafik 9.16. Share Nilai Transaksi Transfer Dana 2013



Grafik 9.17. Perkembangan Transaksi Jual Beli UKA

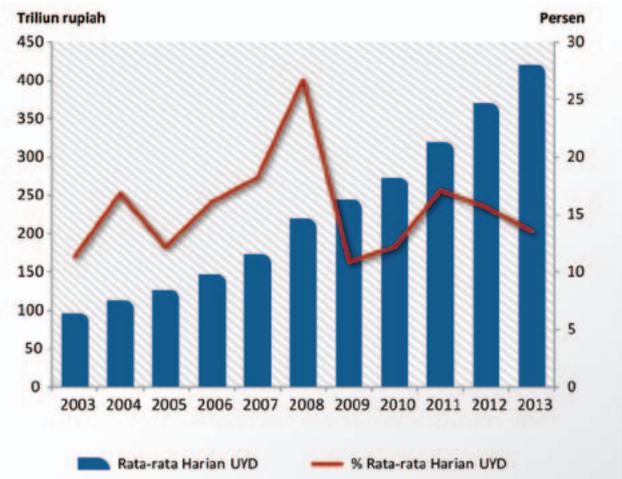
sebagai motor pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi faktor utama meningkatnya permintaan uang kartal. Selain itu, peningkatan uang kartal juga didorong oleh berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya beli masyarakat, antara lain kenaikan UMP, PTKP, dan pencairan BLSM. Di samping itu, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi telah mendorong peningkatan harga bahan pangan dan tarif angkutan yang pada gilirannya meningkatkan permintaan akan uang kartal. Demikian pula dengan pola musiman, terutama selama Ramadhan dan Idul Fitri, Natal serta liburan akhir tahun 2013, telah meningkatkan permintaan uang kartal masyarakat. Semua kebutuhan uang kartal tersebut dapat dipenuhi oleh Bank Indonesia dengan penyediaan uang kartal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi layak edar.



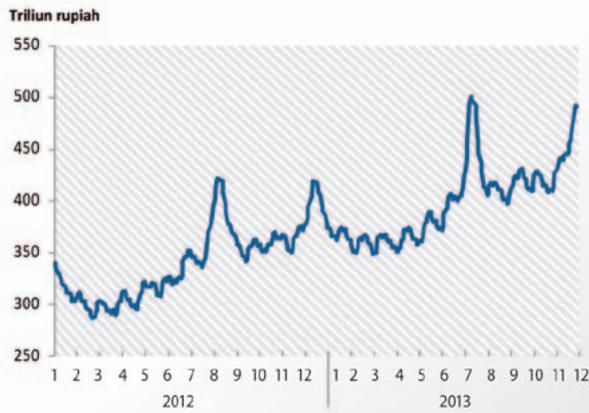
Grafik 9.18. Jumlah PVA Bukan Bank Berdasarkan Lokasi

Masih kuatnya konsumsi masyarakat ditunjukkan dengan meningkatnya uang kartal yang diedarkan selama tahun 2013. Rata-rata harian uang kartal yang diedarkan (UYD) tercatat sebesar Rp420,9 triliun atau meningkat dibandingkan tahun 2012 yang mencapai Rp370,6 triliun. Meskipun demikian, pertumbuhan rata-rata harian UYD tercatat melambat yakni sebesar 13,6%, lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 15,7% (Grafik 9.19). Hal ini menunjukkan bahwa melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia telah memengaruhi UYD selama tahun 2013. Meningkatnya permintaan uang kartal juga dicerminkan oleh pola siklikal pergerakan harian UYD selama tahun 2013. Nilai UYD tertinggi terjadi pada tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp508,3 triliun. Hal ini terjadi setelah Ramadhan dan Idul Fitri, ketika kebutuhan uang kartal masyarakat meningkat. Demikian pula pada periode Natal dan liburan akhir tahun, nilai UYD yang tinggi tercatat sebesar Rp501,3 triliun pada tanggal 30 Desember 2013 (Grafik 9.20).

Peran uang kartal dalam aktivitas ekonomi tercermin dari rasio UYD terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan velositas PDB terhadap UYD. Dalam beberapa tahun terakhir, rasio UYD terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung stabil pada kisaran 5,3% (Grafik 9.21). Demikian pula velositas PDB terhadap UYD cenderung stabil pada kisaran 18,8. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pada saat ekonomi mengalami pertumbuhan, ketersediaan uang kartal di masyarakat juga meningkat. Meningkatnya UYD tersebut sesuai dengan aktivitas perekonomian, sehingga tidak berdampak lebih lanjut pada tekanan inflasi. Di samping itu, peran uang kartal juga dapat diukur dengan rasio UYD terhadap konsumsi rumah tangga (RT). Dalam beberapa tahun terakhir, rasio UYD terhadap konsumsi RT relatif meningkat dari 8,2% pada tahun 2003 menjadi 9,9%



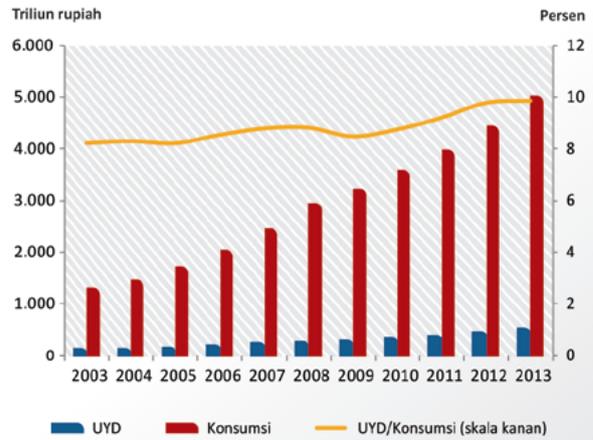
Grafik 9.19. Rata-rata Harian Uang Kartal yang Diedarkan



Grafik 9.20. Pergerakan Harian Uang Kartal yang Diedarkan

pada tahun 2013. Perkembangan ini menunjukkan cukup tingginya peran uang kartal untuk transaksi pembayaran khususnya untuk kegiatan konsumsi (Grafik 9.22).

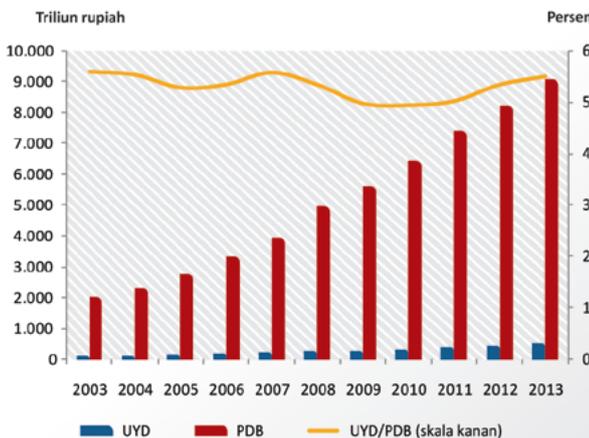
Peran uang kartal terhadap aktivitas ekonomi melalui sistem perbankan terlihat pada rasio uang kartal yang beredar (*Currency Outside Banks - COB*) terhadap simpanan masyarakat yang cenderung stabil selama beberapa tahun terakhir pada kisaran 13,5%. Perkembangan ini menunjukkan proses giralisasi dan penciptaan uang telah berjalan dengan baik (Grafik 9.23). Sementara peran uang kartal untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran terlihat dari meningkatnya rasio uang kartal yang ada di khazanah dan mesin ATM (*cash in vault*) terhadap simpanan masyarakat di perbankan yang meningkat cukup signifikan dari 1,8% pada tahun 2003 menjadi 3,2% pada tahun 2013. Hal ini



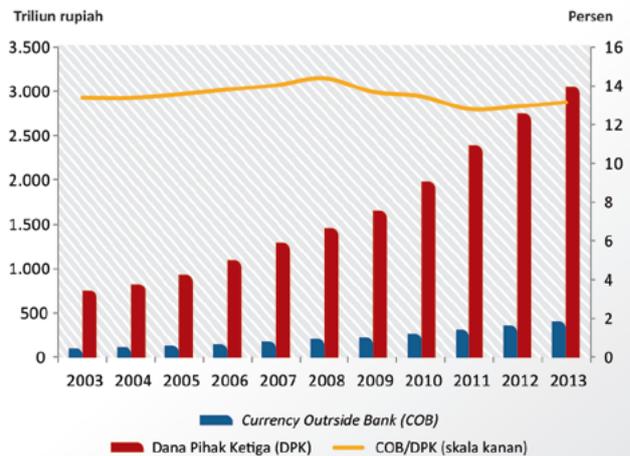
Grafik 9.22. Perkembangan USD dan Konsumsi Rumah Tangga

menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah mesin ATM dari 63.406 mesin pada tahun 2012 menjadi 73.362 mesin pada akhir tahun 2013, maka perbankan harus menyediakan uang kartal yang lebih banyak di mesin ATM untuk penarikan nasabahnya (Grafik 9.24).

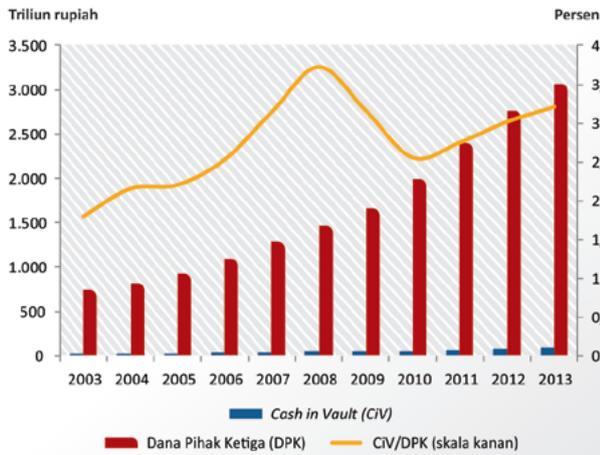
Dari sisi denominasi USD, terjadi sedikit pergeseran komposisi uang yang beredar, yakni dari pecahan Rp20.000 ke pecahan lainnya terutama pecahan Rp50.000. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan negatif pecahan Rp20.000 sebesar 0,9% sementara pecahan Rp50.000 tumbuh jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari 2,0% menjadi 15,0%. Pergeseran ini mengindikasikan tingginya kebutuhan uang kartal pecahan Rp50.000 untuk kebutuhan masyarakat, dan perubahan kebijakan perbankan untuk mengurangi pengisian mesin ATM dengan pecahan Rp20.000 yang



Grafik 9.21. Perkembangan USD dan PDB



Grafik 9.23. Perkembangan *Currency Outside Banks* dan Dana Pihak Ketiga Perbankan

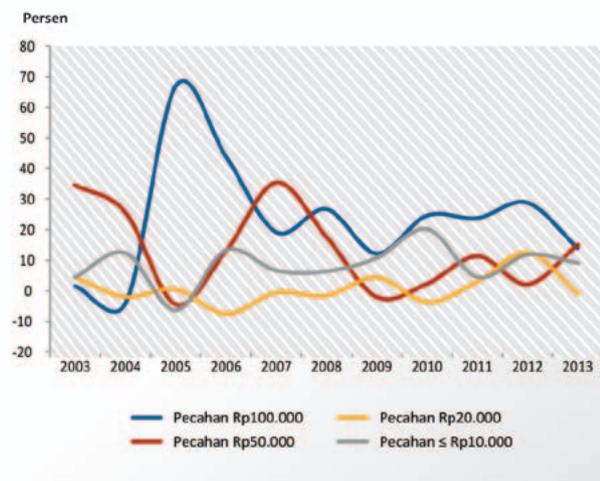


Grafik 9.24. Perkembangan Cash in Vault dan Dana Pihak Ketiga Perbankan

diganti dengan pecahan Rp50.000 atau Rp100.000 (Grafik 9.25). Dengan perkembangan tersebut, pangsa nominal pecahan Rp50.000 terhadap total UYD mengalami peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan pecahan lainnya, yakni dari 30,1% pada tahun 2012 menjadi 30,4% pada tahun 2013. Di sisi lain cukup gencarnya kampanye penggunaan uang elektronik, terutama di kota-kota besar, turut memengaruhi penurunan pangsa uang pecahan kecil (Rp10.000 ke bawah) dari 6,8% pada tahun 2012 menjadi 6,5% pada tahun 2013 (Grafik 9.26).

Aliran Uang Kartal Melalui Bank Indonesia

Sepanjang tahun 2013 Bank Indonesia berhasil menyediakan kebutuhan uang kartal bagi masyarakat

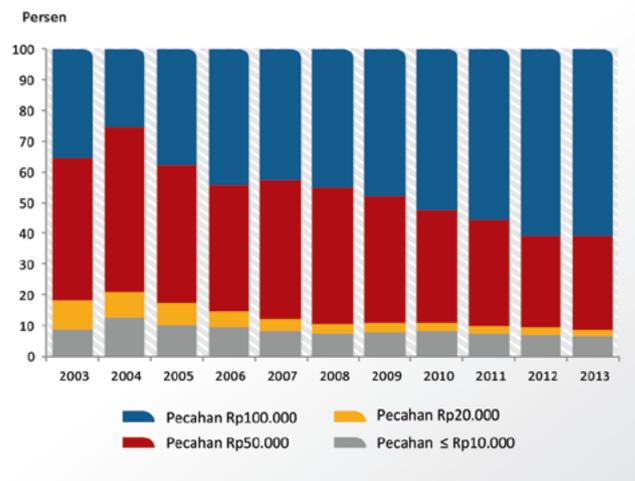


Grafik 9.25. Pertumbuhan Jumlah UYD Berdasarkan Pecahan

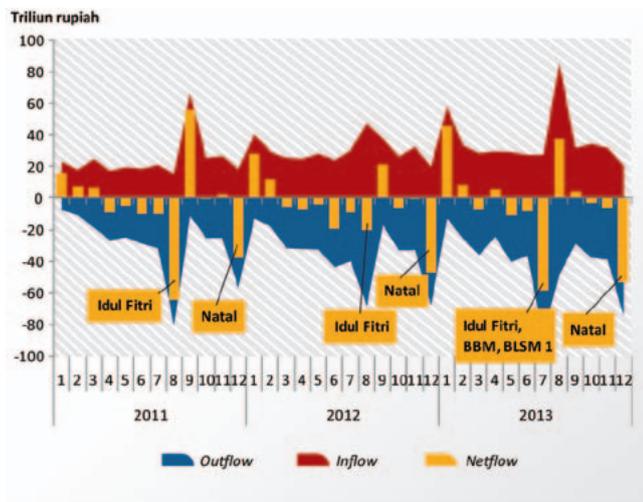
melalui perbankan, termasuk pada saat permintaan uang meningkat secara signifikan. Peningkatan kebutuhan ini terjadi pada periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri selama bulan Juli sampai dengan minggu pertama Agustus 2013, dan pada Hari Natal dan Tahun Baru pada minggu terakhir Desember 2013. Selain itu, kecukupan ketersediaan uang kartal juga terjadi setelah kebijakan Pemerintah Indonesia menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tanggal 21 Juni 2013 dan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) pada tahap pertama bulan Juli sampai dengan Agustus 2013 dan tahap kedua bulan September sampai dengan Oktober 2013. Terpenuhinya kecukupan uang kartal baik secara nominal maupun komposisi pecahan, selain untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan kegiatan ekonomi masyarakat, juga telah memberi kontribusi penting bagi kinerja sektor perbankan dalam menyediakan uang tunai bagi nasabahnya.

Selama tahun 2013, aliran uang kartal melalui Bank Indonesia mengalami *net outflow* sebesar Rp53,1 triliun. Aliran uang kartal keluar (*outflow*) dari Bank Indonesia ke perbankan dan masyarakat tumbuh sebesar 14,1% dari Rp429,6 triliun menjadi Rp490,0 triliun. Sedangkan aliran uang kartal masuk (*inflow*) ke Bank Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 19,3% dari Rp366,3 triliun menjadi Rp436,9 triliun (Grafik 9.27). Pertumbuhan aliran uang kartal (*inflow* dan *outflow*) melalui Bank Indonesia pada tahun 2013 tersebut mengalami tren penurunan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2012 (*inflow* 24,8% dan *outflow* 23,6%) dan 2011 (*inflow* 39,1% dan *outflow* 40,6%).

Perkembangan pada tahun 2013 tersebut sebagai dampak kebijakan Bank Indonesia yang diterapkan sejak



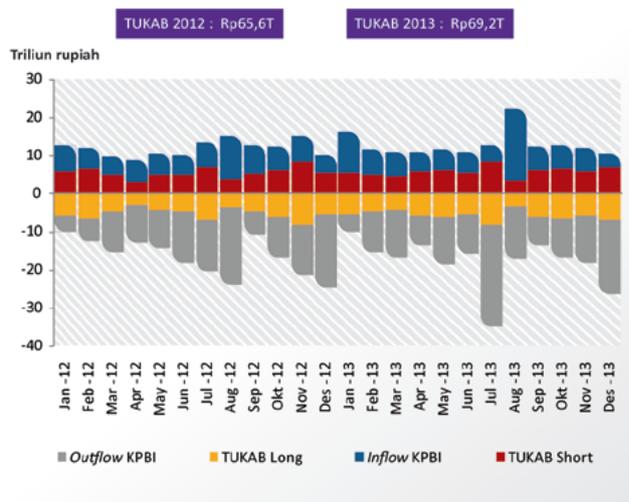
Grafik 9.26. Pangsa Nominal UYD Berdasarkan Pecahan



Grafik 9.27. Transaksi *Outflow* dan *Inflow* melalui Bank Indonesia

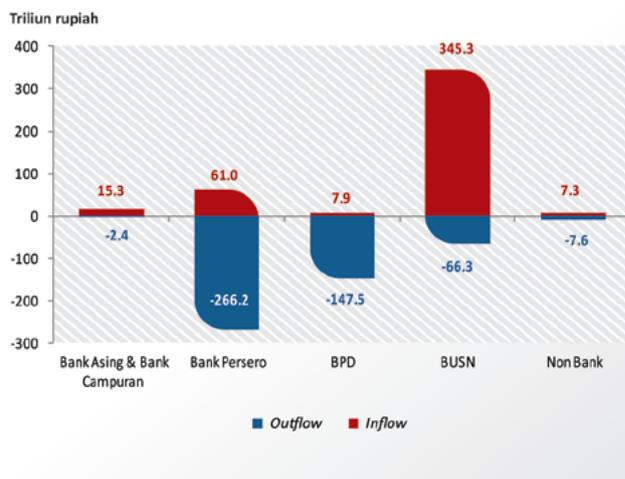
pertengahan tahun 2011 yang mendorong perbankan untuk melakukan optimalisasi Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB), baik dalam satu wilayah maupun secara nasional, dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan uang rupiah bagi nasabahnya. Selama tahun 2013, nilai TUKAB untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya sebesar Rp 69,2 triliun atau mencapai 31,7% dari seluruh transaksi penarikan baik melalui Kantor Pusat Bank Indonesia maupun melalui TUKAB. Nilai TUKAB tahun 2013 tersebut lebih tinggi 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp65,6 triliun (Grafik 9.28).

Berdasarkan kelompok bank, jumlah transaksi uang kartal melalui Bank Indonesia yang tertinggi dilakukan oleh Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). Jumlah transaksi uang kartal oleh bank persero tercatat *net outflow* sebesar Rp205,1 triliun, yang terdiri atas *inflow* Rp61,0 triliun dan *outflow* Rp266,2 triliun. Sebaliknya, transaksi uang kartal oleh BUSN tercatat *net inflow* sebesar Rp278,9 triliun, yang terdiri atas *inflow* Rp345,3 triliun dan *outflow* Rp66,3 triliun. Hal ini mencerminkan bahwa aliran *net outflow* dari Bank Indonesia ke Bank Persero digunakan untuk pembayaran transaksi pemerintah pusat, baik untuk pembayaran proyek-proyek pemerintah maupun sarana pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia. Sementara itu, aliran *net outflow* Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencerminkan pembayaran transaksi pemerintah daerah. Di sisi lain, aliran *net inflow* dari BUSN serta bank campuran dan bank asing ke Bank Indonesia mencerminkan kelompok bank ini menjadi tempat bagi perusahaan swasta dan perorangan dalam menyimpan dananya (Grafik 9.29).

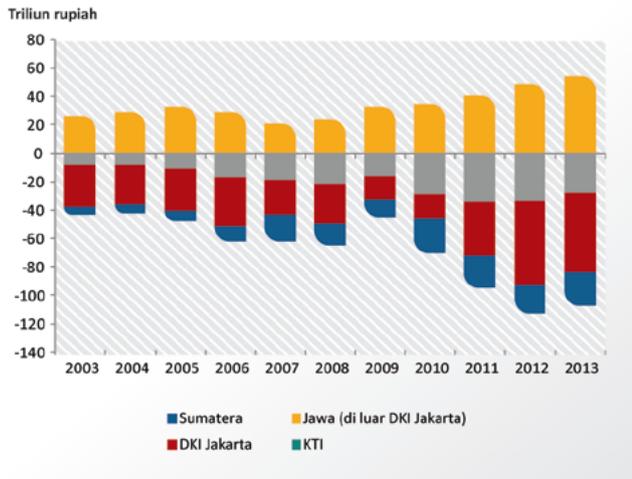


Grafik 9.28. TUKAB dan Transaksi Uang Kartal melalui Kantor Pusat Bank Indonesia

Berdasarkan wilayah ekonomi, selama beberapa tahun terakhir wilayah Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta) menunjukkan pola *net inflow*. Pada tahun 2013 *net inflow* mencapai Rp53,8 triliun. Sementara tiga wilayah lainnya yakni Pulau Sumatera, DKI Jakarta, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) menunjukkan pola *net outflow* yang masing-masing mencapai Rp23,6 triliun, Rp55,3 triliun, dan Rp28,0 triliun (Grafik 9.30). Pola *net outflow* yang terjadi pada wilayah Sumatera dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) mengindikasikan bahwa masyarakat di kedua wilayah tersebut masih tinggi preferensinya dalam menggunakan uang kartal. Ada kemungkinan uang kartal tersebut mengalir ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, sebagaimana ditunjukkan oleh *net inflow* yang terjadi di pulau ini. Kondisi tersebut juga mengindikasikan masih



Grafik 9.29. Aliran Uang Kartal Berdasarkan Kelompok Bank Tahun 2013

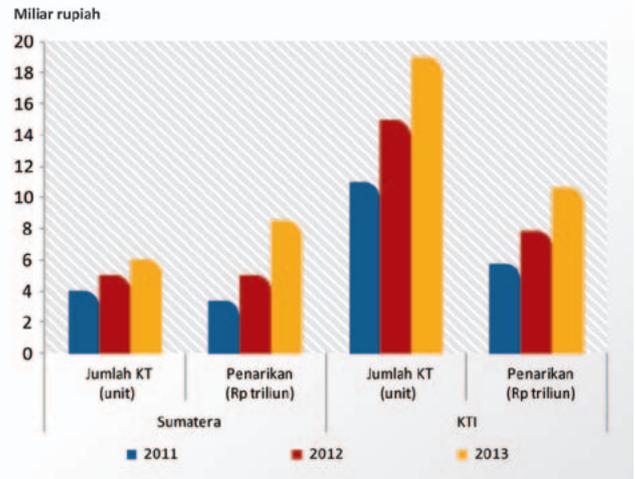


Grafik 9.30. Aliran Uang kartal Bersih Berdasarkan Wilayah

berpusatnya kegiatan ekonomi di Pulau Jawa, meskipun ekonomi daerah mulai berkembang. Selain itu, hal ini juga didukung oleh populasi penduduk Indonesia yang tinggal di wilayah Jawa, yang mencapai lebih dari 50% total penduduk Indonesia, sehingga uang lebih banyak beredar di wilayah Jawa.

Adapun terkait wilayah DKI Jakarta yang mengalami *net outflow* merupakan pengecualian karena hampir seluruh bank berkantor pusat di Jakarta. Terjadinya *net outflow* di DKI Jakarta mengalir ke kota-kota lain di wilayah Jawa mengingat kedekatan jarak antarkota di Pulau Jawa. Sebagai contoh penarikan uang kartal pecahan Rp50.000 oleh perbankan di wilayah DKI Jakarta tercatat sebesar Rp59,9 triliun, sedangkan penyetoran perbankan hanya sebesar Rp34,1 triliun. Sementara itu, penarikan uang kartal oleh perbankan di Provinsi Jawa Barat tercatat sebesar Rp9,1 triliun, sebaliknya penyetoran perbankan jauh lebih tinggi yang mencapai Rp19,3 triliun. Hal ini mengindikasikan cukup banyaknya masyarakat DKI Jakarta yang mengeluarkan uangnya di Provinsi Jawa Barat dan mengalir kembali ke Bank Indonesia melalui perbankan di Provinsi Jawa Barat.

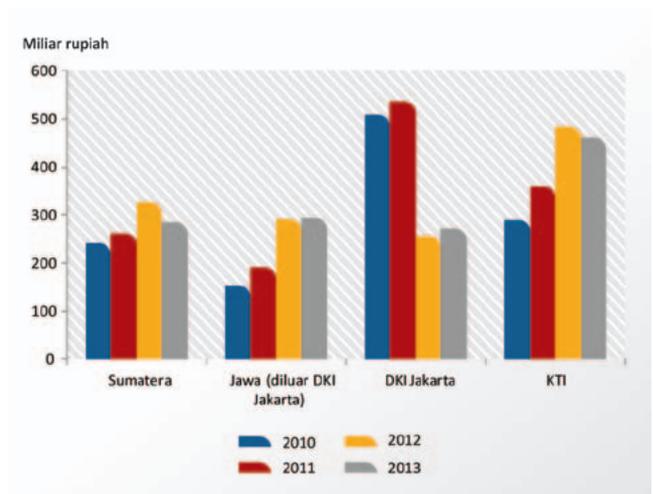
Pada tahun 2013, penarikan uang kartal oleh perbankan dari Bank Indonesia untuk kebutuhan penukaran masyarakat meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kas titipan (KT) baru. Peningkatan jumlah kas titipan pada perbankan setempat ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan penukaran uang masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan Bank Indonesia (*blank spot area*). Selama tahun 2013, Bank Indonesia menitikberatkan kebijakan layanan kas melalui kerjasama pembukaan kas titipan baru dengan enam bank umum.



Grafik 9.31. Penarikan Uang Kartal oleh Perbankan dalam rangka Kas Titipan

Dengan kebijakan ini, pada tahun 2013 terdapat 25 kas titipan, yang tersebar di wilayah Kawasan Timur Indonesia dan Sumatera. Penarikan uang kartal melalui kas titipan pada tahun 2013 tercatat sebesar Rp19,1 triliun, meningkat 47,9% dari tahun sebelumnya sebesar Rp12,9 triliun (Grafik 9.31).

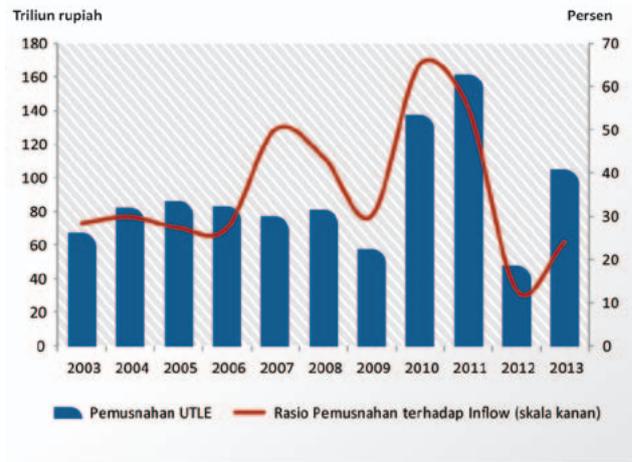
Sementara itu, kegiatan layanan kas yang langsung dilakukan oleh Bank Indonesia dalam bentuk kas keliling, mengalami sedikit penurunan frekuensi kegiatan, sehingga jumlah penarikan masyarakat menurun 3,3% menjadi Rp1,4 triliun pada tahun 2013. Sejak dua tahun terakhir, frekuensi dan jumlah penarikan uang kartal tertinggi dalam kegiatan kas keliling dilakukan oleh Bank Indonesia di wilayah KTI. (Grafik 9.32).



Grafik 9.32. Penarikan Uang Kartal dalam rangka Kas Keliling oleh Bank Indonesia



Grafik 9.33. Rasio Posisi Kas terhadap Rata-Rata *Outflow* Bulanan



Grafik 9.34. Pemusnahan UTLE dan Rasionya terhadap *Inflow*

Posisi Kas Bank Indonesia

Di tengah kebutuhan uang kartal yang meningkat, posisi kas Bank Indonesia tetap terjaga. Berbagai kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia secara simultan selama 2013 menjadi faktor pendukung terjaganya posisi kas Bank Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain berupa optimalisasi distribusi Uang Layak Edar (ULE) dengan cara mengedarkan kembali ULE dari setoran perbankan. Hal ini dilakukan melalui kebijakan *dropshot*¹³, baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah, dan pemberlakuan TUKAB secara Nasional. Dengan kebijakan ini, penyebaran ULE di seluruh perbankan di daerah melalui kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia menjadi lebih merata. Sementara itu, kebijakan sortasi uang kertas dan uang logam serta kerja sama intensif dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) untuk meningkatkan pasokan uang rupiah hasil cetak sempurna (HCS)¹⁴, telah mendukung Bank Indonesia menjaga persediaan kas selama 2013 pada level yang mencukupi. Rasio posisi kas Bank Indonesia pada akhir tahun 2013 mencapai sekitar 2,5 bulan rata-rata *outflow*, atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 2,1 (Grafik 9.33).

13 Kebijakan *dropshot* adalah kebijakan pembayaran uang layak edar (ULE) setoran dari bank kepada bank yang sama (bank penyetor) atau kepada bank berbeda, tanpa penghitungan oleh Bank Indonesia secara rinci dan penyortiran. Pembayaran oleh Bank Indonesia kepada bank dilakukan dalam satu kemasan plastik transparan (10 *broad*) yang masih utuh, tersegel dan terdapat label bank penyetor.

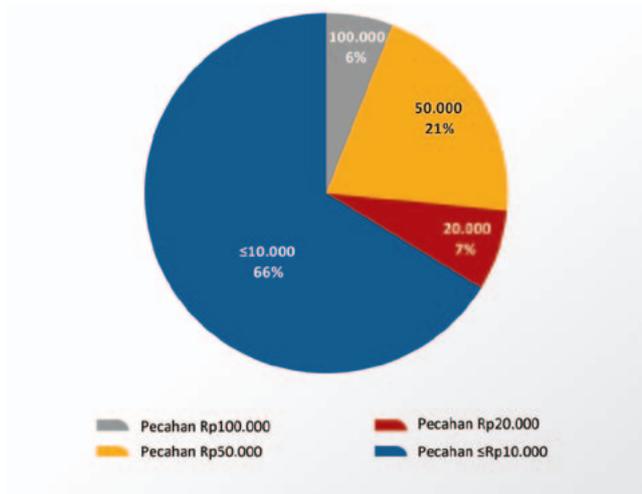
14 Uang rupiah hasil cetak sempurna (HCS) adalah hasil cetak yang spesifikasi teknisnya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pemusnahan Uang Rupiah Tidak Layak Edar

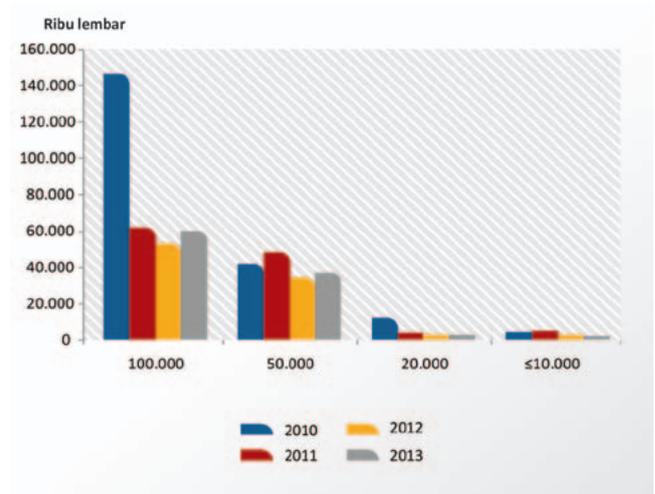
Kegiatan pemusnahan uang rupiah dilakukan dalam rangka meningkatkan standar kualitas uang yang diedarkan ke masyarakat (*clean money policy*). Pemusnahan uang rupiah tersebut dilakukan terhadap uang yang kondisinya sudah lusuh, cacat dan yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran yang berasal dari penyetoran perbankan dan masyarakat. Uang yang sudah dimusnahkan tersebut (uang tidak layak edar/UTLE) akan diganti dengan uang rupiah baru HCS dan ULE yang berasal dari setoran perbankan dan masyarakat.

Selama tahun 2013 jumlah pemusnahan UTLE mencapai Rp105,3 triliun atau meningkat 121,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp47,6 triliun. Rasio pemusnahan UTLE terhadap *Inflow* Rupiah yang masuk ke Bank Indonesia pada tahun 2013 sebesar 24,1%, meningkat dibandingkan tahun 2012 sebesar 13,0% (Grafik 9.34). Jenis pecahan yang dimusnahkan terdiri atas uang kertas senilai Rp105,28 triliun dan uang logam senilai Rp18,0 miliar. Berdasarkan lembar yang dimusnahkan, pangsa pemusnahan uang pecahan kecil (UPK) yaitu pecahan Rp10.000 dan yang lebih kecil, mencapai 66,2% dari total pemusnahan UTLE (Grafik 9.35). Tingginya pangsa UPK yang dimusnahkan mencerminkan bahwa perputaran UPK di masyarakat frekuensinya lebih tinggi dibandingkan uang pecahan besar (UPB). Selain itu, frekuensi yang lebih tinggi pada UPK juga memengaruhi kondisi uang tersebut sehingga lebih cepat dimusnahkan.

Berdasarkan wilayahnya, selama tahun 2013 jumlah pemusnahan uang rupiah tertinggi terdapat di wilayah Pulau Jawa (di luar DKI Jakarta). Jumlah UTLE yang dimusnahkan adalah sebesar Rp50,1 triliun atau sebesar 47,6% dari



Grafik 9.35. Komposisi Pemusnahan UTLE Tahun 2013 Berdasarkan Lembar/Keping (juta)



Grafik 9.37. Komposisi Temuan Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Pecahan

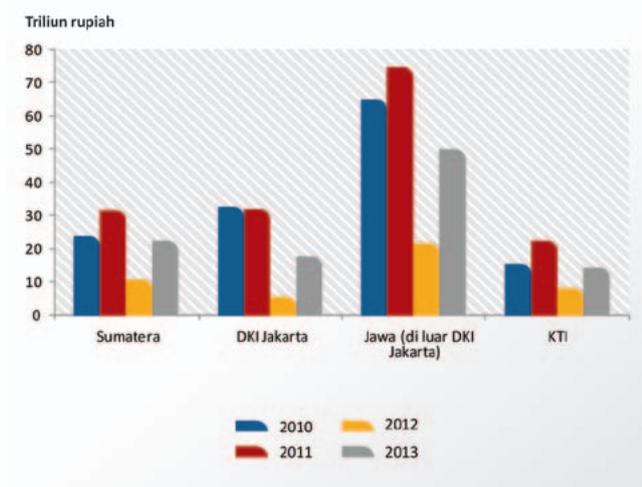
jumlah total UTLE yang dimusnahkan (Grafik 9.36). Tingginya pemusnahan uang di wilayah Jawa (di luar Jakarta) sejalan dengan pola aliran uang kartal di wilayah ini yang cenderung *net inflow* dan mengandung cukup banyak UTLE.

Perkembangan Temuan Uang Rupiah Palsu

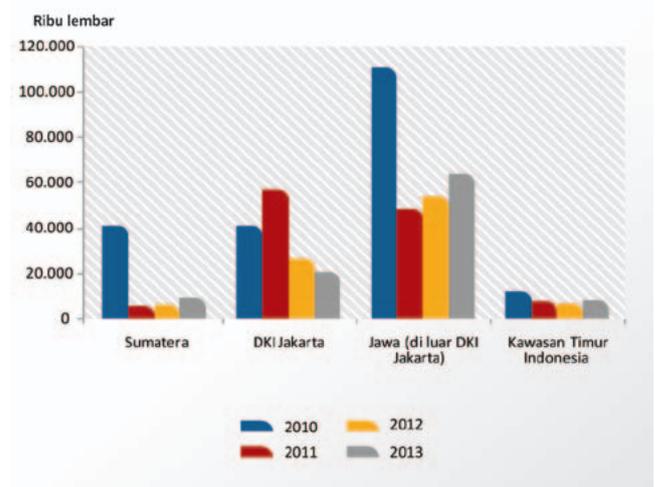
Jumlah temuan uang rupiah palsu pada tahun 2013 sebesar 141.266 lembar, meningkat 52,4% dari tahun 2012 yang mencapai 92.686 lembar. Secara rasio, temuan uang rupiah palsu juga meningkat menjadi 11 lembar per satu juta lembar uang rupiah yang beredar. Pada tahun 2012, rasio temuan uang rupiah palsu adalah sebanyak 8 lembar per satu juta lembar uang rupiah yang beredar. Meningkatnya jumlah temuan uang palsu tersebut

disebabkan oleh semakin membaiknya tingkat kepatuhan perbankan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan uang yang diragukan keasliannya kepada Bank Indonesia, serta pengungkapan kasus tindak pidana uang palsu oleh Kepolisian.

Temuan uang palsu didominasi oleh UPB dan di wilayah Pulau Jawa. Berdasarkan komposisi per pecahan, temuan uang palsu didominasi oleh uang kertas pecahan Rp100.000 sebanyak 92.075 lembar atau 65,2% dan Rp50.000 sebanyak 42.061 lembar atau 29,8% (Grafik 9.37). Sedangkan berdasarkan wilayah, temuan uang palsu terbesar berada di wilayah Pulau Jawa (89.817 lembar atau 63,6%) terutama di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Temuan uang palsu terbesar selanjutnya berada di Provinsi DKI Jakarta (29.256 lembar atau 20,7%) (Grafik 9.38).



Grafik 9.36. Komposisi Pemusnahan UTLE Tahun 2013 Berdasarkan Wilayah



Grafik 9.38. Komposisi Temuan Uang Rupiah Palsu Berdasarkan Wilayah

